KOTA KEDIRI Mapan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD KOTA KEDIRI TAHUN 2025-2029



kedirikota.go.id
Jalan Basuki Rahmad No.15, Kota Kediri

SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun

2024 Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah Kota Kediri dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota kediri.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Kediri dan DPRD

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025-2026 sebagai dokumen transisi pasca berakhirnya periodesasi RPJMD Tahun 2020-2024.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/ kondisi daerah yang diinginkan/ terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan 5 (lima) tahun.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
17. Sasaran adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
19. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUJUAN RPJMD
Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah lain yang berbatasan.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi :

a. Renstra Perangkat Daerah;
b. RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. pendahuluan;
b. gambaran umum daerah;
c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah;
e. penutup.

(2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD
Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/ atau
c. terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran, dan program dalam RPJMD, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sebagai program dan kegiatan tahun 2025.

Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 September 2025
WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 197- 4/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun setelah pelantikan Wali Kota Kediri dan Wakil Wali Kota Kediri, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kediri pada tahun 2025–2029 yang harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel.

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 102

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK vii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4 Maksud Dan Tujuan I-6
1.4.1 Maksud I-6
1.4.2 Tujuan I-6
1.5 Sistematika Penulisan I-7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-53
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-94
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-118
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-226
2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024 ..... II-227
2.2.2 Neraca Daerah II-229
2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030 ..... II-231
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah II-239
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-239
2.3.2 Isu Strategis II-247
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.1.1 Visi dan Misi III-1
3.1.2 Tujuan dan Sasaran III-7
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-12
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-12
3.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan III-18
3.2.3 Penahapan Pembangunan III-22
3.2.4 Pengarustamaan Pembangunan III-23
3.2.5 Program Prioritas III-28
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif Tahun 2026 – 2030 ..... IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-46
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-46
4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-48
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.2 Pengendalian dan Evaluasi V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam RPJMD Kota Kediri I-6
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Kediri II-2
Gambar 2. 2 Luas Area (ha) Wilayah Kota Kediri Berdasarkan Kelurahan II-3
Gambar 2. 3 Peta Hidrologi Kota Kediri II-4
Gambar 2. 4 Peta Persebaran Sumber Mata Air di Kota Kediri..... II-5
Gambar 2. 5 Peta Tutupan Lahan di Kota Kediri II-7
Gambar 2. 6 Rencana Kawasan Strategis Kota Kediri..... II-12
Gambar 2. 7 Peta Sistem Sumber Daya Air Kota Kediri II-17
Gambar 2. 8 Peta Kawasan Pertanian Kota Kediri II-19
Gambar 2. 9 Peta Daya Dukung Kota Kediri..... II-22
Gambar 2. 10 Kerangka Pikir RPJMN 2025-2029..... II-251
Gambar 2. 11 Isu dan Potensi Wilayah Jawa di RPJMN 2025-2029..... II-253
Gambar 2. 12 Arah Pembangunan Wilayah Jawa di RPJMN 2025-2029..... II-254

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW di Kota Kediri II-2
Tabel 2. 2 Daftar Sungai Utama di Kota Kediri II-4
Tabel 2. 3 Tutupan Lahan di Kota Kediri II-6
Tabel 2. 4 Rencana Peruntukan Lahan Kawasan GOR Jayabaya II-15
Tabel 2. 5 Luas Panen Sawah Dalam Setahun (Ha) II-18
Tabel 2. 6 Produktivitas Tanaman Pangan II-18
Tabel 2. 7 Produksi Perikanan (kwintal) II-19
Tabel 2. 8 Perhitungan Kebutuhan Air Tahun 2023 ..... II-23
Tabel 2. 9 Perhitungan Kebutuhan Air Tahun 2029 ..... II-23
Tabel 2. 10 Status Daya Dukung Air Permukaan Kota Kediri II-24
Tabel 2. 11 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2023 ..... II-25
Tabel 2. 12 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2029 ..... II-25
Tabel 2. 13 Daya Dukung Lahan Permukiman Kota Kediri Tahun 2023 II-26
Tabel 2. 14 Daya Dukung Lahan Bangunan Kota Kediri Tahun 2029 .... II-27
Tabel 2. 15 Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Kediri Tahun 2023..... II-28
Tabel 2. 16 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan Tahun 2025 – 2029 ..... II-30
Tabel 2. 17 Indeks Ketahanan Pangan Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 II-31
Tabel 2. 18 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Kediri .. II-32
Tabel 2. 19 Konsumsi Listrik Kota Kediri Tahun 2020 - 2024..... II-33
Tabel 2. 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-34
Tabel 2. 21 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-35
Tabel 2. 22 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Kediri Tahun 2020-2024 . II-35
Tabel 2. 23 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Kediri Tahun 2020-2024 . II-36
Tabel 2. 24 Persentase Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-37
Tabel 2. 25 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020 - 2024..... II-38
Tabel 2. 26 Proporsi Rumah tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024..... II-39
Tabel 2. 27 Capaian Penurunan Emisi GRK Kota Kediri (Kumulatif) Tahun 2020-2024..... II-40
Tabel 2. 28 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2024 ..... II-42
Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri (dalam jiwa) Tahun 2020-2024..... II-47
Tabel 2. 30 Kepadatan Penduduk Kota Kediri Tahun 2024..... II-48
Tabel 2. 31 Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024 (jiwa)..... II-48
Tabel 2. 32 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-50
Tabel 2. 33 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin II-51
Tabel 2. 34 Sex Ratio di Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-52
Tabel 2. 35 Proyeksi Penduduk Kota Kediri Tahun 2025-2030 Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* II-53
Tabel 2. 36 Indikator Kemiskinan di Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-59
Tabel 2. 37 Prevalensi Stunting Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-66

Tabel 2. 38 Angka Keberhasilan Pengobatan (TSR) TBC di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2. 39 *Treatment Coverage TB* di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel 2. 40 Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Kediri Tahun 2019-2023 II-69
Tabel 2. 41 Capaian Literasi dan Numerasi II-73
Tabel 2. 42 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2022-2024 ..... II-74
Tabel 2. 43 Jumlah Atlet Berprestasi Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 .... II-75
Tabel 2. 44 Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan II-76
Tabel 2. 45 Prestasi Kepemudaan Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2. 46 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan II-77
Tabel 2. 47 Indeks Kota Toleran Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel 2. 48 Capaian Dimensi IPK Kota Kediri Tahun 2024 ..... II-81
Tabel 2. 49 Capaian *Return on Asset (%)* BUMD Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2. 50 Indeks Satu Data Indonesia Kota Kediri II-104
Tabel 2. 51 Persentase Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2. 52 Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kota Kediri Tahun 2022-2024 ..... II-111
Tabel 2. 53 Kontribusi PDRB Kota Kediri terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024 ..... II-112
Tabel 2. 54 Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2. 55 Indikator Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2024 ..... II-113
Tabel 2. 56 Indeks Infrastruktur Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 ..... II-114
Tabel 2. 57 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 ..... II-115
Tabel 2. 58 Penegakan Peraturan Daerah (%) Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2. 59 Persentase Capaian Aksi HAM Kota Kediri Tahun 2021-2024 ..... II-126
Tabel 2. 60 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Kediri II-127
Tabel 2. 61 Skor Komponen IDSD II-129
Tabel 2. 62 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan II-132
Tabel 2. 63 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Kediri .. II-132
Tabel 2. 64 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2. 65 Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-135
Tabel 2. 66 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2. 67 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-139
Tabel 2. 68 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-139
Tabel 2. 69 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2. 70 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Kota Kediri II-143
Tabel 2. 71 Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-145

Tabel 2. 72 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2019-2023 ..... II-146
Tabel 2. 73 Persentase Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ... II-147
Tabel 2. 74 Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2. 75 Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Bencana di Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-150
Tabel 2. 76 Persentase Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-151
Tabel 2. 77 Capaian Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Di Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-153
Tabel 2. 78 Skor Capaian Kota Layak Anak Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-155
Tabel 2. 79 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-158
Tabel 2. 80 Realisasi indikator kinerja penatagunaan tanah yang berkualitas tahun 2020-2024 ..... II-160
Tabel 2. 81 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel 2. 82 Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran di Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-161
Tabel 2. 83 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-162
Tabel 2. 84 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-162
Tabel 2. 85 Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan Tahun 2020-2024..... II-163
Tabel 2. 86 Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2. 87 Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2020-2024..... II-164
Tabel 2. 88 Persentase Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-165
Tabel 2. 89 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-172
Tabel 2. 90 Nilai PDRB ADHB Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-175
Tabel 2. 91 Persentase Koperasi Sehat Kota Kediri (2020-2024)..... II-176
Tabel 2. 92 Persentase Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat Tahun 2020-2024..... II-177
Tabel 2. 93 Nilai Akumulasi Realisasi Investasi Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-178
Tabel 2. 94 Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan Kota Kediri Tahun 2021-2024 ..... II-181
Tabel 2. 95 Persentase Kenaikan Atlet dan Pemuda Berprestasi Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-183
Tabel 2. 96 Persentase Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan..... II-188
Tabel 2. 97 Ketermanfaatan Perpustakaan Tahun 2022-2024 ..... II-190
Tabel 2. 98 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Kota Kediri Tahun 2022-2024..... II-191
Tabel 2. 99 Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2022-2024 ..... II-192

Tabel 2. 100 Produksi Perikanan (dalam Kwintal) Tahun 2020-2024 ... II-193
Tabel 2. 101 Angka Konsumsi Ikan (dalam Kg/Kapita/Tahun) II-194
Tabel 2. 102 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Kediri
Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2. 103 Peningkatan PDRB Sektor Pertanian Kota Kediri
Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2. 104 Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan
Peternakan Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-199
Tabel 2. 105 Rasio PDRB Sektor Perdagangan Kota Kediri
Tahun 2020-2024 ..... II-200
Tabel 2. 106 Indeks Tertib Ukur Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-201
Tabel 2. 107 Pertumbuhan Industri Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-202
Tabel 2. 108 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Kecamatan II-225
Tabel 2. 109 Realisasi APBD Tahun 2020-2024..... II-228
Tabel 2. 110 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kediri
Tahun 2020-2024..... II-230
Tabel 2. 111 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 ..... II-235
Tabel 2. 112 Isu Strategis RPJMD Kota Kediri 2025-2029 ..... II-265
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi III-4
Tabel 3.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan..... III-8
Tabel 3.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan
Jangka Menengah III-10
Tabel 3.4 Matriks Koridor Penghubung antar Kawasan dan Sistem
Pusat Pemukiman Jawa Timur dengan Strategi
Pengembangan Wilayah RPJMN: Selingkar Wilis dan
Lintas Selatan III-20
Tabel 3.5 *Highlight* Indikasi Intervensi Kawasan Selingkar Wilis dan
Lintas Selatan 21
Tabel 3.6 Penahapan Pembangunan RPJMD 22
Tabel 3.7 Kontribusi Kota Kediri terhadap SDGs 23
Tabel 3.8 Dukungan Terhadap Tema/Prioritas Nasional 37
Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan.....39
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah IV-2
Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Kediri IV-47
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah IV-49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 ..... II-42
Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri Tahun 2020-2024..... II-44
Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-46
Grafik 2. 4 Piramida Penduduk Kota Kediri Tahun 2024 ..... II-49
Grafik 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ..... II-55
Grafik 2. 6 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 ..... II-57
Grafik 2. 7 Indeks Gini Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-58
Grafik 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024..... II-60
Grafik 2. 9 Perbandingan Capaian IPM Kota Ke diri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2020-2024 ..... II-62
Grafik 2. 10 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2020 – 2024..... II-63
Grafik 2. 11 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-64
Grafik 2. 12 Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-66
Grafik 2. 13 Indeks Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 ..... II-68
Grafik 2. 14 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2024..... II-70
Grafik 2. 15 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-71
Grafik 2. 16 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024..... II-72
Grafik 2. 17 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri Tahun 2020-2024.....80
Grafik 2. 18 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kota Kediri terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2024..... II-84
Grafik 2. 19 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri Tahun 2021-2024..... II-86
Grafik 2. 20 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2023..... II-87
Grafik 2. 21 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2023..... II-88
Grafik 2. 22 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2023..... II-88
Grafik 2. 23 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-90
Grafik 2. 24 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri.... II-91
Grafik 2. 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Kediri Menurut Jenis Kelamin, 2022-2024 ..... II-93
Grafik 2. 26 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024..... II-95
Grafik 2. 27 Proporsi PDRB Industri Pengolahan (%) Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 ..... II-95
Grafik 2. 28 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%) Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 ..... II-97
Grafik 2. 29 Nilai ICOR Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 ..... II-98

Grafik 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 ..... II-99
Grafik 2. 31 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Kediri 2021-2024 .. II-101
Grafik 2. 32 Hasil Penilaian Evaluasi SDI Berdasarkan Aspek II-104
Grafik 2. 33 Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Kota Kediri Tahun 2022-2024 ..... II-106
Grafik 2. 34 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Rp Milyar) Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-108
Grafik 2. 35 Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Milyar) Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 ..... II-109
Grafik 2. 36 Rasio Pajak terhadap PDRB Kota Kediri (%) Tahun 2020-2024 ..... II-116
Grafik 2. 37 Tingkat Inflasi year 0n year (yoy) Kota Kediri II-117
Grafik 2. 38 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 ..... II-119
Grafik 2. 39 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri II-122
Grafik 2. 40 Indeks SPBE Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-123
Grafik 2. 41 Nilai Indeks SPBE Berdasarkan Domain dan Aspek II-124
Grafik 2. 42 Nilai SAKIP Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-130
Grafik 2. 43 Indeks Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-131
Grafik 2. 44 Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi di Kota Kediri Tahun 2021-2024 ..... II-166
Grafik 2. 45 Peningkatan Kualitas Kampung KB Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-167
Grafik 2. 46 Jumlah Penumpang Bus Satria Tahun 2023-2024 ..... II-173
Grafik 2. 47 Indeks Pembangunan Statistik Kota Kediri Tahun 2023-2024 ..... II-185
Grafik 2. 48 Tingkat Kegemaran Membaca Kota Kediri II-189
Grafik 2. 49 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kota Kediri Tahun 2019-2024 ..... II-198
Grafik 2. 50 Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-204
Grafik 2. 51 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-209
Grafik 2. 52 Nilai SAKIP komponen Pengukuran Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-210
Grafik 2. 53 Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD Berkategori Berhasil Tahun 2020-2024 ..... II-212
Grafik 2. 54 IPKD Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-213
Grafik 2. 55 Rasio ITKP Kota Kediri Tahun 2021-2024 ..... II-214
Grafik 2. 56 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap PDRB Kota Kediri Tahun 2020-2023 ..... II-215
Grafik 2. 57 Indeks Sistem Merit Kota Kediri Tahun 2020-2023 ..... II-217
Grafik 2. 58 Indeks Profesionalitas ASN Kota Kediri Tahun 2020-2024 ..... II-219
Grafik 2. 59 Tingkat Maturitas SPIP Kota Kediri 2020-2024 ..... II-222
Grafik 2. 60 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kota Kediri Tahun 2022-2024 ..... II-223

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 - 9 - 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, telah dilaksanakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode tahun 2025 – 2030 pada tanggal 20 Februari 2025. Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan kepada Bupati/Wali Kota bersama DPRD untuk segera menyusun dan membahas RPJMD kabupaten/kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD kabupaten/kota, RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025 – 2029. Seluruh proses penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah, serta memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 mengikuti tahapan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Dengan RPJMD ini, diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kediri. Dokumen ini menjadi instrumen strategis yang tidak hanya memberikan arah bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan

menengah lima tahun dan tahunan, tetapi juga memastikan keterpaduan kebijakan antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. Dalam jangka panjang, RPJMD ini diharapkan dapat membentuk fondasi yang kuat bagi pembangunan Kota Kediri yang lebih inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika zaman, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);

18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 99);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2025-2045.

   Berdasarkan RPJPD Kota Kediri, periode tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dalam rencana pelaksanaan jangka panjang daerah dengan arah kebijakan sebagai penguatan fondasi transformasi Kota Kediri. Maka, dilakukan penyelarasan antara sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja RPJMD dengan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan dari RPJPD.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2024-2044

   Penyelarasan antara RTRW dengan dokumen RPJMD telah dilaksanakan terutama dalam hal posisi dan peran strategis Kota Kediri dalam wilayah regional, kondisi geografi, risiko bencana, dan arahan pemanfaatan ruang.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;

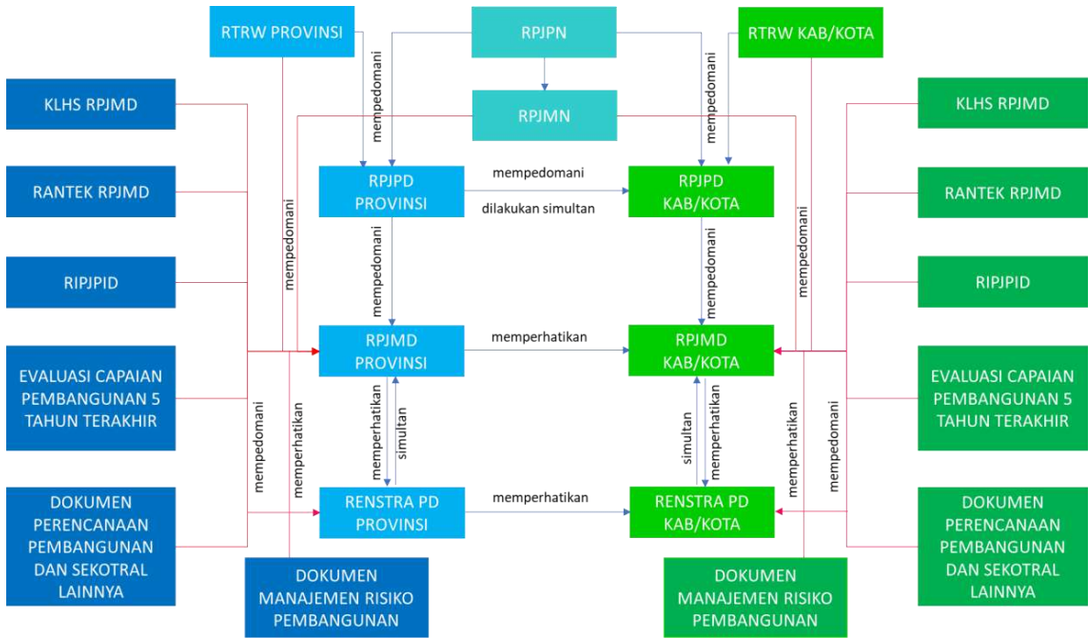
   Keselarasan perencanaan pembangunan pusat daerah merupakan hal mutlak agar tujuan pembangunan bangsa dan negara dapat tercapai. Maka dalam penyusunan RPJMD Kota Kediri telah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dengan menyelaraskan Asta Cita Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat ke dalam 7 (tujuh) Program Unggulan Sapta Cita Wali Kota Kediri.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 beserta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

   Kebijakan regional, dalam hal ini provinsi penting untuk diperhatikan karena Kota Kediri merupakan bagian integral pembangunan yang berkolaborasi dengan kabupaten kota sekitar untuk membentuk capaian provinsi dan akhirnya mendukung nasional. Maka, penyusunan RPJMD ini telah memperhatikan arahan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur terutama melalui penyelarasan kinerja dan pelaksanaan konsultasi rancangan awal kepada Gubernur. Sedangkan, substansi dalam RTRW Provinsi Jawa Timur menjadi pertimbangan dalam posisi strategis Kota Kediri dan *highlight* intervensi kewilayahan regional.

5. KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
   Penyusunan dokumen KLHS merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS menjadi analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Integrasi dokumen KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan ke dalam dokumen RPJMD baik dalam hal daya dukung daya tampung, permasalahan, isu strategis hingga rekomendasi program pembangunan.
6. Dokumen Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD
   Dokumen Rantek telah menjadi bahan dalam pelaksanaan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2024. Dokumen Rantek RPJMD disusun berdasarkan RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan RPJMD ini, dokumen Rantek telah menjadi dokumen awal yang disempurnakan berdasarkan visi misi kampanye kepala daerah terpilih untuk menjadi Rancangan Awal.
7. Hasil evaluasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
   Kemajuan dapat dicapai salah satunya dari upaya perbaikan yang berkelanjutan. Upaya perbaikan dilakukan dengan penentuan kinerja dan target kinerja berdasarkan evaluasi kinerja periode RPJMD Tahun 2020-2024. Proyeksi target berdasarkan evaluasi diharapkan akan memastikan kegiatan pembangunan selalu mengarah pada kemajuan dan menjadi lebih baik dalam melaksanakan pemerintahan.
8. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kota Kediri
   Berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. RIPJPID Kota Kediri telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda Nomor 400.7.22/3067/ 419.202/2025 tanggal 23 Mei 2025 dengan memperhatikan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
9. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Keterkaitan antara Dokumen RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. 1 Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam RPJMD Kota Kediri



Sumber: Bappeda, 2025

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Kediri tahun 2025-2029 adalah memberikan pedoman perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk periode tahun 2026 hingga 2030 dan sebagai arah pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Kediri secara sinergis.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025–2029 adalah:

1. Memberikan gambaran umum kondisi daerah berdasarkan data yang tersedia tahun 2020–2024.
2. Memberikan gambaran keuangan daerah berdasarkan data tahun 2020–2024 beserta proyeksi tahun 2026–2030.
3. Menjabarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam perencanaan strategis yang meliputi rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu tahun 2026–2030 .
4. Menyediakan tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2. Gambaran Keuangan Daerah
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan
5.2. Pengendalian dan Evaluasi

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis

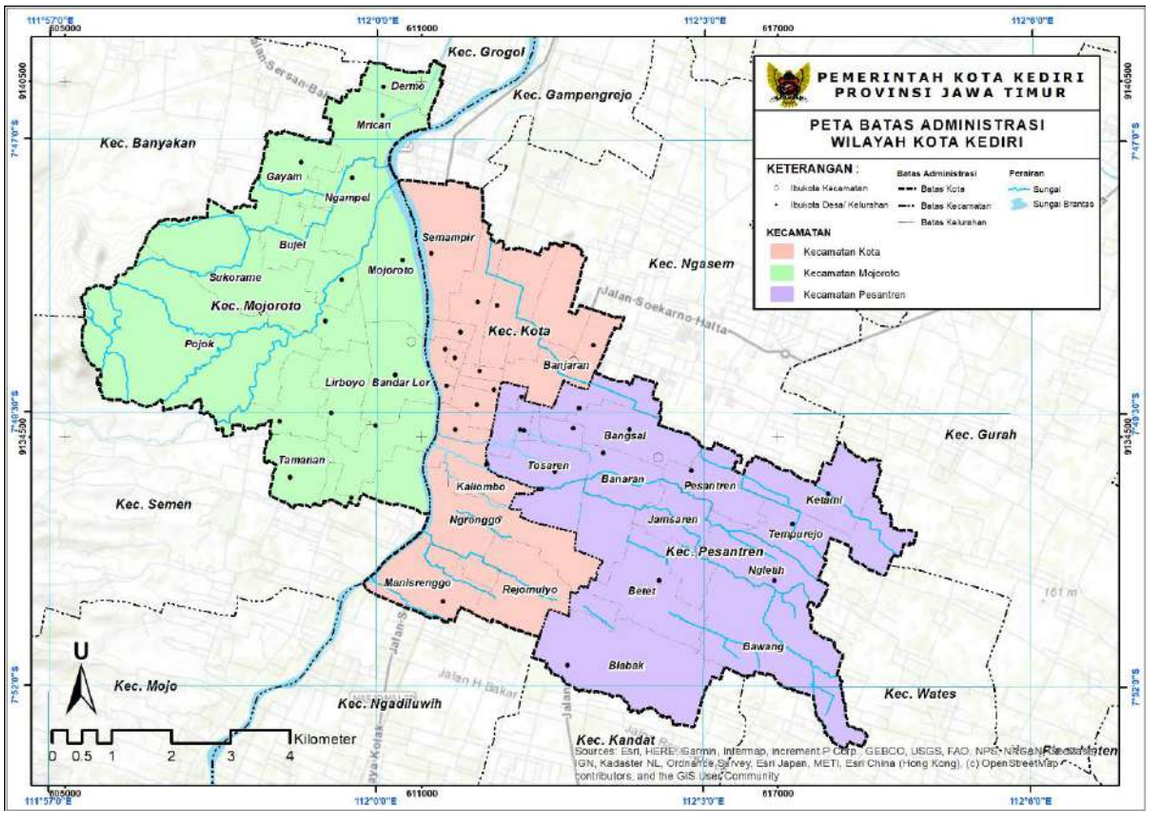
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Kediri ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder dan pengembangan/peningkatan fungsi revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan Nasional. Dalam hal ini, Kota Kediri diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan andalan Kediri - Tulungagung - Blitar yang berfokus pada pengembangan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata. Sejalan dengan itu, Kota Kediri memiliki peran strategis dalam penyediaan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan pendidikan, industri, perdagangan jasa dan pariwisata yang mampu melayani dalam skala regional (Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan Blitar).

1) Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Kediri terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa serta berada diantara $111{,}05^0$ – $112{,}03^0$ Bujur Timur dan $7{,}45^0$ – $7{,}55^0$ Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Ngasem, dan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
c. Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri; dan
d. Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Kediri



Sumber: Bappeda, 2024

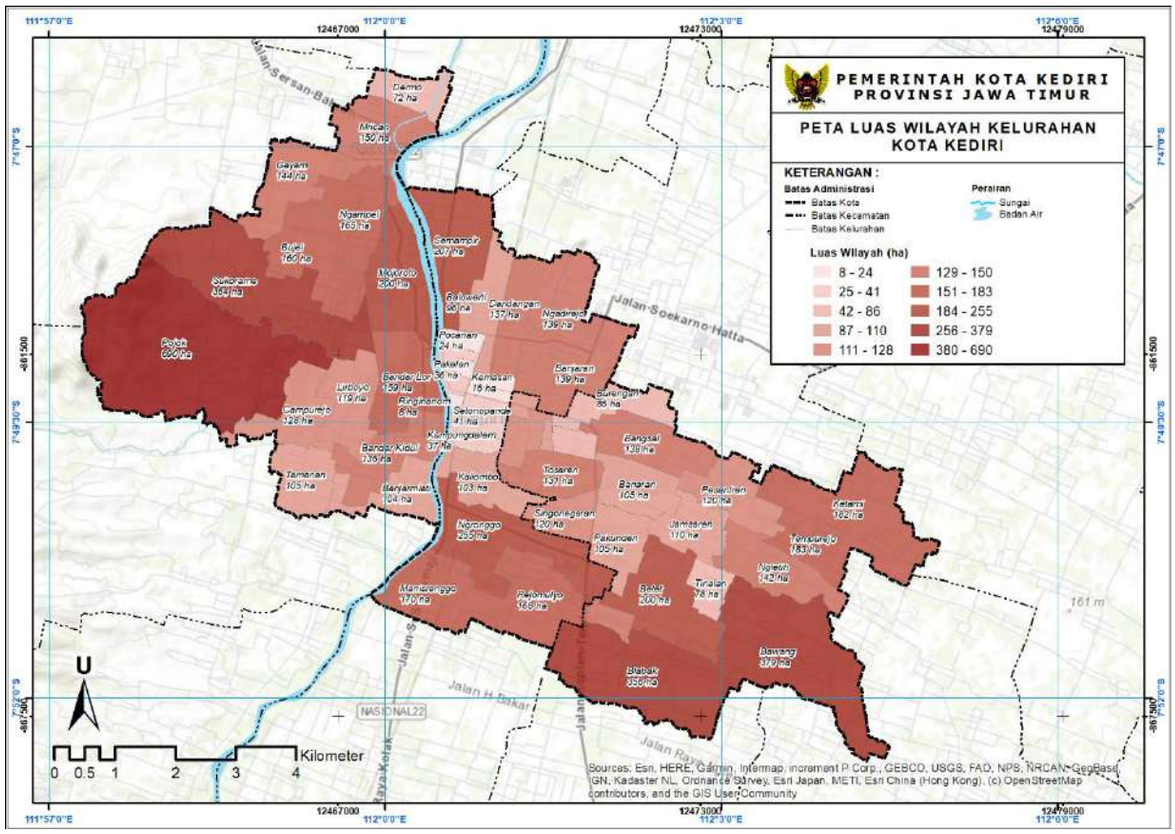
Luas wilayah Kota Kediri yaitu 6.723 Ha, terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, dengan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mojoroto mencapai 2.695 Ha atau sekitar 40,08% dari luas keseluruhan Kota Kediri. Berikutnya Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah mencapai 2.433 Ha atau sekitar 36,18% dari luas keseluruhan Kota Kediri, dan terkecil adalah Kecamatan Kota dengan luas mencapai 1.596 Ha atau sekitar 23,74% dari luas keseluruhan Kota Kediri. Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 327 dan 1.477 Rukun Tetangga (RT) dengan masing-masing rincian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW di Kota Kediri

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Kecamatan Mojoroto	2.695 Ha	14	100	492
2	Kecamatan Kota	1.596 Ha	17	101	488
3	Kecamatan Pesantren	2.433 Ha	15	126	497
Kota Kediri		**6.723 Ha**	**46**	**327**	**1.477**

Sumber: BPS Kota Kediri, 2023 (Data Diolah)

Gambar 2. 2 Luas Area (ha) Wilayah Kota Kediri Berdasarkan Kelurahan



Sumber: Bappeda, 2024

2) Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Kediri dipengaruhi oleh keadaan curah hujan dan jumlah hari hujan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh keberadaan sumber air dan sungai yang melintasi Kota Kediri. Keberadaan Sungai Brantas beserta sungai lainnya memberikan dampak nyata terhadap daerah. Beberapa sungai juga berfungsi sebagai saluran primer, yaitu: Sungai Kresek sepanjang 5,87 km di Kecamatan Pesantren; Sungai Parung sepanjang 3 km, Sungai Kedak sepanjang 5,84 km, Sungai Ngampel sepanjang 1,38 km, dan Sungai Bruno sepanjang 1,93 km di Kecamatan Mojoroto; serta Sungai Tawang sepanjang 7,46 km di Kecamatan Kota. Daftar sungai utama di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

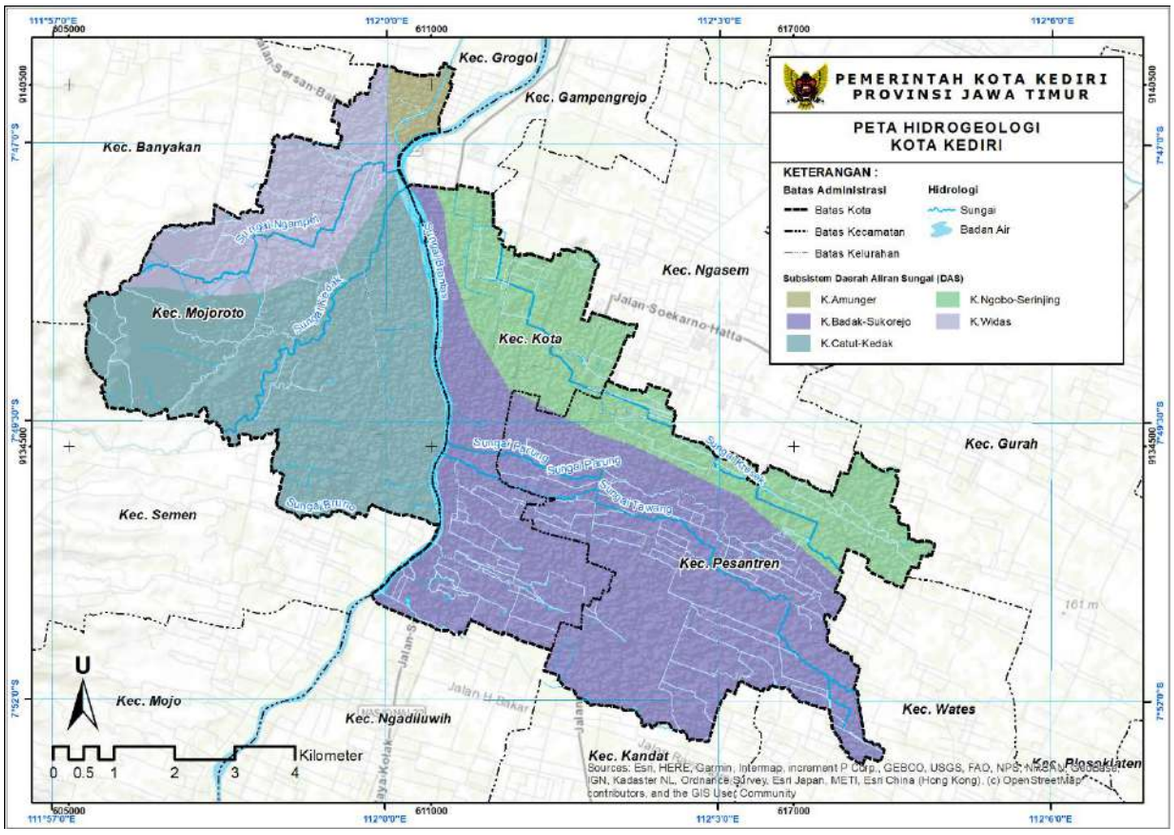
Tabel 2. 2 Daftar Sungai Utama di Kota Kediri

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Debit (m^3/dtk)	
			Maks	Min
1	Kresek	5,87	20	2
2	Parung	3	124	12
3	Kedak	5,84	223	5
4	Brantas	7,11	314	14
5	Ngampel	1,38	45	10
6	Tawang	7,46	800	200
7	Bruno	1,93	130	17

Sumber: UPT PSDAWS Puncu Seladono Kota Kediri, 2019

Ketujuh sungai tersebut masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan terbagi ke dalam 5 (lima) subsistem DAS. Berdasarkan RTRW Kota Kediri Tahun 2024-2044, subsistem DAS di Kota Kediri yaitu subsistem DAS K. Amunger, K. Badak – Sukorejo, K. Catut – Kedak, K. Ngobo Serinjing, dan K. Widas dengan peta sebagai berikut:

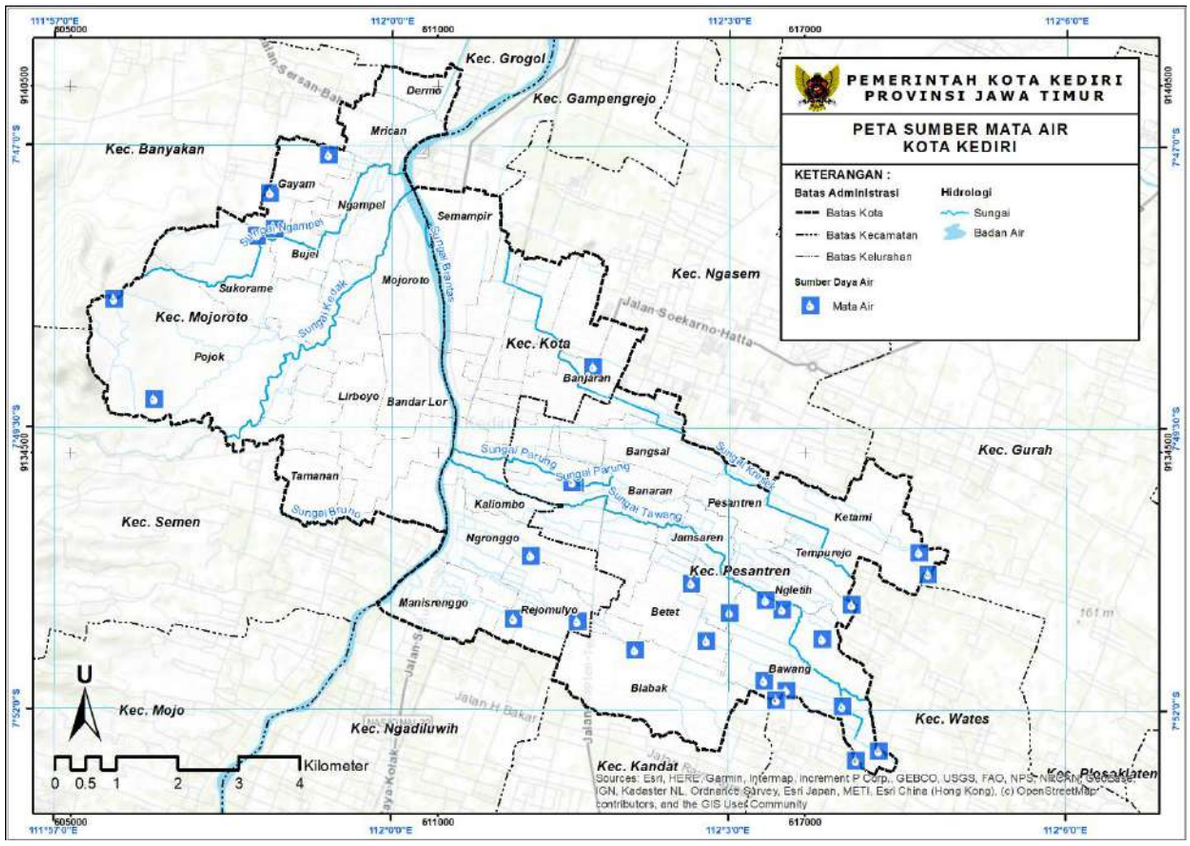
Gambar 2. 3 Peta Hidrologi Kota Kediri



Sumber: Bappeda, 2024

Kota Kediri juga memiliki banyak sumber mata air bersih yang potensial. Sebaran sumber mata air tersebut dapat dilihat dalam peta berikut:

Gambar 2. 4 Peta Persebaran Sumber Mata Air di Kota Kediri



Sumber: DPUPR Bidang SDA, 2023

Sebagian besar sumber mata air berada di Kecamatan Pesantren sejumlah 16 (enam belas) sumber mata air dengan debit paling besar adalah mata air Sumber Banteng (10-112 liter/detik). Di Kecamatan Kota ada 5 (lima) sumber mata air dengan debit paling besar adalah Sumber Jiput 45 liter/detik, sedangkan di Kecamatan Mojoroto, terdapat 6 (enam) sumber mata air dengan debit paling besar adalah Sumber Sendang (0-60 liter/detik).

3) Penggunaan Lahan

Perkembangan untuk lahan terbangun belum tersebar secara merata. Penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kota dengan sebaran perkantoran, perdagangan jasa, industri, permukiman kepadatan tinggi dan wisata kota. Penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojoroto didominasi oleh pendidikan, *home industry*, industri, pariwisata dan pertanian serta

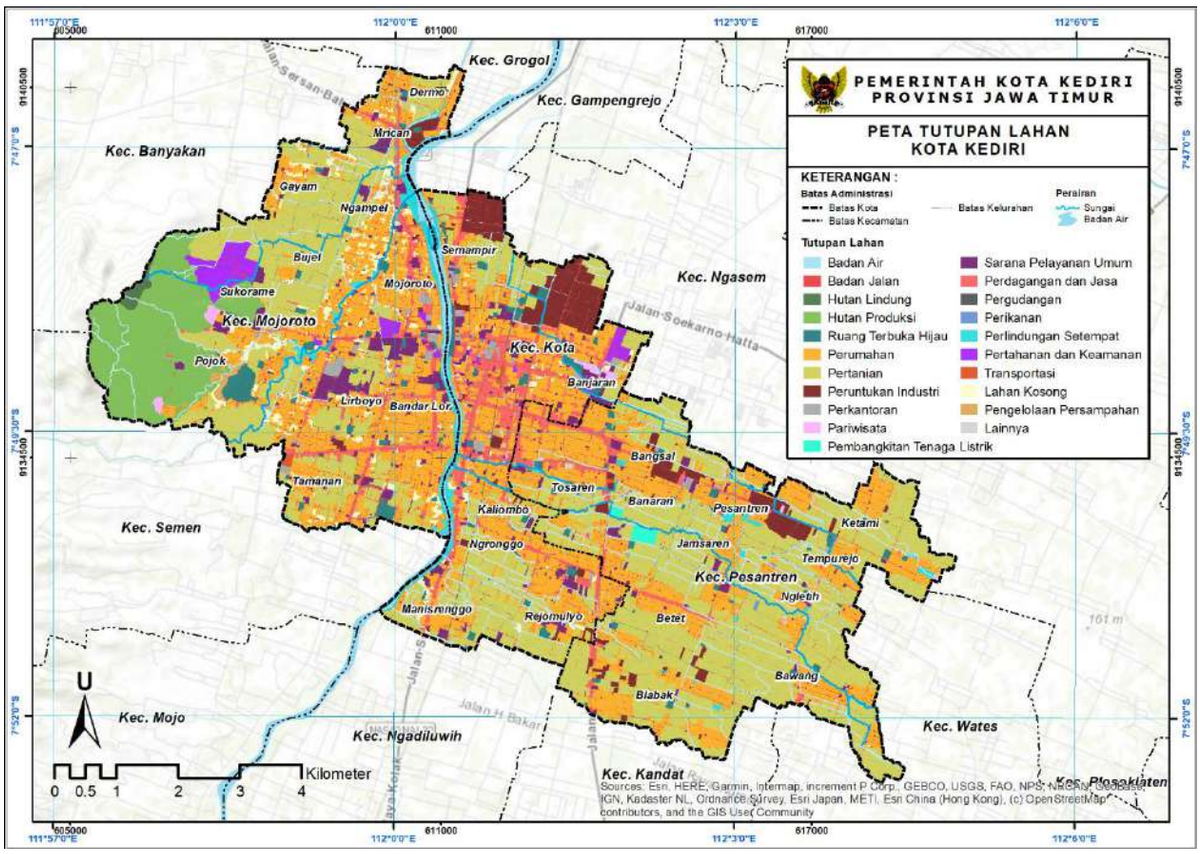
permukiman kepadatan sedang dan rendah. Sedangkan untuk Kecamatan Pesantren, didominasi oleh perkantoran, industri, *home industry*, permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian. Tutupan lahan Kota Kediri secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Tutupan Lahan di Kota Kediri

ZONA	Luas (Ha)
Zona Badan Air	129
Zona Badan Jalan	214
Zona Ruang Terbuka Hijau	151
Zona Kawasan Peruntukan Industri	262
Zona Lahan Kosong	146
Zona Perdagangan dan Jasa	361
Zona Perkantoran	60
Zona Sarana Pelayanan Umum	244
Zona Pertanian	2.504
Zona Transportasi	8
Zona Perumahan	1951
Zona Pengelolaan Persampahan	11
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	14
Zona Pergudangan	1
Zona Perlindungan Setempat	91
Zona Perikanan	5
Zona Pertahanan dan Keamanan	86
Zona Lainnya	16
Zona Pariwisata	16
Zona Hutan Produksi	438
Zona Hutan Lindung	15
Kota Kediri	**6.723**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Gambar 2. 5 Peta Tutupan Lahan di Kota Kediri



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Penggunaan lahan terbesar di Kota Kediri adalah pertanian seluas 2.504 Ha atau 37% dari luas tutupan lahan sebesar 6.723 Ha. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah lahan perumahan seluas 1.951 Ha atau sebesar 29%. Sedangkan penggunaan lahan dengan proporsi paling kecil adalah perikanan seluas 5 Ha dan pergudangan sebesar 1 Ha.

4) Kontribusi Ekonomi

Sebagai pusat layanan sekunder dan salah satu motor pertumbuhan di Jawa Timur bagian selatan, Kota Kediri memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian provinsi. Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri atas dasar harga berlaku tercatat mencapai sekitar Rp 168,75 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Kota Kediri, 2025). Dalam skala regional, wilayah eks Karesidenan Kediri (meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar) menyumbang sekitar 12,36 persen terhadap perekonomian Jawa Timur. Posisi ini menegaskan peran penting Kota Kediri sebagai pusat aktivitas industri,

perdagangan, pendidikan, dan jasa yang mampu menopang dinamika ekonomi kawasan Mataraman.

Struktur ekonomi Kota Kediri pada tahun 2024 sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang hingga 79,64 persen terhadap total PDRB (BPS Kota Kediri, 2025). Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,43 persen, disusul peningkatan signifikan pada konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 11,48 persen. Data ini menunjukkan adanya dinamika positif yang mencerminkan peningkatan arus barang, jasa, dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya konektivitas antardaerah dan berkembangnya kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, Kota Kediri semakin memperkuat perannya sebagai simpul distribusi logistik, pusat pendidikan, dan destinasi pariwisata di Jawa Timur bagian selatan. Dengan demikian, kontribusi ekonomi Kota Kediri tidak hanya penting bagi wilayah sekitar, tetapi juga strategis dalam memperkuat ketahanan dan pemerataan pembangunan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan.

5) Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2024-2044, disebutkan bahwa penataan ruang wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai sentra pendidikan, industri, perdagangan-jasa dan pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur mengarahkan Kota Kediri sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kediri untuk daerah sekitar dengan fungsi pusat pengembangannya adalah pusat pemerintahan, perdagangan, industri, jasa, pendidikan dan kesehatan.

Pada tingkat kota, arah kebijakan pembangunan wilayah yang ditujukan dalam kebijakan penataan ruang Kota Kediri berfokus pada:

a. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota meliputi :
    1) Kebijakan pengembangan kota sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
    2) Kebijakan pengembangan kota pusat pelayanan kawasan andalan Kediri – Tulungagung – Blitar;
    3) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan; dan
    4) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana.
b. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota meliputi:

1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung, terdiri dari:
    i. Pengendalian dan perlindungan Badan Air;
    ii. Pengendalian dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
    iii. Pengendalian dan perlindungan kawasan perlindungan setempat; dan
    iv. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari luas kota untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% dari luas kota untuk ruang terbuka hijau privat.
2) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya.
    i. Pengembangan kawasan budi daya;
    ii. Pengelolaan dan penataan sektor informal; dan
    iii. Pengembangan tempat evakuasi bencana

c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah kota berupa pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi.

Kota Kediri berada di jalur transportasi regional yang menghubungkan antara Kota Surabaya dengan Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Malang. Sehingga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder. Pusat pelayanan kota mempunyai skala pelayanan regional dalam wilayah Kota Kediri, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Kediri dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya. Deliniasi untuk penentuan pusat pelayanan kota yakni berdasarkan dominasi kegiatan. Adapun fungsi pusat pelayanan kota ini adalah sebagai berikut:

a. Pusat Pemerintahan Kota

Pusat pemerintahan Kota Kediri ditandai dengan adanya kantor walikota dan kantor-kantor pemerintahan lainnya yang terdapat di kawasan pusat pelayanan kota ini.

b. Pusat Perdagangan Jasa Skala Regional

Kota Kediri memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa skala regional yakni dengan adanya beberapa pusat perbelanjaan (Kediri Mall, Kediri Town Square); kawasan pertokoan (sepanjang Jalan Erlangga – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Dhoho – Jalan Patimura – Jalan HOS Cokroaminoto dan sepanjang Jalan P. Sudirman – Jalan Yos Sudarso); pasar rakyat (Pasar Setonobetek dan Pasar Pahing); dan

Pasar Grosir yang terdapat di kawasan pusat kota yang mempunyai skala pelayanan regional. Hal tersebut terjadi karena menjadi orientasi pemenuhan kebutuhan penduduk di wilayah luar Kota Kediri seperti dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek.

c. Pusat Kegiatan Industri

Terdapat industri besar berupa industri pengolahan tembakau di Kelurahan Semampir, Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Balowerti yang terletak di Kecamatan Kota. Selain itu terdapat juga sentra industri kecil makanan berupa *home industry* tahu, getuk pisang, kain tenun, kain batik dan lain sebagainya.

d. Pusat Pendidikan

Pusat pelayanan pendidikan yang berada di kawasan Kota Kediri merupakan sarana pendidikan formal tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah favorit/unggulan. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan skala regional berupa perguruan tinggi dan akademi diarahkan ke wilayah Kota Kediri bagian Barat (Kecamatan Mojoroto) dan sebagian kecil di wilayah timur (Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Pesantren). Sarana pelayanan pendidikan berbasis agama yang berupa pesantren juga tersebar di wilayah barat (Pondok Pesantren Lirboyo di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto) dan di wilayah lainnya (Pondok Pesantren Wali Barokah di Kelurahan Banjaran, dan lainnya).

e. Pusat Pelayanan Kesehatan Skala Regional

Sarana pendukung fungsi pusat pelayanan kesehatan skala regional di Kota Kediri berada di RSUD Gambiran di Kelurahan Pakunden, RSUD Daha Husada di Kelurahan Mojoroto, RS Bhayangkara di Kelurahan Dandangan, RS DKT di Kelurahan Semampir, RS Baptis di Kelurahan Bangsal, dan RS Muhammadiyah di Kelurahan Ngampel.

f. Pusat Pelayanan Pariwisata

Kegiatan pariwisata antara lain pengembangan pariwisata Selomangleng, wisata belanja di pusat-pusat perbelanjaan yang ada, wisata kuliner dan pengembangan akomodasi pariwisata berupa hotel atau penginapan.

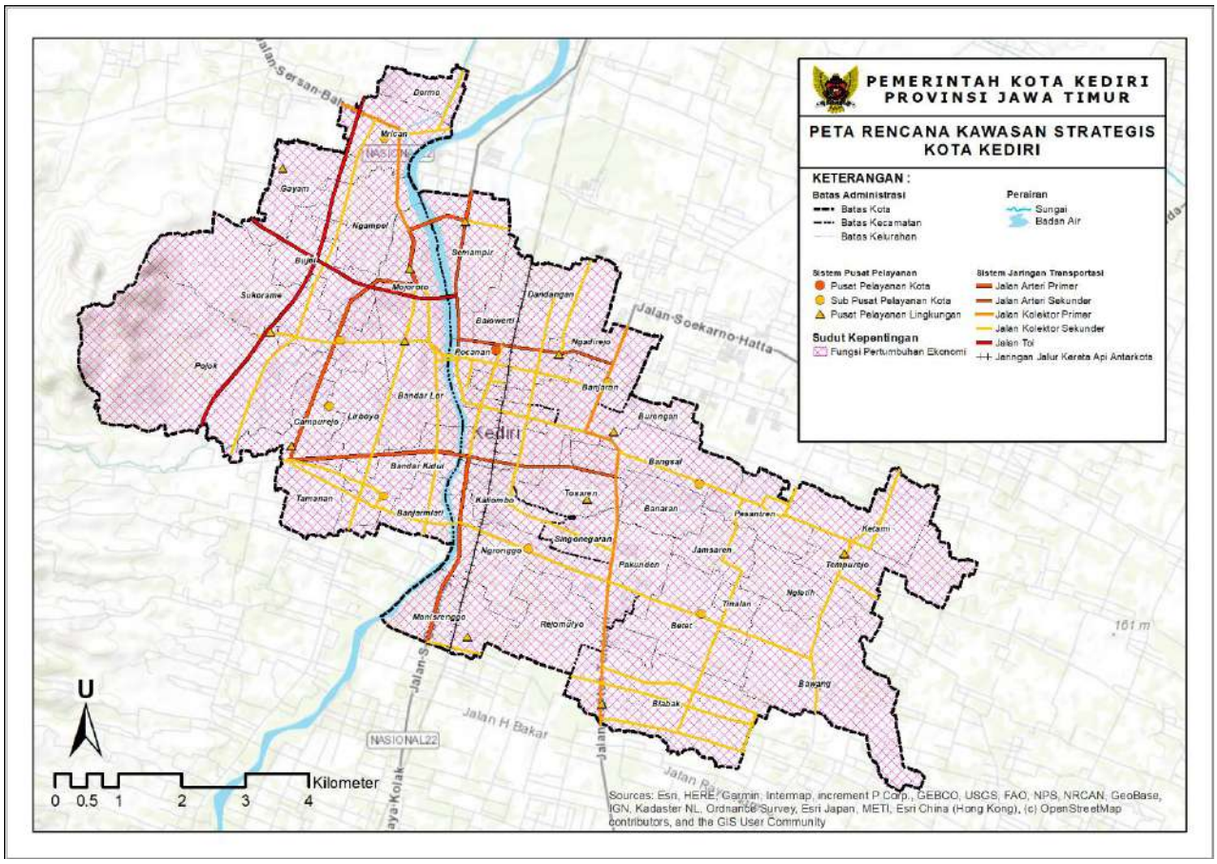
Untuk menyelaraskan arah pembangunan skala nasional dan provinsi, maka Kota Kediri memiliki program strategis antara lain : Kawasan *Central Business District* (CBD); Kawasan peruntukan industri; Kawasan Terpadu Mrican; Kawasan GOR Jayabaya; Kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok; dan Kawasan kota lama. Tujuan pengembangan kawasan *Central Business District* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan regional melalui kegiatan perdagangan jasa dan sosial budaya yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Adapun arah pengembangannya berupa pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan CBD sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional serta pengembangan pusat kawasan perkantoran.

Kemudian pengembangan kawasan peruntukan industri bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif dan non polutan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan arahan pengembangannya adalah pengembangan sarana prasarana penunjang, penataan lingkungan dan bangunan serta meningkatkan fungsi kawasan untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri. Selanjutnya pengembangan Kawasan Terpadu Mrican adalah untuk mewujudkan pusat perdagangan jasa berbasis perguruan tinggi. Adapun arahan pengembangannya berupa Pengembangan sarana prasarana penunjang, penataan bangunan dan lingkungan, meningkatkan fungsi Kawasan Terpadu Mrican sebagai Kawasan Aglomerasi dengan jenis kegiatan berupa industri, pendidikan, perdagangan jasa dan perumahan.

Tujuan pengembangan Kawasan GOR Jayabaya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan pusat kegiatan lokal dan regional dengan arahan pengembangannya berupa pengembangan sarana dan prasarana penunjang, pengembangan fungsi, penataan bangunan dan lingkungan kawasan GOR Jayabaya untuk mewujudkan kawasan campuran. Dilanjutkan dengan pengembangan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata lokal dan regional. Adapun arahan pengembangannya berupa Pelestarian Kawasan Gunung Klotok yang terdiri dari Situs/Candi Klotok, Goa Selomangleng, Makam Mbah Boncolono dan Museum Airlangga. Yang terakhir, pengembangan kawasan kota lama adalah mengembangkan kawasan sesuai dengan fungsinya dengan tetap menjaga kelestarian bangunan, sosial dan budaya dengan arahan pengembangan berupa Pelestarian Kawasan,

menjaga fungsi kawasan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil dan Masjid Aulia di Setonogedong, Bank Indonesia di Pocanan, Hotel Merdeka di Balowerti, Klenteng Tjoe Hwie Kiong di Ringinanom, serta Makam Aulia Sunan Geseng di Singonegaran.

Gambar 2. 6 Rencana Kawasan Strategis Kota Kediri



Sumber: Bappeda, 2024

Kota Kediri merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata secara regional sehingga Kota Kediri memiliki kawasan-kawasan strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan potensinya masing-masing, antara lain:

1. Kawasan *Central Business District*

Kawasan *Central Business District* (CBD) merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yakni kawasan perdagangan dan jasa berskala regional dan kawasan perkantoran berskala lokal dan regional di pusat kota yang berada di Kecamatan Kota. Pada kawasan perdagangan dan jasa ini meliputi:

a. Keberadaan Pasar Setonobetek, Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, serta Pasar Pahing dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kebutuhan pokok, sayuran, ikan dan sejenisnya.
b. Pertokoan di sepanjang Jl. Pattimura dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kelontong, tekstil, dan alat perlengkapan sehari-hari.
c. Pertokoan di sepanjang Jl. Dhoho - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Urip Sumoharjo dan sekitarnya dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang campuran seperti garmen, elektronika, jasa bank, *showroom* motor-mobil, dan lainnya.
d. Pertokoan dan pusat perbelanjaan yang terdapat di sepanjang Jl. Brawijaya Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Hasanuddin.
e. Perkantoran yang terdapat di Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanuddin, Jl. Jendral Basuki Rakhmat.

Selain pengembangan kawasan CBD juga terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi pengembangan pasar rakyat yang tersebar di tiap kecamatan/bagian wilayah kota dan pada pusat-pusat permukiman, pengembangan pusat perbelanjaan berupa *shopping centre*, pertokoan, *showroom*, bank dan grosir pada kawasan pusat kota dan koridor sepanjang Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga dan Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa; serta pengembangan toko modern yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kediri. Selain itu kawasan perdagangan dan jasa juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan pariwisata seperti pembangunan pasar wisata di Kelurahan Campurejo, pembangunan pasar penjualan souvenir Selomangleng di Kelurahan Pojok, pembangunan sentra pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kelurahan Banjarmlati; dan pengembangan sentra oleh-oleh dan produk IKM di Kelurahan Pocanan. Sedangkan kawasan perdagangan dan jasa yang akan dikembangkan adalah pasar sembako di Kelurahan Bandar Lor, pasar grosir elektronik di Kelurahan Ketami dan pasar *showroom* di Kelurahan Blabak.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Kediri meliputi kawasan peruntukan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM*).* Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi industri besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar yaitu industri

rokok PT Gudang Garam, Tbk. di Kelurahan Semampir, Dandangan dan Ngadirejo serta industri pengolahan tebu (pabrik gula) di Kelurahan Mrican dan Pesantren. Kemudian industri menengah berupa industri pergudangan di Kelurahan Bangsal, pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren dan Kota, industri pengolahan makanan di Kecamatan Pesantren dan Kota. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Betet dan Blabak, Kecamatan Pesantren serta industri kecil lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Kediri.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) meliputi sentra kerajinan batik di Kelurahan Dermo, Mrican, Dandangan dan Rejomulyo; sentra kerajinan tenun di Kelurahan Bandar Kidul; sentra tahu di Kelurahan Pakelan, Pocanan, Tinalan, Banaran dan Bawang; sentra stik tahu di Kelurahan Tinalan dan Kampung Dalem; sentra madumongso dan getuk pisang di Kelurahan Kampung Dalem, Tinalan dan Dandangan; serta sentra makanan ringan di Kelurahan Blabak dan Bangsal.

Arah pengembangan baru untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan di Kota Kediri meliputi Kecamatan Kota (Kelurahan Balowerti, Kelurahan Dandangan, kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Semampir) dan Kecamatan Pesantren (Kelurahan Bangsal, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak).

Mengingat sektor industri pengolahan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri, keberadaan industri ini tetap dipertahankan. Arahan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak, Betet dan Bawang.

Rencana penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, untuk kawasan industri meliputi:

a. Industri besar, terdapat Industri Rokok di Kelurahan Semampir, Balowerti dan Dandangan di Kecamatan Kota, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Mrican, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Pesantren.
b. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak – Betet – Bawang.
c. Pengembangan dan penataan sentra industri rumah tangga (*home industry*) yakni *home industry* tenun di Kelurahan Bandar Kidul; *home industry* batik di Kelurahan Dermo, Rejomulyo dan Dandangan; *home industry* pengolahan makanan (tahu) di Jalan Pattimura.

3. Kawasan Terpadu Mrican

Pengembangan kawasan akibat dampak pintu tol dan bandara di Kabupaten Kediri akan menyebabkan perubahan dan perkembangan kegiatan pada Kelurahan Mrican (Jl. Sersan Bahrun – Jl. Gatot Subroto) serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain :

a. Industri (Pabrik Gula Meritjan dan IKM batik);
b. Pendidikan (kampus Universitas Brawijaya);
c. Perdagangan-jasa;
d. Perumahan untuk disewakan (kost).

4. Kawasan GOR Jayabaya

Merupakan bagian dari Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Banjarmlati, kawasan GOR Jayabaya direncanakan sebagai kawasan superblok dengan peruntukan fungsi sebagai kawasan permukiman, olahraga, perdagangan-jasa dan pelayanan publik. Secara sederhana, superblok dapat dimaknai sebagai konsep pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan fungsi lahan melalui integrasi berbagai fasilitas publik dalam satu kawasan. Adapun rencana pengembangan berdasarkan Masterplan Pengembangan Kawasan GOR Jayabaya yang telah disusun sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Peruntukan Lahan Kawasan GOR Jayabaya

Zona	Rencana Peruntukan Lahan	Luas (ha)
A	Campuran kawasan komersial skala kota, ruang terbuka publik, kawasan olahraga, dan rekreasi	3.93
B	Pusat UMKM, pusat pengembangan IPTEKS, dan convention hall	3.49
C	Parkir umum dan terminal wisata	3.44
D	Permukiman kepadatan rendah-sedang, pendidikan, pusat kuliner, komersial skala kawasan, dan peribadatan	3.58
E	Kawasan olahraga dan rekreasi	3.50
F	Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang publik	2.05
G	Campuran kawasan komersial skala regional, hotel, dan apartemen	5.46
H	Campuran kawasan, komersial, perkantoran, mall layanan publik, RTH/ruang publik, dan rekreasi.	6.25
Total		**31.7**

Sumber: Bappeda, 2021

5. Kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok

Kawasan strategis Goa Selomangleng – Gunung Klotok terdiri dari Pelestarian Kawasan Gunung Klotok dimana pada kawasan tersebut terdapat Situs/Candi Klotok, *patirtan* (pemandian), Goa Selomangleng, Makam Mbah Boncolono dan Museum Airlangga. Dalam pengembangan kawasan wisata Goa Selomangleng perlu adanya Nota Kesepahaman dengan Perum Perhutani karena kawasan Situs/Candi Klotok berada dalam kawasan yang dikelola oleh perhutani.

6. Kawasan Kota Lama

Kawasan Kota Lama yang berlokasi di dalam area Central Business District (CBD) sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan unggulan perdagangan-jasa sekaligus wisata sejarah. Di kawasan tersebut terdapat bangunan ikonik bersejarah Klenteng Tri Dharma Tjoe Hwie Kiong, bangunan-bangunan lama dengan gaya arsitektur klasik serta sentra oleh-oleh khas Kediri di sepanjang Jl. Yos Sudarso. Revitalisasi dan pengembangan kawasan ini dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensinya sebagai destinasi wisata alternatif sekaligus menghindarkan pertumbuhan yang tidak terkendali (*unmanaged growth*) yang dapat menghilangkan nilai-nilai historis kawasan. Pengalaman dari beberapa kota yang melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap kawasan kota lama terbukti memberikan implikasi positif dari sisi peningkatan kunjungan wisata, preservasi bangunan bersejarah serta mendorong geliat perekonomian di kawasan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

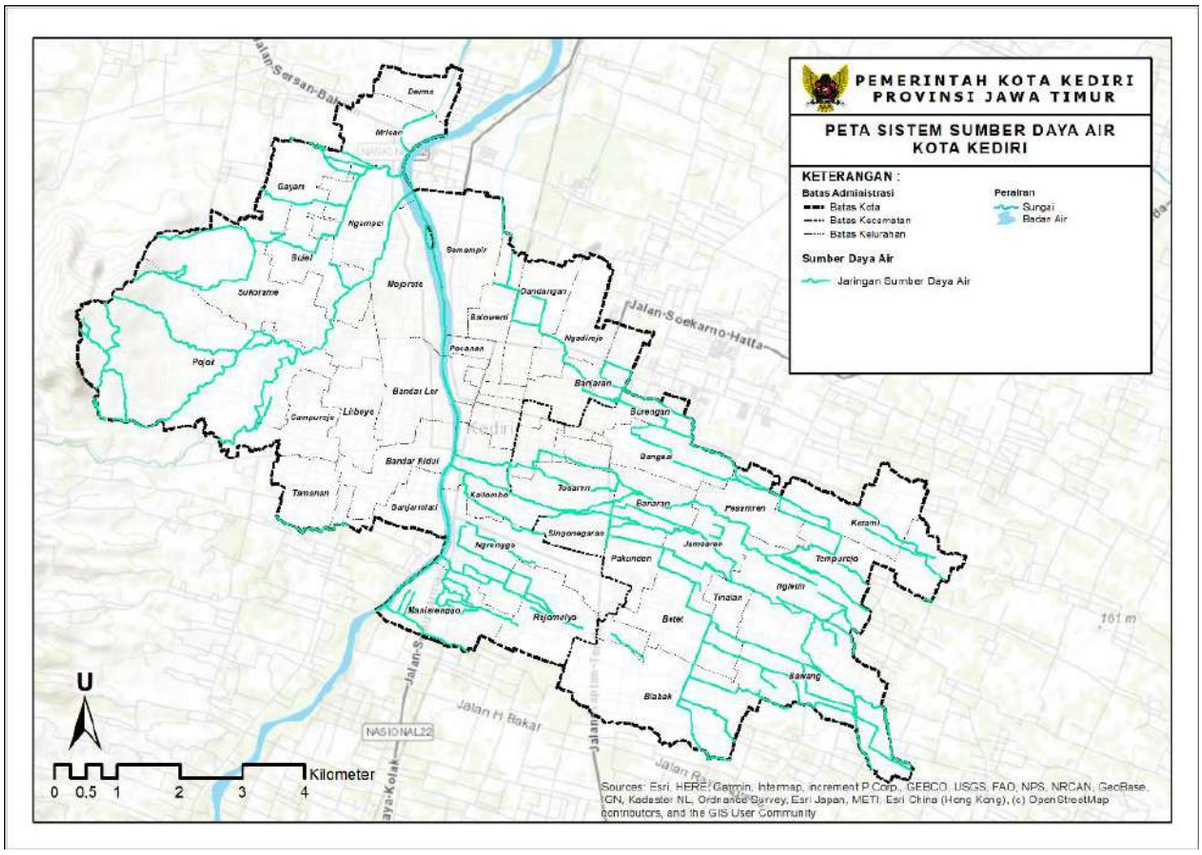
Kota Kediri memiliki potensi sumber daya alam yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Kediri, karena wilayahnya yang tidak terlalu luas dan sudah berkembang sebagai kawasan urban. Berikut ini diuraikan beberapa potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kota Kediri.

1) Sumber Daya Air

Kota Kediri dilalui oleh sungai terpanjang di Jawa Timur yaitu Sungai Brantas yang membelah wilayah Kota Kediri sepanjang 7,11 km. Secara umum, Sungai Brantas memiliki debit air berkisar antara 14 - 314 m3/detik tergantung kondisi cuaca dan curah hujan di sepanjang Daerah Aliran

Sungai (DAS). Sungai ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Namun dengan semakin berkembangnya aktivitas sosial-ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui Sungai Brantas, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk mencegah pencemaran sungai dari berbagai jenis limbah sekaligus menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya.

Gambar 2. 7 Peta Sistem Sumber Daya Air Kota Kediri



Sumber: Bappeda, 2024

Selain Sungai Brantas, Kota Kediri juga memiliki sumber-sumber mata air yang tersebar di 11 (sebelas) Kelurahan. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, terdapat 27 sumber mata air dengan pemanfaatan yang bervariasi, di antaranya untuk keperluan irigasi pertanian, keperluan rumah tangga dan destinasi wisata. Namun perlu dicatat, beberapa sumber mata air mengalami kondisi kekeringan terutama pada musim kemarau yang berpengaruh pada debit air. Mengingat kompleksnya upaya pelestarian sumber-sumber mata air, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar perlindungan terhadap kawasan konservasi mata air dapat dijalankan secara integral dan konsisten.

2) Pertanian dan Perikanan

Tutupan lahan di Kota Kediri masih didominasi oleh pertanian seluas 2.503,96 Ha atau sebesar 37,24% dari luas wilayah Kota Kediri. Pengembangan sektor pertanian di Kota Kediri didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.441,95 Ha, yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 509,96 Ha yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Kediri dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 931,99 Ha. Adapun luas panen sawah dalam setahun dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 Luas Panen Sawah Dalam Setahun (Ha)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen sawah dalam setahun (Ha)	1,830	1,729	1,421	1,383	1,164

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Komoditas tanaman pangan di Kota Kediri antara lain tanaman padi dan jagung dengan produktivitas tahun 2020-2024 sebagai berikut:

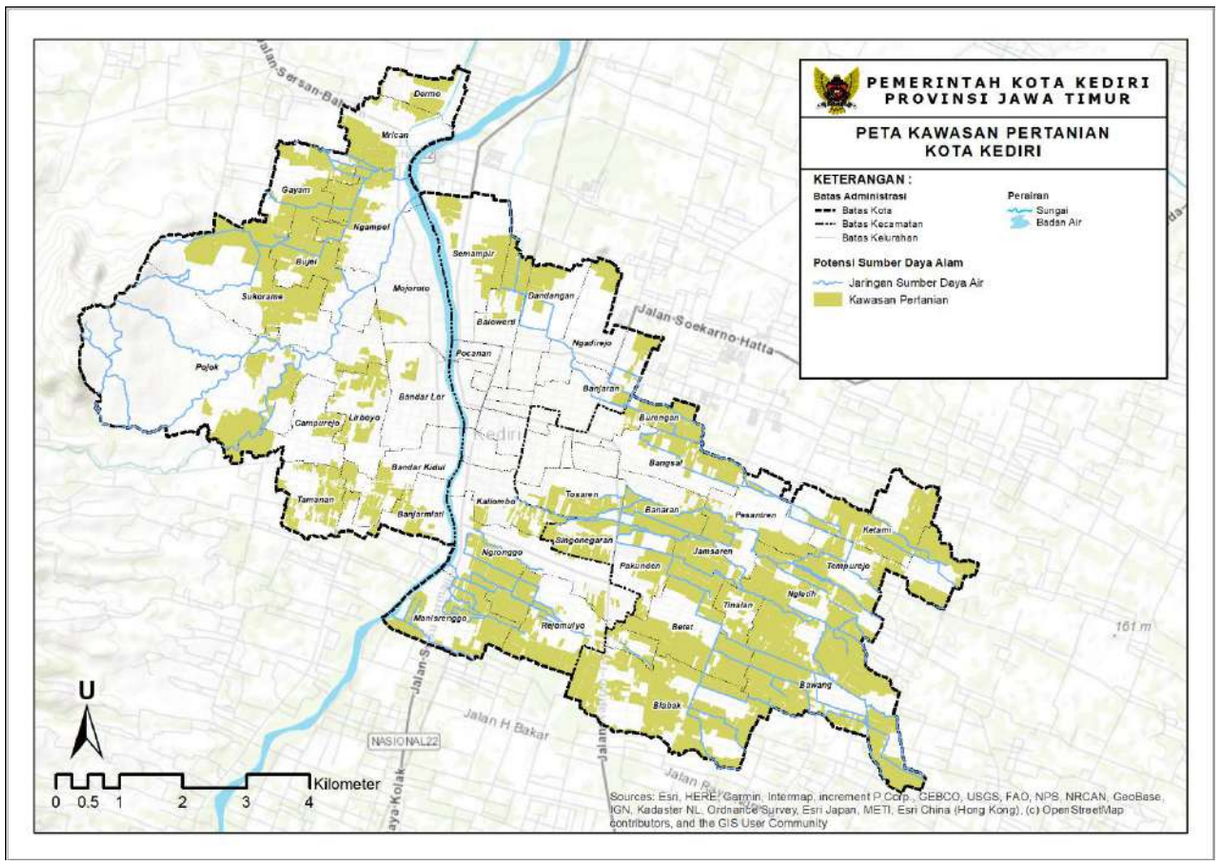
Tabel 2. 6 Produktivitas Tanaman Pangan

Produktivitas tanaman pangan (ton/Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
Jagung	8.4	8.39	8.25	8.63	8.75
Padi	7.29	7.55	7.28	7.35	7.33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Produktivitas tanaman pangan di Kota Kediri menunjukkan tren meningkat walaupun luas lahan sawah terus menurun. Hal ini dikarenakan adanya penyuluhan dan peningkatan kapasitas kepada petani sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

Gambar 2. 8 Peta Kawasan Pertanian Kota Kediri



Sumber: Bappeda, 2024

Selain sektor pertanian Kota Kediri juga terdapat sektor perikanan. Jenis-jenis kegiatan perikanan meliputi pembudidayaan ikan melalui pembinaan, penyuluhan dan pengembangan bibit ikan unggul. Adapun jumlah produksi perikanan tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7 Produksi Perikanan (kwintal)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan (kwintal)	1466,5	1840,0	1861,0	1878,0	1898,0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

3) Potensi Ekonomi dari Pariwisata Alam

Salah satu atribut ekologis yang dimiliki oleh Kota Kediri adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetap di kawasan Gunung Klotok yang berlokasi di bagian barat wilayah kota. Hutan lindung dan hutan produksi tetap dimaksud memiliki luas kawasan masing-masing 42 Ha dan 254 Ha. Selain berfungsi untuk menjaga keseimbangan neraca air dan produksi hasil hutan, Gunung Klotok sangat potensial untuk

dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis alam (ekowisata). Agar potensi ekonomi tersebut dapat dioptimalkan, sebagai langkah awal diperlukan kajian akademis yang mendalam agar pembangunan kepariwisataan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung menjadi salah satu dasar dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup. Untuk mendukung pembangunan daerah perlu memperhatikan hasil kajian daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem, sebagai berikut:

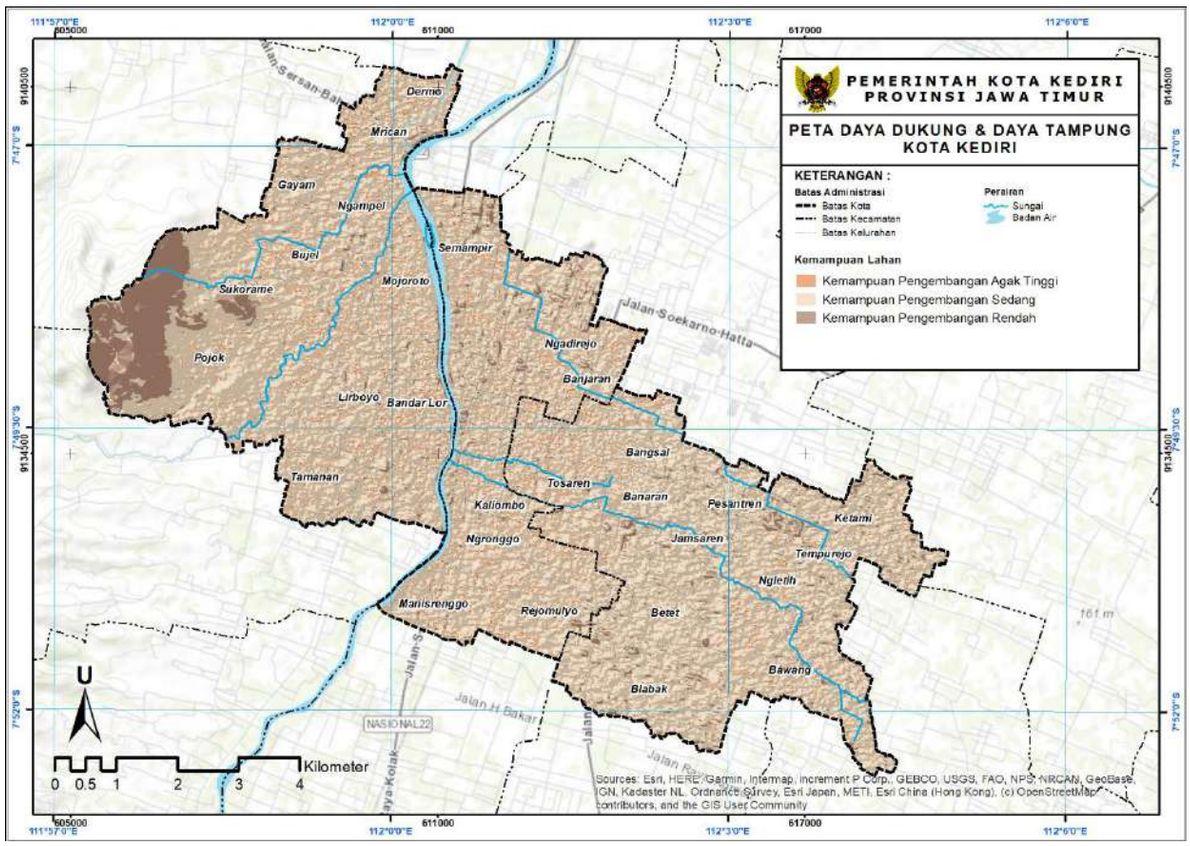
a. Jasa Ekosistem dipengaruhi oleh dua komponen penting yakni ekoregion dan tutupan lahan. Ekoregion yang mendominasi di Kota Kediri adalah Dataran Fluvio Gunung Api sebesar 6.028,39 Ha. Sedangkan penggunaan lahan di Kota Kediri yang mendominasi adalah pertanian yang luasnya mencapai 2.441,16 Ha dari total luas wilayah Kota Kediri.
b. Jasa ekosistem dapat digunakan untuk mengetahui potensi daya dukung dan daya tampung pada suatu wilayah. Kecamatan yang memiliki wilayah kategori I atau prioritas pertama paling besar adalah Kecamatan Mojoroto yang memiliki luasan wilayah prioritas I sebesar 596,26 hektar. Dengan demikian untuk wilayah yang mendapatkan prioritas dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan adalah Kecamatan Mojoroto.
c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem penyedia (penyedia pangan, penyedia air bersih, penyedia serat fiber, penyedia bahan bakar, dan penyedia sumber daya genetik) memiliki nilai jasa ekosistem yang

bervariasi. Jasa ekosistem penyedia pangan dominan pada kelas sangat tinggi, jasa ekosistem penyedia air bersih dominan pada kelas sangat tinggi, jasa ekosistem penyedia serat fiber dominan pada kelas sedang, dan jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik dominan pada kelas sedang.

d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem pengaturan memiliki dominan nilai sebagai berikut: pengaturan iklim memiliki nilai jasa ekosistem pada dominan kelas tinggi, pengaturan tata aliran air dan banjir pada kelas sedang, pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana pada kelas tinggi, pengaturan pemurnian air pada kelas tinggi, pengaturan pengolahan dan pengurai limbah pada kelas sangat tinggi, pengaturan pemeliharaan kualitas udara pada kelas sedang, pengaturan penyerbukan alami pada kelas sangat tinggi, dan pengaturan pengendalian hama penyakit pada kelas sangat tinggi.
e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem budaya memiliki dominan nilai sebagai berikut: jasa ekosistem budaya untuk permukiman dominan pada kelas sedang, untuk ekowisata pada kelas sangat rendah, untuk estetika alam pada kelas sedang, pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan pada kelas sedang, pendukung siklus hara pada kelas sangat tinggi, produksi primer pada kelas tinggi, dan pendukung keanekaragaman hayati pada kelas tinggi.

Peta daya dukung Kota Kediri untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 9 Peta Daya Dukung Kota Kediri



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Kediri Tahun 2025 – 2029 diperoleh hasil kondisi eksisting dan proyeksi daya dukung daya tampung Kota Kediri sebegai berikut:

1. Kebutuhan Air

   Data yang digunakan untuk proses perhitungan kebutuhan air tahun 2023, terdiri atas jumlah penduduk tahun 2023, luas penggunaan lahan dan jumlah ternak dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 yang disesuaikan menurut sumber Badan Pusat Statistik. Setiap jenis kegiatan mempunyai standar kebutuhan air yang berbeda sehingga perlu dilakukan konversi menjadi m^3/tahun. Hasil perhitungan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Perhitungan Kebutuhan Air Tahun 2023

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m^3/tahun)
Kecamatan Mojoroto	118.821	jiwa	120	5.022.704
Kecamatan Kota	86.752	jiwa	120	3.916.644
Kecamatan Pesantren	89.652	jiwa	120	3.991.507
Kota Kediri	295.225	jiwa	120	12.930.855
Uraian	**Besaran Luas Lahan**	**Satuan**	**Kebutuhan air (liter/detik/ha)**	**Kebutuhan air (m^3/tahun)**
Sawah	3.271,93	Ha	0,231	23.835.406,3
Kawasan Industri	596,97	Ha	0,75	14.119.490,93
Uraian	**Jumlah Ternak**	**Satuan**	**Kebutuhan air (liter/ternak/hari)**	**Kebutuhan air (m^3/tahun)**
Sapi	3.051	ekor	40	44.544,6
Kerbau	37	ekor	40	540,2
Kuda	6	ekor	40	87,6
Kambing	5.149	ekor	5	9.396,93
Domba	2.605	ekor	5	4.754,13
Unggas	345.590	ekor	0,6	75.684,21
Total				51.020.759,91

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Selanjutnya, Kebutuhan air pada tahun 2029 diperoleh melalui proyeksi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan, sedangkan kebutuhan air untuk ternak diasumsikan tetap. Luas penggunaan lahan dan jumlah ternak dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 yang disesuaikan menurut sumber Badan Pusat Statistik. Hasil perhitungan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Perhitungan Kebutuhan Air Tahun 2029

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m^3/tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk 2029	312.690	jiwa	120	13.695.822
Uraian	**Besaran Luas Lahan**	**Satuan**	**Kebutuhan air (liter/detik/ha)**	**Kebutuhan air (m^3/tahun)**
Sawah	3.271,93	Ha	0,231	23.835.406,30
Kawasan industry	596,97	Ha	0,75	14.119.490,93

Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m^3/tahun)
Sapi	3.051	ekor	40	44.544,60
Kerbau	37	ekor	40	540,2
Kuda	6	ekor	40	87,6
Kambing	5.149	ekor	5	9.396,93
Domba	2.605	ekor	5	4.754,13
Unggas	345.590	ekor	0,6	75.684,21
Total				51.785.726,9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air, daya dukung air Kota Kediri berstatus belum terlampaui pada tahun 2023 sampai dengan 2029. Peningkatan kebutuhan air pada tahun 2029 karena kenaikan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap bertambahnya kebutuhan air. Jumlah penduduk diproyeksikan mengalami kenaikan dari 295.225 jiwa pada tahun 2023 menjadi 312.690 jiwa pada tahun 2029.

Tabel 2. 10 Status Daya Dukung Air Permukaan Kota Kediri

No	Tahun	Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air (m^3)	Status
1	2023	59.589.131,50	51.020.759,91	Belum Terlampaui
2	2029	85.979.714,16	51.785.726,9	Belum Terlampaui

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan,2024

2. Daya dukung daya tampung lahan pertanian

Konsep daya dukung wilayah untuk lahan pertanian menerapkan ambang batas kritis daya dukung, yaitu jumlah populasi terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, daya dukung lahan pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani. Dengan demikian, data yang perlu diketahui meliputi luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum, dan produksi lahan rata-rata per hektar. Perhitungan daya dukung lahan pertanian dilakukan menurut daya dukung masing-masing kecamatan yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 11 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	Status
Mojoroto	118.821	458,90	480	5.688,69	0,05	Terlampaui
Kota	86.752	267,78	480	5.688,69	0,04	Terlampaui
Pesantren	89.652	785,30	480	5.688,69	0,10	Terlampaui
Kota Kediri	**295.225**	**1.511,98**	**480**	**5.688,69**	**0,06**	**Terlampaui**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kota Kediri tidak mampu melakukan swasembada pangan karena nilai daya dukung lahan pertanian <1 atau terlampaui.

b. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2029

Proyeksi daya dukung lahan pertanian pada tahun 2029 dihitung dengan memproyeksikan jumlah penduduk, sedangkan aspek-aspek lain diasumsikan bernilai tetap. Hasil perhitungan daya dukung lahan pertanian Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2029

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/ kapita/ th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	Status
Mojoroto	124.972	458,90	480	5.688,69	0,04	Terlampaui
Kota	92.450	267,78	480	5.688,69	0,03	Terlampaui
Pesantren	95.268	785,30	480	5.688,69	0,10	Terlampaui
Kota Kediri	**312.690**	**1.511,98**	**480**	**5.688,69**	**0,08**	**Terlampaui**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kota Kediri mempunyai nilai daya dukung lahan pertanian 0,08. Dengan demikian, Kota Kediri tidak mampu melakukan swasembada pangan karena nilai daya dukung lahan pertanian <1 atau **terlampaui**.

3. Daya dukung lahan terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, upaya pemenuhan rumah yang layak huni melalui kumpulan rumah sebagai bagian dari Daya Dukung Lahan Permukiman baik dan masih mampu mendukung permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Kota Kediri mempunyai karakteristik kepadatan penduduk cukup tinggi karena luas wilayah yang relatif kecil. Pusat kegiatan berada di Kecamatan

Kota dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap daripada kecamatan lain sehingga mempunyai daya tarik lebih tinggi. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas layanan perlu dilakukan secara merata. Adapun daya dukung lahan permukiman Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. 13 Daya Dukung Lahan Permukiman Kota Kediri Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Infrastruktur (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	Koefisien Bangunan	DDL Bangunan	Keterangan
1	Mojoroto	2.695	687,17	206,151	893,321	0,7	2,11	Sedang
2	Kota	1.596	486,60	145,980	632,580	0,7	1,77	Sedang
3	Pesantren	2.432	486,60	145,980	632,580	0,7	2,69	Sedang
Kota Kediri		**6.723**	**1.660,37**	**498,111**	**2.158,481**	**0,7**	**2,18**	**Sedang**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan nilai daya dukung lahan bangunan (DDLB) di masing-masing kecamatan dan Kota Kediri secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang atau bersyarat. Kecamatan Kota mempunyai luas bangunan sama dengan Kecamatan Pesantren, namun luas wilayah lebih kecil daripada Kecamatan Pesantren. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai DDLB Kecamatan Kota menjadi yang terendah di Kota Kediri.

Untuk mengetahui kemampuan lahan dalam mendukung penggunaan lahan permukiman, dilakukan proyeksi daya dukung lahan bangunan. Proyeksi didasarkan atas jumlah penduduk pada tahun 2029 untuk menghitung proyeksi jumlah rumah tangga yang mencerminkan kebutuhan jumlah rumah dan luas lahan. Koefisien jumlah rumah tangga sebesar 3,04 menurut Badan Pusat Statistik, sedangkan kebutuhan luas lahan per unit rumah adalah 100 m^2 menurut SNI 03-1733-2004. Berdasarkan hasil proyeksi, daya dukung lahan bangunan tahun 2029 mempunyai kategori sedang di Kecamatan Kota, sedangkan kecamatan lain dan Kota Kediri secara keseluruhan berkategori baik. Oleh karena itu, Kota Kediri perlu menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pembangunan lahan terbangun sehingga kemampuan lahan dapat berkelanjutan pada masa mendatang.

Tabel 2. 14 Daya Dukung Lahan Bangunan Kota Kediri Tahun 2029

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga/Rumah (Unit)	Luas Bangunan (Permukiman) (Ha)	Luas Lahan Infrastruktur (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	Koefisien Bangunan	DDL Bangunan
Mojoroto	2.695	124.972	41.109	411,09	123,33	534,42	0,7	3,53
Kota	1.596	92.450	30.411	304,11	91,23	395,35	0,7	2,83
Pesantren	2.432	95.268	31.338	313,38	94,01	407,40	0,7	4,18
Kota Kediri	**6.723**	**312.690**	**102.859**	**1.028,59**	**308,58**	**1.337,16**	**0,7**	**3,52**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

4. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung adalah kemampuan lingkungan alami untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologisnya. Seperti menjaga keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan udara, serta melindungi tanah dari erosi. Ada 5 kategori tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung yaitu Sangat Rendah (0-0,20); Rendah (0,20-0,40); Sedang (0,40-0,60), Baik (0,60-0,80) dan Sangat Baik (0,80-1). Untuk menghitungnya menggunakan metode Rushton sebagai berikut:

$$DDL = \frac{\Sigma Lgl1.a1 + Lgl2.a2 + Lgl3.a3 + \ldots + Lgln.an}{LW}$$

Keterangan:

DDL = daya dukung fungsi lindung

Lgln = luas guna lahan jenis n (ha)

an = koefisien lindung untuk guna lahan

LW = luasan wilayah (ha)

Luas Guna Lahan jenis n diperoleh dari dokumen KLHS perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan luas wilayah dalam Kota Kediri Dalam Angka 2024. Hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 15 Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Kediri Tahun 2023

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Lgln)	Luas (%)	Koefisien Lindung (an)	(Lgln x an)
Permukiman	1.741,13	25.90%	0,18	313,40
Perdagangan dan Jasa	157,95	2.35%	0,18	28,43
Perkantoran	102,40	1.52%	0,18	18,43
Pelayanan Umum	148,84	2.21%	0,18	26,79
Industri dan Pergudangan	187,26	2.79%	0,18	33,71
Pariwisata	6,52	0.10%	0,18	1,17
Ruang Terbuka Non Hijau	63,51	0.94%	0,1	6,35
Ruang Terbuka Hijau	34,14	0.51%	0,5	17,07
Peruntukan Sektor Informal	0,52	0.01%	0,18	0,09
Pertanian	3.271,93	48.67%	0,46	1.505,09
Ladang/Kebun Campur	677,41	10.08%	0,21	142,26
Hutan	173,30	2.58%	1	173,30
Kawasan Militer	26,86	0.40%	0,18	4,84
Stasiun	0,05	0.00%	0,18	0,01

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Lgln)	Luas (%)	Koefisien Lindung (an)	(Lgln x an)
TPA dan IPLT	1,17	0.02%	0,18	0,21
Terminal	2,94	0.04%	0,18	0,53
Sungai	127,07	1.89%	0,98	124,53
Total	**6.723**	**100%**	**∑ (lgn x an)**	**2.396,20**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

DDL Fungsi Lindung = 2.396,20 / 6.723 = **0,36**

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kota Kediri mempunyai daya dukung fungsi lindung yang tergolong dalam kelas rendah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kapasitas lingkungan dalam mendukung fungsi lindung (seperti resapan air, penyediaan ruang hijau, dan perlindungan ekosistem) tidak sebanding dengan tekanan aktivitas manusia yang terjadi. Dengan kata lain, kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dapat disimpulkan bahwa saat ini Kota Kediri lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Daya dukung rendah juga merupakan indikator peringatan dini bahwa fungsi lindung kota sudah jauh berkurang dan perlu segera dipulihkan.

5. Daya tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini adalah sebuah kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Perbandingan daya dukung lahan (A) dengan konsumsi lahan dapat digambarkan jika nilai A lebih besar daripada nilai konsumsi lahan yang ditentukan maka populasi penduduk telah melebihi daya dukung lingkungannya (lebih dari ambang batas). Nilai daya dukung lahan ditunjukkan melalui konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran populasi kota. Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 hasil perhitungan daya tampung wilayah Kota Kediri Tahun 2023 menggunakan rumus sebagai berikut:

L = 6.723 ha (BPS Kota Kediri)

P (2023) = 295.225 jiwa (Registrasi Penduduk, BPS Kota Kediri)

A (2023) = L / P = 6.723 / 295.225 = 0,023 ha/jiwa

Dengan demikian, daya tampung wilayah Kota Kediri pada tahun 2023 sebesar 0,023 ha/jiwa dan daya tampung pada tahun 2024 adalah 0,022 (=6.723/298.230). Kemampuan suatu wilayah untuk

menyediakan lahan permukiman bagi penduduknya perlu diketahui keberlanjutannya. Untuk mengetahui daya tampung wilayah Kota Kediri pada tahun-tahun selanjutnya, proyeksi perlu dilakukan menggunakan data proyeksi jumlah penduduk dan mengasumsikan luas lahan tetap sama dengan tahun sebelumnya. Hasil perhitungan proyeksi daya tampung wilayah Kota Kediri tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan Tahun 2025 – 2029

No	Kecamatan	Daya Tampung Wilayah				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Mojoroto	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
2	Kota	0,018	0,018	0,018	0,017	0,017
3	Pesantren	0,027	0,026	0,026	0,026	0,026
Kota Kediri		**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**	**0,022**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan daya tampung wilayah di Kota Kediri pada tahun 2025 sebesar 0,022 ha/jiwa sampai tahun 2029 menunjukkan nilai yang sama. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan standar kriteria Yeates, Kota Kediri memiliki daya tampung wilayah yang sudah terlampaui untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2029.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri, stabil, dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan dukungan ketersediaan air untuk irigasi dan energi untuk produksi, pengolahan, hingga distribusi pangan.

1) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan

di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan tiga aspek, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan konsumsi pangan. Adapun IKP dihitung mulai tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2024 terdapat kenaikan sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 2. 17 Indeks Ketahanan Pangan Kota Kediri

Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	71,16	68,60	73,95	76,42	76,67

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Peningkatan nilai IKP menunjukkan bahwa Kota Kediri secara umum telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga indikator penting dari kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini dikarenakan adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor pertanian, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan berkelanjutan dalam aspek pangan. Dengan upaya terus-menerus Kota Kediri dapat memperkuat posisinya sebagai wilayah yang memiliki ketahanan pangan yang baik.

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat (FAO, 2021). Selanjutnya, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment* atau PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. PoU dihitung sebagai persentase populasi yang konsumsinya di bawah *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER). MDER populasi digunakan sebagai proksi ambang batas (*threshold*) dan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari persyaratan energi minimum untuk setiap kelompok usia dan jenis kelamin dalam populasi (Wanner et al., 2014). Indikator PoU selaras dengan tujuan kedua SDGs yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*).

Inti dari tujuan ini adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Bappenas, 2017).

Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan bagian dari masalah ketahanan pangan. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2021), terdapat tiga aspek yang menjadi pilar ketahanan pangan diantaranya aspek keterjangkauan pangan, aspek ketersediaan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat dua aspek yang relevan terhadap faktor yang mempengaruhi ketidakcukupan konsumsi pangan yaitu aspek keterjangkauan pangan dan aspek ketersediaan pangan. Adapun angka PoU Kota Kediri tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 18 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	7.19	6.37	6.41	6.6	5.31

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2020 PoU Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 1,32% hal tersebut dikarenakan terdapatnya pandemi Covid-19. Sementara itu, selama rentang tahun 2021 – 2023, PoU cenderung stagnan pada angka 6%, hal tersebut dikarenakan Kota Kediri yang secara reguler melaksanakan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat.

3) Konsumsi Listrik

Konsumsi listrik dihitung berdasarkan penggunaan energi listrik oleh individu, rumah tangga, bisnis, industri, dan sektor lainnya untuk menjalankan berbagai aktivitas dan peralatan yang bergantung pada tenaga listrik. Konsumsi listrik sering kali digunakan sebagai indikator efisiensi energi, tingkat perkembangan ekonomi, serta pola konsumsi energi di suatu negara atau daerah. Peningkatan konsumsi listrik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, perkembangan teknologi, serta pola konsumsi yang semakin canggih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, jumlah produksi

listrik di Kota Kediri setiap tahunnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah listrik terjual.

Tabel 2. 19 Konsumsi Listrik Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggan PLN	94.240	96.463	99.787	100.780	121.883
Listrik terjual (KWh)	336.859.952	350.284.371	335.446.663	30.610.017	494.730.848

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

4) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana masyarakat di wilayah perkotaan dapat menikmati layanan air minum berkualitas yang dialirkan langsung ke rumah melalui jaringan perpipaan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dengan jumlah total rumah tangga di daerah perkotaan. Melalui indikator ini, dapat terlihat ketersediaan infrastruktur dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mencerminkan efektivitas penyediaan layanan publik di sektor air minum.

Pada periode tahun 2020 hingga 2023, belum tersedia hasil perhitungan terhadap indikator ini, sehingga data yang dapat dijadikan acuan masih kosong. Oleh karena itu, untuk menetapkan baseline dalam perencanaan target pada tahun 2025–2030, dilakukan perhitungan awal pada tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 22,34% rumah tangga perkotaan yang telah memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. Angka ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi peningkatan cakupan layanan air minum di masa mendatang, sekaligus menegaskan perlunya langkah terukur untuk memperluas jangkauan sistem perpipaan agar lebih banyak rumah tangga dapat merasakan manfaatnya.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikembangkan secara nasional mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan Indeks Lingkungan Berbasis Wilayah

(kabupaten/kota/provinsi). Indikator ini menjadi acuan bagi semua pihak sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan dan program kinerja perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Target peningkatan dari IKLH akan mencakup keseluruhan sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air dan udara untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih. Pengetahuan akan kondisi kualitas lingkungan hidup akan membantu pengalokasian sumber daya alam secara lebih akurat agar penggunaannya lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Secara umum, selama 5 (lima) tahun kualitas lingkungan hidup di Kota Kediri terus meningkat karena adanya pembinaan pelaku usaha untuk melengkapi usahanya dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) agar outlet air limbah menuju sungai telah sesuai baku mutu dan adanya kegiatan *Car Free Day*, maupun gerakan penanaman pohon yang meningkatkan kualitas udara. Adapun capaian IKLH dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	-	61.06	63.59	65.38	65.26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2024

a) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) digunakan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Pemantauan kualitas air dilakukan pada sungai utama dengan 7 (tujuh) parameter, yakni TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Coliform. Kota Kediri memiliki nilai IKA yang menunjukkan tren fluktuatif karena masih tingginya tingkat pencemaran. Semakin beragamnya aktivitas masyarakat setiap tahunnya menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan air, begitu pula pada tingkat kualitas air. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kegiatan sehari-hari masyarakat Kota Kediri masih sangat tinggi dalam pemanfaatan air. Pengukuran IKA dilakukan dengan membandingkan jumlah sampel air sungai yang tercemar dengan jumlah sampel yang diambil. Dari 43 (empat puluh tiga) sampel titik air sungai yang diuji disimpulkan bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan)

sampel memenuhi baku mutu, sebanyak 9 (sembilan) sampel tercemar ringan, sebanyak 6 (enam) sampel tercemar sedang dan untuk yang tercemar berat nihil (0) sampel. Adapun IKA Kota Kediri selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 21 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	-	50	58.24	62.86	62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri 2025

Faktor penghambat peningkatan indeks kualitas air adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri untuk tidak membuang sampah ke sungai, penggunaan pupuk kimia yang tidak hanya berasal dari wilayah Kota Kediri namun dimulai dari hulu Sungai Brantas dan juga masih ada pelaku usaha yang belum mengolah limbahnya sesuai baku mutu air sebelum dibuang melalui saluran drainase yang bermuara ke sungai. Sedangkan faktor pendukung peningkatan indeks kualitas air adalah adanya gerakan bersih sungai dan pemantauan rutin, serta upaya peningkatan wawasan pelaku usaha serta pengendalian limbah industri.

b) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara, yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Peningkatan kualitas udara sangat penting karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Semakin kecil kadar SO2 dan NO2 maka akan semakin tinggi nilai IKU di suatu daerah. Adapun IKU Kota Kediri selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 22 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	-	90.11	88.34	88.44	88.95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 2025

Faktor pendukung peningkatan IKU adalah adanya kegiatan *Car Free Day*, pelarangan pembakaran sampah dan adanya upaya penanaman pohon.

Sedangkan faktor penghambat adalah semakin banyaknya kendaraan bermotor, adanya perubahan iklim dan masih rendahnya luasan RTH publik.

c) Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Indeks kualitas tutupan lahan digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah yang mempertimbangkan aspek konservasi dan rehabilitasi yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan mulai dari tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Sedangkan untuk indeks kualitas ekosistem gambut tidak dihitung karena tidak ada lahan gambut di Kota Kediri.

IKL digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan maupun program untuk memperbaiki kualitas lahan yang buruk. Semakin tinggi nilai IKL menunjukkan kemampuan dan kualitas lahan yang paling baik dan stabil. IKL Kota Kediri meningkat signifikan dampak penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, di mana lahan sawah perkotaan yang ditetapkan sebagai sawah abadi dapat dianggap sebagai sabuk hijau kota. Hasil pengukuran IKL Kota Kediri tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 23 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKL	-	26.31	27.02	27.08	27.07

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2024

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), rumah tangga dengan akses sanitasi aman merujuk pada rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Rumah

tangga dengan akses sanitasi aman dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki toilet layak dengan kloset leher angsa terhubung ke sistem pengelolaan limbah yang aman dan dilakukan penyedotan secara berkala serta tidak mencemari sumber air.

Sejauh ini, Kota Kediri belum melakukan perhitungan rumah tangga dengan akses sanitasi aman. Hingga 2024, penghitungan baru dilakukan terhadap rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Untuk menuju rumah tangga dengan akses sanitasi aman, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Campurejo. Selain itu telah dilakukan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) pada tahun 2024.

Tabel 2. 24 Persentase Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	-	-	8,27%	5,16%	6,47%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

3) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai upaya dilakukan, salah satunya melalui fasilitas pengolahan sampah yang berfungsi mengelola dan mengurangi timbulan sampah sebelum berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kediri dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui penanganan dan pengurangan sampah.

Mengacu kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah, target pengurangan sampah di Kota Kediri ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan berkurangnya volume sampah menuju TPA, maka diharapkan TPA dapat berumur lebih panjang dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.

Sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah merupakan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku. Bentuk pengolahan dapat berupa daur ulang, pengomposan maupun pengolahan lainnya. Adapun data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 25 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020 - 2024

Pengelolaan sampah	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Timbulan Sampah (ton/ tahun)	55.091,09	61.812,13	65.183,70	63.461,92	66.532,27
Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan *upcycle)* (ton/ tahun)	1.574,61	669,04	679,63	623,05	477,16
Persentase sampah terolah	2,86%	1,08%	1,04%	0,98%	0,72%

Sumber : Kementerian LHK, 2025

4) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Sistem pengelolaan sampah yang efektif merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu aspek utama dalam sistem ini adalah proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, yang menunjukkan sejauh mana akses masyarakat terhadap layanan pengangkutan sampah yang terorganisir dan berkelanjutan.

Layanan penuh pengumpulan sampah mengacu pada sistem di mana sampah rumah tangga dikumpulkan secara teratur oleh petugas kebersihan atau instansi terkait, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Sampah yang dikumpulkan kemudian disalurkan ke fasilitas pengolahan atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar lingkungan.

Adapun capaian proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Proporsi Rumah tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	75.44	78.04	77.52	85.03	89.98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2025

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Perubahan Iklim

1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (kumulatif)

Perubahan iklim telah menjadi tantangan pembangunan global. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak sekaligus turut serta sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Dengan dasar pertimbangan tersebut, pemerintah mengambil peran aktif dalam negosiasi internasional dengan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan 41% dengan kerja sama internasional di tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh (a) kementerian/lembaga, (b) pemerintah daerah, (c) pelaku usaha, dan (d) masyarakat. Peran dan komitmen pemerintah daerah merupakan hal yang krusial dalam mengarusutamakan perubahan iklim. Kota-kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi penduduk secara geografis merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca sekaligus yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) kemudian diturunkan ke daerah berupa Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Kota Kediri telah menyusun Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2024, sehingga diharapkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun upaya penurunan emisi karbon telah dilakukan dan telah dilaporkan dalam Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) dari Bappenas yang telah dimonitor dan

dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sampai tahun 2024 nilai kumulatif Kota Kediri dapat melakukan penurunan potensi emisi gas rumah kaca sebesar 1.247.635,34 Ton CO2Eq atau berkontribusi 6.37% pada capaian Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan yang tersebar di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.

Inventarisasi gas rumah kaca merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai risiko perubahan iklim. Adapun penyebab dari terjadinya gas rumah kaca yaitu cahaya matahari yang tidak mampu memantulkan sinarnya secara sempurna keluar atmosfer bumi sehingga menyebabkan pemanasan global. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional pada pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa walikota wajib melakukan inventarisasi gas rumah kaca untuk pencapaian *Nationally Determined Contributions* (NDC). Adapun hasil perhitungan GRK di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 27 Capaian Penurunan Emisi GRK Kota Kediri (Kumulatif) Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif (ton CO2 Eq)	599,487.12	614,006.17	1,238,712.29	1,247,527.31	1,247,635.36

Sumber: Bappenas, 2025

2) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator strategis dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana, serta mencerminkan tingkat kapasitas daerah dalam melakukan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023, memiliki lima jenis bencana utama yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan berbasis kebencanaan, yaitu:

1. Banjir – Risiko tinggi khususnya di wilayah bantaran Sungai Brantas dan aliran sekunder seperti selokan dan saluran air dengan luas

terdampak mencapai 2.994,74 ha. Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren adalah wilayah paling rentan.

2. Tanah Longsor – Risiko tinggi terutama di wilayah perbukitan Kecamatan Mojoroto, seperti Gunung Klotok di Kelurahan Pojok, dengan luas risiko sekitar 353,52 ha. Longsor dipicu oleh kemiringan lereng curam, jenis tanah aluvial, dan degradasi lingkungan .
3. Cuaca Ekstrem – Risiko sedang, meliputi kejadian seperti angin puting beliung yang cukup sering terjadi di wilayah terbuka dan perbukitan. Luas wilayah terdampak mencapai 6.719,95 ha.
4. Kekeringan – Risiko sedang, berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan suplai air. Kekeringan terjadi terutama saat musim kemarau panjang dan berpotensi diperparah oleh perubahan iklim serta degradasi vegetasi penutup tanah .
5. Gempa Bumi – Meskipun tidak terjadi secara intensif, namun dikategorikan sebagai risiko sedang karena posisi Kota Kediri yang tidak jauh dari wilayah seismik aktif di Jawa Timur.

Tingkat kerawanan dari masing-masing jenis bencana tersebut tercermin dalam nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri yang dihitung berdasarkan data bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nilai IRB Kota Kediri menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif namun cenderung membaik, seiring peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana. Berikut grafik Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dengan basis data bahaya/ *Hazard* (H) dan kerentanan/ *Vulnerability* (V) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2011:

Grafik 2. 1 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024



Sumber: BPBD Kota Kediri, 2025

Pada tahun 2021, BNPB melakukan pemutakhiran data H dan V, sehingga pada tahun 2023-2024 nilai Indeks Risiko Bencana dihitung dengan menggunakan basis data H dan V baru. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2024 dengan menggunakan data H dan V Tahun 2021 adalah:

Tabel 2. 28 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2024

No	Provinsi/Kota	2023	2024
1.	Provinsi Jawa Timur	121,05	113,70
2.	Kota Kediri	64,82	73,21

Sumber: BPBD Kota Kediri, 2025

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024-2044, kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Ada 4 (empat) kawasan rawan bencana di Kota Kediri yaitu :

1. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi
2. Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
3. Kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi;
4. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi.

Menyikapi kawasan rawan bencana tersebut, dalam pengembangan kawasan strategis kota menerapkan strategi salah satunya adalah melindungi kawasan rawan bencana dengan ketentuan khusus rencana pola ruang di kawasan bencana dan perwujudan kawasan infrastruktur kota untuk jaringan evakuasi bencana yang terdiri dari:

a. pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
b. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
c. pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan sistem jaringan jalan yang ada;
d. penyediaan tempat evakuasi bencana;
e. pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES);
f. pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA);
g. memberikan rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju tempat evakuasi bencana;
h. sosialisasi dan pelatihan evakuasi bencana.

3) Indeks Ketahanan Daerah

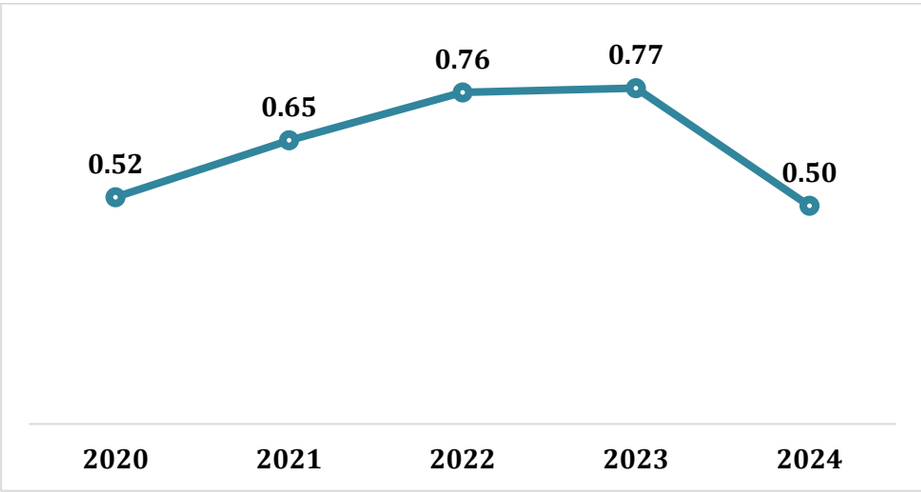
Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana (IKD) menggambarkan ketahanan suatu daerah terhadap risiko bencana yang ada. Formula indikator yang digunakan untuk menghitung Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana adalah rata-rata jumlah indeks skala prioritas. Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana. Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana berpedoman pada 7 (tujuh) prioritas, yaitu:

a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;
b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik;
d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Pada Tahun 2024 Kota Kediri mencapai IKD sebesar 0,50 (sedang) mengalami penurunan sebesar 0,27 poin bila dibandingkan dengan IKD Tahun 2023 sebesar 0,77. Berikut grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri Tahun 2020-2024 :

Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber: BPBD Kota Kediri, 2025

2.1.1.7 Demografi

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik). Data terkait kependudukan sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan program, optimalisasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan di masa mendatang, hingga pengalokasian anggaran dalam suatu wilayah.

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dengan metode pencatatan setiap penduduk dari rumah ke rumah. Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) merupakan pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia yang menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar pelaksanaan

SP2020 sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk dapat memberikan eksternalitas positif dan negatif bagi suatu wilayah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan perekonomian wilayah. Namun pertambahan penduduk yang berlebihan berpotensi menimbulkan permasalahan seperti tekanan penduduk dan lingkungan yang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian dan kerusakan lingkungan akibat tingginya kepadatan pemukiman dan perilaku manusia yang tidak peduli dengan lingkungan, kemiskinan sebagai akibat keterbatasan penduduk dalam mengakses kebutuhan ekonomi dan pelayanan dasar; pengangguran sebagai akibat kesenjangan ketersediaan lapangan kerja dan kebutuhan pencari kerja; serta daerah rawan pangan sebagai akibat kesenjangan tingginya kebutuhan pangan dengan produksi pangan untuk seluruh penduduk. Selain itu pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan akan barang, jasa, tempat tinggal, serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan upaya penataan ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung agar memastikan kebutuhan dasar penduduk tersedia.

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang terus berkembang di Provinsi Jawa Timur, dengan dinamika demografi yang mencerminkan potensi besar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun perlu untuk mendapat perhatian utama yang harus dioptimalkan kualitasnya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, struktur demografi Kota Kediri didominasi oleh kelompok usia produktif yang berperan sebagai motor penggerak utama pembangunan. Komposisi ini memberikan keuntungan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, serta memperluas basis ekonomi kreatif dan sektor industri mikro, kecil dan menengah.

Namun untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk dapat menjadi modal utama dalam pembangunan, diperlukan perencanaan strategis yang berkelanjutan. Penyediaan lapangan kerja, peningkatan

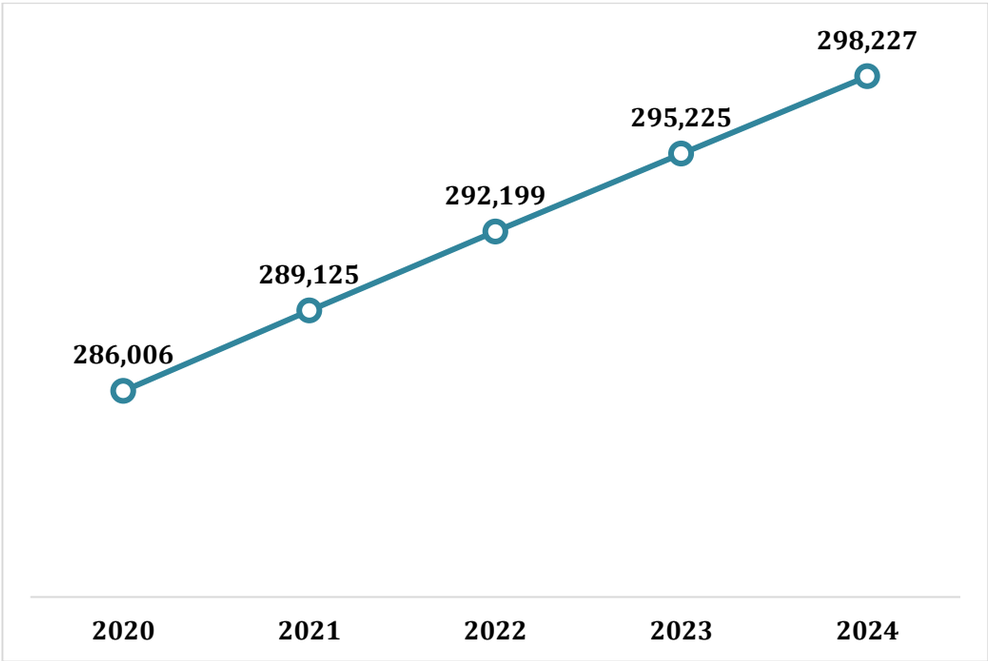
kualitas pendidikan dan keterampilan, serta optimalisasi infrastruktur dan layanan dasar menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Bonus demografi dan jumlah penduduk yang besar bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang strategis bagi Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kondisi demografi Kota Kediri dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang dapat menggambarkan angka ketergantungan (*dependency ratio*) dan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebagaimana penjelasan dibawah ini.

1) Jumlah Penduduk

Penduduk dengan segala dimensinya merupakan potensi terbesar dalam pembangunan, karena mereka merupakan penggerak utama dari setiap aspek pembangunan. Pembangunan yang berhasil adalah yang mampu memanfaatkan potensi penduduk secara maksimal dan memastikan kesejahteraan mereka terpenuhi. Potensi penduduk merupakan gabungan antara jumlah (aspek kuantitatif) dan kualitas penduduk. Secara kuantitas, tren peningkatan jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh grafik dibawah ini.

Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Kediri dipengaruhi oleh jumlah kelahiran (natalitas) yang lebih besar daripada jumlah kematian (mortalitas), sebaliknya penurunan jumlah penduduk Kota Kediri dapat dipengaruhi oleh jumlah kematian (mortalitas) lebih besar daripada jumlah kelahiran (natalitas). Selain itu dinamika jumlah penduduk dapat terjadi karena adanya perpindahan (migrasi) penduduk.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Situasi kependudukan di Kota Kediri menunjukkan kecenderungan pertambahan yang semakin melambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri cenderung stabil dengan rata-rata peningkatan dalam lima tahun terakhir sebesar 0,01. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2020-2024 dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri (dalam jiwa) Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Selisih Penduduk 2 Tahun terakhir	Laju Pertumbuhan Penduduk
2020	286.006	N/A	N/A
2021	289.125	3.119	0,0109
2022	292.199	3.074	0,0106
2023	295.225	3.026	0,0104
2024	298.227	3.002	0,0102

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

3) Kepadatan Penduduk

Perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah administrasi menentukan tingkat kepadatan penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk di wilayah dengan luas yang sempit, maka kepadatan penduduk akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Untuk mengetahui kepadatan penduduk Kota Kediri pada masing-masing wilayah Kecamatan, digunakan pendekatan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Semester II/2024 sebanyak 301.424 jiwa sebagaimana terinci dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 30 Kepadatan Penduduk Kota Kediri Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Mojoroto	117.448	38,96	26,95	4.358
2	Kota	90.896	30,16	15,96	5.695
3	Pesantren	93.080	30,88	24,33	3.826
Kota Kediri		**301.424**	**100,00**	**67,23**	**4.483**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, DKB Semester 2/2024

Tabel diatas menunjukkan kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2024 sebanyak 4.483 jiwa/km^2 dan Kecamatan Kota merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk mencapai 5.695 jiwa/km^2, diikuti oleh Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.

4) Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2020-2024 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 31 Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024 (jiwa)

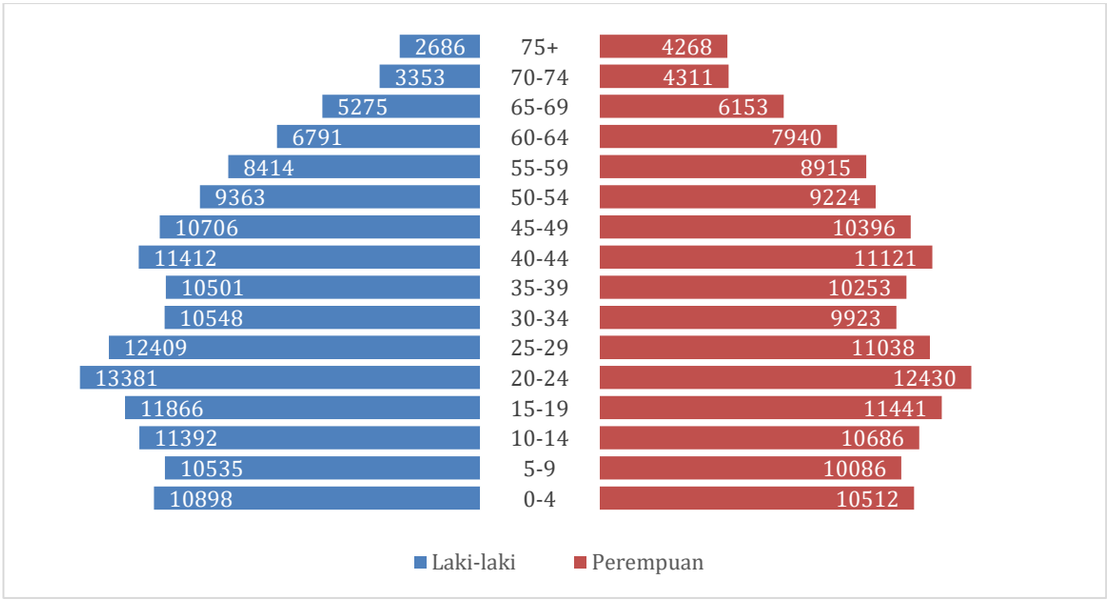
Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	20.830	20.918	21.111	21.328	21.410
5-9	21.697	21.459	21.104	20.755	20.621
10-14	22.478	22.187	22.083	22.083	22.078
15-19	25.393	25.121	24.602	23.943	23.307
20-24	23.894	24.532	25.106	25.559	25.811
25-29	20.785	21.301	21.953	22.694	23.447
30-34	20.451	20.248	20.180	20.252	20.471
35-39	22.482	22.181	21.737	21.226	20.754
40-44	21.678	22.050	22.335	22.505	22.533
45-49	19.057	19.473	19.990	20.554	21.102
50-54	17.982	18.181	18.304	18.414	18.587
55-59	15.792	16.210	16.615	16.997	17.329
60-64	12.890	13.379	13.849	14.300	14.731

Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
65-69	9.446	9.983	10.488	10.961	11.428
70-74	5.541	6.043	6.584	7.137	7.664
75+	5.610	5.859	6.158	6.517	6.954
Jumlah	**286.006**	**289.125**	**292.199**	**295.225**	**298.227**

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

Komposisi penduduk Kota Kediri dalam piramida penduduk dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 4 Piramida Penduduk Kota Kediri Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

Sebagaimana grafik piramida penduduk di atas, Kota Kediri memiliki struktur piramida penduduk yang berbentuk ekspansif atau piramida penduduk muda, dimana jumlah penduduk usia muda yang lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk usia produktif yaitu penduduk berusia 15-64 tahun yang mencapai 69,77% pada tahun 2024 menunjukkan dominasi usia kerja. Sedangkan penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk berusia 0-14 tahun dan penduduk berusia 65 tahun ke atas sebanyak 90.155 jiwa atau 30,23% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia 0–14 tahun sebesar 21,50% berarti akan terjadi regenerasi tenaga kerja dalam waktu dekat, dan penduduk lansia yang relatif kecil (8,73%) menunjukkan beban ketergantungan lansia belum terlalu tinggi saat ini, namun perlu diantisipasi dalam jangka panjang.

Sehingga berdasar data tersebut dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan yaitu perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif di Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar 43,33%. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 43 orang penduduk usia tidak produktif. Perkembangan rasio ketergantungan selama lima tahun terakhir di Kota Kediri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 32 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Usia Produktif (15-64 th)		Usia Tidak Produktif				Rasio Ketergan-tungan (%)
	Jumlah	%	Usia belum produktif (0-14 th)	Usia Lanjut (> 64 th)	Jumlah	%	
2020	200.404	70,06	65.005	20.597	85.602	29,93	42,71
2021	202.676	69,96	64.564	21.885	86.449	29,90	42,65
2022	204.671	69,84	64.298	23.230	87.528	29,95	42,77
2023	206.444	69,93	64.166	24.615	88.781	30,07	43,00
2024	208.072	69,77	64.109	26.046	90.155	30,23	43,33

Sumber : BPS Kota Kediri (Data Diolah), 2025

Berdasar struktur usia dan rasio ketergantungan yang ditunjukkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa Kota Kediri sedang menikmati masa bonus demografi. Hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan yang rendah dibawah 50% dan proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Hal ini sangat menguntungkan karena dominasi penduduk usia produktif yang besar berpotensi menyediakan tenaga kerja yang melimpah sebagai motor penggerak pembangunan di Kota Kediri. Rasio ketergantungan rendah memberi peluang yang lebih besar untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang produktif.

Berdasar hasil proyeksi penduduk Kota Kediri, potensi bonus demografi akan berlanjut hingga 2035 dengan rasio ketergantungan mencapai 49,24%. Saat ini bonus demografi telah mencapai puncaknya pada fase jendela peluang (*window of opportunity*). Ini merupakan momen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu didukung dengan perencanaan dan intervensi lintas sektor yang efektif agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi di masa depan. Tantangan yang dihadapi seperti ketersediaan lapangan kerja, harus mampu menyerap penduduk usia produktif agar tidak

terjadi pengangguran terbuka, SDM harus dijamin kualitasnya baik pendidikan, keterampilan, maupun kesehatan agar dapat menghasilkan dividen ekonomi, serta tantangan agar bersiap diri menghadapi *aging population* untuk transisi menuju masyarakat menua dalam jangka panjang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu adanya upaya peningkatan keterampilan dan kualitas SDM melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi agar penduduk usia produktif terus kompetitif, penciptaan lapangan kerja dan dukungan terhadap UMKM, penguatan layanan kesehatan dan gizi anak dalam upaya menjamin generasi mendatang tumbuh optimal dan siap menjadi angkatan kerja berkualitas, pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, serta penting kiranya menyiapkan kebijakan ramah lansia yang berfokus pada lansia berdaya yang sehat, aktif dan produktif sesuai kapasitasnya, baik dari sisi perlindungan sosial, kesehatan maupun pemberdayaan.

5) Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio*

Karakteristik penduduk yang penting selain struktur umur adalah proporsi jenis kelamin yang berpengaruh terhadap proses demografi dan perubahan perilaku sosial ekonomi penduduk sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan kependudukan suatu daerah. Komposisi penduduk Kota Kediri berdasar jenis kelamin selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 33 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	*Sex Ratio*
	Jiwa	%	Jiwa	%		
2020	143.220	50,08	142.786	49,92	286.006	100,30
2021	144.840	50,10	144.285	49,90	289.125	100,38
2022	146.434	50,11	145.765	49,89	292.199	100,46
2023	147.985	50,13	147.240	49,87	295.225	100,51
2024	149.530	50,14	148.697	49,86	298.227	100,56

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa berdasar data BPS hasil SP2020, tren peningkatan jumlah penduduk laki-laki terus meningkat, sedangkan

tingkat pertumbuhan penduduk perempuan fluktuatif. Apabila jumlah penduduk laki-laki diperbandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, maka diperoleh *sex ratio* penduduk Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar 100,56. *Sex ratio* > 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan atau terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kota Kediri. Sementara itu secara administratif, *sex ratio* per wilayah Kecamatan di Kota Kediri berdasar Data Konsolidasi Bersih Semester II/2024 Dispendukcapil mendekati angka 100 atau menuju keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Data rasio jenis kelamin memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender, terutama dalam memastikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara adil dan berkelanjutan.

Tabel 2. 34 Sex Ratio di Kota Kediri Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020[1]	2021[2]	2022[2]	2023[3]	2024[4]
1	Mojoroto	103,85	104,00	103,45	98,66	98,81
2	Kota	96,61	97,00	96,83	97,29	97,54
3	Pesantren	99,38	98,00	99,42	99,56	99,53
Kota Kediri		**100,30**	**100,00**	**100,00**	**98,52**	**98,64**

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri
Catatan :
[1]Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)
[2]Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Juni)
[3]Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2023
[4]Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2024

6) Proyeksi Penduduk Lima Tahun Mendatang

Berdasar data proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) hasil SP 2020, jumlah penduduk Kota Kediri dalam lima tahun mendatang menunjukkan laju yang semakin melambat dengan rata-rata pertumbuhan konsisten sebesar 0,01. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan mengalami tren peningkatan dengan kenaikan jumlah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Akibatnya, rasio jenis kelamin melampaui 100% yaitu sebesar 100,60 pada tahun 2025 dan mencapai 100,71 pada tahun 2030. Hal ini berarti bahwa komposisi penduduk relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan sedikit keunggulan jumlah laki-laki.

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur dalam proyeksi penduduk lima tahun kedepan, proporsi penduduk usia produktif menunjukkan tren menurun dengan jumlah penduduk usia tidak produktif

terus meningkat. Hal ini berimplikasi pada peningkatan angka ketergantungan (*dependency ratio*) dari 43,70% hingga mencapai 46,06% pada tahun 2030. Namun demikian hingga tahun 2030 dapat dikatakan Kota Kediri masih berada pada masa bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif sebesar 68,47%, proporsi penduduk lansia sebesar 11,12%.

Proyeksi penduduk Kota Kediri pada tahun 2025-2030 dapat dicermati pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 35 Proyeksi Penduduk Kota Kediri Tahun 2025-2030 Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio*

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah	*Sex Ratio* (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
2025	151.055	150.147	301.202	100,60
2026	152.543	151.586	304.129	100,63
2027	154.021	153.008	307.029	100,66
2028	155.465	154.411	309.876	100,68
2029	156.890	155.802	312.692	100,70
2030	158.281	157.162	315.443	100,71

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

Perekonomian Kota Kediri pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,43 persen. Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,92 persen. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selain itu, Kota Kediri mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp565,8 juta pada tahun 2024. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara kota-kota lain di Jawa, menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk yang cukup tinggi. Dalam hal struktur ekonomi, perekonomian Kota Kediri masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 79,64 persen. Industri rokok menjadi penyumbang utama dalam sektor ini. Meskipun dominan, kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yang bermakna bahwa sektor usaha selain industri pengolahan berkembang. Beberapa sektor mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, antara lain; (1) Transportasi dan Pergudangan: 10,43 persen, (2) Jasa

Lainnya: 8,58 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: 8,15 persen, dan (4) Jasa Pendidikan: 8,13 persen.

Dalam hal kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Kota Kediri pada Maret 2024 mencapai 19,24 ribu jiwa, atau 6,51 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana jumlah penduduk miskin mencapai 21,03 ribu jiwa (7,15 persen). Penurunan ini merupakan yang terbesar selama periode 2020-2024. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan pada semua dimensinya, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 10,92 tahun, meningkat 2,15 persen. Pengeluaran per Kapita per Tahun meningkat 2,97 persen menjadi Rp13.670.000.

Meskipun kesejahteraan ekonomi Kota Kediri pada tahun 2024 menunjukkan tren positif, beberapa hal perlu diperhatikan:

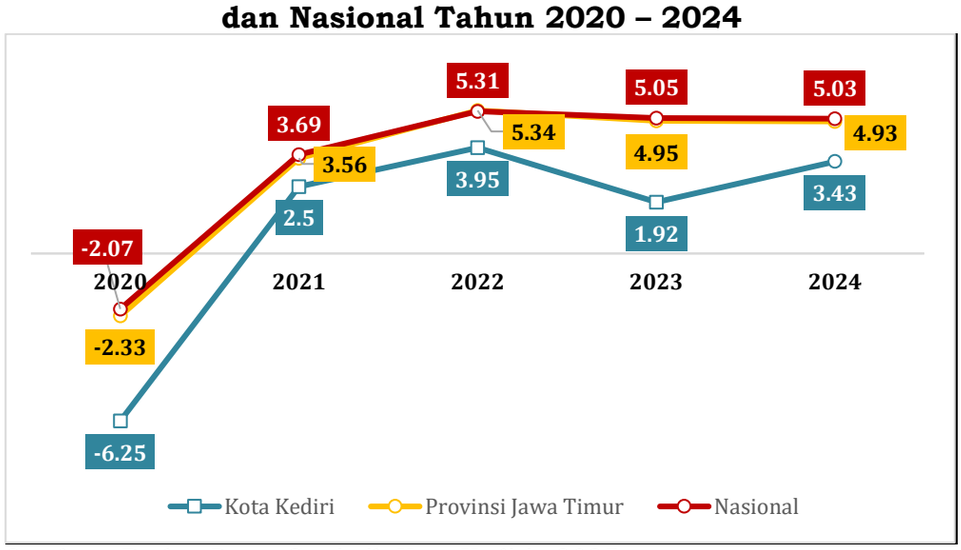
1) Ketergantungan pada Sektor Industri Pengolahan: Diversifikasi ekonomi ke sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi perlu terus didorong.
2) Perlambatan di Beberapa Sektor: Kinerja perdagangan, terutama perdagangan mobil dan sepeda motor, mengalami perlambatan.
3) Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan: Meskipun persentase penduduk miskin menurun, Indeks Keparahan Kemiskinan sedikit meningkat, mengindikasikan bahwa kelompok miskin yang tersisa mungkin berada dalam kondisi yang lebih sulit.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengupayakan adanya perbaikan, kemajuan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, dan peningkatan hubungan ekonomi regional dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang dalam perencanaannya dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah yang penghitungannya dilakukan berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan

ekonomi juga dimaknai sebagai pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam rentang waktu satu tahun yang diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan secara keseluruhan. Sampai dengan saat ini, penopang utama perekonomian Kota Kediri adalah sektor lapangan usaha Industri Pengolahan dengan andil ± 80%, disusul dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi.

Grafik 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri , 2025

Selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi global Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mengalami penurunan signifikan terjadi pada tahun 2023 didominasi oleh sektor lapangan usaha terkuat, yaitu Industri Pengolahan terutama dari industri pengolahan tembakau. Pada tahun tersebut, industri pengolahan tembakau mengalami penurunan pendapatan domestik yang disebabkan oleh kenaikan tarif cukai hasil tembakau di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Di samping itu, kondisi ketidakpastian global akibat situasi geopolitik di berbagai kawasan yang semakin memanas turut mempengaruhi kinerja ekspor. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi diantaranya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, dan melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian terutama terkait keberadaan Bandara Internasional Dhoho yang saat ini telah beroperasi.

Selain penanggulangan inflasi, Pemerintah Kota Kediri juga telah menetapkan kebijakan penanggulangan potensi terjadinya deflasi seperti yang terjadi selama bulan April 2024 sampai Maret 2025. Menanggulangi potensi deflasi di Kota Kediri memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah Kota perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendorong permintaan agregat, menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Pemantauan indikator ekonomi secara berkala dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan.

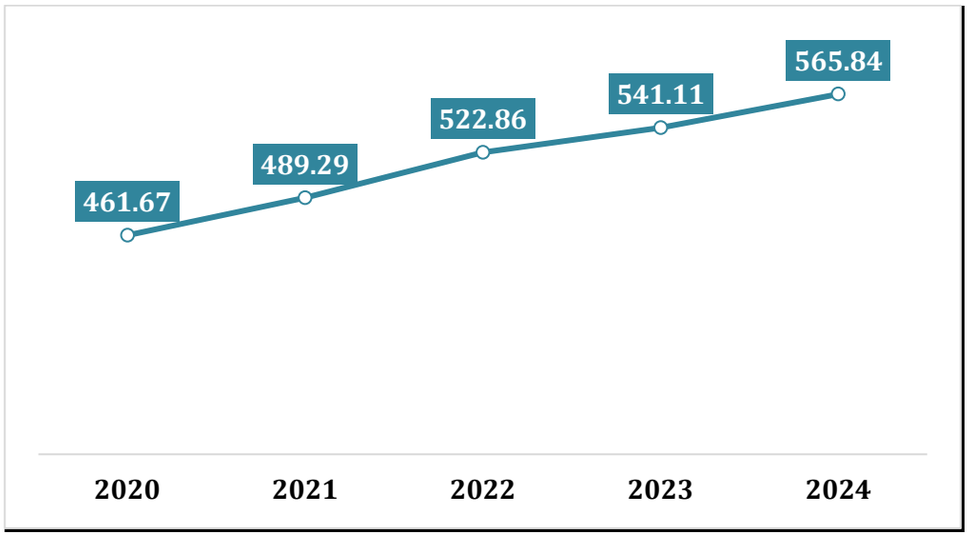
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Kediri dalam menanggulangi potensi deflasi akan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1) *Pengembangan Sektor Unggulan Lokal*: Mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang menjadi kekuatan Kota Kediri (misalnya, industri pengolahan, perdagangan, jasa pendidikan dan kesehatan) melalui insentif, pelatihan, dan promosi.
2) *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*: Melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, dan fasilitasi akses ke pasar.
3) *Peningkatan Kesejahteraan Sosial:* Melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat rentan.
4) *Promosi Investasi:* Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Investasi baru akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan.
5) *Pengembangan Pariwisata Lokal:* Mengembangkan potensi pariwisata Kota Kediri untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara, yang akan meningkatkan pengeluaran dan permintaan akan barang dan jasa lokal.
6) *Dukungan untuk Inovasi dan Teknologi:* Mendorong adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah.
7) *Stabilisasi Harga Komoditas Pokok:* Bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan.

2) PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per Kapita Kota Kediri tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 6 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (Data Diolah), 2025

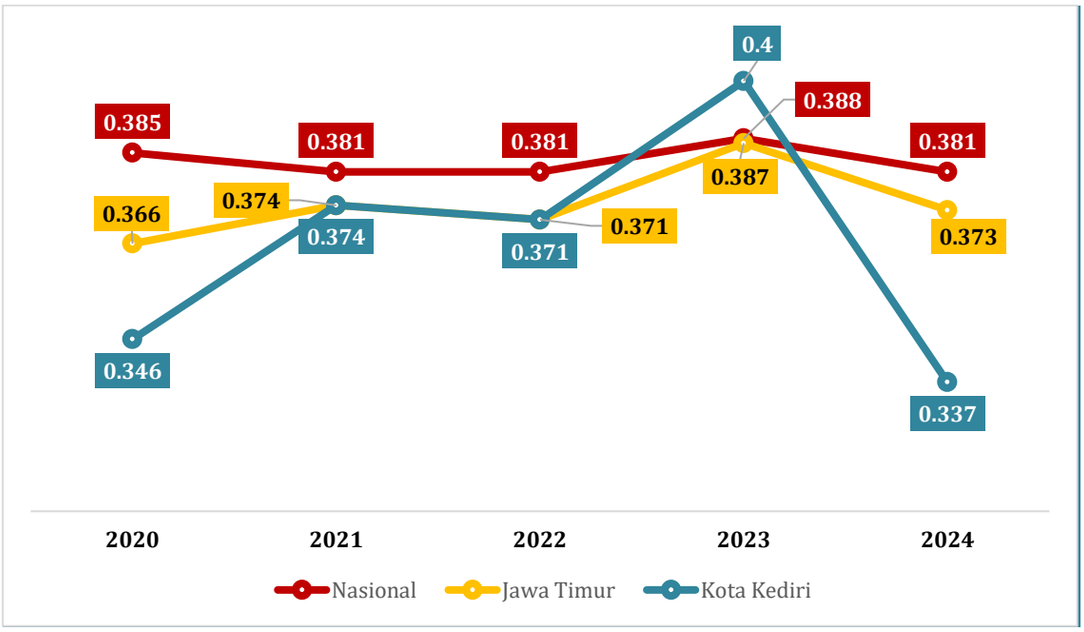
Berdasarkan data BPS, PDRB per kapita Kota Kediri pada tahun 2024 telah mencapai nilai Rp 565,84 juta per orang per tahun, yang berarti bahwa nilai tersebut telah melampaui target pendapatan per kapita nasional tahun 2045 yang sebesar USD 30.000 atau senilai lebih dari Rp 485 juta per orang per tahun. Akan tetapi nilai PDRB per kapita tersebut masih mencakup kontribusi dari sektor Industri Pengolahan yang sangat mendominasi struktur PDRB Kota Kediri. Apabila sektor industri pengolahan tembakau dikeluarkan dari struktur PDRB, maka nilai PDRB per kapita Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar Rp 127,56 juta per orang per tahun. Nilai ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita Kabupaten / Kota di sekitar. Apabila sektor industri pengolahan dikeluarkan, nilai PDRB per kapita Kota Kediri masih jauh dari target nasional Rp 485 juta per orang

per tahun. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Kota Kediri untuk mencapai target nasional.

3) Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Besaran indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika Indeks Gini mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka satu. Capaian Indeks Gini Kota Kediri cukup fluktuatif. Indeks Gini Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik 2. 7 Indeks Gini Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2024, Indeks Gini Kota Kediri tercatat sebesar 0,337, mengalami penurunan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perbaikan ini diantaranya adalah penguatan sektor ekonomi lokal, terutama pertumbuhan UMKM dan industri kreatif, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri. Stabilitas ekonomi pasca-pandemi COVID-19 juga berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat, terutama setelah berbagai kebijakan pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang lebih konkret. Namun, capaian ini masih menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang

perlu terus dikendalikan. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah disparitas pendapatan antar kelompok sosial dan wilayah, terutama di sektor informal yang masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang lebih terarah, seperti peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pemerataan infrastruktur ekonomi, serta optimalisasi program perlindungan sosial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata.

4) Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Kota Kediri. Meskipun terjadi tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, namun laju penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan secara merata. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin Kota Kediri menunjukkan fluktuasi, yang turut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional dan dampak pasca pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indikator kemiskinan di Kota Kediri selama tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 2. 36 Indikator Kemiskinan di Kota Kediri Tahun 2020-2024

Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	22.190	22.550	21.150	21.030	19.240
Tingkat Kemiskinan (%)	7,69	7,75	7,23	7,15	6,51
Garis Kemiskinan	493.438	506.936	537.326	587.723	621.051
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,96	1,03	1,42	1,08	1,02
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,17	0,21	0,41	0,23	0,25

Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Berdasarkan data BPS, Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Kediri selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuatif cenderung menurun, hal ini menandakan bahwa pengeluaran antar penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin rendah. Kebijakan Pemerintah Kota Kediri untuk mengurangi kesenjangan ekonomi

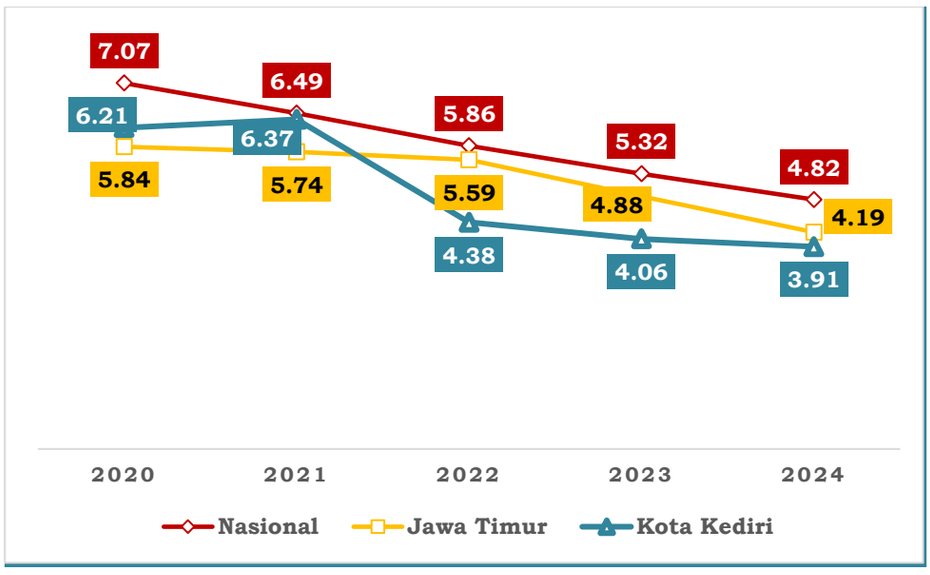
masyarakat miskin antara lain melalui pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan wilayah, pemberian bansos dan peningkatan kualitas SDM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp 10.739/ orang/ hari atau Rp 322.170/ orang/ bulan. Dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum. Berdasarkan hasil musyawarah kelurahan tahun 2023, jumlah miskin ekstrem di Kota Kediri sebesar 3.002 jiwa.

5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik.

Grafik 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada berbagai sektor. Namun demikian penurunan TPT Kota Kediri pada Tahun 2024 hingga mencapai 3,91% menunjukkan kondisi perekonomian Kota Kediri kembali menggeliat didukung oleh kualitas pendidikan penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka relatif tinggi. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah di antaranya penciptaan Wirausaha Baru (WUB), program Bantuan Modal Usaha, Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (KURNIA), Pelatihan Kerja, Klinik UMKM, fasilitasi kepengurusan legalitas usaha, dan hibah sarana prasarana usaha.

6) Indeks Pembangunan Manusia

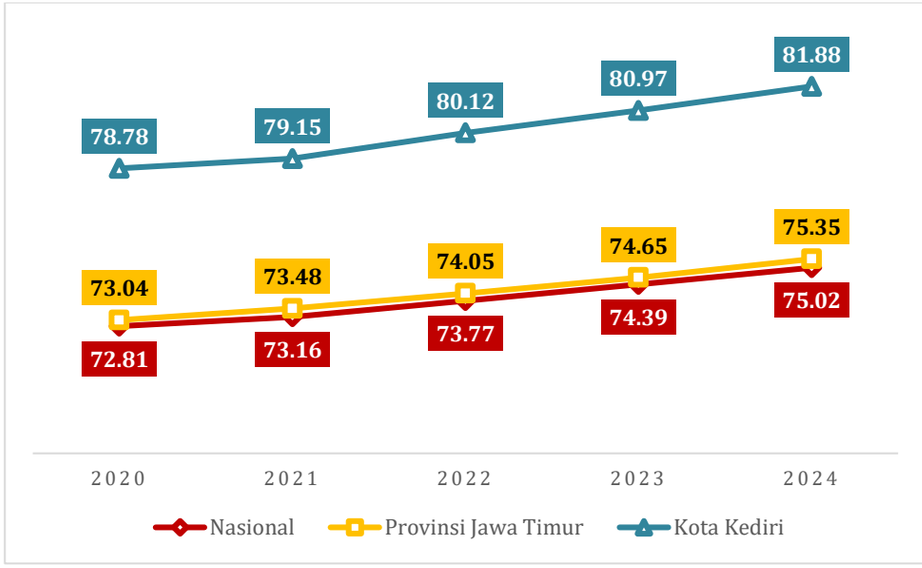
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui pendekatan tiga dimensi dasar kualitas hidup, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana penduduk Kota Kediri dapat mengakses hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya.

Tiga dimensi utama dalam IPM mencakup : 1) Umur panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup saat lahir; 2) Pengetahuan, yang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; serta 3) Standar hidup layak, yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai pendekatan daya beli masyarakat.

Perhitungan IPM tidak hanya menyoroti capaian pembangunan secara fisik, tetapi juga menekankan pada penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia, sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, IPM menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berikut grafik perkembangan capaian IPM Kota Kediri dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama lima tahun terakhir.

Grafik 2. 9 Perbandingan Capaian IPM Kota Ke diri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Data diatas menunjukkan capaian IPM Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional selama lima tahun terakhir meningkat dengan tren positif. IPM Kota Kediri secara konsisten berada diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional dengan kecepatan peningkatan IPM melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Selama periode 2020-2024 IPM Kota Kediri meningkat cukup signifikan sebesar 3,10 poin dan termasuk pada kategori sangat tinggi sejak tahun 2022. Capaian IPM Kota Kediri pada tahun 2024 menempati peringkat 5 tertinggi diantara Kab/Kota se-Jawa Timur. Hal ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Kediri dalam pembangunan manusia cukup efektif dengan perbaikan menyeluruh pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

7) Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menjadi alat ukur penting dalam mengidentifikasi berbagai dimensi kesejahteraan, baik secara individu maupun kelompok. Melalui Ikesos, dapat dilihat sejauh mana pemenuhan kebutuhan dasar, peranan sosial, serta keberdayaan ekonomi masyarakat telah tercapai. Hasil pengukuran ini kemudian menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan dan program sosial yang lebih tepat sasaran.

Penghitungan Ikesos dilakukan oleh Kementerian Sosial setiap tahun untuk masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Nilai indeks dihitung

melalui formulasi berbagai parameter yang mencerminkan kondisi sosial di setiap daerah, sehingga mampu menggambarkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

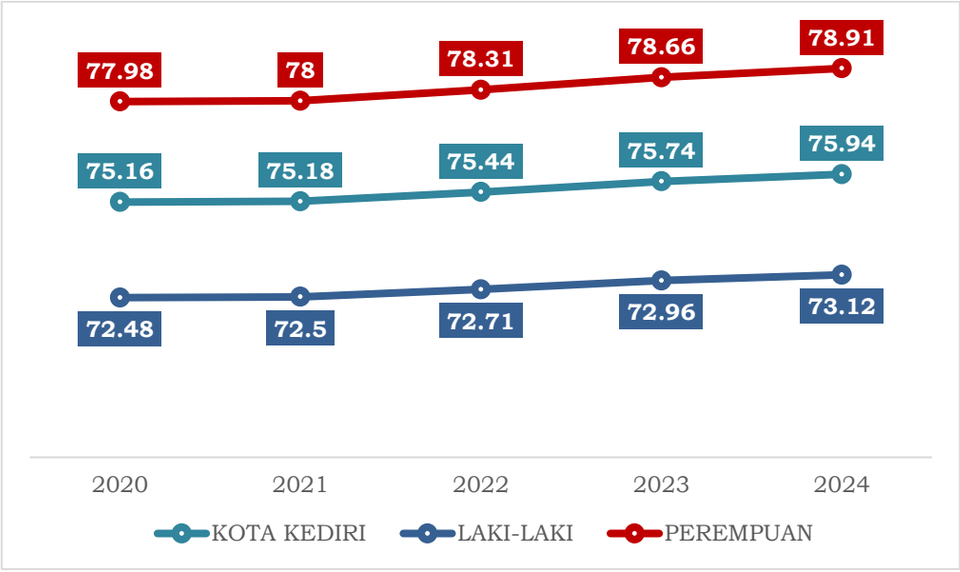
Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar 57,72. Angka ini menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang masih perlu terus ditingkatkan melalui program pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan peran sosial, dan peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat.

2.1.2.1 Kesehatan untuk Semua

1) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata – rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup . Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Umur Harapan Hidup di kota kediri berdasarkan jenis kelamin tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 10 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2020 – 2024

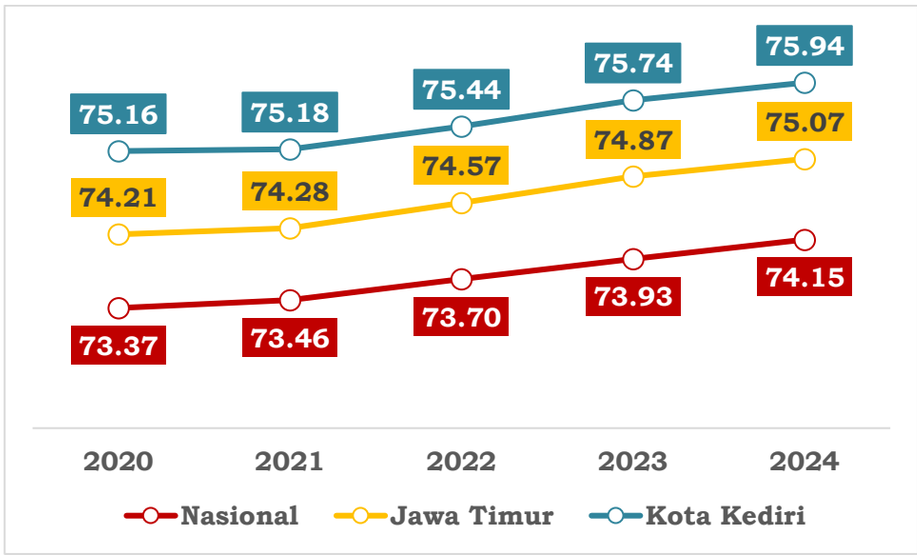


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

UHH Kota Kediri pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren kenaikan. Artinya, umur harapan hidup bayi yang baru lahir pada tahun 2024 dapat berumur sampai 75 tahun. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Tahun 2024, UHH perempuan 78 tahun di atas UHH laki-laki 73 tahun. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penyebab rendahnya UHH laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah laki – laki lebih banyak terpapar polutan (salah satunya dipengaruhi rokok) sehingga risiko kematiannya lebih besar. Pemerintah kota kediri menyelenggarakan beberapa program untuk meningkatkan UHH laki-laki, diantaranya Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Gerakan Masyarakat hidup sehat yang terus dioptimalkan keberhasilannya, sehingga dengan meningkatnya UHH laki-laki maka secara langsung akan meningkatkan UHH Kota Kediri.

Untuk mengetahui capaian Kota Kediri dalam meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat, maka diperlukan perbandingan UHH Kota Kediri dengan UHH Provinsi dan Nasional. Pengukuran perbandingan ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah Kota Kediri termasuk daerah yang berkontribusi menaikkan UHH Provinsi dan Nasional. Perbandingan UHH Kota Kediri dengan UHH Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 11 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Kediri (Data Diolah), 2025

2) Indeks Keluarga Sehat

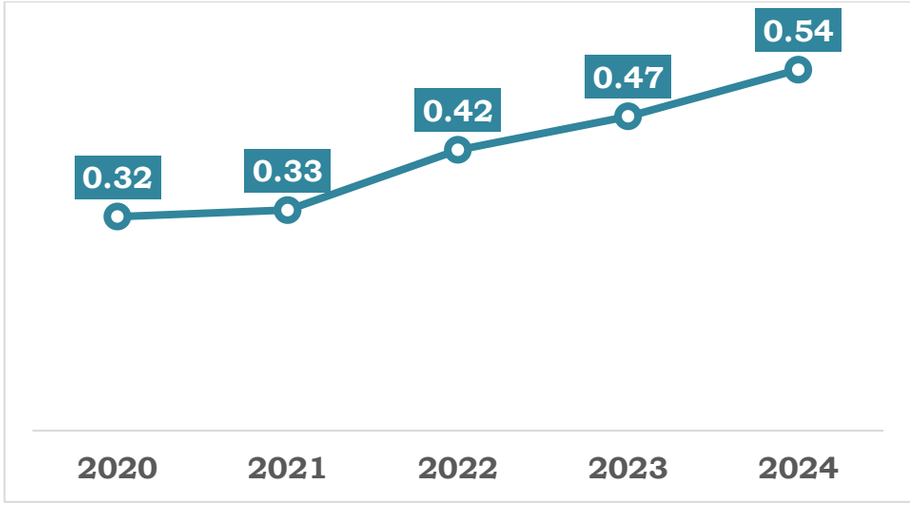
Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8.

Keluarga yang sehat atau tidak, digunakan beberapa indikator atau penanda, telah disepakati adanya 12 indikator untuk penanda status kesehatan keluarga. Indikator keluarga sehat antara lain:

a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB),
b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,
c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap,
d. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif,
e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan,
f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar,
g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur,
h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan,
i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok,
j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih,
l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil indikator tersebut dilakukan perhitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap anggota keluarga. Keluarga dikatakan sehat dengan IKS > 0,800, keluarga pra sehat IKS =0,500 - 0,800, sedangkan Keluarga tidak Sehat dengan IKS < 0,500. Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 12 Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri (Data Diolah), 2025

Berdasarkan perhitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Kediri selama lima tahun terakhir menunjukkan IKS < 0,500, hal ini menandakan bahwa meskipun terjadi peningkatan IKS tapi masih berada dalam kategori keluarga tidak sehat. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek- aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai status keluarga yang lebih sehat secara keseluruhan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan keluarga dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.

3) Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak – anak di bawah 5 tahun dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan fisik mereka . Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Berikut data prevalensi stunting Kota Kediri tahun 2020 – 2024.

Tabel 2. 37 Prevalensi Stunting Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	12,70	15,70	14,30	18,60	*Tbd*

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, Tahun 2024

Survei Nasional terkait evaluasi status gizi diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menggunakan metode pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan. Riskesdas dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan pemerintah memerlukan monitoring dan

evaluasi status gizi stunting Balita setiap tahun berdasarkan indikator output intervensi gizi spesifik dan sensitif di tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu sejak tahun 2019-2024 dilaksanakan untuk mengukur status gizi balita, namun pada tahun 2020 tidak dilakukan integrasi survei dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga sumber data stunting diperoleh dari Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM). Tahun 2021-2022 data balita berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Tahun 2023 berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia, Tahun 2024 berdasarkan Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) per Bulan Desember 2024 prevalensi stunting Kota Kediri pada angka 5.1.

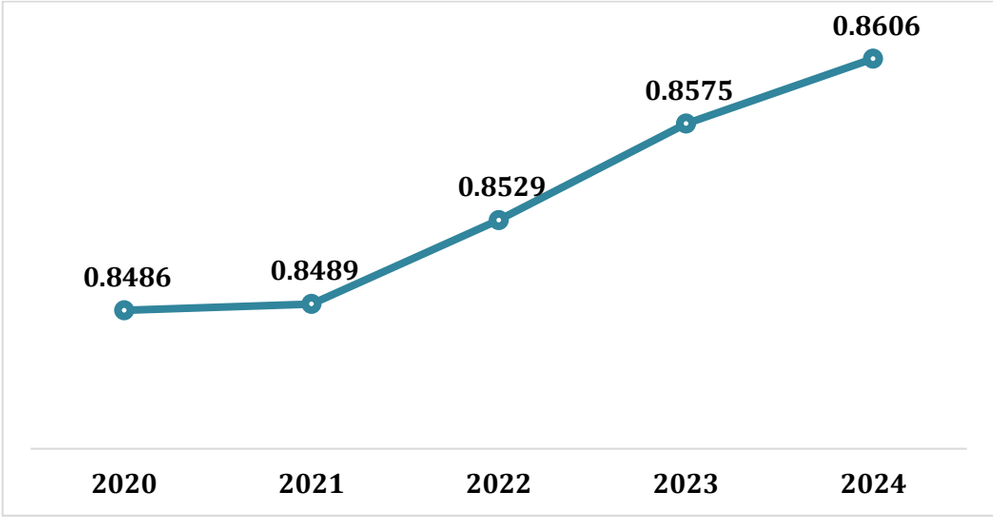
Pada tahun 2024 prevalensi stunting Kota Kediri berdasarkan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelayanan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sebesar 5,1%, melampaui target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Capaian ini didukung dengan program upaya percepatan penurunan stunting antara lain melalui intervensi spesifik, yaitu Layanan pemeriksaan ibu hamil (3 kali) dengan USG di Puskesmas, Program 1 dokter spesialis anak di setiap puskesmas untuk layanan rujukan balita Stunted, Pemberian Makan Tambahan (PMT) Plus, Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi Balita Stunting, Pangan Diet Khusus (PDK) bagi Ibu Hamil KEK, Balita Wasting dan Balita Gizi Kurang; intervensi sensitif melalui strakom kader kesehatan, sekolah orang tua hebat di seluruh kelurahan, penanganan kawasan kumuh terintegrasi; serta penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

4) Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan adalah nilai tunggal yang menunjukkan tingkat kesehatan suatu wilayah, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dasar untuk mengukur kualitas hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, antara lain: Umur Harapan Hidup (UHH), Status Gizi, Morbiditas (kesakitan), Kondisi Mortalitas (kematian). Indeks kesehatan dapat digunakan untuk menentukan peringkat wilayah dalam mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Kesehatan, diantaranya: UHH, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi kurang pada balita, kejadian atau

prevalensi penyakit, serta faktor penentu kesehatan, seperti perilaku kesehatan, faktor risiko kesehatan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial ekonomi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 Indeks kesehatan Kota Kediri tercatat sebesar 0,8575 dan pada tahun 2024 sebesar 0,8606.

Grafik 2. 13 Indeks Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kota Kediri (Data Diolah), 2025

5) Angka Keberhasilan Pengobatan/ *Treatment Success Rate* (TSR) TBC

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Kediri pada tahun 2020-2024:

Tabel 2. 38 Angka Keberhasilan Pengobatan (TSR) TBC di Kota Kediri Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Keberhasilan Pengobatan (TSR) TBC	80,00	90,00	89,00	86,40	86,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2025

Berdasarkan tabel capaian TSR TBC di Kota Kediri beradad pada kisaran 80–90% selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 capaian TSR sebesar 86,14%, capaian tersebut menunjukkan masih adanya pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan. Hal ini menjadi catatan penting untuk memperkuat pendampingan pasien, peningkatan kepatuhan minum obat, serta penguatan peran kader dalam pemantauan pengobatan TBC.

6) *Treatment Coverage TB*

Berikut adalah data yang menunjukkan *Treatment Coverage TB* di Kota Kediri pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 39 *Treatment Coverage TB* di Kota Kediri Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	*Treatment Coverage TB*	61,10	55,70	111,72	158,08	120,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2025

Treatment Coverage TB menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang periode 2020–2023. Pada 2024 capaian sedikit menurun menjadi 120,77%, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan capaian awal periode. Hal ini menunjukkan adanya perluasan akses layanan TBC serta deteksi kasus yang semakin baik. Meski demikian, perlu dipastikan bahwa peningkatan cakupan ini diikuti dengan keberhasilan pengobatan (TSR) agar kasus TBC tidak kembali meningkat.

7) Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Indikator ini menggambarkan cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional. Nilai diperoleh dengan membandingkan antara jumlah peserta yang terdaftar JKN dengan jumlah penduduk. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Kediri tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 40 Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No.	Indikator RPJMD	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	89,05	94,15	98	102,1	100,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan JKN di Kota Kediri selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2024, cakupan JKN mencapai 100,41%. Peningkatan cakupan JKN selama lima tahun terakhir menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan pembiayaan kesehatan, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya jaminan kesehatan.

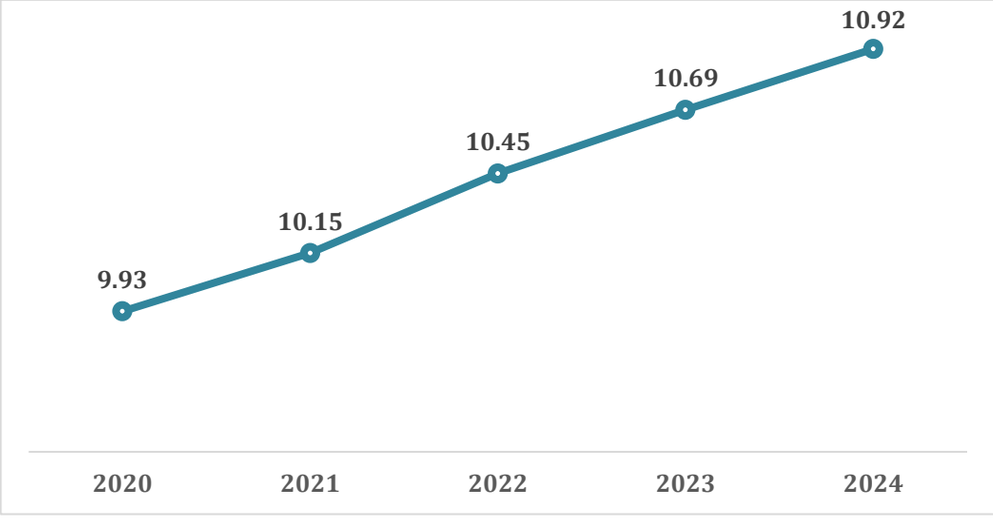
2.1.2.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata di Kota Kediri merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa aspek yang mencerminkan upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Kediri meliputi:

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Formula angka RLS adalah 1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dikali lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun.

Grafik 2. 14 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Kediri, 2024

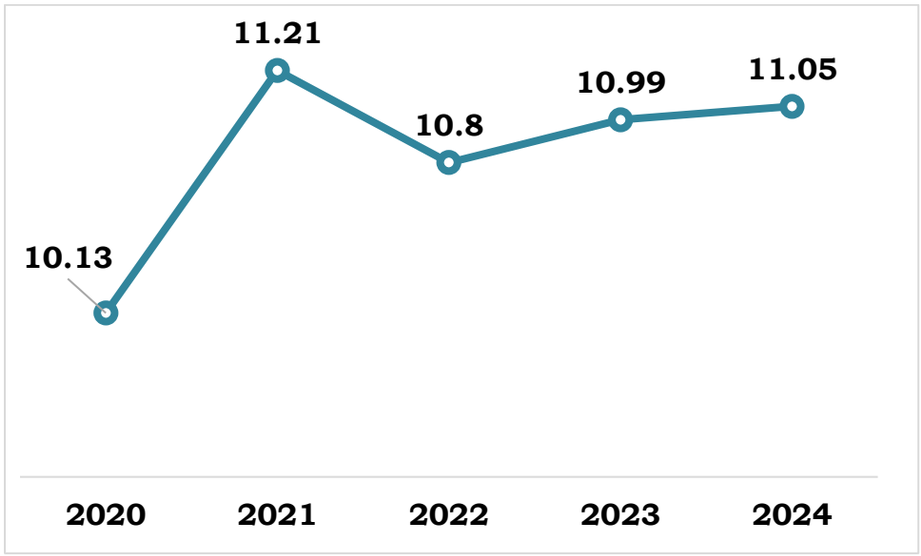
Capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Kediri pada tahun 2024 berada di angka 10,92 meningkat sebesar 2,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata telah mencapai jenjang SMA (lebih tepatnya kelas 2 SMA). Peningkatan RLS ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya Pemerintah Kota Kediri telah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui berbagai

program dan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka mendorong partisipasi yang lebih tinggi dalam pendidikan formal, adanya program bantuan seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan berkontribusi pada kualitas pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan, seperti pembangunan dan renovasi sekolah, serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya.

2) Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia yang menggambarkan jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Semakin tinggi angka RLS, semakin baik pula kualitas pendidikan yang telah dicapai masyarakat di suatu wilayah. Berikut data capaian Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2020-2024:

Grafik 2. 15 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Timur, 2025

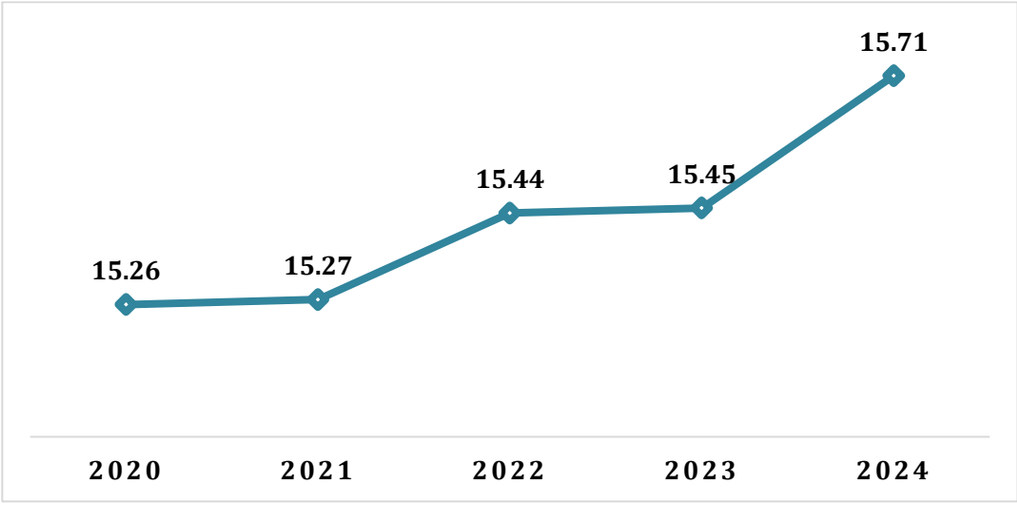
Perkembangan RLS di Kota Kediri menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun fluktuatif. Capaian RLS Kota Kediri pada tahun 2024 berada di angka 11,05, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan RLS ini mencerminkan semakin baiknya akses dan kesempatan masyarakat dalam menempuh pendidikan, terutama pada

jenjang menengah dan tinggi. Meski demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong percepatan peningkatan RLS agar sejalan dengan target pembangunan pendidikan jangka menengah.

3) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 16 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Kediri, 2024

Capaian HLS Kota Kediri di tahun 2024 berada di angka 15,71 meningkat sebesar 1,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,45 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah yang akan dirasakan oleh anak di masa mendatang di Kota Kediri adalah 15,71 tahun atau setara dengan lulus Diploma 3 atau sedang menempuh jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) semester 7. Peningkatan HLS ini didukung oleh upaya pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan, seperti pembangunan dan renovasi sekolah, serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya, adanya kebijakan dan program yang mendukung akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan,

program bantuan seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

4) Angka Literasi/Numerasi

Kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Tabel 2. 41 Capaian Literasi dan Numerasi

No	Uraian	Th. 2023	Th. 2024
1	Literasi SD	67.72	86.96
2	Literasi SMP	79.55	89.29
3	Numerasi SD	50.18	75.10
4	Numerasi SMP	68.39	84.26

Sumber Data : Kemendikbudristek, 2024.

5) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menggambarkan tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diukur dari Unsur-unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

Jika sebelumnya hanya diukur pada tingkat Provinsi, mulai tahun 2022 Perpusnas secara berkala merilis hasil perhitungan IPLM di tingkat Kabupaten/Kota. Ada 7 (tujuh) unsur pembangun literasi masyarakay yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari
5. Perpustakaan yang dibina sesuai SNP
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan

7. Anggota Perpustakaan

Perkembangan IPLM Kota Kediri pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 42 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2022-2024

No.	Indikator	2022	2023	2024	Interpretasi
1.	**IPLM**	**87,81**	**63,16**	**51,21**	**Sedang**

Sumber : Perpusnas, 2024

IPLM Kota Kediri tahun 2024 menunjukkan penurunan hingga sebesar 51,21 atau termasuk dalam kategori sedang (50-79,99), dan berada di bawah capaian IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 78,60 dan Nasional sebesar 73,52. 75,18. Penurunan ini perlu menjadi perhatian dimana tren menurun IPLM Kota Kediri berbanding terbalik dengan IPLM rata-rata Jawa Timur yang meningkat 3,42% pada tahun 2024.

Dari ketujuh indikator pembentuk IPLM, terdapat 5 (Lima) indikator yang berhasil meningkat capaiannya di Kota Kediri, antara lain ketercukupan koleksi perpustakaan, SDM pustakawan, tingkat kunjungan, pembinaan perpustakaan dan keanggotaan. Namun demikian 2 (dua) indikator yaitu pemerataan layanan perpustakaan dan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan menunjukkan adanya penurunan.

Rasio ketersediaan perpustakaan umum sebanyak 2 perpustakaan per 100.000 penduduk, perpustakaan sekolah sebanyak 168 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 26 perpustakaan per 100.000 civitas akademika. Sementara itu Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpusnas menyebutkan bahwa pemerataan yang ideal adalah lebih dari 3 perpustakaan per 100.000 penduduk, mencakup perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus, didukung satu desa/kelurahan memiliki minimal satu perpustakaan desa/kelurahan.

Sementara itu partisipasi masyarakat dihitung dari proporsi jumlah penduduk, standarnya penduduk Kota Kediri yang terpapar sosialisasi sebanyak 5.681 orang, namun realisasinya masih 223 orang atau 0,08% masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi.

Penurunan IPLM menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk lebih inovatif dan strategis dalam membangun ekosistem literasi yang menyeluruh. Transformasi perpustakaan dengan penguatan literasi digital,

pengembangan taman baca, penyediaan pojok baca di ruang publik, peningkatan literasi sosial budaya melalui seminar, pameran buku, lomba menulis, mendongeng, dan penguatan kolaborasi diupayakan sebagai pengembangan program yang tidak hanya mendorong minat baca, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis, berkreasi, dan berkolaborasi, sehingga manfaat literasi dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

6) Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan banyaknya kompetisi olahraga yang diselenggarakan baik tingkat daerah maupun nasional, disamping itu juga karena adanya peningkatan pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pelatihan atlet secara intensif, dan pendelegasian/pengiriman atlet ke berbagai kompetisi atau turnamen olahraga. Pada tahun 2024, capaian atlet berprestasi sebanyak 88 atlet atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebanyak 168 atlet. Penurunan jumlah atlet berprestasi pada tahun 2024 disebabkan pengiriman atlet dalam event Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Kota Kediri relatif terbatas hanya sekitar 100 atlet. Sedangkan pada tahun 2024 event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur tidak diselenggarakan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan event multi-cabang PORPROV dan PORDA secara bergantian, sehingga tidak ada pengiriman atlet dalam jumlah besar sekitar 400 atlet.

Tabel 2. 43 Jumlah Atlet Berprestasi Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Atlet Berprestasi	0	32	173	168	88

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2024

Atlet-atlet Kota Kediri banyak menorehkan prestasi pada level provinsi dan sangat disegani daerah lain, terutama cabang olahraga, atletik, renang, wushu, taekwondo, senam, balap sepeda serta *paralympic*. Namun, Kota Kediri masih belum memiliki gedung, lintasan balap dan kolam renang bertaraf nasional dan alat-alat olahraga yang dibutuhkan. Memang sudah tersedia Stadion Brawijaya untuk cabang olahraga sepak bola dan atletik yang berstandar nasional, namun diperlukan rehabilitasi mayor pada tribun

VIP yang kurang memadai dan beberapa fasilitas yang perlu penambahan dan perbaikan. Sedangkan untuk GOR Jayabaya sudah dilakukan renovasi atap dan toilet namun juga masih perlu dilakukan perbaikan sarana-prasarana pendukung lainnya.

7) Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan

Pada tahun 2024 jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) event atau menurun sebesar 70% dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terjadi realokasi anggaran yang rencana digunakan untuk menambah dukungan keikutsertaan di PORPROV Jawa Timur dan event olahraga tradisional tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. 44 Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kegiatan Olahraga yang Diselenggarakan	0	3	5	7	2

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2024

8) Prestasi Kepemudaan

Dalam rangka memacu prestasi pemuda Kota Kediri melakukan berbagai upaya untuk memberikan wadah kepada para pemuda Kota Kediri, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan pemuda melalui *workshop* kepemimpinan, memfasilitasi pemuda untuk mengikuti kompetisi tingkat kota, propinsi dan nasional, dan penyelenggaraan kompetisi Pemuda Pelopor di tingkat kota. Melalui upaya-upaya tersebut sehingga pada tahun 2024 jumlah prestasi kepemudaan di Kota Kediri meningkat menjadi 17 prestasi melalui ajang Pemilihan Pemuda Pelopor, Pemilihan Pemuda Utama Tingkat Provinsi Jawa Timur, kompetisi tingkat nasional serta berbagai prestasi di bidang olahraga.

Tabel 2. 45 Prestasi Kepemudaan Kota Kediri Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prestasi Kepemudaan	0	8	6	11	17

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2024

2.1.2.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan salah satu kunci penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Hal ini

bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga, terutama kelompok rentan, memiliki akses yang sama terhadap perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Perlindungan sosial yang efektif tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup jaminan sosial yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah Kota Kediri berupaya memperkuat sistem perlindungan sosial dengan berbagai kebijakan dan program, termasuk peningkatan cakupan jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap pekerja, baik di sektor formal maupun informal, mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan standar kesejahteraan.

1) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sebagai salah satu indikator dalam perlindungan sosial yang adaptif, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mencerminkan sejauh mana masyarakat pekerja memperoleh perlindungan dalam menghadapi risiko ekonomi, kecelakaan kerja, maupun ketidakpastian dalam dunia kerja. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah Kota Kediri telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya ke dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung dengan membandingkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (penerima upah dan bukan penerima upah) dengan jumlah Penduduk yang Bekerja. Capaian cakupan kepesertaan dimaksud dapat dilihat secara detail pada tabel berikut:

Tabel 2. 46 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (orang)	32.269	32.670	39.635	51.244	68.912
Penduduk yang bekerja (orang)	142.804	146.620	156.641	159.567	159.426
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	**22,59**	**22,28**	**25,30**	**32,11**	**43,23**

Sumber: Badan Pusat Statistik dan BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam rentang 2020 – 2022 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan cenderung fluktuatif. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 di mana cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah dan bukan penerima upah secara akumulatif mencapai lebih dari 30%. Hal ini tidak lepas dari intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri melalui kebijakan perlindungan pekerja rentan yang didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui pendanaan dari APBD Kota Kediri untuk Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

2.1.2.4 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep beragama maslahat dan berkebudayaan maju menekankan pentingnya harmoni antara kehidupan beragama yang membawa kebaikan dan kemajuan budaya dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama yang maslahat dengan upaya memajukan budaya, masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual yang kaya dan kebudayaan yang maju. Ini semua berkontribusi pada pembentukan identitas nasional yang kuat dan dinamis. Penguatan peran agama dalam berbagai aspek kehidupan memiliki dampak yang signifikan pada pembentukan karakter individu dan jati diri bangsa, dan dengan memperkuat peran agama diharapkan dapat membentuk karakter individu yang kokoh, bermoral, dan beretika, serta memperteguh jati diri bangsa. Ini semua pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sejahtera, damai, dan berbudaya tinggi. Selain hal tersebut penguatan peran agama dalam pembangunan memerlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, komunitas agama, dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran agama dalam proses pembangunan sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

1) Indeks Kota Toleran

Kota toleran adalah kota yang berkomitmen pada pembangunan inklusif melalui visi yang jelas, regulasi yang mendukung penguatan toleransi, kepemimpinan yang progresif, serta pengendalian terhadap praktik intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama. Kota toleran juga ditandai dengan konsistensi dalam mengelola keragaman dan memperkuat inklusi sosial. Untuk mengukur hal tersebut, disusun Indeks Kota Toleran

(IKT) sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah bersama elemen masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan toleransi. IKT mengintegrasikan jaminan hak konstitusional warga negara, prinsip hak asasi manusia sesuai standar internasional, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif. Melalui kombinasi ini, IKT memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi dan kemajuan toleransi di tingkat kota, baik yang dijalankan pemerintah daerah maupun masyarakat sipil.

Pengukuran IKT diharapkan mendorong pemerintah kota untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, merumuskan kebijakan promotif, mengalokasikan anggaran khusus bagi pemajuan toleransi, serta memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam mencegah intoleransi. Dengan demikian, kota mampu membangun tatanan sosial yang berkeadilan, berwawasan kebangsaan, dan berlandaskan harmoni dalam keberagaman. Pengukuran indikator dilaksanakan oleh SETARA Institute dengan menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yaitu:

1) Kebijakan kebijakan pemerintah kota;
2) Tindakan-tindakan aparatur pemerintah kota;
3) Perilaku antar entitas di kota termasuk warga dengan warga, pemerintah dengan warga; dan
4) Relasi-relasi sosial dalam heterogenitas demografis warga kota.

Adapun capaian IKT Kota Kediri selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Indeks Kota Toleran Kota Kediri Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kota Toleran	5.583	5.733	5.850	6.073	5.925

Sumber : SETARA Institute, 2025

2) Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

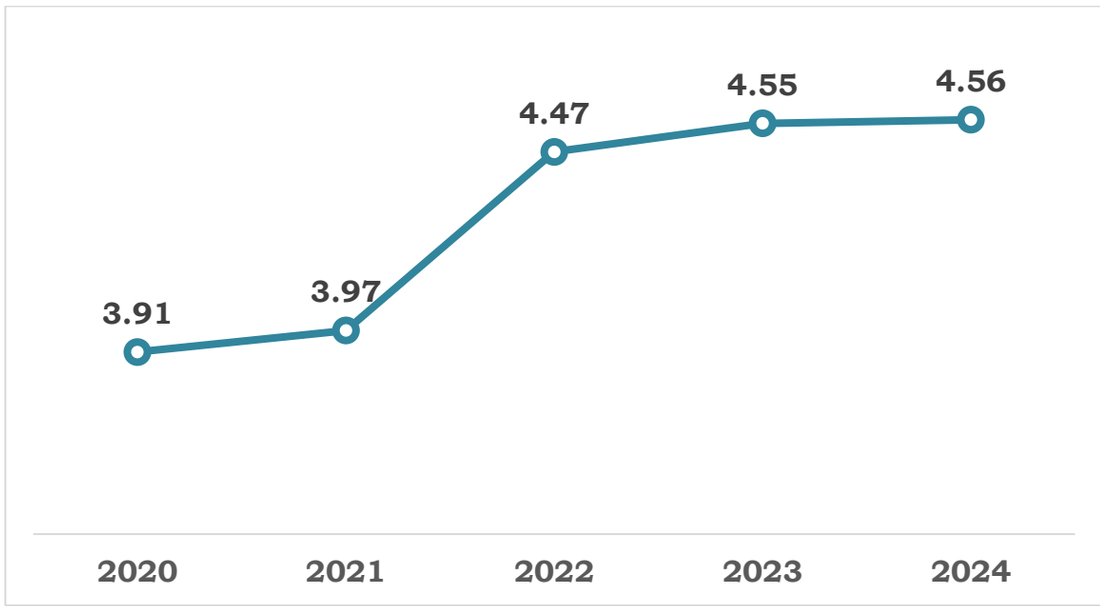
Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus menjaga, menciptakan dan melestarikan kerukunan hidup antar umat beragama dengan pengaturan indikator kinerja Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (IKUB). IKUB Provinsi Jawa Timur dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Agama dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Sedangkan untuk Kota Kediri melakukan perhitungan/ survey mandiri dengan menggunakan 4 (empat) variabel

utama, yaitu toleransi, kesetaraan, kerjasama, dan kebijakan. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian tersebut adalah:

a. Faktor historis, kultur dan budaya yang kondisional;
b. Dukungan pemerintah terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama;
c. Tingkat pendidikan yang semakin baik;
d. Peran strategis aktivis lintas agama yang mengedepankan asas kerukunan.
e. Masyarakat Kota Kediri memiliki kesadaran tentang pentingnya sikap saling menghargai antar umat beragama

Indeks kerukunan umat beragama Kota Kediri tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 17 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda, 2024

3) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan daerah menjadi salah satu objek dan subjek peningkatan pembangunan di daerah. Dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan di daerah dapat dioptimalkan melalui pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK adalah salah satu instrumen yang didesain untuk melihat kontribusi unsur kebudayaan dalam mendukung pembangunan. IPK pada scope nasional telah secara rutin dilakukan penghitungan sejak tahun 2018,

sedangkan IPK Kota Kediri baru diukur pada tahun 2024. Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Kediri pada tahun 2024 menunjukkan hasil 58,15. IPK diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, ketujuh dimensi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor, Adapun 7 (tujuh) dimensi/unsur tersebut adalah:

(1) dimensi ekonomi budaya (1 indikator);
(2) dimensi pendidikan (6 indikator);
(3) dimensi ketahanan sosial budaya (8 indikator);;
(4) dimensi warisan budaya (6 indikator);;
(5) dimensi kebebasan ekspresi budaya (4 indikator);;
(6) dimensi budaya literasi (3 indikator);; dan
(7) dimensi kesetaraan gender (3 indikator);.

Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Kediri pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Capaian Dimensi IPK Kota Kediri Tahun 2024

No.	Dimensi	Kota Kediri
1	Ekonomi Budaya	26,12
2	Pendidikan	60,48
3	Ketahanan Sosial Budaya	81,85
4	Warisan Budaya	59,96
5	Kebebasan Ekspresi Budaya	53,17
6	Budaya Literasi	82,94
7	Gender	42,57
Rata-rata		**58,15**

Sumber: Bappeda, 2025

Berdasarkan capaian setiap dimensi tersebut maka diperoleh kesimpulan:

a. Dimensi Ekonomi Budaya memberikan gambaran bahwa dari seluruh penduduk yang terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni, hanya 26,12% penduduk yang menjadikan seni sebagai sumber penghasilan. Hal ini mengindikasikan pekerjaan di bidang seni Kota Kediri belum bisa diandalkan sebagai sumber penghasilan.
b. Dimensi Pendidikan Kota Kediri tergolong baik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Fasilitas pendidikan yang memadahi, program

pemerintah yang mendukung, serta dukungan masyarakat seperti keterlibatan kegiatan sekolah, menjadi faktor perpenting dalam kesuksesan pendidikan di Kota Kediri.

c. Ketahanan sosial budaya di Kota Kediri sangat bagus, tercermin dari toleransi masyarakatnya yang tidak membedakan ras, suku atau agama dalam kegiatan kemasyarakatan.
d. Warisan Budaya Kota Kediri tergolong baik, hal ini didukung oleh banyaknya masyarakat Kota Kediri yang masih menggunakan produk tradisional, penggunaan Bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, dan pencatatan cagar budaya yang bagus. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pertunjukan seni masih perlu ditingkatkan. Terlebih lagi pendataan warisan budaya tak benda yang perlu ditingkatkan.
e. Kebebasan Ekspresi Budaya di Kota Kediri tergolong baik yang ditunjukkan dengan masih adanya kegiatan musyawarah pada masyarakat serta penyelenggaraan upacara adat. Masyarakat Kediri juga cenderung aktif dalam mengikuti organisasi. Namun, masih tergolong rendah dalam keterlibatan di bidang seni.
f. Literasi Budaya Kota Kediri sangat baik, masyarakat gemar membaca koran maupun berita secara online. Namun, masyarakat masih jarang berkunjung ke perpusatakaan.

   Partisipasi gender di Kota Kediri, masih didominasi oleh kaum laki-laki. Tingkat partisipasi kerja laki-laki lebih tinggi daripada tingkat partisipasi kerja perempuan. Begitu pula pada keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan.

Upaya dalam meningkatkan capaian dimensi IPK Kota Kediri (dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan dan Gender) yang skornya masih rendah melalui:

a. Memperbanyak event atau pameran yang mendukung pekerja seni untuk menjual atau memamerkan hasil karyanya sehingga akan menambah penghasilan bagi seniman atau orang yang bekerja di dalamnya, serta memberikan tempat atau ruang berekspresi untuk masyarakat, sehingga masyarakat lebih mencintai dan menggemari bidang kesenian.

b. Memberikan edukasi secara lebih masif kepada masyarakat tentang pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dan melanjutkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.
c. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas kerja, pendidikan dan kepemimpinan terutama dalam aspek partisipasi kerja yang melibatkan perempuan.

2.1.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan di Kota Kediri, pembangunan ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Kota Kediri memiliki komitmen kuat dalam membangun keluarga berkualitas, mendorong kesetaraan gender, serta menciptakan masyarakat yang inklusif guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Upaya tersebut tercermin dalam capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender sebagaimana penjelasan berikut ini.

1) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

IPBK merupakan indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan Indonesia. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan sensitif terhadap dinamika penduduk. Nilai IPBK dinyatakan dalam skala 0–100 dan diklasifikasikan dalam lima kategori: Sangat tinggi (>80), Tinggi (69-80), Menengah atas (60-68), Menengah bawah (50-59, Rendah (<50). Semakin tinggi nilai IPBK berarti semakin baik kondisi pembangunan berwawasan kependudukan.

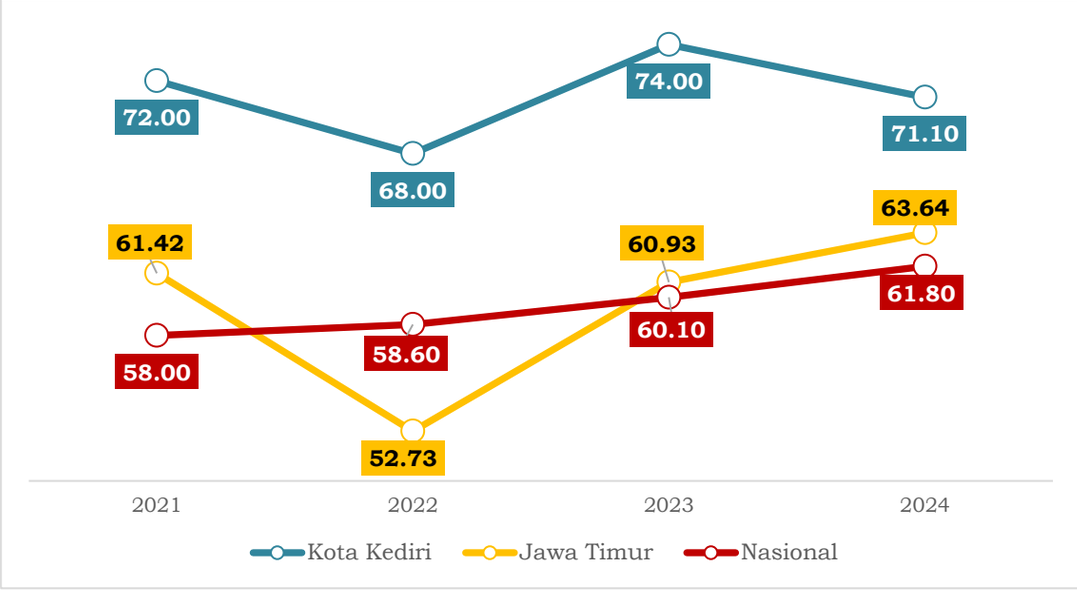
Capaian IPBK dihitung dengan mengintegrasikan 5 dimensi utama atas rata-rata geometrik 20 indikator bersumber dari BPS dan K/L terkait yaitu :

1) Partisipasi : Jaminan kesehatan, CPR, APS SLTA, TPAK 20-64 tahun;
2) Keberlanjutan : Rumah layak, air bersih, sanitasi layak;

3) Inklusivitas : Tingkat kemiskinan, unmet need, Pendidikan anak ruta miskin, disabilitas bekerja, lansia mandiri;
4) Holistik-Integratif : Stunting, akses informasi, perkawinan anak, akses transportasi, akta lahir balita;
5) Kesetaraan : kesetaraan jabatan, prevalensi kekerasan, dan kesenjangan pendapatan.

Perkembangan capaian IPBK Kota Kediri selama periode 2021-2024 dapat dicermati pada grafik berikut.

Grafik 2. 18 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kota Kediri terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : BKKBN/Kemendukbangga, 2025

Berdasar grafik diatas, capaian IPBK Kota Kediri menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung stabil pada kategori "Tinggi" selama periode 2021-2024. Pada tahun 2022 IPBK Kota Kediri mengalami penurunan capaian hingga kategori "Menengah Atas" yang dimungkinkan sebagai dampak pandemi yang masih terasa terhadap indikator seperti akses layanan dasar, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan kelompok rentan. Namun demikian pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan yang menunjukkan pemulihan dan peningkatan kualitas intervensi seperti proporsi KB yang terpenuhi terus meningkat, UHC dan ODF 100%, penurunan Indeks Ketimpangan Gender, serta peningkatan akses informasi dan transportasi.

Grafik diatas juga menunjukkan bahwa kinerja IPBK Kota Kediri secara konsisten lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun perlu dicermati adanya penurunan nilai IPBK Kota Kediri pada tahun 2024, sementara Provinsi dan Nasional justru mengalami peningkatan. Hal ini bisa menjadi indikasi perlunya evaluasi terhadap indikator-indikator yang stagnan atau mengalami penurunan, seperti prevalensi stunting, lansia berdaya, dan kesenjangan pendapatan. Sehingga diperlukan stabilisasi dan penguatan intervensi di semua dimensi IPBK melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis data mikro.

2) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

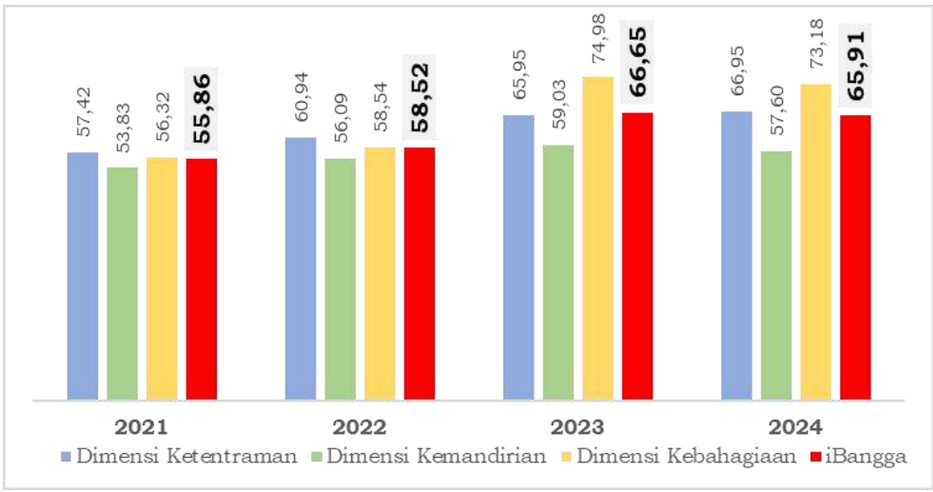
Ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan keluarga di Kota Kediri. Dengan memperhatikan faktor ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan sosial, Kota Kediri terus berupaya meningkatkan iBangga guna memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang.

Indikator indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menggambarkan kualitas peran dan fungsi keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi pengukuran, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga dapat menentukan level pembangunan keluarga di suatu wilayah dengan tiga kategori, yaitu keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Ketiga dimensi pengukuran iBangga antara lain :

a. Dimensi Ketentraman, meliputi Keluarga dengan Ibadah Rutin, Keluarga Akta Nikah, Keluarga dengan Akta Lahir Anak Usia 0-17 Thn, keluarga dengan Kepemilikan Jamkes, Keluarga Tanpa Konflik, Keluarga Tanpa Cerai;
b. Dimensi Kemandirian, meliputi Keluarga Memiliki Penghasilan, Keluarga Makan Beragam, Keluarga dengan Rumah Layak Huni, Keluarga Memiliki Tabungan, Keluarga Tidak Ada Putus Sekolah, Keluarga Tidak Ada ART Sakit, Keluarga dengan Akses Media Online; dan
c. Dimensi Kebahagiaan, meliputi Keluarga dengan Interaksi Antar Anggota, Keluarga Pengasuhan Anak Bersama Suami Istri, Terdapat Rekreasi Keluarga, dan Keluarga Ikut Kegiatan Sosial.

Perkembangan capaian iBangga Kota Kediri selama tahun 2021-2024 dapat dicermati pada grafik berikut:

Grafik 2. 19 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri Tahun 2021-2024



Sumber : BKKBN, 2024

Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas antara lain pengembangan 38 Kampung KB, peningkatan cakupan akta kelahiran program GO KLING (Go Keliling), PENCAKSILAT (Pelayanan Pencatatan Sipil bagi yang terlambat), Pelayanan 3 in 1 (KK, Akta Kelahiran dan KIA), Universal Health Coverage (UHC) 100%, CEPAK (Cegah Perkawinan Anak), PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Klinik Pendidikan, penanganan Anak Tidak Sekolah, SELIMUT HATI, dll.

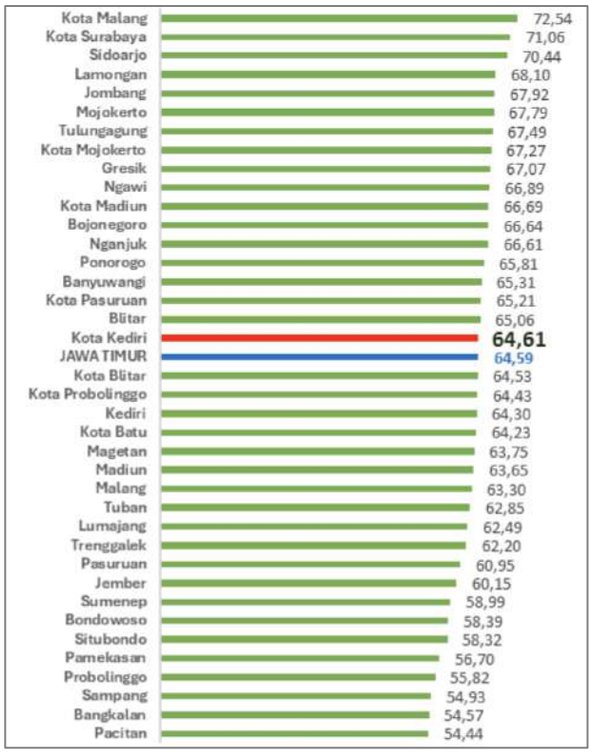
3) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Dari perspektif perlindungan sosial, Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan gambaran capaian keberhasilan sistem perlindungan anak dan menjadi tolok ukur sejauh mana anak-anak di Kota Kediri mendapatkan hak-haknya, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Upaya ini diperkuat dengan berbagai kebijakan dan program yang mendukung hak-hak anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Indeks Perlindungan Anak (IPA) diukur dengan komponen Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) mengacu pada 5 (lima) klaster Kabupaten/Kota Layak Anak.

IPHA direpresentasikan oleh pemenuhan indikator pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Sedangkan IPKA direpresentasikan melalui indikator pada Klaster Perlindungan Khusus.

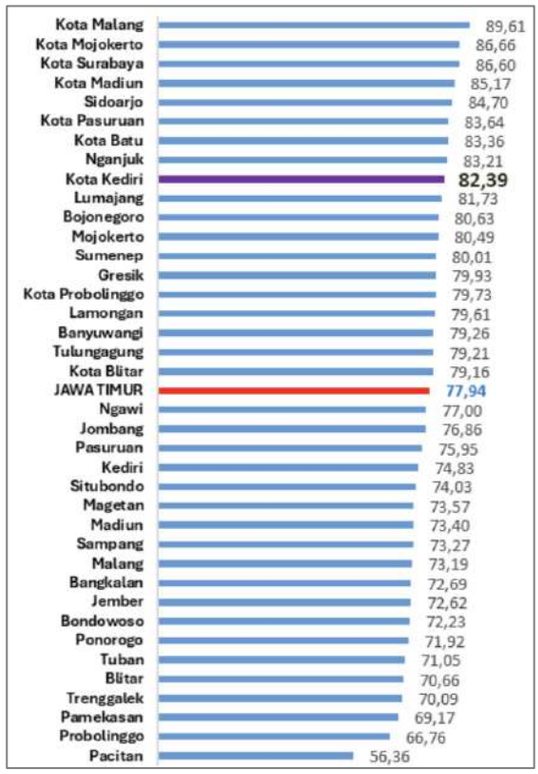
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur dapat dicermati pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. 20 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2023



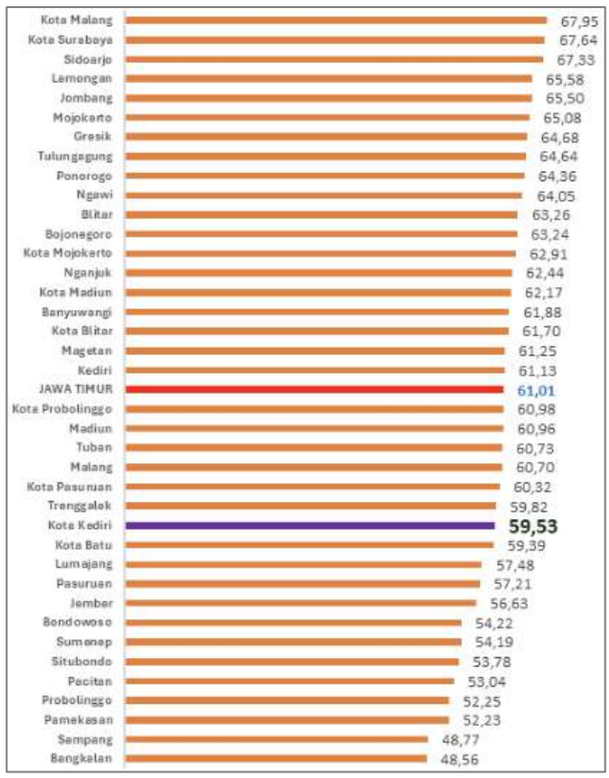
Sumber : Badan Pusat Statistik & KemenPPPA, 2022

Grafik 2. 21 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik & KemenPPPA, 2022

Grafik 2. 22 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik & KemenPPPA, 2022

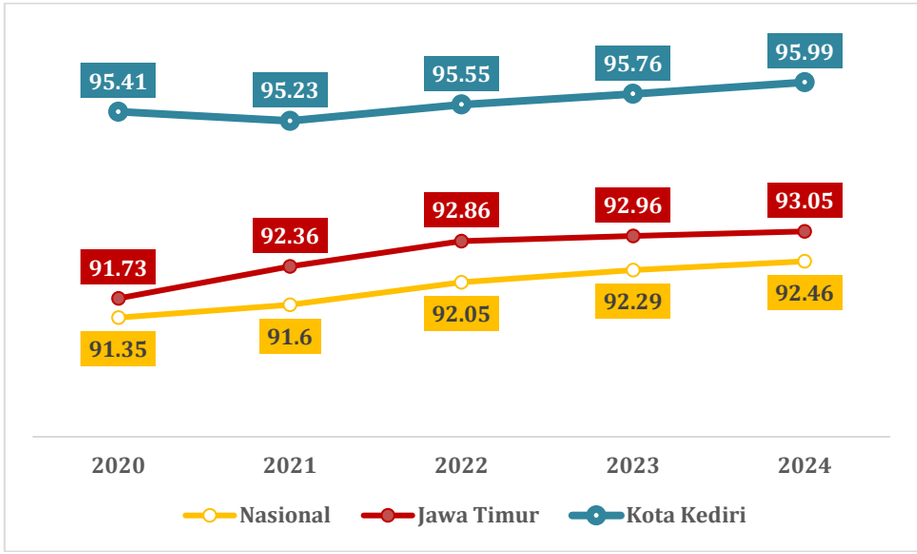
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Kediri dilaksanakan melalui penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak, penguatan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, optimalisasi kegiatan pendukung penyelenggaraan lima klaster Kota Layak Anak (KLA), meliputi hak sipil kebebasan; lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif; kesehatan dasar & kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya; perlindungan khusus melalui pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tahun 2024; serta peningkatan kolaborasi dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang tersebar di 46 Kelurahan dan 3 (tiga) Kecamatan. Kolaborasi lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media massa sangat penting dalam mendorong percepatan menuju Kota Kediri sebagai Kota Layak Anak.

4) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender, sehingga dapat diketahui ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, IPG adalah IPM yang disesuaikan (dikurangi) oleh adanya ketimpangan gender. Makin besar kesenjangan antar gender dalam pembangunan manusia, makin rendah nilai IPG suatu daerah dibandingkan dengan nilai IPM-nya.

Penghitungan IPG pada dasarnya hampir sama dengan IPM dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Angka IPG merupakan rasio dari angka IPM Perempuan (IPM-P) terhadap Angka IPM laki-laki (IPM-L). Bila capaian IPG semakin mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan gender semakin baik. Nilai IPG sama dengan 100 memberikan gambaran hasil capaian pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara, dan sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dari nilai 100, maka terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kota Kediri selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 23 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (menggunakan UHH hasil SP2020 LF)

Grafik diatas menunjukkan bahwa IPG Kota Kediri secara konsisten selalu berada di atas capaian rata-rata IPG Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kesenjangan capaian IPG Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur >2 poin dan Nasional >3 poin menunjukkan kinerja pembangunan gender di Kota Kediri yang sangat baik.

Selama periode 2020-2024 IPG Kota Kediri tumbuh 0,58 poin dan mencapai 95,99 pada tahun 2024 menuju kesetaraan penuh (nilai maksimal 100), menunjukkan bahwa perempuan di Kota Kediri mendapat akses dan manfaat pembangunan yang relatif setara dengan laki-laki, baik dalam hal pendidikan (RLS dan HLS), Kesehatan (Umur Harapan Hidup), maupun Ekonomi (Partisipasi Angkatan Kerja). Kondisi ini menempatkan Kota Kediri pada capaian IPG tertinggi kelima diantara Kab/Kota di Jawa Timur. Kedepan arah pembangunan perlu bertransformasi tidak hanya untuk kesetaraan akses melainkan juga kesetaraan kualitas dan partisipasi, sehingga pembangunan inklusif dan adil gender dapat terwujud.

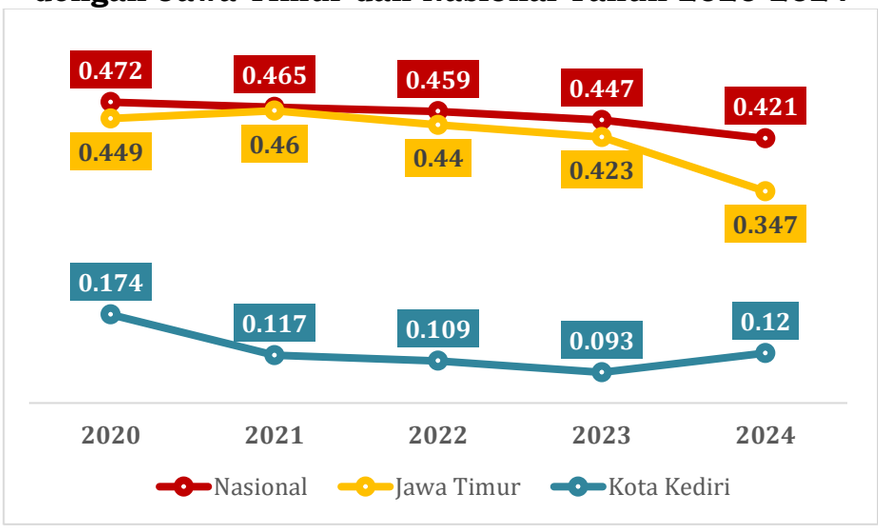
5) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Dalam aspek kesetaraan gender, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan sejauh mana kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor, termasuk partisipasi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kota Kediri terus mendorong kebijakan yang mempersempit kesenjangan ini melalui pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi kreatif, kepemimpinan, dan akses terhadap layanan sosial.

Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Nilai IKG berada pada rentang 0-1. Angka IKG sebesar 0 (nol) mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya. Sedangkan angka IKG sebesar 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender. Sehingga nilai IKG yang semakin rendah menuju ke 0 merepresentasikan terwujudnya kesetaraan dalam pembangunan.

Perkembangan capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri selama tahun 2020-2024 dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 24 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Kediri (Data Diolah), 2025

Berdasar grafik diatas IKG Kota Kediri secara konsisten lebih rendah dibanding rata-rata IKG Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Selama lima tahun terakhir IKG Kota Kediri menunjukkan penurunan 0,054 poin, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan menjadi namun masih jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur maupun Nasional dan menempatkan Kota Kediri sebagai daerah dengan IKG terendah diantara Kab/Kota di Jawa Timur.

Kenaikan tipis IKG Kota Kediri pada tahun 2024 diantaranya ditandai dengan adanya penurunan partisipasi perempuan dalam pasar kerja atau

lembaga legislatif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Tingkat Partisipasti Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan tahun 2024 menurun 1,09% menjadi 70,74%. Selain itu proporsi anggota DPRD perempuan di Kota Kediri tahun 2024-2029 menurun dibandingkan periode sebelumnya menjadi 26,67% (8 dari 30 anggota DPRD).

Keberhasilan pembangunan manusia idealnya diikuti dengan kesetaraan gender. Tingginya angka IPM idealnya diikuti dengan tingginya angka IPG dan semakin rendahnya angka IKG. Capaian pembangunan manusia Kota Kediri sudah baik dicerminkan oleh angka IPM pada kategori sangat tinggi, diikuti dengan tren IPG menuju angka 100 dan tren IKG menuju angka 0. Artinya pemerataan kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan telah ditunjukkan oleh nilai IPG yang tinggi dan IKG yang rendah.

6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam mengukur seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK juga mencerminkan sejauh mana pembangunan inklusif berlangsung, khususnya dalam konteks kesetaraan gender. Oleh karena itu, capaian partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menjadi bagian integral dalam mendukung upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di Kota Kediri.

Publikasi BPS Kota Kediri tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kota Kediri Tahun 2024 menunjukkan bahwa TPAK Kota Kediri tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,09% poin dibandingkan tahun 2023. Sedangkan TPAK Perempuan selama tiga tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan tren menurun sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2. 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Kediri Menurut Jenis Kelamin, 2022-2024



Sumber : BPS Kota Kediri, 2024

Grafik diatas menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan. Namun demikian dibanding tahun 2023, TPAK laki-laki mengalami penurunan 2,36% poin sedangkan TPAK Perempuan mengalami peningkatan 0,18% poin. Menurunnya TPAK Kota Kediri pada tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan tantangan dalam menjaga partisipasi angkatan kerja, termasuk perempuan. Dalam beberapa sektor terjadi peningkatan pekerja terutama di sektor industri (2.908 pekerja) dan jasa (769 pekerja), dimana kedua sektor tersebut umumnya lebih inklusif terhadap pekerja perempuan.

Untuk menjaga momentum keterlibatan angkatan kerja perempuan Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan upaya intensif untuk memperkuat akses perempuan terhadap kesempatan kerja yang berkualitas. Saat ini program pemberdayaan perempuan diantaranya telah dilakukan melalui Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); pelatihan vokasional kewirausahaan berbasis gender sesuai minat dan kebutuhan seperti salon, kecantikan, menjahit, *handycraft*, *bakery*, dsb yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; pembinaan koperasi wanita; kolaborasi dan penguatan hubungan industrial dengan perusahaan untuk ekosistem kerja yang ramah perempuan dll.

7) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Sementara itu, dalam upaya membangun generasi muda yang produktif dan berdaya saing, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas hidup pemuda di Kota Kediri.

Berbagai program telah dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan, serta partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, termasuk dalam kewirausahaan dan inovasi teknologi. Jika mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, pemerintah daerah diharuskan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan. RAD ini disusun untuk menggalang sinergi di antara aktor-aktor yang terlibat dalam pelayanan kepemudaan di daerah guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan global, daya saing daerah menjadi kunci strategis yang perlu diarusutamakan dalam setiap kebijakan pembangunan. Daya saing suatu daerah bukan sekadar ukuran pertumbuhan ekonomi, melainkan representasi dari kapasitas daerah dalam menciptakan nilai tambah melalui pemanfaatan potensi sumber daya secara efisien dan inovatif.

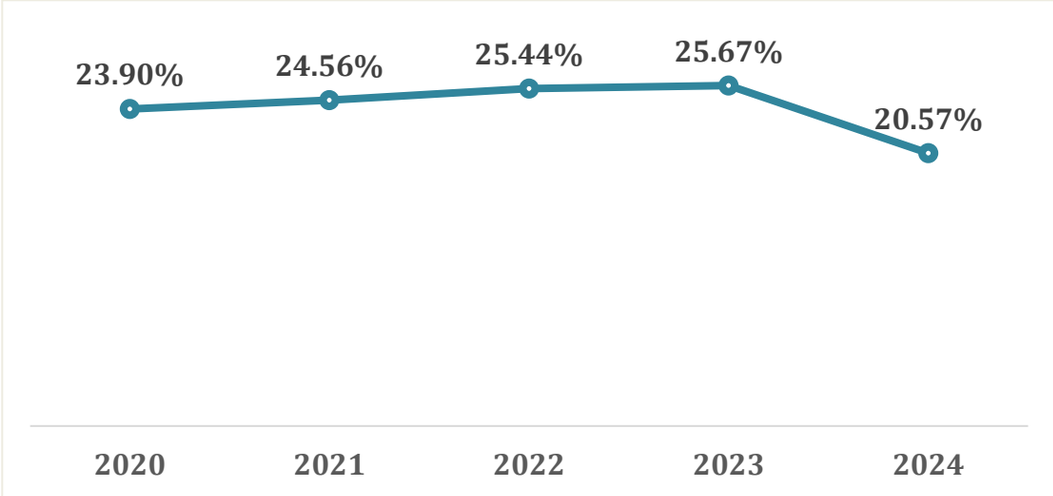
2.1.3.1 Daya saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah menjadi sebuah potensi dan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Berdasarkan data yang telah disampaikan dalam aspek demografi, rasio ketergantungan pada tahun 2024 sebesar 43.33% dan Kota Kediri masih akan mengalami bonus demografi hingga tahun 2035.

1) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2, , S2 Terapan dan S3. Proporsi ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus/ berijazah pendidikan tinggi dibandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan 100%. Adapun kondisi Kota Kediri pada tahun 2020-2024 sebagaimana dalam grafik berikut.

Grafik 2. 26 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024



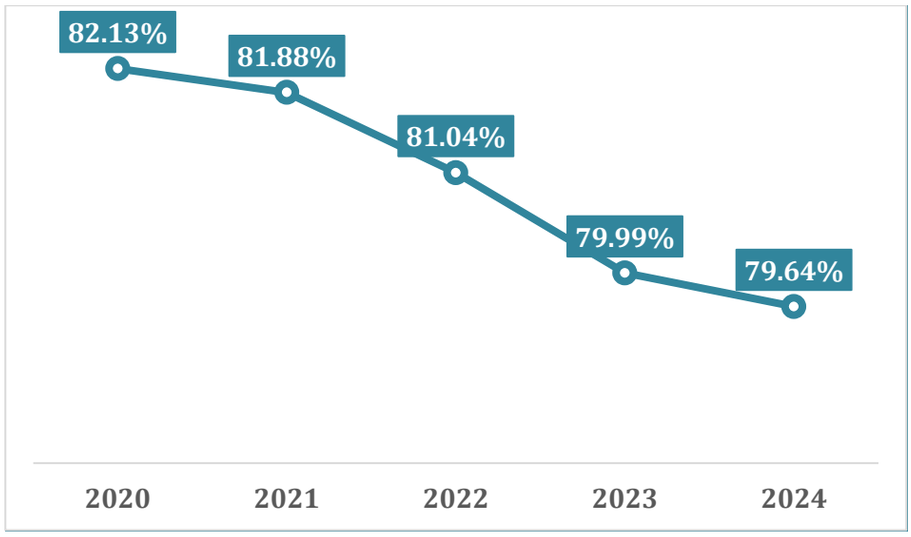
Sumber : BPS Kota Kediri, 2025

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Indikator rasio PDRB sektor industri di Kota Kediri mengukur nilai yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kota Kediri. Namun, persentase kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren penurunan dari 82,13% pada tahun 2020 menjadi 79,64% pada tahun 2024. Tren penurunan tersebut disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2. 27 Proporsi PDRB Industri Pengolahan (%) Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

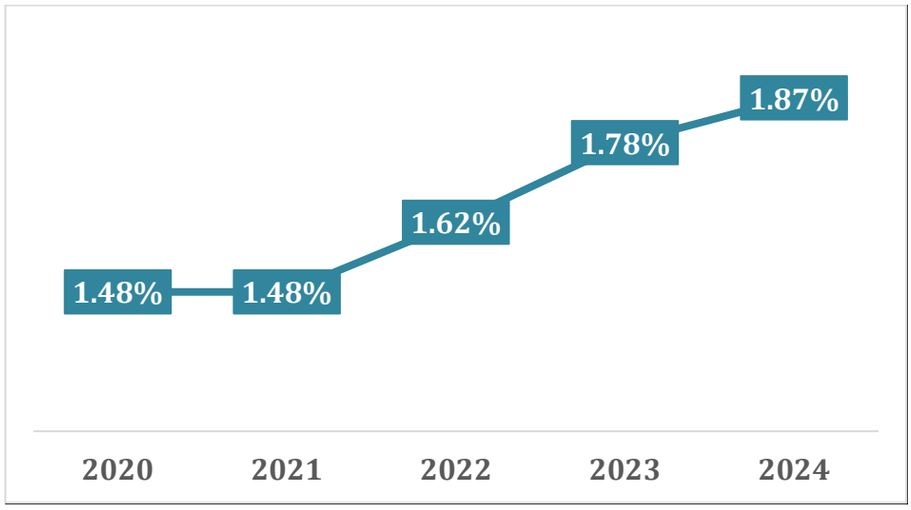
Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja industri pengolahan tembakau, yang selama ini mendominasi sektor industri Kota Kediri. Dalam sepuluh tahun terakhir, pihak manajemen industri tembakau banyak melakukan kebijakan alih lokasi dan alih sektor usaha, yang berdampak langsung terhadap nilai PDRB dan sektor ketenagakerjaan. Selain itu, faktor eksternal seperti kenaikan tarif cukai serta belum pulihnya daya beli masyarakat turut memperburuk pendapatan sektor tembakau. Kondisi ini menandakan pentingnya diversifikasi ekonomi Kota Kediri untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor saja.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang baru, dengan mengarahkan transformasi ke sektor perdagangan dan jasa, pengembangan sektor-sektor pendukung pariwisata, serta penguatan industri ekonomi kreatif dan teknologi, yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

2) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sesuai dengan bahasan pada sektor di atas, untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa, sektor-sektor pendukung pariwisata, serta sektor ekonomi kreatif. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum menjadi salah satu sektor yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mendukung pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya yakni dengan melaksanakan program bantuan modal yang bersumber dari DBHCHT sejak tahun 2021. Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 2. 28 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%) Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

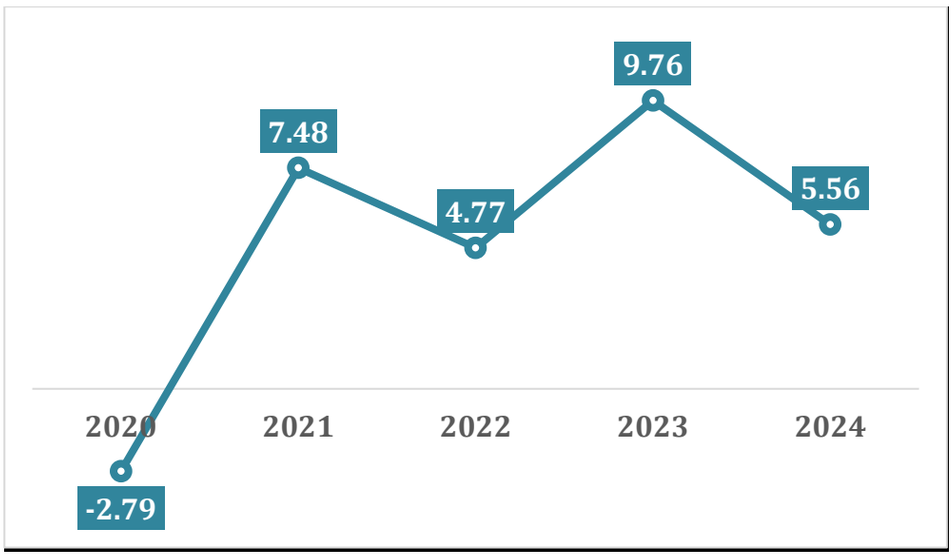
3) Nilai *Incremental Capital Output Ratio*

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. *ICOR* juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Nilai ICOR dianggap efisien apabila berada pada kisaran 3,00 – 4,00.

Grafik 2. 29 Nilai ICOR Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



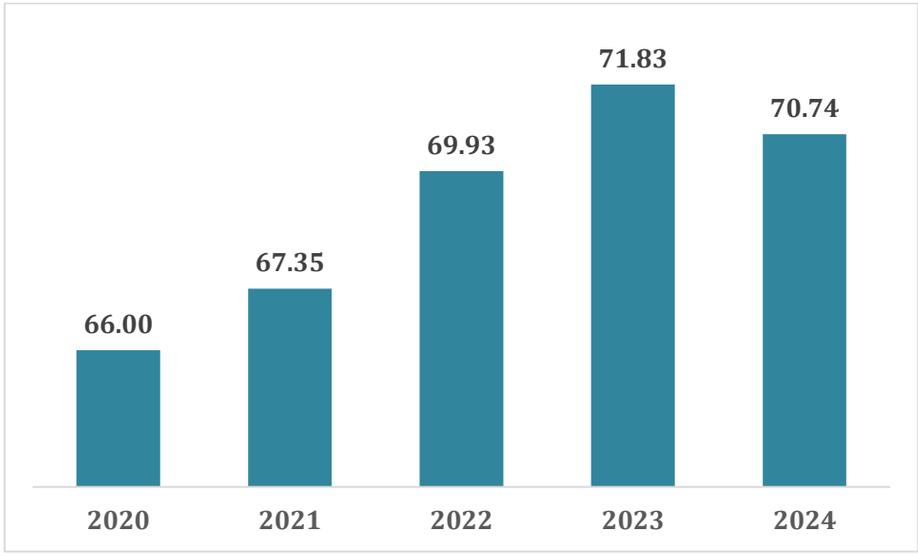
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan besaran *ICOR* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh dominasi sektor industri pengolahan, khususnya industri pengolahan tembakau. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2023, yang mana pada tahun tersebut pihak manajemen dari industri pengolahan tembakau melakukan investasi yang sangat besar untuk pembangunan Bandara Dhoho, sehingga nilai ICOR tahun tersebut sebesar 9,76 yang dapat disimpulkan bahwa pada tahun tersebut investasi dinilai "kurang efisien". Pada tahun 2024 nilai ICOR mulai mengalami pergeseran menjadi 5,56, sehingga mendekati "efisien". Kondisi tersebut tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Kota Kediri yang memacu pengembangan sektor selain industri pengolahan.

4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai 64 tahun.

Grafik 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kediri Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 tercatat sebesar 70,74%, mengalami penurunan sebesar 1,09 poin dibandingkan capaian TPAK pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penambahan jumlah penduduk bukan angkatan kerja sehingga berpengaruh pada capaian TPAK secara keseluruhan.

5) Penerapan Ekonomi Hijau

Kota Kediri saat ini memiliki lanskap ekonomi yang didominasi oleh sektor manufaktur, khususnya industri rokok, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun demikian, kota ini juga menunjukkan potensi yang berkembang di sektor lain seperti perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Konsep ekonomi hijau, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil mengurangi risiko lingkungan, menjadi semakin relevan bagi Kediri dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Analisis ini mengidentifikasi berbagai inisiatif hijau yang telah diterapkan di kota ini, termasuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, regulasi lingkungan, pengembangan infrastruktur hijau, proyek energi terbarukan, dan upaya pengelolaan sampah.

Terlepas dari kemajuan ini, transisi menuju ekonomi hijau di Kediri menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada industri yang ada, keterbatasan finansial, kurangnya kesadaran, isu kebijakan, dan faktor sosial budaya. Laporan ini menyajikan rekomendasi strategis untuk

mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup di Kota Kediri melalui pendekatan ekonomi hijau. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan transisi ini.

Dalam hal regulasi lingkungan, Kota Kediri memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah [61] dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Upaya kota dalam pengelolaan lingkungan juga diakui dengan meraih penghargaan sebagai "Kota Paling Berkelanjutan" di Indonesia oleh UI GreenCityMetric pada tahun 2023 dan 2024. Regulasi dan pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Kediri telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu lingkungan, yang merupakan pertanda positif untuk pengembangan ekonomi hijau lebih lanjut.

Kota Kediri juga berfokus pada pengembangan infrastruktur hijau dan pertanian perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikembangkan di setiap kelurahan, dan pertanian perkotaan didorong untuk mendukung ketahanan pangan. Pengembangan taman seperti Taman Sekartaji dan Hutan Joyoboyo juga menjadi bagian dari upaya ini. Fokus pada infrastruktur hijau dan pertanian perkotaan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mempromosikan sistem pangan lokal.

Dalam pengelolaan sampah, Kota Kediri memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPA) III dan rencana untuk lokasi pembuangan sampah alternatif. Unit Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) juga ada dan direncanakan untuk diperluas. Kolaborasi penelitian dengan universitas tentang solusi pengelolaan sampah juga dilakukan. Upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, termasuk fokus pada prinsip 3R, sangat penting untuk transisi menuju ekonomi sirkular, aspek kunci dari ekonomi hijau.

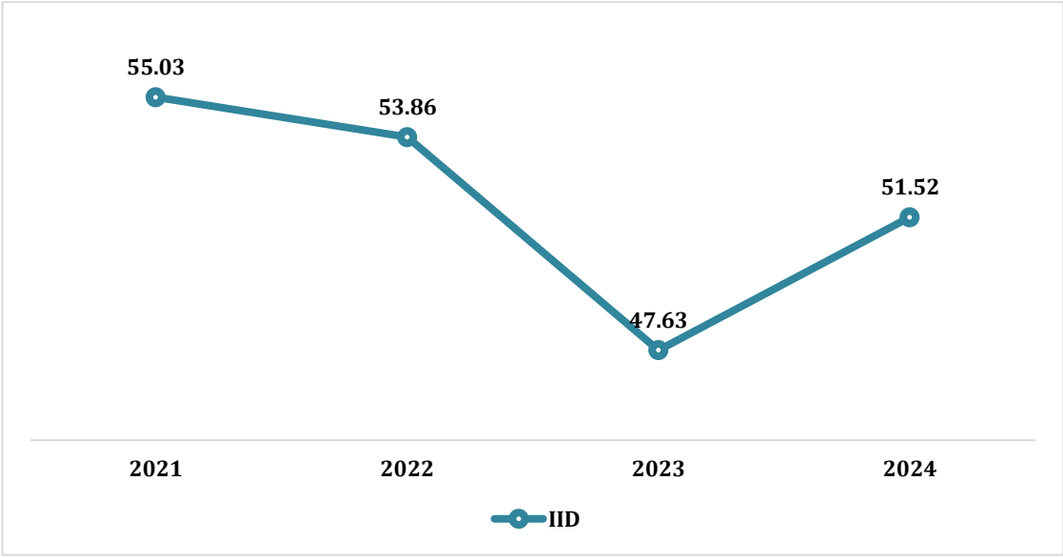
6) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Kediri mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, Kota Kediri mencatat skor 55,03 yang menempatkannya dalam kategori *Inovatif*. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan skor 53,86 dan semakin menurun di tahun 2023 dengan skor 47,63. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang

dihadapi Kota Kediri dalam mempertahankan konsistensi inovasi di tengah dinamika perubahan lingkungan dan sumber daya.

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan skor menjadi 51,52. Meskipun belum mencapai kategori *Sangat Inovatif*, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen inovasi dan implementasi program yang lebih efektif. Faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi lintas perangkat daerah, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan publik berkontribusi pada peningkatan ini.

Grafik 2. 31 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Kediri 2021-2024



Sumber: Indikator dalam Satu Data Kota Kediri, 2024; Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021-2024

Untuk meningkatkan capaian di masa depan, diperlukan strategi inovasi yang berkelanjutan, evaluasi rutin, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Penguatan budaya inovasi di setiap perangkat daerah menjadi kunci, dengan mendorong lingkungan kerja kreatif, terbuka terhadap perubahan, serta pemberian insentif bagi inovasi yang berhasil. Setiap perangkat daerah perlu mendukung kebijakan kepala daerah dengan mengintegrasikan inovasi dalam program kerja mereka, baik secara individu, kolaborasi antar perangkat daerah, maupun lintas sektor dengan melibatkan masyarakat atau instansi lain. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif yang lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di tingkat daerah, Lomba Inovasi dan Teknologi digelar

setiap tahun. Kegiatan ini berperan sebagai wadah partisipatif bagi masyarakat umum dan akademisi dalam menumbuhkan semangat riset terapan dan inovasi lokal untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh solusi kreatif atas permasalahan Pembangunan. Seiring dengan itu, upaya penguatan kolaborasi kelembagaan juga dilakukan melalui optimalisasi peran Jaringan Peneliti (Jarlit) yang melibatkan berbagai perguruan tinggi, baik negeri seperti IAIN Kediri, Universitas Brawijaya Kediri, Politeknik Negeri Malang, maupun perguruang tinggi swasta seperti Universitas Islam Kadiri, Universitas Kadiri, Universitas Strada, Universitas Nusantara PGRI Kediri dan sebagainya. Kolaborasi ini mendorong keterlibatan akademisi dalam riset-riset berbasis kebutuhan daerah serta memperluas ruang kontribusi masyarakat terhadap proses perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan, baik tantangan global, nasional, hingga regional, maka Kota Kediri perlu memantapkan perannya sebagai kawasan perkotaan strategis yang tangguh dan berdaya saing. Salah satu pendekatan penting dalam mewujudkannya adalah melalui penguatan identitas budaya lokal sebagai ciri khas dan identitas dalam kancah regional maupun nasional. Guna merealisasikan hal tersebut, dikembangkan konsep "DCito – Kediri City Tourism", yang menjadi tema pembangunan strategis berbasis potensi lokal. Konsep ini bertujuan menjadikan Kota Kediri sebagai destinasi pariwisata budaya dan sejarah, yang terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi kreatif, pelestarian cagar budaya, dan penguatan kapasitas pelaku pariwisata lokal.

7) *Return on Asset* (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pemerintah Kota Kediri memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu Perumda Tirta Dhaha yang mengelola air minum, Perumda Pasar yang mengelola sebagian pasar tradisional dan Perumda BPR "Bank Kota Kediri". Dalam pengelolaannya, diperlukan indikator untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan milik daerah dalam mengelola aset yang dimiliki. ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar keuntungan (laba bersih) total yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Dalam perhitungan ROA BUMD di Kota Kediri dilakukan dengan menghitung rata-rata ROA dari seluruh BUMD. Meskipun ROA belum menunjukkan risiko bisnis maupun

keberlanjutan laba, ROA BUMD diharapkan dapat menunjukkan seberapa baik BUMD di Kota Kediri menggunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan, menjadi indikator produktivitas BUMD, menunjukkan tata kelola perusahan BUMD dan menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan lanjutan. Berikut adalah capaian ROA BUMD di Kota Kediri selama tahun 2020-2024.

Tabel 2. 49 Capaian *Return on Asset (%)* BUMD Tahun 2020-2024

No.	BUMD	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perumda Tirta Dhaha	3.23	3.77	4.25	4.95	4.56
2	Perumda BPR	0.00	0.00	0.71	2.18	2.13
3	Perumda Pasar	0.00	0.00	0.59	1.19	1.11
ROA BUMD		**1.08**	**1.26**	**1.85**	**2.77**	**2.60**

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Kediri, 2025

2.1.3.3 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Dengan digitalisasi, layanan publik menjadi lebih responsif dan mudah diakses, memungkinkan proses yang lebih sederhana serta menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat. Sistem berbasis data memastikan setiap keputusan lebih tepat sasaran, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat kepercayaan publik. Partisipasi masyarakat juga semakin luas melalui platform interaktif, memungkinkan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan warga.

Lebih dari sekadar inovasi, digitalisasi adalah fondasi bagi kota yang dinamis dan berkelanjutan. Teknologi mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih optimal—transportasi yang lebih lancar, efisiensi energi yang lebih tinggi, dan lingkungan yang lebih terjaga. Selain itu, digitalisasi membantu kota dalam mengelola sumber daya dengan lebih cerdas melalui analisis data, sistem sensor, dan penggunaan kecerdasan buatan. Pengelolaan infrastruktur yang terhubung secara digital memungkinkan optimalisasi transportasi, energi, dan pengelolaan limbah, menciptakan kota yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Teknologi juga memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan, seperti bencana alam dan perubahan iklim, melalui sistem peringatan dini dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan transformasi digital, pemerintahan daerah dapat mewujudkan kota yang lebih inklusif, efisien, dan siap menghadapi dinamika global.

1) Satu Data Indonesia Kota Kediri

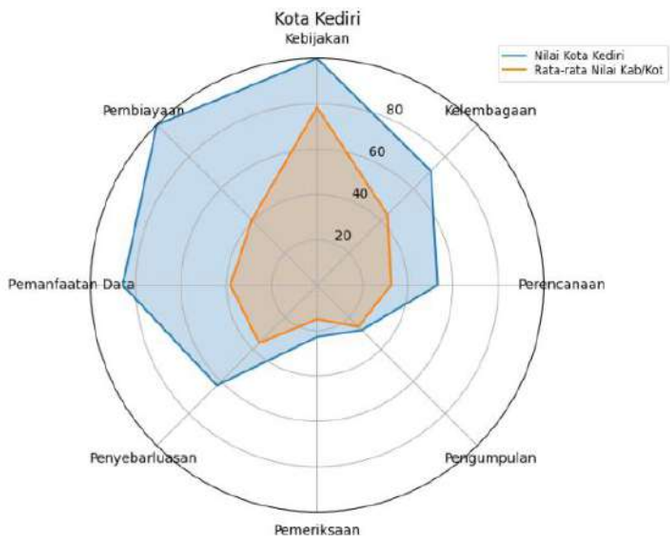
Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) tahun 2023 di Kota Kediri dilakukan oleh Bappenas untuk mengukur efektivitas tata kelola data dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga domain utama, yaitu Kebijakan dan Kelembagaan, Penyelenggaraan SDI, dan Data Leadership. Berdasarkan hasil evaluasi, Kota Kediri memperoleh nilai Indeks SDI sebesar 66.74. Nilai ini menunjukkan bahwa Kota Kediri berada pada kategori sedang dalam implementasi Satu Data Indonesia. Berikut adalah rincian nilai berdasarkan tiga domain evaluasi:

Tabel 2. 50 Indeks Satu Data Indonesia Kota Kediri

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	**85.59**
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	**38.70**
3	Domain Data Leadership	23%	**91.30**
	Indeks Satu Data Indonesia Kota Kediri	**-**	**66.74**

Sumber : Bappenas, 2024

Grafik 2. 32 Hasil Penilaian Evaluasi SDI Berdasarkan Aspek



Sumber : Bappenas, 2024

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa Domain Data Leadership memiliki nilai tertinggi (91.30), yang mencerminkan kuatnya kepemimpinan dalam tata kelola data di Kota Kediri. Domain Kebijakan dan Kelembagaan juga memiliki skor yang cukup tinggi (85.59), menunjukkan adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung SDI. Namun, tantangan utama berada pada Domain Penyelenggaraan SDI, dengan nilai hanya 38.70, yang

mengindikasikan masih adanya kendala dalam implementasi operasional, interoperabilitas data, serta keterpaduan antar perangkat daerah.

Tantangan utama dalam penyelenggaraan SDI di Kota Kediri meliputi fragmentasi data yang masih terjadi karena kurangnya keterpaduan antar perangkat daerah, menyebabkan data yang dihasilkan tidak seragam dan sulit diakses. Ketersediaan dan kualitas data juga menjadi kendala karena pembaruan data secara berkala masih belum optimal, sehingga beberapa data tidak selalu akurat dan mutakhir. Selain itu, kapasitas SDM dan infrastruktur digital di perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar tata kelola data dapat berjalan lebih efektif dan mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti.

Untuk meningkatkan implementasi SDI, Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan penguatan infrastruktur digital dengan mengembangkan sistem data berbasis digital yang terintegrasi antar perangkat daerah. Optimalisasi Forum SDI juga diperlukan dengan memperkuat peran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebagai Walidata guna meningkatkan koordinasi dan interoperabilitas data. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM harus dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis terkait pengelolaan data digital, analisis big data, dan pemanfaatan artificial intelligence.

Hasil evaluasi SDI Kota Kediri relevan dengan kebijakan transformasi digital sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Kota Kediri perlu mengadopsi layanan digital berbasis data terbuka dan sistem informasi yang terpadu agar perangkat daerah dapat saling terhubung secara lebih efisien. Pemanfaatan big data dan investasi dalam infrastruktur cloud computing, interoperabilitas sistem, serta keamanan siber menjadi langkah krusial guna menjamin keterpaduan data dan perlindungan informasi publik. Dengan transformasi digital yang optimal, Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas tata kelola data, mempercepat interoperabilitas antar instansi, serta mendukung kebijakan pembangunan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis bukti. Implementasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks SDI Kota Kediri secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Hasil evaluasi SDI Kota Kediri menunjukkan bahwa meskipun ada aspek kepemimpinan dan regulasi yang kuat, masih terdapat tantangan besar dalam penyelenggaraan SDI. Untuk mencapai transformasi digital

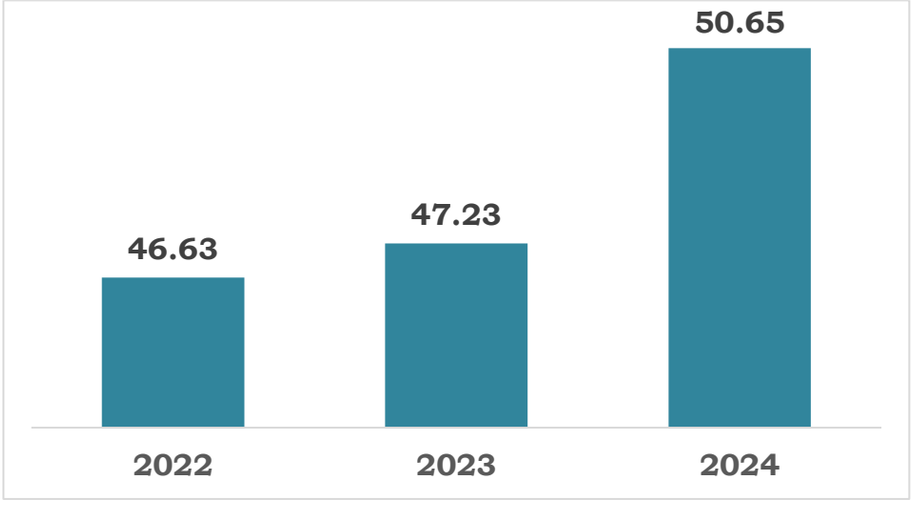
yang optimal, Kota Kediri harus memperbaiki interoperabilitas data, meningkatkan kapasitas SDM, serta mempercepat adopsi sistem digital yang terintegrasi. Dengan langkah-langkah ini, Kota Kediri dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan berbasis data dan mencapai target pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

2) Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Dalam upaya mengukur kemajuan transformasi digital masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui SDM Digital Center meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Indeks ini menjadi indikator penting untuk menilai kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi era digital, yang meliputi aspek infrastruktur, keterampilan digital, pemberdayaan, dan penciptaan lapangan kerja berbasis digital.

Berdasarkan data IMDI 2024, capaian Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2. 33 Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Kota Kediri Tahun 2022-2024



Sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024

Peningkatan nilai IMDI sebesar **+3,42 poin** pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya menempatkan Kota Kediri dalam kategori **Klasifikasi Tinggi** secara nasional.

Secara lebih rinci, capaian Kota Kediri pada masing-masing pilar IMDI tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Pilar 1: Infrastruktur dan Ekosistem** sebesar **64,92** (meningkat 1,06 poin dibandingkan 2023), menunjukkan perbaikan akses terhadap layanan internet, perangkat digital, serta ekosistem pendukung transformasi digital.
- **Pilar 2: Keterampilan Digital** sebesar **62,93** (sedikit menurun 0,06 poin dibandingkan 2023), menandakan perlunya penguatan dalam pendidikan keterampilan digital dasar hingga menengah di masyarakat.
- **Pilar 3: Pemberdayaan** sebesar **34,05** (meningkat 5,65 poin dibandingkan 2023), mengindikasikan adanya perluasan pemanfaatan teknologi digital untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- **Pilar 4: Pekerjaan** sebesar **40,26** (meningkat 8,64 poin dibandingkan 2023), mencerminkan pertumbuhan peluang kerja berbasis platform digital, wirausaha daring, dan ekonomi kreatif digital di Kota Kediri.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem pendukung di Kota Kediri sudah berjalan cukup baik. Namun, tantangan masih ada terutama dalam aspek keterampilan digital masyarakat, yang harus diperkuat untuk memastikan kesenjangan digital tidak melebar dan seluruh lapisan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja berbasis digital juga menunjukkan tren positif, namun tetap membutuhkan dorongan inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem digital di Kota Kediri. Optimalisasi seluruh pilar IMDI menjadi sangat penting dalam mendukung visi Kota Kediri sebagai kota maju, produktif, inovatif, dan berdaya saing di era transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045.

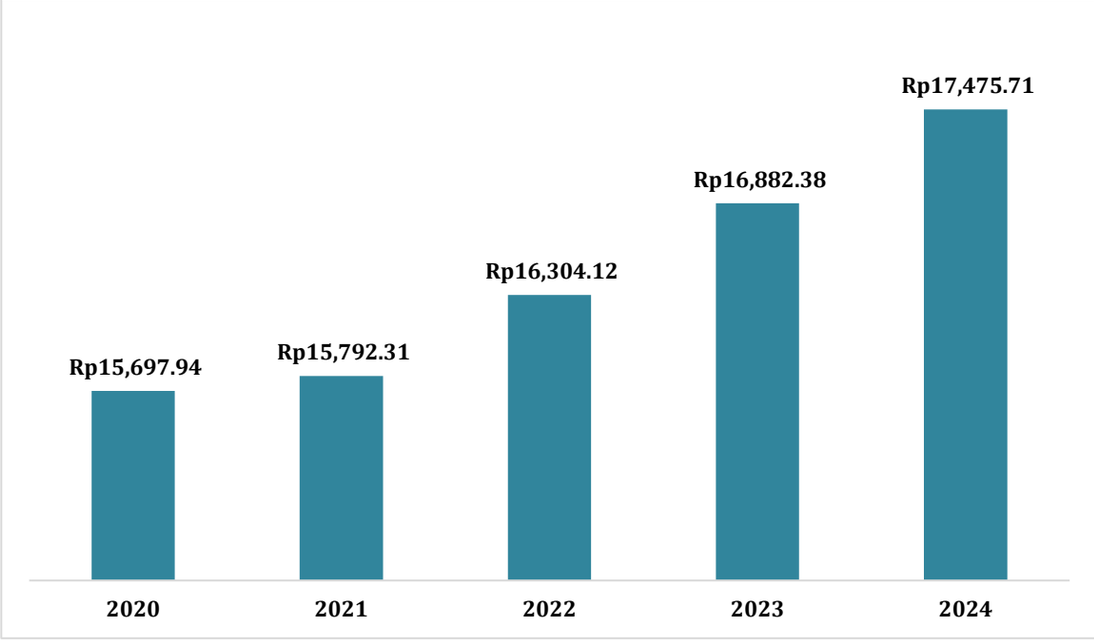
2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi Kota Kediri dengan ekonomi global saat ini berjalan secara bertahap melalui perdagangan, potensi investasi, keterhubungan dalam rantai pasok nasional, pergerakan tenaga kerja, dan potensi pariwisata. Pemanfaatan peluang dan pengelolaan tantangan akan menentukan sejauh mana integrasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kediri.

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kajian PDRB menurut pengeluaran ini, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik/aset produksi). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai *input* tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Grafik 2. 34 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Rp Milyar) Kota Kediri Tahun 2020-2024



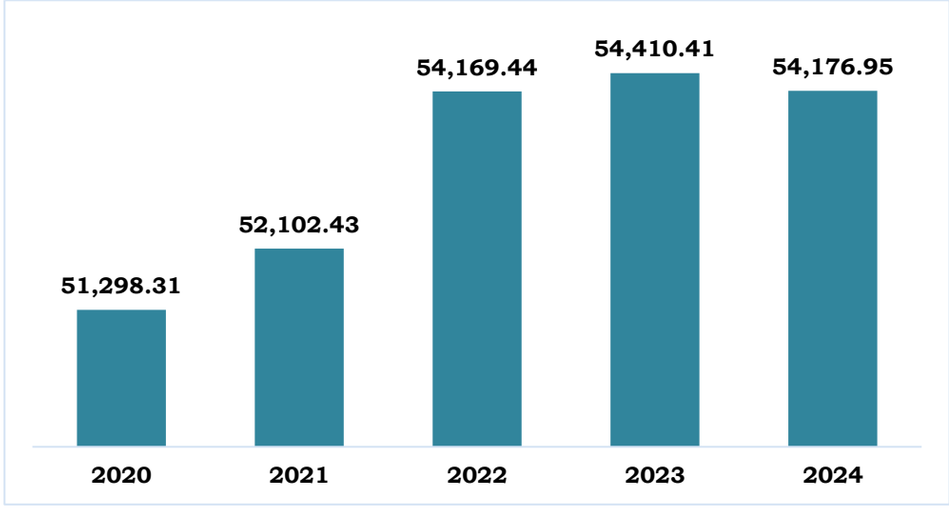
Dalam kurun waktu lima tahun, nilai PMTB Kota Kediri mengalami peningkatan yang pesat. Berdasarkan PDRB ADHK 2010, PMTB naik dari 16.697,94 miliar rupiah (2020) menjadi 17.475,71 miliar (2024).

2) Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Kediri, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten/kota lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor yaitu pembelian oleh badan-badan internasional, awak kapal (udara maupun laut), dan nonresiden yang singgah dan sebagainya.

Sedangkan transaksi impor menjelaskan adanya tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung *(direct purchase)* oleh penduduk Kota Kediri di luar wilayah domisilinya, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Kediri terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Grafik 2. 35 Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Milyar) Kota Kediri Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Secara total seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, pada tahun 2020 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar Rp 51.298,31 miliar. Kemudian pada tahun 2021, nilai net ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan menjadi Rp 52.102,43 miliar, sedangkan pada tahun 2024, nilai net ekspor barang dan jasa mencapai sebesar Rp 54.176,95 miliar.

3) Persentase Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kota Kediri menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), nilai sektor ini meningkat secara signifikan dari Rp 8.195,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 10.804,33 miliar pada tahun 2024. Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB juga

menunjukkan tren peningkatan, dari 8,67% pada tahun 2020 menjadi 10,31% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi, di mana sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,11% pada tahun 2021.

Tabel 2. 51 Persentase Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24%	0,24%	0,23%	0,23%	0,21%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,67%	9,11%	9,68%	10,19%	10,31%
Total	8,92%	9,35%	9,92%	10,42%	10,52%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Pertumbuhan yang stabil pada sektor perdagangan adalah salah satu indikator keberhasilan dari strategi diversifikasi ekonomi yang diusung oleh Pemerintah Kota Kediri. Kenaikan kontribusi PDRB sektor ini mencerminkan adanya pergeseran struktural yang perlahan namun pasti, dari ketergantungan mutlak pada industri pengolahan, menuju penguatan sektor jasa dan perdagangan.

Peningkatan aktivitas perdagangan memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan sektor lain, seperti transportasi, akomodasi, dan kuliner. Kehadiran Bandara Internasional Dhoho dan pembangunan infrastruktur jalan tol di kawasan Kediri Raya diproyeksikan akan semakin memperkuat posisi Kota Kediri sebagai simpul distribusi logistik dan perdagangan. Dengan demikian, pertumbuhan sektor perdagangan bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari fondasi ekonomi yang sedang dibangun untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu industri dan mewujudkan visi pembangunan yang lebih merata dan berdaya saing.

Sektor pertanian di Kota Kediri menghadapi tantangan ganda: penurunan lahan dan perlunya peningkatan produktivitas. Meskipun kontribusi sektor ini terhadap total PDRB secara nominal mengalami peningkatan dari Rp 323,44 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 397,35 miliar pada tahun 2024, persentase kontribusinya justru menurun dari 0,24% menjadi 0,21%. Tren ini mencerminkan bahwa meskipun sektor

pertanian tumbuh, laju pertumbuhan sektor lain (terutama industri dan perdagangan) jauh lebih cepat.

Meskipun kontribusi sektor perdagangan, pertanian, dan perikanan ini relatif kecil, peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi Kota Kediri sangat vital. Sektor-sektor ini bukan sekadar penopang ekonomi, tetapi juga fondasi untuk diversifikasi yang sehat, ketahanan pangan, dan penciptaan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan rekomendasi kebijakan ini ke dalam RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kota Kediri dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, mengurangi kerentanan terhadap satu sektor, dan mewujudkan visi "Kota Kediri yang MAPAN" untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

4) Net Ekspor Barang dan Jasa

Indikator Koefisien Variasi Harga Antar Waktu di Kota Kediri digunakan untuk mengukur tingkat kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan penting dari waktu ke waktu. Dalam dokumen RKPD 2025 tercatat bahwa target koefisien variasi harga antar waktu berada pada angka 8,50%, dengan realisasi capaian yang pernah mencapai 4,15% pada tahun 2024, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 52 Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kota Kediri Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	5,10	4,19	4,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Nilai koefisien pada tabel di atas menggambarkan adanya fluktuasi harga yang relatif moderat. Semakin kecil nilai koefisien variasi, semakin stabil harga barang di pasaran, dan sebaliknya semakin besar nilainya menandakan harga lebih bergejolak. Upaya pengendalian harga oleh Pemerintah Kota Kediri dilakukan melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, termasuk pemantauan rutin, operasi pasar, serta pengendalian stok di tingkat pasar. Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah berupaya menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga serta inflasi daerah terkendali.

5) Kontribusi PDRB Kota Kediri terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data PDRB Kota Kediri tahun 2024, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp168,75 triliun dan Atas Dasar

Harga Konstan (ADHK) 2010 sebesar Rp94,77 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,43 persen.

Tabel 2. 53 Kontribusi PDRB Kota Kediri terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024

ADHB	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Kota Kediri	132.406,06	141.467,12	152.778,31	159.736,72	168.748,92
PDRB Provinsi Jawa Timur	2.299.807,64	2.454.792,00	2.731.423,63	2.953.546,98	3.168.295,58
Kontribusi	**5,76%**	**5,76%**	**5,59%**	**5,41%**	**5,33%**
ADHK	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
PDRB Kota Kediri	84.374,98	86.485,59	89.907,20	91.631,35	94.774,08
PDRB Provinsi Jawa Timur	1.611.392,55	1.668.754,36	1.757.874,90	1.844.808,68	1.935.810,15
Kontribusi	**5,24%**	**5,18%**	**5,11%**	**4,97%**	**4,90%**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi PDRB Kota Kediri relatif cukup besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur untuk tingkat kota, yakni sebesar 5,33% dari total PDRB Provinsi Jawa Timur untuk ADHB dan sebesar 4,90% untuk ADHK, meskipun luas wilayahnya kecil. Kota Kediri berperan sebagai lokomotif ekonomi wilayah barat daya Jawa Timur dengan keunggulan sektor industri pengolahan, khususnya industri pengolahan tembakau.

Struktur ekonomi Kota Kediri yang masih sangat didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan khususnya industri pengolahan tembakau, dengan kontribusi mencapai 79,64 persen terhadap total PDRB Kota Kediri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan jika terjadi guncangan industry, misalnya kebijakan cukai rokok. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan kebijakan strategis untuk mendiversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan UMKM agar kontribusi Kota Kediri terhadap PDRB Jawa Timur tetap stabil dan berkelanjutan.

2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1) Indeks Kota Layak Huni

Kota Layak Huni atau *Liveable City* merupakan kota di mana semua penduduknya dapat tinggal dengan nyaman dan mendapatkan akses yang mudah. *Liveable City* menurut Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) adalah kota layak huni yang menggambarkan lingkungan yang nyaman dan suasana kota sebagai tempat tinggal dan bekerja, dengan melihat berbagai aspek baik secara fisik (fasilitas perkotaan, infrastruktur, tata ruang, dan lain-lain) serta non-fisik (sosial hubungan, kegiatan ekonomi, dan lain-lain). Perlu dicatat bahwa tingkat *Liveable City* kota-kota besar di Indonesia yang

diteliti oleh IAP bersifat '*snapshot*' yaitu observasi yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Berikut adalah data yang menunjukkan indeks Kota Layak Huni Kota Kediri pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 54 Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2020-2024

Nilai	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	72.6	77.8	79.37	79.83	81,02

Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2024

Dari hasil kajian Indeks Kota Layak Huni terhadap 29 indikator, diketahui bahwa Sektor Informal Kota dan Fasilitas Pejalan Kaki memiliki nilai cukup. Berikut disampaikan detail kinerja masing-masing indikator yang diukur dalam Indeks Kota Layak Huni.

Tabel 2. 55 Indikator Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2024

No.	Indikator	Nilai indikator	Mutu pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Keamanan kota	80.23	B	Baik
2	Fasilitas keamanan	81.53	B	Baik
3	Politik kota	82.64	B	Baik
4	Keselamatan kota	83.49	B	Baik
5	Kesehatan kota	79.00	B	Baik
6	Fasilitas kesehatan	85.44	B	Baik
7	Kebersihan kota	79.62	B	Baik
8	Persampahan	78.29	B	Baik
9	Pengelolaan air bersih	84.52	B	Baik
10	Perekonomian kota	79.26	B	Baik
11	Fasilitas ekonomi	80.91	B	Baik
12	Sektor informal kota	71.23	C	Cukup
13	Ketercukupan pangan	84.71	B	Baik
14	Informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat	82.13	B	Baik
15	Fasilitasi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	84.29	B	Baik
16	Perumahan	79.87	B	Baik
17	Fasilitas peribadatan	86.15	B	Baik
18	Fasilitas pendidikan	82.48	B	Baik
19	Fasilitas taman kota	84.75	B	Baik
20	Fasilitas olahraga	78.48	B	Baik
21	Fasilitas kesenian dan budaya	79.37	B	Baik
22	Pelestarian cagar budaya	81.97	B	Baik
23	Fasilitas rekreasi	81.05	B	Baik
24	Fasilitas pejalan kaki	73.38	C	Cukup
25	Transportasi	80.36	B	Baik
26	Pengelolaan drainase	78.00	B	Baik
27	Jaringan telekomunikasi	83.47	B	Baik
28	Kelistrikan	83.43	B	Baik
29	Penataan kota	79.62	B	Baik

No.	Indikator	Nilai indikator	Mutu pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
	IKLH Kota Kediri	**81.02**	**B**	**Baik**

Sumber : Dokumen IKLH Kota Kediri , 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kota Layak Huni adalah dengan menyusun dokumen rencana penataan sektor informal serta melakukan revitalisasi dan beautifikasi fasilitas pejalan kaki.

2) Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur Kota Kediri mulai diukur pada tahun 2022 dengan komponen yang diukur meliputi kinerja infrastruktur jalan dan jembatan, kinerja infrastruktur air bersih serta kinerja infrastruktur drainase. Pada tahun 2024 diperoleh hasil pengukuran Indeks Infrastruktur Kota Kediri sebesar 87,41%, yang merupakan rata-rata nilai dari masing-masing kinerja infrastruktur Jalan sebesar 79,21%, kinerja infrastruktur Air Bersih sebesar 100,00% dan kinerja infrastruktur Drainase sebesar 83,01%. Berikut ini capaian Indeks Infrastruktur Kota Kediri tahun 2020 - 2024.

Tabel 2. 56 Indeks Infrastruktur Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur	70,00	75,00	82,87	86,80	87,41

Sumber: Bappeda, 2024

Meskipun capaian Indeks Infrastruktur Kota Kediri secara konsisten menunjukkan peningkatan selama rentang 2022 – 2024, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Melengkapi pendataan kinerja jalan pada jalan dengan fungsi kolektor sekunder untuk mendukung pengukuran kinerja infrastruktur jalan pada indikator persentase jalan kota dalam kondisi baik (dapat dilintasi kendaraan dengan kecepatan 40 km/jam). Kondisi saat ini pendataan kinerja jalan kolektor sekunder adalah sepanjang 50,83 km dari total panjang jalan kota dengan fungsi kolektor sekunder sepanjang 52,25 km.
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas jembatan baik dalam kondisi baik maupun jembatan dalam kondisi rusak ringan.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan trotoar di Kota Kediri, khususnya pada kawasan pusat kegiatan dengan intensitas pejalan kaki yang tinggi. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan menambah panjang trotoar untuk meningkatkan kontinuitas jaringan jalur

pejalan kaki, maupun meningkatkan kondisi perkerasan trotoar, khususnya pada ruas trotoar dengan kondisi rusak.

4. Untuk meningkatkan pencapaian nilai rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan di Kota Kediri dapat dilakukan kajian pendahuluan mengenai tingkat aksesibilitas wilayah (di antaranya rasio luas jalan per luas wilayah, dan rasio panjang jalan per luas wilayah) sebagai pembanding dalam pengambilan keputusan penambahan panjang jalan pada area tertentu di Kota Kediri.

Untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, perlu dievaluasi ruas jalan kewenangan kota di Kecamatan Mojoroto dengan peran strategis untuk ditingkatkan fungsinya menjadi kolektor sekunder, sebagaimana yang menjadi arahan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2021-2041.

3) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman harus menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Penilaian rumah layak huni berdasarkan pada luasan tempat tinggal, akses air minum dan sanitasi layak, ketahanan bangunan dan pencahayaan serta penghawaan.

Indikator rasio rumah layak huni diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah yang ada di wilayah Kota Kediri. Kinerja peningkatan rasio rumah layak huni tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah tangga memiliki akses hunian yang layak dan terjangkau	83,19	84,16	80,20	84,56	83,94

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

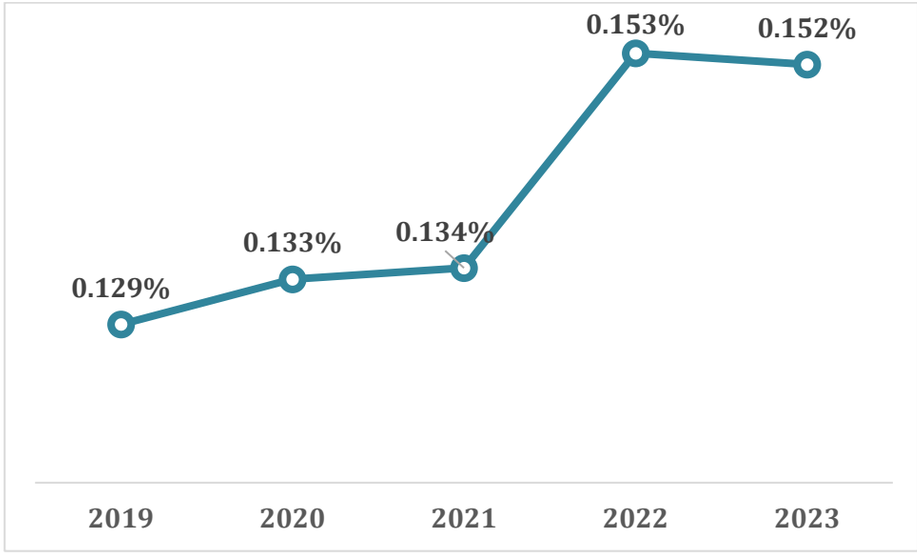
2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, tingkat inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah (*tax ratio*) adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu daerah, yakni untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan daerah dengan sumber dayanya sendiri. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah terhadap PDRB, maka pemerintah daerah tersebut lebih dapat mengandalkan APBD untuk melakukan pembangunan. Semakin tinggi *tax ratio*, maka ketergantungan suatu daerah terhadap pembiayaan melalui dana transfer dari pusat maupun sumber lain akan semakin berkurang.

Grafik 2. 36 Rasio Pajak terhadap PDRB Kota Kediri (%) Tahun 2020-2024



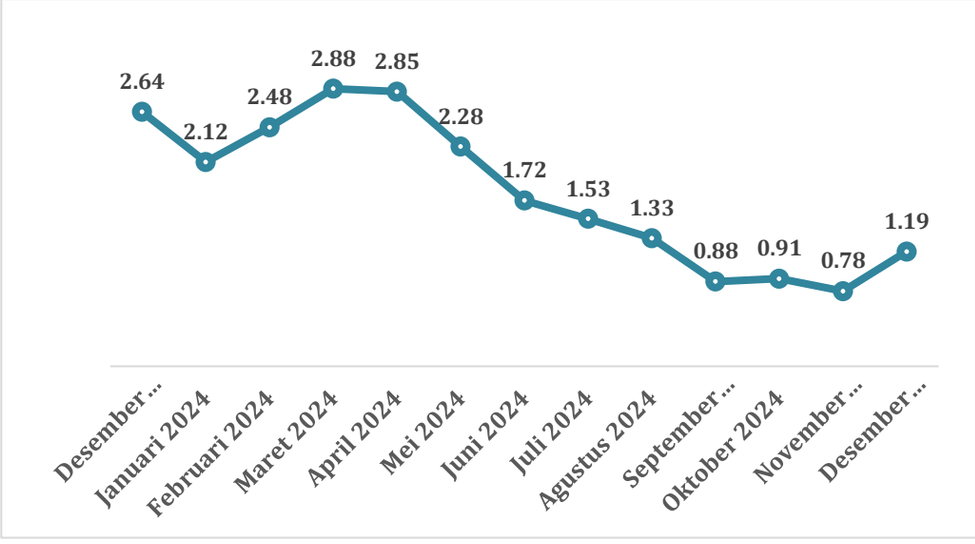
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, 2025

2) Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi menggambarkan fluktuasi kenaikan harga komoditas dalam rentang waktu tertentu. Di sisi lain, inflasi juga menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Apabila harga komoditas cenderung

mengalami penurunan atau terjadi kondisi deflasi, dikhawatirkan perekonomian masyarakat justru mengalami penurunan. Oleh sebab itu, inflasi bukanlah kondisi yang harus dihindari, namun lebih tepat harus dijaga rentang fluktuasinya. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan pemerintah pusat, target inflasi ditetapkan berada pada rentang 2,5% +/- 1%, atau pada rentang 1,5% - 3,5%.

Grafik 2. 37 Tingkat Inflasi year 0n year (yoy) Kota Kediri
Bulan Desember 2023 – Desember 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Berdasarkan grafik di atas, tingkat inflasi Kota Kediri selama bulan Desember 2023 sampai Desember 2024 relatif stabil, yakni berada pada rentang 0,78% - 2,88%. Namun perlu dijadikan catatan, bahwa tingkat inflasi tahunan pada 2024 sebesar 1,19% berada di bawah rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah. Tingkat inflasi yang rendah ini tak lepas dari adanya deflasi secara *month-to-month* (mtm) yang terjadi sebanyak enam kali sepanjang tahun 2024, yaitu pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September.

3) Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target inklusi keuangan nasional sebesar 98% di 2045. Inklusi keuangan ditekankan menjadi bagian penting dari Arah Pembangunan Stabilitas Ekonomi Makro yang diharapkan dapat mendorong optimalnya fungsi intermediasi sektor jasa keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, dan inklusif. Inklusi Keuangan

adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai enabler dalam pembangunan nasional. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indikator komposit bagi level Kabupaten/Kota untuk mengukur kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). IKAD menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data *supply* dan *demand* serta berfungsi sebagai alat pemantauan untuk menganalisis capaian program inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh TPAKD. IKAD disusun dengan mempertimbangkan:

1. Dimensi penggunaan yaitu perbandingan antara jumlah pengguna layanan keuangan formal (individu dan pelaku usaha) dengan jumlah penduduk.
2. Dimensi ketersediaan merupakan perbandingan jumlah fasilitas layanan keuangan formal dengan 100.000 penduduk dewasa.
3. Dimensi kedalaman yaitu perbandingan nominal tabungan dan deposito dengan PDRB dan nominal pinjaman UMKM dengan nominal pinjaman total, yang mencerminkan tingkat pemanfaatan dan kontribusi layanan keuangan terhadap perekonomian daerah.
4. Dimensi penggunaan mencakup kepemilikan rekening tabungan/ koperasi, *e-wallet,* pinjaman, dan asuransi
5. Dimensi ketersediaan mencakup Anjungan Tunai Mandiri (ATM), agen laku pandai dan *merchant* QRIS.
6. Dimensi kedalaman mencakup rasio deposito dan tabungan terhadap PDRB dan rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman.

Indeks Akses Keuangan Daerah setiap Kabupaten/ Kota dirilis oleh Bappenas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

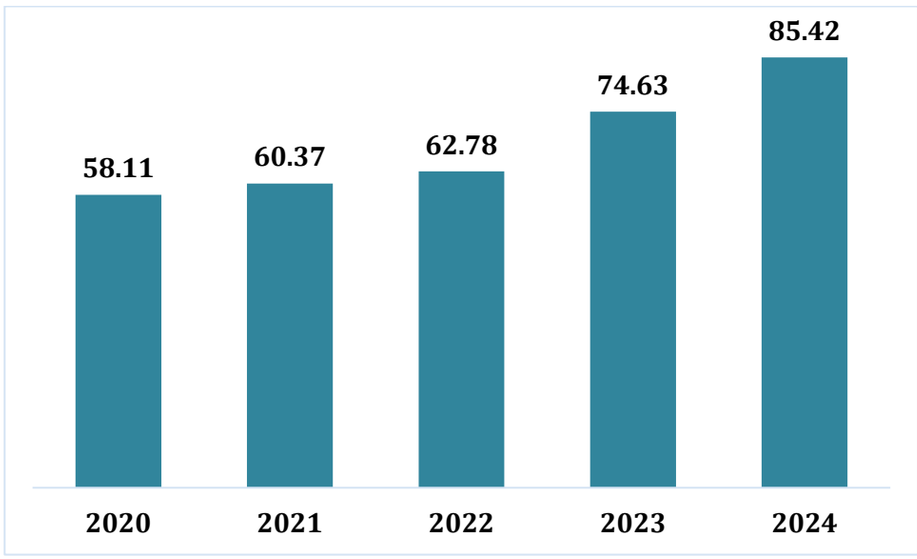
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif merupakan pendekatan dalam pengaturan dan administrasi pemerintahan yang

mengedepankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, regulasi dan tata kelola dapat menjadi lebih baik dalam melayani kepentingan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk perkembangan ekonomi dan sosial.

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat beberapa komponen untuk pengukuran indeks reformasi birokrasi, antara lain: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 38 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber : KemenPAN-RB, 2025

Lima tahun terakhir, realisasi indeks reformasi birokrasi terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 IRB Kota Kediri sebesar 58,11 dengan kategori CC (Cukup). Selanjutnya pada tahun 2024 IRB meningkat menjadi 85,42 dengan kategori A (Sangat Baik). Peningkatan nilai ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Kediri secara konsisten melakukan perbaikan

dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini mencakup efisiensi pengelolaan, transparansi dan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri antara lain melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja, yaitu penetapan nilai anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kediri berdasarkan kinerja pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja OPD di Kota Kediri.

2) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, IPP disusun sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana unit penyelenggara pelayanan publik telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional.

Evaluasi pelayanan publik dilakukan terhadap unit pelayanan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan mengacu pada enam aspek utama, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan.

Penilaian dilakukan secara menyeluruh melalui metode observasi, wawancara, dan telaah dokumen, yang kemudian menghasilkan skor yang digunakan untuk menentukan kategori kinerja pelayanan publik dari suatu unit kerja, mulai dari kategori “buruk”, “cukup”, “baik”, hingga “sangat baik”. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Kota Kediri tahun 2024 sebesar 4,2 dengan predikat sangat baik. Perangkat daerah yang mewakili perhitungan IPP tahun 2024, yaitu: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Satpol PP.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang terdiri dari :

a. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
b. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
c. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
d. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
f. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
g. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
i. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang

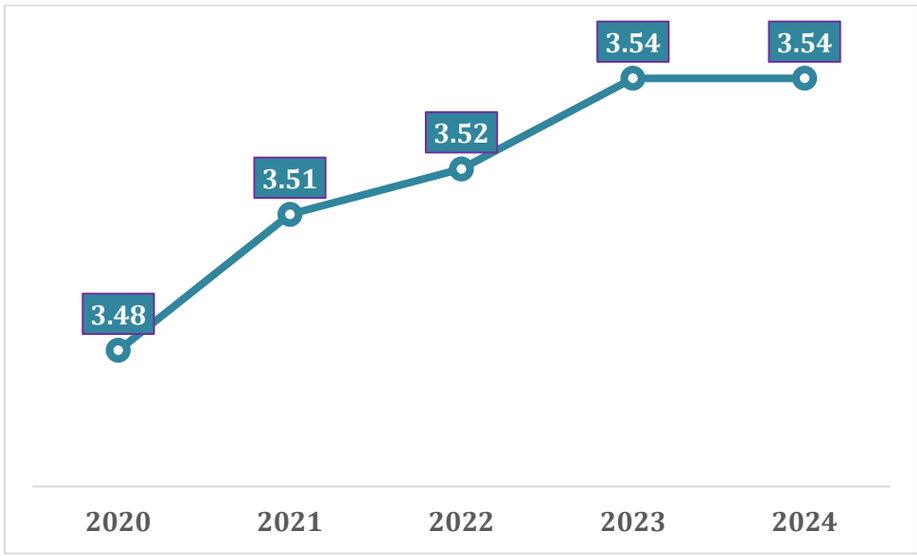
bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut:

a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Perkembangan nilai IKM Kota Kediri Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 39 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda, 2024

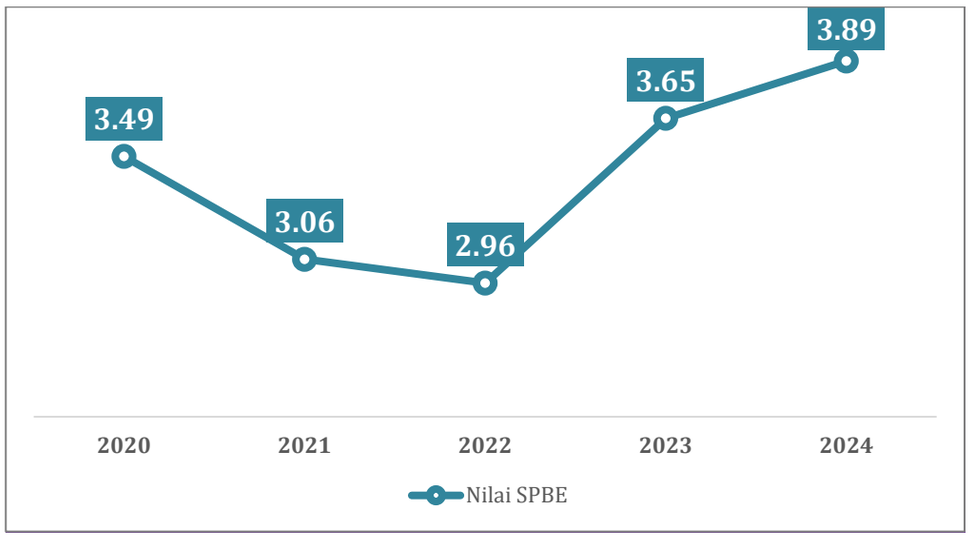
Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai IKM adalah menerapkan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menyelenggarakan Sertifikasi Pelayanan Publik (ISO), memanfaatkan media sosial secara masif sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dalam setiap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan.

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indikator indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan hasil penilaian tahunan dari Kementerian PAN RB. Secara lengkap capaian Indeks SPBE sebagai berikut:

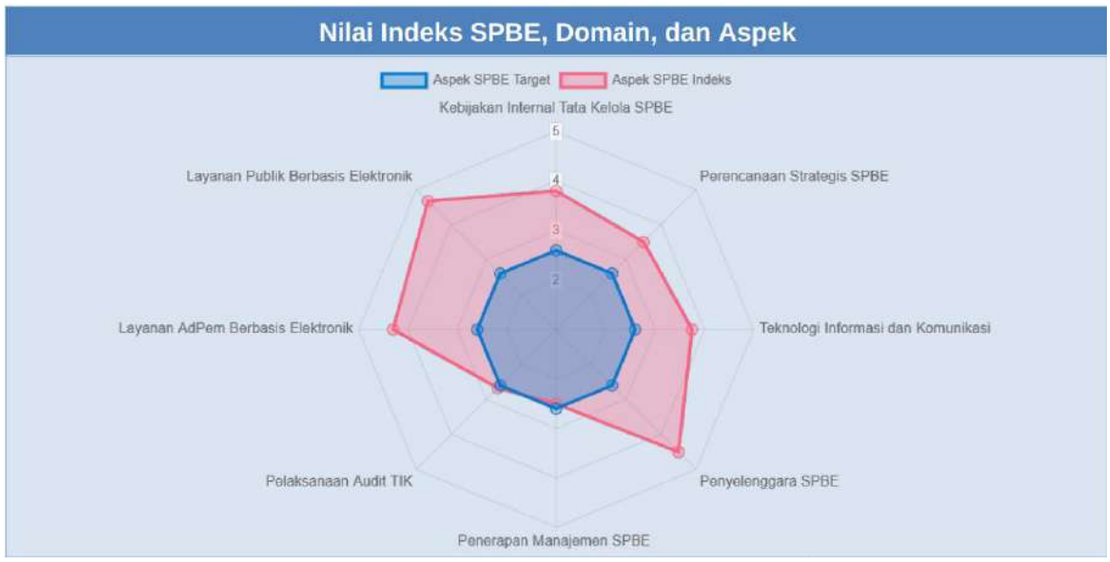
Grafik 2. 40 Indeks SPBE Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2024

Dengan capaian Indeks SPBE sebesar 3,89 pada tahun 2024, Kota Kediri memperoleh predikat SANGAT BAIK dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peningkatan ini mencerminkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memahami dan mendukung penerapan SPBE dengan menghadirkan bukti yang relevan terhadap indikator yang ditetapkan. Capaian ini didorong melalui upaya strategis dalam optimalisasi infrastruktur digital, penguatan tata kelola elektronik, dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. Kota Kediri berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian SPBE demi mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Secara lengkap penilaian pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 41 Nilai Indeks SPBE Berdasarkan Domain dan Aspek



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2025

Secara keseluruhan, evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE) di Kota Kediri menggambarkan gambaran yang komprehensif terkait dengan delapan aspek yang dievaluasi. Pemenuhan tingkat 3 hingga 5 pada sebagian besar indikator menunjukkan komitmen dan kemajuan yang signifikan dalam implementasi SPBE di tingkat pemerintahan daerah. Keberhasilan implementasi aspek-aspek seperti kebijakan internal, perencanaan strategi, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen, audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan tata kelola layanan SPBE menciptakan landasan yang kokoh untuk pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terukur di Kota Kediri. Namun, perlu diingat bahwa evaluasi ini adalah representasi pada periode waktu tertentu dan perubahan berkelanjutan serta peningkatan perlu menjadi fokus untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam penerapan SPBE di Kota Kediri.

Meskipun implementasi SPBE di Kota Kediri telah menunjukkan capaian positif, namun masih diperlukan perbaikan signifikan pada aspek manajemen data dan kebijakan keamanan informasi yang belum sepenuhnya mencapai target. Untuk itu, langkah konkret harus ditempuh melalui penerapan kebijakan keamanan informasi yang lebih ketat, tindak lanjut yang konsisten terhadap hasil audit TIK, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan reguler, serta penerapan teknologi keamanan terkini guna memperkuat perlindungan data secara menyeluruh.

Perbaikan juga perlu diarahkan pada penguatan manajemen dan integrasi layanan SPBE, dengan memastikan implementasi manajemen risiko, manajemen aset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen layanan berjalan merata di seluruh perangkat daerah, serta peningkatan integrasi antar layanan administrasi pemerintahan dan publik berbasis elektronik sebagai prioritas utama dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepuasan masyarakat. Sejalan dengan arahan Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB melalui Surat Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah dalam rangka Penerapan Kebijakan Pemerintahan Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, Pemerintah Kota Kediri melakukan penyesuaian dengan mengalihkan indikator SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (IPD) mulai tahun 2026 sehingga tata kelola pemerintahan digital Kota Kediri dapat berjalan lebih terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial adalah tiga pilar penting dalam pembangunan negara yang demokratis dan sejahtera. Hukum berkeadilan mengacu pada sistem hukum yang adil, tidak memihak, dan mampu menegakkan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Keamanan nasional yang tangguh adalah kondisi di mana negara mampu melindungi kepentingan dan kedaulatannya dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Sedangkan demokrasi substansial adalah bentuk demokrasi yang tidak hanya berfokus pada prosedur dan mekanisme formal, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi terwujud dalam kehidupan sehari-hari warga negara.

1) Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Persentase penegakan Perda dihitung dari jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah pelanggaran perda dikali seratus persen. Indikator ini bertujuan menghitung jumlah kasus pelanggaran perda yang berhasil terselesaikan sesuai prosedur yang berlaku dalam satu tahun. Adapun data penegakan Perda dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58 Penegakan Peraturan Daerah (%) Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan
2020	100 %	9	9
2021	95,93 %	123	118
2022	100 %	2.478	2.478
2023	100%	2.768	2.768
2024	100%	1.888	1.888

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 2025

2) Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)

Dasar pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM adalah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali selama 1 Tahun kepada Panitia Nasional RANHAM. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Tabel 2. 59 Persentase Capaian Aksi HAM Kota Kediri Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Capaian Aksi HAM	70,62	72,38	80,70	96,70

Sumber: Bappeda, 2024

Berdasarkan tabel diatas persentase Capaian Aksi HAM mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan trend kenaikan. Pada Tahun 2021 sebanyak 9 Aksi, dengan nilai 70,62%, Tahun 2022 sebanyak 6 Aksi dengan capaian 72,38%, Tahun 2023 sebanyak 7 Aksi dengan capaian 80,70% sedangkan Tahun 2024 sebanyak 6 Aksi dengan capaian 96,70%.

3) Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan ketertiban diperoleh dari hasil survei berupa kuesioner berisikan tentang penegakan 12 (dua belas) ruang lingkup ketentraman dan ketertiban di Kota Kediri (berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Ruang Lingkup yang dimaksud adalah:

a. Tertib jalan dan angkutan jalan;
b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
c. Tertib Sungai, saluran dan mata air;
d. Tertib usaha;
e. Tertib lingkungan;
f. Tertib bangunan;
g. Tertib sosial masyarakat;
h. Tertib kesehatan;
i. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
j. Tertib pemondokan, kos, dan penginapan/ hotel;
k. Tertib kependudukan; dan
l. Tertib pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Peraturan Daerah Ketentraman ketertiban mencakup 12 (dua belas) Tertib yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam menegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum di masyarakat. Sejumlah 12 (dua belas) Tertib tersebut menjadi Variabel yang akan menjadi dasar mengukur Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kota Kediri. Setiap, variabel memiliki Bobot Nilai yang berbeda sesuai dengan penting dan urgensi substantif penegakan Trantibum di Kota Kediri. Penilaian dilakukan dengan survei kepada masyarakat secara langsung untuk menilai persepsi mereka tentang Trantibum. Analisis Data dilakukan dengan menilai 4 level jawaban, jawaban angka 4 = sangat setuju, angka 3 = Setuju, angka 2 = Cukup dan angka 1 = Tidak Setuju. Sasaran survei Trantib adalah perangkat publik (kelurahan, RT/RW, Ormas, dan masyarakat). Adapun data Indeks Ketentraman dan Ketertiban tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 60 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	86	87	87.11	86.65	86.04

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Hasil survei dari perangkat publik selama 6 (enam) tahun terakhir, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Kediri menunjukkan tren stabil dalam penegakan ketentraman dan ketertiban. Upaya yang konsisten akan terus ditingkatkan agar dapat mempertahankan tingkat ketertiban yang lebih tinggi di Kota Kediri.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Sebagai salah satu kota bersejarah dan pusat ekonomi di Jawa Timur, Kota Kediri berperan dalam memperkuat diplomasi dan pertahanan Indonesia di tingkat regional melalui penguatan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Dalam konteks pertahanan berdaya gentar, stabilitas kota dan ketahanan sosial-ekonomi menjadi bagian dari ketahanan nasional. Kota Kediri membangun ketahanan pangan, energi, dan digital yang selaras dengan agenda nasional dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan infrastruktur yang berkembang dan penguatan sumber daya manusia berbasis teknologi, Kota Kediri berkontribusi dalam menciptakan daya gentar di berbagai bidang, termasuk keamanan siber dan inovasi industri strategis.

1) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kota Kediri terus meningkatkan daya saing melalui penguatan infrastruktur, tata kelola yang baik, pembangunan SDM, serta optimalisasi ekonomi digital. Dengan semakin kompetitifnya Kediri dalam IDSD, diplomasi ekonomi Indonesia semakin kuat, memperluas hubungan perdagangan, dan menarik investasi yang mendukung pertahanan ekonomi nasional.

Adapun nilai setiap komponen pilar tersebut untuk Kota Kediri sekaligus nilai IDSD Nasional, provinsi dan Kota Kediri pada tahun 2023 dan 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. 61 Skor Komponen IDSD

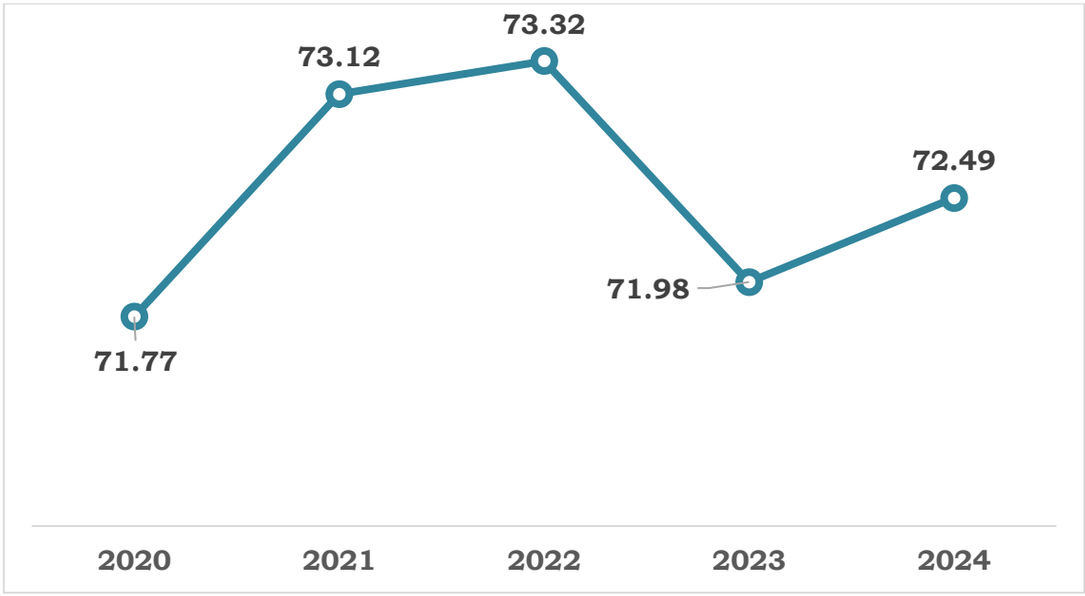
Komponen	Pilar	Nilai 2023	Nilai 2024
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,74	4,75
	Infrastruktur	3,34	3,53
	Adopsi TIK	4,87	4,89
	Stabilitas Ekonomi Makro	2,93	3,32
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	4,17	4,15
	Ketrampilan	4,36	4,25
Pasar	Pasar Produk	1,16	1,41
	Tenaga Kerja	3,53	3,42
	Sistem Keuangan	0,99	1,45
	Ukuran Pasar	5,00	5,00
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	2,67	4,75
	Kapabilitas Inovasi	3,16	2,92
Nilai IDSD Kota Kediri Tahun 2023		**3,41**	**3,65**
Nilai IDSD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023		**3,78**	**3,88**
Nilai IDSD Nasional Tahun 2023		**3,44**	**3,43**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2) Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja setiap tahunnya. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Adapun nilai SAKIP Kota Kediri tahun 2020 – 2024 sebagaimana dalam grafik berikut.

Grafik 2. 42 Nilai SAKIP Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber: KemenPAN-RB, 2024

3) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK adalah pernyataan profesional yang menyimpulkan tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Opini ini mencerminkan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin kuat ketika laporan keuangan mendapatkan opini positif, menandakan pengelolaan yang baik dan pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, opini BPK menjadi indikator utama dalam menilai kredibilitas suatu entitas pemerintah, yang berpengaruh pada daya saing daerah serta memperkuat legitimasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah Kota Kediri telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut sejak tahun 2014, menandakan Pemerintah Kota Kediri memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

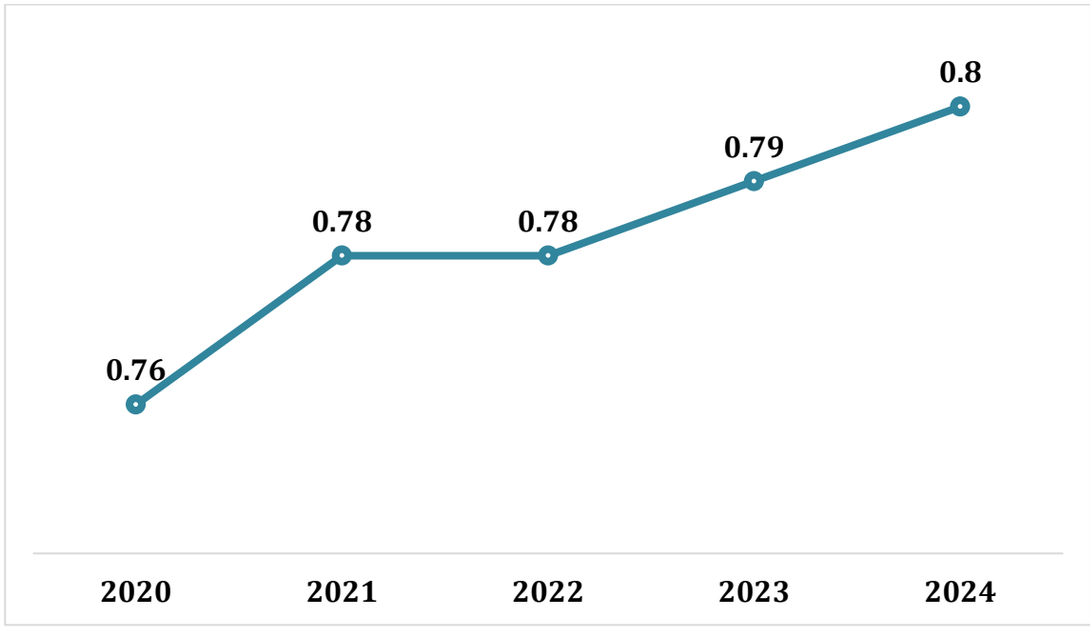
Bidang Urusan Pendidikan di Kota Kediri bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing guna mencetak sumber daya manusia yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab

dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan mengedepankan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta inovasi dalam pembelajaran berbasis teknologi, Kota Kediri berkomitmen untuk membangun generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

a) Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah mempunyai produktivitas yang rendah pula. Perkembangan Indeks pendidikan Kota Kediri tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 43 Indeks Pendidikan Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2024

Indeks pendidikan Kota Kediri selama 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 0,004 poin dari 0,76 menjadi 0,80. Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terjadinya peningkatan indeks pendidikan, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan dan semakin besar kontribusinya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Kediri.

b) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 62 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2020-2024

No	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	%	106,26	102,9	105,76	102,87	102,87
2	SMP/MTs	%	109,99	111,18	118,21	114,39	114,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2025

c) Guru yang Memenuhi S1/D-IV

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kota Kediri tahun 2020-2024.

Tabel 2. 63 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Kediri Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Guru yang Berkualifikasi S1/DIV (%)	89.49	83.75	89.74	89.65	90.52

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2025

d) Persentase ketercapaian SPM Bidang Pendidikan

Indikator Persentase Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan digunakan untuk mengukur efektivitas Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar, menengah, dan PAUD. Indikator ini mencakup partisipasi pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), partisipasi dalam

pendidikan kesetaraan bagi yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, serta partisipasi dalam pendidikan PAUD. Berikut adalah tabel Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 Dasar Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 64 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	100,27%	80,56%	88,40%	93,76%	99.87%
2	Anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100,25%	105,72%	110,08%	106,94%	102.87%
3	Anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100.00%
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional				86.96%	100.00%
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional				75.10%	100.00%
6	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional				89.29%	100.00%
7	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional				84.26%	100.00%
8	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B				84.23%	84.23%
9	Pertumbuhan proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV				89.43%	89.43%
10	Iklim keamanan SD				74,28%	100.00%
11	Iklim keamanan SMP				71.65%	100.00%
12	Iklim kebinekaan SD				75.04%	100.00%
13	Iklim kebinekaan SMP				75.82%	100.00%
14	Iklim inklusivitas SD				56.60%	100.00%
15	Iklim inklusivitas SMP				60.32%	100.00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2025

Capaian SPM bidang pendidikan Kota Kediri pada periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan layanan dasar pendidikan dasar dan layanan dasar kesetaraan konsisten mencapai target, sementara layanan dasar pendidikan PAUD mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2024. Dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan mutu, ketercapaian SPM pendidikan Kota Kediri diharapkan terus meningkat pada periode 2025–2029. Fokus utamanya adalah memperkuat kualitas layanan pendidikan agar lebih merata, berdaya saing,

dan berkelanjutan dalam rangka mencetak generasi Kota Kediri yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia.

2) Kesehatan

Bidang Urusan Kesehatan di Kota Kediri bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta promosi kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan mengedepankan aksesibilitas layanan kesehatan yang inklusif serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, Kota Kediri berkomitmen untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal sebagai fondasi utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Penentuan target telah menyesuaikan dengan target dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) antara lain Angka Kematian Ibu, Cakupan JKN, Usia Harapan Hidup,

a) Persentase ketercapaian SPM Bidang Kesehatan

Indikator Persentase Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan digunakan untuk mengukur efektivitas Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas. Indikator ini mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, terduga tuberkulosis, serta orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS. Data capaian indikator ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Kediri dan didokumentasikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan setiap tahunnya.

Berdasarkan data realisasi tahun 2020-2024, ketercapaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Kediri menunjukkan tren yang fluktuatif, terutama pada pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan usia lanjut. Berikut adalah tabel Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Kediri selama periode 2020-2024:

Tabel 2. 65 Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	90,73	90,02	91,70	89,51	78,37
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	93,09	100	93,19	90,14	77,66
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	98,22	94	98,04	92,69	81,69
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	93,35	96	99,7	100,00	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan	100	100	124,99	100,00	119,6
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga usia produktif mendapatkan skrining kesehatan	26,09	70,2	90,73	100,00	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga usia lanjut mendapatkan skrining kesehatan	34,95	64,73	87,45	91,96	91,90
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	17,67	33	44,98	100,00	100,11
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan	66,43	95	110	100	100,04
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	76,43	92,71	107	100,00	100,35

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan kesehatan	45,87	43,32	125	100,00	132,32
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	91,98	100	100,17	100,00	163,73

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kediri, Satu Data Kota Kediri, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Kediri menunjukkan fluktuasi yang signifikan, terutama pada pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan usia lanjut. Pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, terjadi penurunan pada tahun 2023 dengan capaian masing-masing 89,51% dan 90,14%. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah sasaran proyeksi dengan sasaran sesungguhnya sehingga target tidak tercapai, kurangnya akses ke fasilitas kesehatan di beberapa wilayah pinggiran, serta keterbatasan tenaga kesehatan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin turut mempengaruhi rendahnya capaian indikator ini.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir juga mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 92,69% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir, serta keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan khusus bayi di beberapa wilayah. Sementara itu, pelayanan kesehatan pada usia produktif, penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, terduga tuberkulosis, dan HIV menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh intervensi program kesehatan secara intensif melalui sosialisasi, edukasi, dan skrining kesehatan massal, dukungan kegiatan kunjungan rumah dan pengadaan peralatan kesehatan, serta kerjasama yang baik dengan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan.

Untuk meningkatkan ketercapaian SPM Bidang Kesehatan, terutama pada pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan usia

lanjut, diperlukan beberapa strategi, antara lain peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, optimalisasi program skrining dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM), serta digitalisasi sistem informasi kesehatan dan pemantauan capaian SPM. Pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, diperlukan peningkatan akses fasilitas kesehatan di wilayah pinggiran dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendampingan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan kesehatan bayi melalui kader kesehatan dan posyandu, serta program jemput bola dengan mobile clinic untuk menjangkau ibu hamil dan bayi baru lahir di daerah terpencil.

Pada optimalisasi program skrining dan pencegahan PTM, diperlukan peningkatan skrining kesehatan usia produktif dan usia lanjut melalui program pemeriksaan kesehatan berkala di Puskesmas dan Posyandu, serta peningkatan edukasi kesehatan tentang hipertensi, diabetes melitus, dan kesehatan mental melalui kampanye kesadaran kesehatan dan sosialisasi aktif. Sedangkan pada digitalisasi sistem informasi kesehatan dan pemantauan capaian SPM, diperlukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) untuk pemantauan capaian SPM secara real-time, serta integrasi data kesehatan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data penerima layanan kesehatan.

Dengan strategi yang adaptif dan inovatif, kolaborasi yang sinergis, serta peningkatan edukasi kesehatan, diharapkan ketercapaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Kediri dapat ditingkatkan pada periode 2025-2030 untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas.

b) Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Cara perhitungan/rumus cakupan ini adalah:

$$\text{AKI} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$$

Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan *prenatal* dan *obstetric*. Berikut adalah data yang menunjukkan angka kematian ibu di Kota Kediri tahun 2020-2024.

Tabel 2. 66 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	48.32	154.36	25.27	0.00	55.01

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Fluktuasi ini menggambarkan bahwa masih ada faktor risiko besar dalam kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Capaian nol kematian pada 2023 menjadi bukti bahwa dengan pelayanan yang tepat, risiko bisa ditekan. Namun, kenaikan kembali di 2024 menegaskan perlunya layanan maternal yang lebih merata, tenaga kesehatan yang sigap, dan sistem rujukan yang lebih cepat.

c) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang. Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Formula indikator yang digunakan adalah jumlah balita dengan gizi buruk dibanding jumlah balita yang ada di Kota Kediri. Berikut ini merupakan data persentase balita gizi buruk di Kota Kediri.

Tabel 2. 67 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Kediri
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	5.60	5.10	8.20	8.50	0.16

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2025

Prevalensi balita gizi buruk di Kota Kediri menunjukkan tren yang sangat fluktuatif sepanjang periode 2020–2023. Namun, pada 2024 terjadi penurunan signifikan hingga mencapai 0,16%, yang merupakan capaian terbaik selama lima tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi perbaikan gizi, baik melalui program kesehatan berbasis Posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), maupun dukungan program pengentasan kemiskinan. Keberhasilan ini tidak boleh membuat Pemkot Kediri lengah, karena masalah gizi pada anak bisa kembali muncul apbila pengawasan dan intervensi tidak berkesinambungan.

d) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Berbeda dengan gizi buruk, angka balita gizi kurang justru memperlihatkan fenomena yang sebaliknya. Berikut ini merupakan data persentase balita gizi kurang di Kota Kediri:

Tabel 2. 68 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Kediri
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	0,11	0,07	0,07	0,04	5,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2025

Kondisi gizi kurang pada balita relatif terkendali pada periode 2020–2023 dengan angka prevalensi di bawah 0,1%. Namun, pada tahun 2024 prevalensi melonjak menjadi 5,80%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran masalah gizi dari kategori gizi buruk menuju gizi kurang. Fenomena ini perlu dicermati sebagai tantangan baru yang menuntut peningkatan intervensi gizi sensitif, edukasi konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang, serta peningkatan pemantauan tumbuh kembang balita oleh tenaga kesehatan di tingkat layanan dasar.

e) Cakupan Desa Siaga Aktif

Salah satu kekuatan Kota Kediri adalah keberhasilan menjaga seluruh kelurahan tetap aktif dalam program Desa Siaga. Berikut ini merupakan Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Kediri.

Tabel 2. 69 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Kediri Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2025

Selama periode 2020–2024, cakupan desa siaga aktif di Kota Kediri sebesar 100%. Hal ini menunjukkan seluruh kelurahan telah memiliki kesiapan dalam menghadapi masalah kesehatan, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat, kader kesehatan, dan kesiapan sistem rujukan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program kesehatan berbasis Masyarakat

3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Kediri bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan tata ruang yang berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan bangunan publik, serta penataan ruang yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Dengan mengedepankan perencanaan yang terpadu dan pelaksanaan yang efektif, Kota Kediri berkomitmen untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan demi tercapainya kota yang maju dan berdaya saing.

a) Persentase Infrastruktur SDA Yang Memadai

Indikator Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang Memadai digunakan untuk mengukur kondisi kelayakan dan keberlanjutan infrastruktur pengelolaan sumber daya air, terutama jaringan irigasi dan pemeliharaan sungai di Kota Kediri. Indikator ini dihitung dengan perhitungan pembobotan yang terdiri dari 80% capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik dan 20% capaian sungai yang terpelihara, sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu yang efektif dan efisien. Data

capaian indikator ini diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dan terdokumentasikan dalam Laporan Kinerja Infrastruktur SDA setiap tahunnya.

Indikator ini dihitung dengan mengalikan capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan bobot 80%, kemudian menambahkannya dengan capaian sungai yang terpelihara yang dikalikan dengan bobot 20%. Dengan kata lain, 80% dari capaian jaringan irigasi yang dalam kondisi baik dan 20% dari capaian sungai yang terpelihara dijumlahkan untuk mendapatkan persentase infrastruktur SDA yang memadai.

Baseline indikator baru ini untuk Persentase Infrastruktur SDA yang Memadai pada tahun 2024 adalah 65,31%. Indikator ini menjadi patokan dasar dalam menetapkan target capaian pada periode perencanaan selanjutnya, yaitu RPJMD 2025-2029. Dengan baseline 65,31% pada tahun 2024, target peningkatan capaian akan difokuskan pada perbaikan kondisi jaringan irigasi dan optimalisasi pemeliharaan sungai guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kediri.

b) Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang memadai

Indikator Persentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang Memadai digunakan untuk mengukur kondisi kelayakan dan keberlanjutan infrastruktur keciptakaryaan di Kota Kediri, terutama pada penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan penataan bangunan gedung. Indikator ini dihitung dengan menggunakan perhitungan rata-rata dari capaian empat indikator program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, serta Program Penataan Bangunan Gedung.

Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan capaian dari keempat indikator program, kemudian membaginya dengan jumlah indikator program, yaitu empat. Dengan kata lain, persentase infrastruktur keciptakaryaan yang memadai diperoleh dari rata-rata capaian program penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan penataan bangunan gedung. Rumus perhitungan dalam bentuk kalimat adalah sebagai berikut:

Jumlahkan capaian dari Program Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Air Limbah, dan Program

Penataan Bangunan Gedung, kemudian bagi hasilnya dengan angka 4 untuk mendapatkan rata-rata persentase infrastruktur keciptakaryaan yang memadai.

Dengan perhitungan rata-rata tersebut, Persentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang Memadai pada tahun 2024 capainnya adalah 59,00%. Baseline indikator baru ini menjadi patokan dasar dalam menetapkan target capaian pada periode perencanaan selanjutnya, yaitu RPJMD 2025-2029. Dengan baseline 59,00% pada tahun 2024, target peningkatan capaian akan difokuskan pada peningkatan akses air minum yang layak, pengelolaan persampahan yang efektif, pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan, dan penataan bangunan gedung yang aman dan teratur guna mendukung kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Kota Kediri.

c) Persentase infrastruktur kebinamargaan yang memadai

Indikator Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Memadai digunakan untuk mengukur kondisi kelayakan dan keberlanjutan infrastruktur jalan dan drainase di Kota Kediri. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan jalan serta drainase yang berdampak pada kelancaran lalu lintas, pencegahan banjir, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini dihitung dengan perhitungan pembobotan yang terdiri dari 60% capaian jalan dalam kondisi mantap dan 40% capaian drainase dalam kondisi baik, sesuai dengan prioritas pembangunan infrastruktur kebinamargaan yang efektif dan efisien.

Indikator ini dihitung dengan mengalikan capaian jalan dalam kondisi mantap dengan bobot 60%, kemudian menambahkannya dengan capaian drainase dalam kondisi baik yang dikalikan dengan bobot 40%. Dengan kata lain, 60% dari capaian jalan dalam kondisi mantap dan 40% dari capaian drainase dalam kondisi baik dijumlahkan untuk mendapatkan persentase infrastruktur kebinamargaan yang memadai. Rumus perhitungan dalam bentuk kalimat adalah sebagai berikut: Kalikan capaian jalan dalam kondisi mantap dengan 60%, kemudian tambahkan hasilnya dengan capaian drainase dalam kondisi baik yang dikalikan dengan 40% untuk mendapatkan persentase infrastruktur kebinamargaan yang memadai.

Berdasarkan data realisasi tahun 2024, Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Memadai di Kota Kediri menunjukkan capaian yang

cukup tinggi sebesar 88,08%. Capaian ini menunjukkan efektivitas program pemeliharaan dan perbaikan jalan serta drainase yang dilaksanakan melalui pembangunan jalan baru, perbaikan jalan rusak, normalisasi drainase, serta peningkatan kapasitas saluran air. Meskipun demikian, untuk mencapai target 100% infrastruktur kebinamargaan yang memadai, diperlukan strategi yang adaptif dan inovatif serta kolaborasi yang sinergis dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan drainase.

d) Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK

Indikator Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam RTRW Kota Kediri. Indikator ini mencerminkan kesesuaian penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan ekonomi dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam RTRW. Indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas perencanaan dan pengendalian tata ruang guna mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, aman, dan tertata.

Berdasarkan data realisasi tahun 2020-2024, Ketaatan terhadap RTRW di Kota Kediri menunjukkan tren yang meningkat namun belum mencapai 100%. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas pengawasan dan penegakan peraturan tata ruang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui optimalisasi sistem perizinan berbasis digital, pengawasan lapangan yang lebih ketat, dan peningkatan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berikut adalah tabel Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Kediri selama periode 2020-2024:

Tabel 2. 70 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Pemanfaatan yang Sesuai RTRW (Hektar)	Jumlah Luas Pemanfaatan (Hektar)	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)
2020	5.054	6.723	75,17
2021	5.167	6.723	76,86
2022	5.280	6.723	78,54
2023	5.338,57	6.723	79,41
2024	5.417,98	6.723	80,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2025

e) Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang Yang Berkualitas

Indikator Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang yang Berkualitas digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di Kota Kediri. Indikator ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang tertata, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Indikator ini dihitung dengan menggunakan perhitungan rata-rata dari capaian indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penegakan hukum tata ruang.

Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang yang Berkualitas di Kota Kediri pada tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 84,20% sedangkan pada tahun 2024 capaian sebesar 85.46%. Capaian ini menunjukkan kualitas penyelenggaraan tata ruang yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan tantangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, terutama dalam kepatuhan terhadap RTRW dan RDTR, pengawasan pemanfaatan ruang, serta penegakan hukum tata ruang yang tegas dan konsisten.

f) Persentase capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan untuk mengukur efektivitas Pemerintah Kota Kediri dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data capaian indikator ini diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dan didokumentasikan dalam Satu Data Kota Kediri serta Laporan Kinerja (LKPJ) DPUPR Kota Kediri setiap tahunnya.

Berdasarkan data realisasi tahun 2020-2024, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Kediri menunjukkan tren yang stabil dan meningkat, terutama pada indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Indikator ini menunjukkan keberhasilan program penyediaan air minum yang aman dan layak konsumsi yang difokuskan pada masyarakat

miskin atau tidak mampu serta daerah rawan air di Kota Kediri. Program ini dilaksanakan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perbaikan jaringan distribusi air, dan peningkatan kapasitas produksi air bersih oleh PDAM Kota Kediri.

Selain itu, pada indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, capaian menunjukkan peningkatan yang stabil dari 89,82% pada tahun 2020 menjadi 91,37% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas program pengolahan air limbah domestik yang terintegrasi melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta sosialisasi sanitasi yang higienis dan berwawasan lingkungan kepada masyarakat. Berikut adalah tabel Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Kediri selama periode 2020-2024:

Tabel 2. 71 Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Kediri Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,65	90,97	91,00	100,00	100,00 *
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90,02	90,22	90,83	91,03	91,37 *

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, Satu Data Kota Kediri, 2024;

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kediri bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam penyediaan rumah yang layak, pengelolaan kawasan permukiman yang tertata, dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase. Dengan perencanaan yang komprehensif dan pembangunan yang inklusif, Kota Kediri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

a) Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Indikator persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan diperoleh dengan membandingkan luas kawasan permukiman kumuh dibanding dengan luas wilayah Kota Kediri. Pada tahun 2024 luas kawasan permukiman kumuh di Kota Kediri 1,27 Ha dari luas wilayah Kota Kediri sebesar 6.723 Ha, atau terealisasi sebesar 0,019%. Kinerja penangangan luasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 72 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	0,0530	0,0500	0,0340	0,032	0,019

Sumber: DPKP Kota Kediri,2024

Upaya pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh dititikberatkan pada penanganan secara terintegrasi dengan sasaran kawasan kumuh prioritas yang melibatkan 7 (tujuh) komponen indikator kekumuhan, yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi, air minum, layanan persampahan dan proteksi kebakaran. Keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antar Perangkat Daerah terkait serta dukungan pihak ketiga seperti dunia usaha, lembaga amal dan lembaga nonpemerintah lainnya

b) Persentase capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kediri digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah. Indikator ini mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota. Data capaian indikator ini diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri dan didokumentasikan dalam RKPD Kota Kediri setiap tahunnya.

Berdasarkan data realisasi tahun 2020-2024, capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kediri menunjukkan pencapaian maksimal pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Selama periode 2020-2024, capaian indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan dan merehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana secara tepat waktu dan tepat sasaran. Program ini terlaksana dengan baik berkat sinergi yang efektif antara Dinas Perumahan, BPBD, dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pembangunan hunian sementara, rehabilitasi rumah terdampak bencana, serta penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Adapun indikator fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi Program Pemerintah Daerah tidak memiliki capaian selama periode 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya program pemerintah daerah yang menyebabkan masyarakat harus direlokasi, sehingga tidak ada kebutuhan untuk memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi. Dengan demikian, tidak terdapat data capaian untuk indikator ini. Berikut adalah tabel Persentase Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kediri selama periode 2020-2024:

Tabel 2. 73 Persentase Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kediri Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah rumah layak huni yang disediakan atau direhabilitasi bagi korban bencana	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah rumah layak huni yang difasilitasi untuk masyarakat terdampak relokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri, Satu Data Kota Kediri, 2025

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Kediri bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif melalui sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Satpol PP bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta melakukan pengawasan terhadap potensi gangguan ketenteraman masyarakat. Sementara itu, BPBD berperan dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan bencana untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Dengan mengedepankan pendekatan preventif, responsif, dan koordinatif, Kota Kediri berkomitmen untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

a) Persentase capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat

Indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat digunakan untuk mengukur efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban. Indikator ini diukur melalui persentase capaian layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada. Data capaian indikator ini diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dan terdokumentasikan dalam Laporan Kinerja Satpol PP setiap tahunnya.

Berdasarkan data realisasi tahun 2020-2024, capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Kediri menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh penurunan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta peningkatan pelanggaran ketertiban umum, terutama dalam pengaturan pedagang kaki lima, ketertiban lalu lintas, dan pelanggaran perizinan usaha. Berikut adalah tabel Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Kediri selama periode 2020-2024:

Tabel 2. 74 Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umu (%)	100	100	97,5	95	96
Persentase Capaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	96	91,53	96,94	94,80	96,84

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, Satu Data Kota Kediri, 2023

b) Persentase capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat terkait bencana

Indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Bencana digunakan untuk mengukur efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri dalam memberikan layanan pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana maupun kebakaran. Indikator ini meliputi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan informasi rawan bencana, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Data capaian indikator ini diperoleh dari BPBD Kota Kediri dan terdokumentasikan dalam Laporan Kinerja BPBD setiap tahunnya.

Berdasarkan data realisasi tahun 2020-2024, capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Bencana di Kota Kediri menunjukkan tren yang fluktuatif, terutama pada indikator penyelamatan evakuasi korban bencana dan Layanan Informasi Rawan Bencana. Berikut adalah tabel Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Bencana di Kota Kediri selama periode 2020-2024:

Tabel 2. 75 Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Bencana di Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)
2020	83,00	100,00	100,00	96,00
2021	83,00	100,00	100,00	91,53
2022	83,00	100,00	100,00	96,94
2023	67,00	100,00	75,00	96,94
2024	78,08	71,17	100,00	96,84

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri,

Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Bencana di Kota Kediri pada periode 2020-2024 menunjukkan capaian maksimal pada Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, namun mengalami penurunan pada indikator Layanan Informasi Rawan Bencana dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, namun masih terdapat tantangan dalam layanan informasi kesiapsiagaan masyarakat, mobilisasi tim penyelamat, dan ketersediaan infrastruktur mitigasi bencana.

Dengan strategi yang adaptif dan inovatif, kolaborasi yang sinergis, serta peningkatan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat, diharapkan capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Bencana dapat ditingkatkan pada periode 2025-2029 untuk mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh, siap siaga, dan aman dari risiko bencana di Kota Kediri

6) Sosial

Bidang Urusan Sosial di Kota Kediri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan dasar kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, dan korban bencana. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Sosial guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar kelompok rentan tersebut. Melalui program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan bantuan sosial yang tepat sasaran, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di Kota Kediri.

a) Persentase capaian SPM Bidang Sosial

Indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial digunakan untuk mengukur efektivitas Pemerintah Kota Kediri dalam memberikan pelayanan dasar bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, dan korban bencana. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah penerima layanan dengan total kebutuhan pelayanan yang seharusnya dipenuhi sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial. Indikator ini penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah dalam memenuhi hak dasar kelompok rentan dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Kediri. Berikut adalah tabel Persentase Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Kediri selama periode 2020-2024:

Tabel 2. 76 Persentase Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Kediri Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	95,71	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	96,67	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	93,76	93,84	81,05	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	91,49	90,45	96,48	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana	Jumlah korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	97,49	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Kediri

Dengan strategi yang adaptif, inovatif dan kolaborasi yang sinergis, serta peningkatan akurasi data penerima bantuan melalui digitalisasi dan integrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), optimalisasi program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga sosial. Dengan strategi ini, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan angka kemiskinan secara signifikan di Kota Kediri.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Ketenagakerjaan

Bidang Urusan Ketenagakerjaan di Kota Kediri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk memfasilitasi penyaluran tenaga kerja melalui program pelatihan keterampilan, bursa kerja, dan digitalisasi informasi pasar kerja. Selain itu, untuk mengatasi tantangan ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara pencari kerja dengan kebutuhan industri, dilakukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Melalui strategi ini, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran, serta terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di era ekonomi digital.

a) Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah dalam memfasilitasi penyaluran tenaga kerja di Kota Kediri. Persentase ini dihitung dengan cara membagi jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar, kemudian dikalikan dengan seratus untuk mendapatkan persentase. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas program penyaluran tenaga kerja dan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Kediri. Berikut adalah tabel capaian indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota Kediri:

Tabel 2. 77 Capaian Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Di Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
2020	668	140	20,96%
2021	528	281	53,22%
2022	761	451	59,26%
2023	802	463	57,73%
2024	1.002	693	69,16%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMTK, 2024

Berdasarkan tabel di atas, sejak tahun 2021 terjadi peningkatan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Hal tersebut menunjukkan efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri melalui pelatihan keterampilan, job fair, dan digitalisasi informasi pasar kerja. Meskipun demikian, capaian yang fluktuatif mengindikasikan masih adanya tantangan, terutama terkait ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara pencari kerja dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan capaian pada periode 2025-2029, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inovatif seperti pelatihan berbasis kebutuhan industri, digitalisasi layanan penempatan kerja, dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kediri bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak anak melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, serta perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mengembangkan program responsif gender, pendampingan perempuan korban kekerasan, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan dan kewirausahaan. Selain itu, penguatan kelembagaan perlindungan anak dan partisipasi anak dalam pembangunan menjadi fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara menyeluruh.

a) Predikat Pengarusutamaan Gender

Predikat Pengarusutamaan Gender (PUG) diukur berdasarkan capaian dalam penerapan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan, yang mencakup akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara setara. Penghitungan Predikat PUG dilakukan melalui evaluasi terhadap indikator utama, termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Skor capaian PUG dihitung berdasarkan pengumpulan data kinerja program responsif gender yang dilaksanakan oleh OPD terkait, kemudian dikonversi menjadi skor capaian yang diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

Sejak keikutsertaannya dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2017, Pemerintah Kota Kediri berhasil menyandang predikat Madya hingga tahun 2021, yang menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2023, Predikat PUG Kota Kediri meningkat menjadi kategori Nindya, mencerminkan peningkatan efektivitas implementasi program responsif gender, terutama dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang setara, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik. Peningkatan predikat ini menunjukkan keberhasilan Kota Kediri dalam mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui program yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan dalam mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh, terutama pada kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, adalah stereotip gender dalam masyarakat, serta kurangnya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis di sektor publik dan swasta. Untuk mempertahankan predikat Nindya dan meningkatkan ke predikat yang lebih tinggi, diperlukan inovasi dalam implementasi program pengarusutamaan gender, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengintegrasian perspektif gender secara menyeluruh dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, Kota Kediri diharapkan mampu meningkatkan predikat PUG dan mewujudkan kesetaraan gender yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b) Predikat Kota Layak Anak

Predikat Kota Layak Anak (KLA) mengukur tingkat pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan kebijakan nasional tentang Kota Layak Anak. Predikat KLA ditentukan berdasarkan skor capaian indikator yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus bagi anak. Berdasarkan skor capaian KLA Kota Kediri dari tahun 2022 hingga 2024, predikat Kota Layak Anak menunjukkan tren yang stagnan, yang mencerminkan perlunya peningkatan kualitas dan efektivitas program pemenuhan hak anak.

Tabel 2. 78 Skor Capaian Kota Layak Anak Kota Kediri
Tahun 2020-2024

Tahun	Skor Capaian KLA	Predikat KLA
2020	-	Madya
2021	-	Madya
2022	623,50	Madya
2023	600,38	Madya
2024	684	Madya

Sumber: DP3AP2KB

Tabel di atas menunjukkan bahwa predikat Kota Layak Anak (KLA) di Kota Kediri berada pada kategori Madya secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian pemenuhan 24 indikator KLA dari 5 (lima) klaster substantif hak anak dan kelembagaan, serta 2 indikator tambahan yaitu Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana)

diupayakan melalui penguatan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, penguatan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, optimalisasi kegiatan pendukung penyelenggaraan lima klaster KLA, meliputi Hak Sipil Kebebasan; Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar & Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya; dan Perlindungan Khusus; serta peningkatan kolaborasi dengan Lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa dalam mendorong percepatan Kota Kediri menuju Kota Layak Anak.

Salah satu upaya penguatan kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) adalah peningkatan jumlah SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA). Seluruh Gugus Tugas KLA di Kota Kediri yang merupakan perwakilan Perangkat Daerah telah dilatih KHA sebanyak 1 orang untuk masing-masing Perangkat Daerah. Untuk penyediaan SDM terlatih KHA capaian Kota Kediri terdiri atas 1 orang SDM pelayanan adminduk dan pencatatan akta kelahiran, 100 orang tenaga pendidik dengan perwakilan dari SD dan SMP masing-masing 1 orang pendidik, 63 orang tenaga Kesehatan dari 9 Puskesmas dan 2 RS, 10 orang Pengelola Rumah Ibadah (RIRA), dan 4 orang Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kapasitas SDM terlatih KHA melalui pelatihan mandiri melalui *e-learning* Kementerian PPPA RI.

Selanjutnya, mekanisme partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dengan keterlibatan Forum Anak dalam tahapan Musrenbang. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Kediri telah memberikan ruang partisipasi kepada anak dalam perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tematik Anak di tingkat Kota dengan menghadirkan perwakilan anak dari berbagai latar belakang, meliputi Forum Anak baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, aktivis anak dari berbagai organisasi, serta Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), yang didampingi fasilitator Forum Anak. Forum Anak juga dilibatkan dalam berbagai forum konsultasi publik terkait penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Aksi Daerah KLA, RPJMD dan RPJPD. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Musrenbang

Tematik GEDSI di tingkat Kota, dan pelibatan forum anak secara aktif dalam Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Pembinaan maupun peningkatan kapasitas Forum Anak Kelurahan dan Kecamatan melalui pendampingan Satgas PPA dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri. Harapannya pelibatan anak dalam proses pembangunan akan meningkatkan sudut pandang anak sebagai subyek/pelaku pembangunan dapat melahirkan program dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak di Kota Kediri.

3) Pangan

Bidang Urusan Pangan di Kota Kediri berfokus pada mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi pangan lokal, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan akses pangan yang aman dan bergizi. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mengembangkan diversifikasi pangan lokal, mendukung pemberdayaan petani, serta mengoptimalkan distribusi pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

a) Ketersediaan Ideal Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita mengukur tingkat ketersediaan energi (kkal) dan protein (gram) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di Kota Kediri. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah energi dan protein yang tersedia per kapita per hari, yang mencerminkan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan energi dan protein yang ideal merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan, serta berperan dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, ketersediaan energi dan protein per kapita menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, mencerminkan perbaikan dalam distribusi pangan dan diversifikasi sumber gizi.

Tabel 2. 79 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	92,04	93,60	94,00	95,02	96,06
Persentase Ketersediaan Energi per Hari (%)	2.429	2.806	3.730	3.763	2.948
Persentase Ketersediaan Protein per Hari (%)	74,40	95,20	108,00	102,00	93,91

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Tabel di atas menunjukkan tren peningkatan ketersediaan energi dan protein per kapita di Kota Kediri dari tahun 2020 hingga 2024. Ketersediaan energi meningkat dari 92,04 kkal/kapita/hari pada tahun 2020 menjadi 96,06 kkal/kapita/hari pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Persentase ketersediaan energi per hari menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3.730%, yang mencerminkan peningkatan konsumsi energi masyarakat akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, persentase ketersediaan energi per hari mengalami penurunan menjadi 2.948%, yang menunjukkan adanya penyesuaian konsumsi energi yang lebih seimbang dan efisien.

Ketersediaan protein per kapita juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, dengan persentase ketersediaan protein per hari meningkat dari 74,40% pada tahun 2020 menjadi 93,91% pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh diversifikasi sumber protein, terutama dari produk hewani seperti daging, telur, dan ikan, serta peningkatan konsumsi protein nabati dari kacang-kacangan dan olahan kedelai. Fluktuasi yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan perubahan pola konsumsi protein akibat perubahan harga pangan dan ketersediaan pasar.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan yang positif dalam ketersediaan energi dan protein per kapita menunjukkan perbaikan dalam ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kota Kediri. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program ketahanan pangan, diversifikasi pangan lokal, dan optimalisasi distribusi pangan yang lebih merata. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan energi dan protein yang

ideal, diperlukan strategi diversifikasi pangan yang lebih luas, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta penguatan akses pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, edukasi gizi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi yang sehat dan seimbang juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

4) Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup berfokus pada upaya mempertahankan daya dukung daya tampung lingkungan hidup bagi kehidupan Masyarakat di Kota Kediri. Pengelolaan limbah industri maupun limbah domestik menjadi salah satu hal yang akan berdampak terhadap kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Pengawasan pengelolaan limbah hingga saat ini belum optimal dilaksanakan. Sudah ada Peraturan Walikota yang mengatur tentang limbah yaitu Peraturan Walikota nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah berbahaya dan beracun di Kota Kediri untuk pengelolaan limbah industri dan limbah bahan berbahaya. Dalam pelaksanaan dan pengendaliannya masih belum optimal salah satunya masih adanya aduan dari masyarakat terkait dengan limbah serta belum tersedianya pengelolaan Limbah B3 di Kota Kediri. Untuk limbah domestik di Kota Kediri belum terkelola dengan baik. Salah satunya belum memiliki peraturan terkait perizinan, pengawasan pengelolaan maupun pengelolaan pemulihan akibat pencemaran limbah domestik. Indikator kinerja lainnya terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dalam subbab 2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.

5) Pertanahan

a) Persentase ketersediaan dokumen data/informasi tanah kosong

Kegiatan urusan pertanahan pada tahun 2020-2024 dilaksanakan melalui Program Penatagunaan Tanah dengan indikator kinerja persentase penatagunaan tanah yang berkualitas. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah tata guna tanah yang berkualitas dibagi dengan jumlah tata guna tanah. Pada tahun 2020-2021 belum dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut sehingga tidak tersedia data. Adapun capaian kinerja tersebut tahun 2022-2024 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 80 Realisasi indikator kinerja penatagunaan tanah yang berkualitas tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi indikator penatagunaan tanah yang berkualitas	N.A	N.A	66,67%	66,67%	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

Selanjutnya, mulai tahun 2025 Program Penatagunaan Tanah tidak lagi digunakan dan untuk meningkatkan kinerja penatagunaan tanah akan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Tanah Kosong. Adapun indikator kinerja Urusan Pertanahan akan diukur melalui Persentase ketersediaan dokumen data/ informasi tanah kosong. Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 diawali dengan identifikasi/ pemetaan lahan kosong bertahap per masing-masing kecamatan, sehingga baseline capaian tahun 2024 adalah 0%. Kegiatan ini diharapkan akan mampu menyeleseikan permasalahan pengelolaan tanah kosong maupun tanah yang memiliki sertifikat ganda disebabkan database/ pencatatan pertanahan belum sinkron. Upaya koordinasi dan kolaborasi dilakukan oleh pemangku kepentingan pertanahan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah layanan yang berkaitan dengan administrasi penduduk, termasuk pendaftaran kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian, serta pembuatan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Layanan ini bertujuan untuk mengelola data kependudukan dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki dokumen resmi yang diperlukan. Kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting karena dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti sah dari identitas dan status seseorang sebagai warga negara

a) Rasio Penduduk Ber-KTP

Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) memberikan berbagai manfaat penting bagi setiap warga negara. Manfaat utama ber-KTP adalah dengan memiliki KTP, warga negara dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan pihak lain

Tabel 2. 81 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk ber KTP	Jiwa	211.171	213.443	217.163	221.120	225.512
Jumlah penduduk wajib ber KTP	Jiwa	214.722	216.043	222.752	227.536	225.929
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk		0,98	0,98	0,97	0,97	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Data Per 31 Desember 2024

b) Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran

Memiliki akta kelahiran untuk bayi memberikan banyak manfaat yang sangat penting, baik untuk anak itu sendiri maupun untuk orang tuanya, dan untuk memastikan bahwa setiap bayi memiliki akta kelahiran adalah langkah penting untuk menjamin hak-hak dasar dan akses terhadap berbagai layanan yang dibutuhkan sepanjang hidup mereka.

Tabel 2. 82 Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran di Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk yang ber Akta Kelahiran (usia 0-18 tahun	Jiwa	86.070	85.218	85.242	81.017	79.997
Jumlah penduduk usia 0-18 tahun	Jiwa	87.362	86.214	86.231	81.387	80.045
Rasio Penduduk Ber-Akta		0,98	0,98	0,98	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (Data Per 31 Desember)

c) Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) mempunyai manfaat yang sangat penting bagi setiap keluarga, Dengan memiliki Kartu Keluarga, setiap keluarga dapat memastikan bahwa informasi kependudukannya tercatat dengan baik dan mendapatkan akses ke berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah

Tabel 2. 83 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
Kota Kediri Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kepemilikan KK	Keluarga	96.904	97.182	98.224	104.206	105.781
Keluarga yang Wajib Memiliki KK	Keluarga	99.706	100.948	102,353	104.284	106.243
Rasio Kepemilikan KK		0,97	0,96	0.96	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (Data Per 31 Desember 2024)

d) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sangat penting bagi anak-anak , Dengan memiliki KIA, anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara dan mendapatkan akses yang lebih baik ke berbagai layanan dan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya.

Tabel 2. 84 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Kediri
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak yang memiliki KIA	orang	60.072	68.015	64.958	67.957	74.099
Jumlah anak wajib KIA	Orang	77.540	76.559	76.429	76.398	75.495
Rasio Kepemilikan KIA		0,77	0,88	0,85	0,89	0,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (Data Per 31 Desember)

e) Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan

Perjanjian Kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan memberikan berbagai manfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga yang terlibat, di antaranya :

1) Dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pemberian layanan kepada masyarakat, seperti bantuan sosial, administrasi kependudukan, dan perizinan.
2) Perjanjian kerjasama memungkinkan integrasi data antar lembaga sehingga memudahkan koordinasi dan sinergi dalam program pembangunan atau pelayanan publik.

3) Data kependudukan yang valid dan terkini membantu OPD dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, mengurangi kesalahan dalam verifikasi dan validasi data.

Tabel 2. 85 Jumlah OPD/lembaga yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OPD/lembaga yang melakukan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan*	OPD	-	-	7	7	19

Sumber : Dirjen DUKCAPIL Kemendagri

*Keterangan : *Tahun 2020 dan 2021 belum ada Perjanjian Kerjasama*

f) Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah dokumen resmi yang mencatat pernikahan antara dua individu. Dokumen ini juga dikeluarkan oleh Dukcapil dan berfungsi sebagai bukti sah bahwa pernikahan tersebut telah berlangsung secara hukum. Akta ini diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan warisan, klaim asuransi, dan perubahan status pada kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga.

Tabel 2. 86 Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk berstatus kawin	orang	137,497	136,052	136,155	137,104	137,836
Jumlah penduduk berstatus kawin yang memiliki surat nikah/akta perkawinan	Orang	119,930	121,501	124,329	126,664	128,858
Rasio Kepemilikan Akta Perkawinan		87.22	89.30	91.31	92.39	93.49

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020-2024

g) Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian memiliki beberapa manfaat penting, terutama dalam aspek legal dan administratif, dan tujuan utama diterbitkannya akta perceraian adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan seseorang setelah perceraian. Dengan adanya akta perceraian, urusan-urusan terkait legalitas dan administrasi bisa diselesaikan dengan

lebih mudah dan cepat, serta memainkan peran krusial dalam menjaga kejelasan dan keteraturan hukum serta administrasi setelah perceraian.

Tabel 2. 87 Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk berstatus cerai	orang	7,421	7,845	8,362	8,909	9,253
Jumlah penduduk berstatus cerai yang memiliki surat cerai/akta perceraian	Orang	6,658	7,152	7,724	8,285	8,652
Rasio Kepemilikan Akta Perceraian		89.72	91.17	92.37	93.00	93.50

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020-2024

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Kediri dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong partisipasi pembangunan, dan mewujudkan kemandirian Kelurahan. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa guna mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

a) Persentase Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada

Persentase Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemampuan kelurahan dalam mengelola potensi sumber daya lokal serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Klasifikasi Swasembada mencerminkan kemampuan kelurahan dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah kelurahan yang memiliki status swasembada dengan total kelurahan yang ada di Kota Kediri, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Peningkatan persentase kelurahan swasembada menunjukkan keberhasilan dalam penguatan kapasitas lokal, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Tabel 2. 88 Persentase Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kelurahan Swasembada	Persentase Kelurahan Swasembada (%)
2020	14	30%
2021	16	35%
2022	18	38%
2023	21	45%
2024	23*	50%

Sumber: Bagian Pemerintahan

Tabel di atas menunjukkan tren peningkatan persentase kelurahan swasembada di Kota Kediri, yang mencerminkan keberhasilan program pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelurahan dan kemandirian masyarakat. Peningkatan ini didorong oleh program pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, serta implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah disparitas antar kelurahan dalam akses terhadap sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan kapasitas yang lebih merata dan integrasi program pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mendorong seluruh kelurahan mencapai status swasembada secara optimal.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Kediri bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), pengendalian penduduk, serta pemberdayaan dan pembinaan keluarga. Dengan pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif, program ini difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui sinergi yang kuat antara

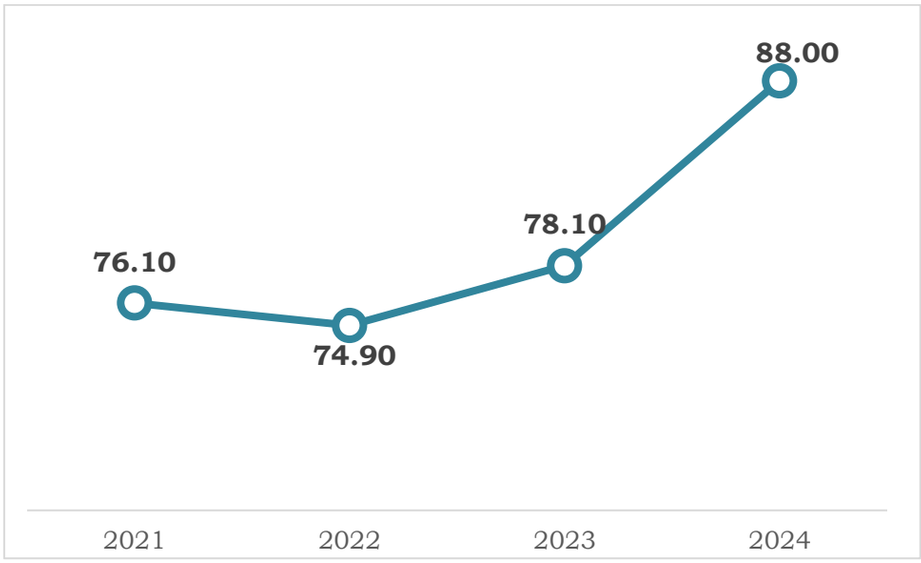
pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, Kota Kediri berkomitmen untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan serta menciptakan keluarga yang sehat, bahagia, dan berkualitas.

a) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (*Contraceptive Prevalence Rate/ CPR*)

CPR dihitung berdasar persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi (modern maupun tradisional) dibanding total PUS yang membutuhkan layanan KB. Indikator ini mencerminkan aksesibilitas dan efektivitas program Keluarga Berencana dalam mendukung pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga.

Penguatan yang signifikan dalam akses dan pelayanan KB menandakan keberhasilan program KB dalam menjangkau kelompok sasaran secara luas dan merata, efektivitas kolaborasi antara tenaga lini lapangan, fasilitas kesehatan, dan edukasi keluarga berencana, sekaligus mengindikasikan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya pengaturan kelahiran. Adapun capaian CPR Kota Kediri Tahun 2021-2024 sebagaimana dalam grafik berikut.

Grafik 2. 44 Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi di Kota Kediri Tahun 2021-2024



Sumber : Kemendukbangga/BKKBN, 2025

Meskipun capaiannya tinggi, perlu dipastikan bahwa peningkatan proporsi KB yang terpenuhi ini sejalan dengan penurunan *unmet need* (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), terutama pada kelompok rentan

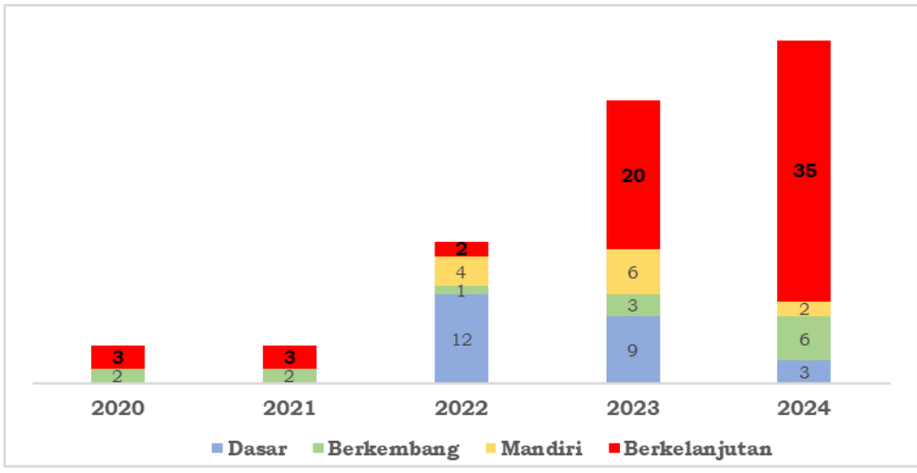
seperti PUS dari remaja yang berstatus menikah, PUS dari keluarga miskin, dan Wanita Usia Subur (WUS) usia tinggi (40-49 tahun).

b) Peningkatan kualitas Kampung KB

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Terdapat 4 (empat) kategori pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, antara lain kategori dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan. Indikator peningkatan kualitas kampung KB diukur dari cakupan jumlah Kampung KB pada kategori mandiri dan berkelanjutan. Peningkatan jumlah Kampung KB yang dikembangkan selama tahun 2020-2024 sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2. 45 Peningkatan Kualitas Kampung KB Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2024

Pada tahun 2024 telah dikembangkan Kampung KB di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Kediri. Peningkatan Kampung KB kategori mandiri dan berkelanjutan mencapai 42,31%, yaitu sebanyak 26 Kampung menjadi 37 Kampung KB kategori Mandiri dan berkelanjutan.

Keberhasilan peningkatan pengembangan kampung keluarga berkualitas pada kategori mandiri dan berkelanjutan diwujudkan melalui keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, serta dukungan lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat dalam bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan,

pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dsb yang mendukung penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga.

Upaya perwujudan keluarga berkualitas perlu ditopang oleh dua tiang utama yaitu Keluarga Kecil agar bebannya tidak terlalu berat, dan Keluarga Sejahtera dengan ekonomi yang kuat. Kemandirian keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB diupayakan melalui pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Pada tahun 2024 data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN menunjukkan terdapat 84 kelompok UPPKS aktif di Kota Kediri, terdiri dari 33 kelompok UPPKS di Kecamatan Kota, 24 kelompok UPPKS di Kecamatan Pesantren dan 27 kelompok UPPKS di Kecamatan Mojoroto. Keseluruhan kelompok UPPKS difasilitasi pengembangannya melalui Koperasi Aku Sejahtera UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga akseptor KB melalui kegiatan usaha ekonomi produktif. Kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan UPPKS diantaranya mayoritas kelompok UPPKS memiliki modal usaha yang sangat minim dan belum ber-NIB. Upaya yang dilakukan antara lain mendorong kepesertaan UPPKS untuk menjadi anggota koperasi guna meningkatkan aksesibilitas modal usaha, pemetaan jenis usaha UPPKS untuk memudahkan pembinaan dan fasilitasi kepengurusan izin usaha bekerjasama dengan sektor perizinan terkait.

Selanjutnya, salah satu isu permasalahan yang turut menjadi pembahasan dalam Musrenbang Anak Tahun 2025 adalah masih banyaknya perkawinan anak di Kota Kediri meskipun tren nya menurun. Kementerian Agama Kota Kediri menunjukkan jumlah perkawinan anak di Kota Kediri pada tahun 2023 sebanyak 53 kasus dan menurun menjadi 35 kasus pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan jumlah anak yang teregistrasi, maka angka perkawinan anak di Kota Kediri sebesar 0,07% pada tahun 2023 yaitu sebanyak 53 dari 81.387 anak, dan menurun menjadi 0,039% pada tahun 2024 yaitu 35 dari 89.494 anak. Data ini masih jauh dari angka perkawinan anak nasional sebesar 6,92% pada tahun 2023 dan target angka perkawinan anak tahun 2024 sebesar 8,74% pada RPJMN. Hal ini sejalan dengan data konseling pernikahan anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Kediri menunjukkan penurunan dari 57 67 konseling pada tahun 2023 menjadi 46 konseling pada tahun 2024. Namun demikian data jumlah dispensasi kawin anak yang diputus oleh Pengadilan Agama pada

tahun 2024 meningkat dari 42 perkara menjadi 49 perkara. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan kepada pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dan apabila akan melakukan perkawinan di bawah usia tersebut, maka harus melalui dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi konseling dispensasi kawin sebagai salah satu syarat sidang pengajuan dispensasi kawin oleh anak di bawah umur. Konseling tersebut tidak mempunyai tujuan untuk "merekomendasikan" pernikahan anak, namun memberikan gambaran dilakukan untuk menggambarkan kondisi kesiapan psikis, psikologis , fisik, sosial dan ekonomi anak yang akan menikah dan berbagai dampak negatif yang dapat timbul dalam melakukan pernikahan di usia yang masih sangat muda.

Berdasar hasil konseling perkawinan anak diketahui beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak di Kota Kediri diantaranya yaitu faktor kemiskinan dan ekonomi keluarga; kehamilan yang tidak diinginkan; budaya dan adat istiadat etnis tertentu, seperti misalnya pandangan bahwa ketika laki-laki dewasa siap menikah maka harus disegerakan meskipun calon pengantin wanita masih berusia anak; pola asuh orang tua yang kurang tepat; perjodohan; penyalahgunaan fasilitas internet serta kurangnya kontrol terhadap penggunaan media sosial. Kejadian perkawinan anak di Kota Kediri erat sekali menyebabkan anak putus sekolah. Sehingga upaya preventif masif dilakukan Pemerintah Kota Kediri melalui Duta Generasi Berencana (Duta Genre)/PIKR di 46 kelurahan dan satuan pendidikan, peran Forum Anak di 46 kelurahan dan Kecamatan sebagai pendidik sebaya terkait kesehatan reproduksi dan resiko pernikahan dini, edukasi pencegahan perkawinan anak dan pendampingan oleh Satgas PPA, dan kolaborasi penyelenggaraan sekolah perempuan bagi remaja putri/Selimut Hati (Sekolah bagi Perempuan Bekal Tantangan Hidup di Masa Depan Nanti) bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Kediri.

9) Perhubungan

Bidang Urusan Perhubungan di Kota Kediri berperan penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan letak geografis yang strategis, Kota Kediri berkomitmen untuk

mengembangkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk peningkatan sarana prasarana keselamatan jalan, fasilitas angkutan umum, serta sistem manajemen lalu lintas yang modern. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mendorong penerapan transportasi umum berbasis digital, optimalisasi angkutan umum, serta peningkatan keselamatan lalu lintas melalui edukasi keselamatan berkendara dan penegakan hukum yang tegas. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku transportasi, dan masyarakat, diharapkan sistem perhubungan di Kota Kediri mampu mendukung mobilitas yang efisien dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

a) Tingkat Layanan Jalan

Tingkat Layanan Jalan digunakan untuk mengukur kualitas layanan jalan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta sebagai dasar perkiraan lalu lintas di masa mendatang. Indikator tingkat layanan jalan ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan (V/C) yang dihitung dengan membandingkan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Volume lalu lintas mencerminkan intensitas penggunaan fasilitas jalan, sedangkan kapasitas jalan menunjukkan kemampuan ruas jalan dalam menampung arus kendaraan dalam satuan waktu tertentu. Nilai derajat kejenuhan (V/C) digunakan untuk mengukur efisiensi kapasitas jalan, di mana nilai V/C < 1 menunjukkan kapasitas yang memadai, sedangkan nilai V/C > 1 menunjukkan kapasitas jalan yang tidak memadai dan terjadi kemacetan.

Berdasarkan Penilaian Kinerja Jalan Indonesia (PKJI) Tahun 2023, tingkat layanan jalan di Kota Kediri menunjukkan kategori yang beragam, dengan nilai V/C rata-rata sebesar 0,46. Sebagian besar jalan di Kota Kediri berada pada kategori B dan C, yang menunjukkan arus lalu lintas yang stabil namun kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Jumlah jalan berdasarkan kategori layanan adalah sebagai berikut: Kategori A (V/C 0 – 0,20) sebanyak 16 ruas jalan, Kategori B (V/C 0,20 – 0,44) sebanyak 60 ruas jalan, Kategori C (V/C 0,45 – 0,74) sebanyak 64 ruas jalan, dan Kategori D (V/C 0,75 – 0,84) sebanyak 2 ruas jalan. Tidak terdapat ruas jalan yang masuk dalam Kategori E (V/C 0,85 – 1,00) maupun Kategori F (V/C > 1,00), menunjukkan bahwa belum terjadi kemacetan signifikan pada ruas jalan di Kota Kediri.

Faktor utama yang mempengaruhi tingkat layanan jalan di Kota Kediri adalah peningkatan volume kendaraan, penggunaan ruas jalan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir kendaraan, serta perkembangan infrastruktur pendukung seperti Jalan Tol Kediri–Tulungagung dan Bandara Dhoho. Pemanfaatan ruas jalan oleh PKL dan parkir kendaraan berdampak pada berkurangnya kapasitas jalan, yang selanjutnya menyebabkan kemacetan. Selain itu, peningkatan volume kendaraan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat juga menjadi faktor pendorong utama yang mempengaruhi tingkat kejenuhan jalan. Untuk mencapai tingkat layanan jalan, diperlukan optimalisasi manajemen lalu lintas melalui rekayasa lalu lintas, peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran ruas jalan, serta pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dan efisien. Dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan tingkat layanan jalan di Kota Kediri dapat meningkat, mengurangi kemacetan, serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b) Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perhubungan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri, termasuk layanan transportasi, manajemen lalu lintas, serta sarana dan prasarana perhubungan. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pelayanan publik dalam bidang perhubungan, yang mencakup aksesibilitas, kemudahan, kenyamanan, keselamatan, serta kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan di Kota Kediri, nilai IKM menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan perbaikan kualitas pelayanan dan inovasi dalam layanan perhubungan.

Tabel 2. 89 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori
2020	3,25	Baik (B)
2021	3,38	Baik (B)
2022	3,54	Sangat Baik (A)
2023	3,61	Sangat Baik (A)
2024	3,70	Sangat Baik (A)

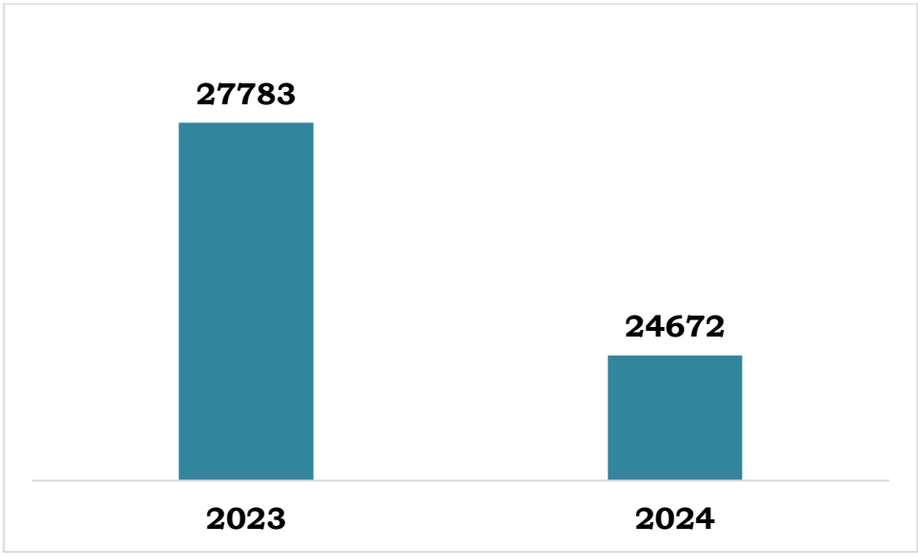
Sumber: Bappeda, 2024

Tabel di atas menunjukkan tren peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perhubungan di Kota Kediri dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan efektivitas implementasi inovasi layanan transportasi, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas layanan perhubungan melalui penerapan Area Traffic Control System (ATCS)
2. Penggunaan aplikasi TRA-KER (Transportasi Kediri)
3. Pengoperasian Bus Sekolah Gratis
4. Transportasi publik yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Bus SATRIA (Sarana Transportasi Kediri Bahagia)

Bus SATRIA pertama kali beroperasional pada tahun 2023. Pada awalnya, rute pelayanan Bus SATRIA mencakup jarak kurang lebih 20,5km dengan jumlah ritase sebanyak 4 rit/kendaraan. Rute ini melalui 15 kelurahan dari total 46 (empat puluh enam) kelurahan di Kota Kediri. Hasil evaluasi rute pada tahun 2024 menunjukkan perlu dilakukan pengembangan rute pada bagian timur wilayah Kota Kediri sehingga cakupan layanan menjadi 25 kelurahan dari 46 kelurahan di Kota Kediri. *Load factor* Bus SATRIA hingga akhir 2024 adalah 0,42.

Grafik 2. 46 Jumlah Penumpang Bus Satria Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Faktor utama yang mendorong peningkatan IKM adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi publik, penertiban parkir dan PKL yang meningkatkan kenyamanan lalu lintas, serta peningkatan keselamatan lalu lintas melalui program edukasi keselamatan berkendara. Selain itu, pengembangan layanan berbasis digital melalui Aplikasi TRA-KER turut berkontribusi dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi lalu lintas secara *real-time*.

Secara keseluruhan, Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan di Kota Kediri menunjukkan tren yang sangat positif, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perhubungan. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan perhubungan, optimalisasi manajemen lalu lintas berbasis teknologi digital, serta pengembangan transportasi publik yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan strategi yang komprehensif dan inovatif, diharapkan IKM Layanan Perhubungan di Kota Kediri dapat terus meningkat, serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

10) Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Kediri berperan penting dalam mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan efisien. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), layanan administrasi dan

pelayanan publik dapat diakses secara daring, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan secara cepat dan akurat. Selain itu, optimalisasi media sosial dan portal digital digunakan untuk memperkuat komunikasi publik dan transparansi informasi. Dengan visi menjadi Smart City yang berbasis digital, Kota Kediri terus berinovasi dalam meningkatkan infrastruktur TIK, keamanan siber, dan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya Kota Kediri yang Maju, Produktif, dan Inovatif.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Kediri berfokus pada pemberdayaan usaha mikro sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mendorong penguatan koperasi sebagai akses permodalan dan digitalisasi usaha mikro melalui pelatihan pemasaran online serta fasilitasi merek dagang gratis. Melalui sinergi dengan koperasi dan komunitas ekonomi lokal, diharapkan usaha mikro di Kota Kediri mampu tumbuh lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

a) Nilai Peningkatan PDRB Non Industri Pengolahan

Nilai Peningkatan PDRB Non Industri Pengolahan mengukur pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari sektor-sektor selain industri pengolahan, termasuk perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, transportasi, akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Kediri, sektor non industri pengolahan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusi PDRB non industri pengolahan sebesar 17,87% dari total PDRB dan mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 20,36% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan diversifikasi ekonomi yang semakin baik di Kota Kediri, meskipun sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dengan 79,64% pada tahun 2024.

Tabel 2. 90 Nilai PDRB ADHB Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Total PDRB (Miliar Rupiah)	PDRB Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)	PDRB Non Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)	Persentase Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2020	132.406,06	108.748,95	23.657,11	17,87	
2021	141.467,12	115.829,48	25.637,64	18,12	+8,37
2022	152.778,31	123.819,15	28.959,16	18,96	+12,97
2023	159.749,94	127.782,46	31.967,48	20,01	+10,39
2024	168.748,91	134.391,33	34.357,58	20,36	

Sumber: BPS Kota Kediri, 2025

Total PDRB ADHB Kota Kediri mengalami peningkatan yang konsisten dari 132.406,06 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 168.748,91 miliar rupiah pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,69% per tahun. PDRB Industri Pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun kontribusinya terhadap total PDRB cenderung menurun dari 82,13% pada tahun 2020 menjadi 79,64% pada tahun 2024, yang mencerminkan transformasi ekonomi yang semakin terdiversifikasi. Sementara itu, PDRB Non Industri Pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri pengolahan, meningkat dari 23.657,11 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 34.357,58 miliar rupiah pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,25% per tahun.

Pertumbuhan PDRB Non Industri Pengolahan didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dipengaruhi oleh pemulihan daya beli masyarakat dan transformasi digital dalam perdagangan. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan peningkatan akses internet dan digitalisasi ekonomi di Kota Kediri. Sektor akomodasi dan makan minum juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, didorong oleh pemulihan pariwisata lokal dan peningkatan konsumsi rumah tangga.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB Non Industri Pengolahan di Kota Kediri menunjukkan tren yang positif, mencerminkan diversifikasi ekonomi yang semakin baik dan potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan strategi penguatan sektor non-manufaktur, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui inovasi dan diversifikasi produk.

b) Persentase Koperasi Sehat

Persentase Koperasi Sehat mengukur jumlah koperasi yang dinilai sehat dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif di Kota Kediri. Pengukuran didapatkan dengan membandingkan antara jumlah Koperasi Sehat dengan Koperasi Aktif. Kategori sehat atau cukup sehat sesuai undang – undang perkoperasian dan kategori aktif adalah koperasi yang aktif dalam kegiatan dan pelaporan. Koperasi sehat didefinisikan sebagai koperasi aktif yang secara rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 tahun berturut-turut dan memiliki nilai penilaian kesehatan koperasi minimal 66. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Kediri, persentase koperasi sehat menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dipengaruhi oleh penambahan jumlah koperasi aktif baru dan peningkatan upaya pendampingan serta pengawasan koperasi.

Tabel 2. 91 Persentase Koperasi Sehat Kota Kediri (2020-2024)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Sehat (%)	60	60,32	60,78	60,95	72,09

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2025

Kenaikan signifikan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan pendampingan, pelatihan manajemen usaha, serta pengawasan yang lebih intensif dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Kediri. Pencapaian sebesar 72,09% pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas strategi pembinaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan melalui pendampingan digitalisasi koperasi serta penguatan kapasitas SDM koperasi. Penggunaan portal link untuk konsultasi dan koordinasi juga mempermudah akses informasi mengenai peraturan perkoperasian dan manajemen usaha koperasi.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan yang positif ini menunjukkan efektivitas program pemberdayaan koperasi di Kota Kediri, meskipun fluktuasi persentase disebabkan oleh penambahan koperasi aktif baru. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan strategi peningkatan kompetensi pengelola koperasi, pemantauan kinerja koperasi secara berkala, serta inovasi dalam digitalisasi layanan koperasi guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha koperasi di Kota Kediri .

c) Persentase usaha mikro yang omzetnya meningkat

Indikator ini menghitung jumlah usaha mikro binaan yang mengalami peningkatan omzet dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah usaha mikro binaan. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas program pemberdayaan ekonomi lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri, khususnya dalam mendukung perkembangan usaha mikro sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Capaian tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 92 Persentase Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usaha Mikro yang Omsetnya Meningkat (%)	5,5	5,71	5,9	6,1	7,91

Sumber : Dinas Koperasi dan UMTK

Peningkatan yang konsisten setiap tahun mencerminkan efektivitas program pemberdayaan usaha mikro, seperti bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi pemasaran, serta fasilitasi merek dagang dan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Kediri.

Faktor utama yang mendorong omzet usaha mikro di Kota Kediri adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, transformasi digital dalam perdagangan, serta peningkatan akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kemitraan dengan lembaga keuangan lokal. Selain itu, dukungan promosi digital dan pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui pelatihan e-commerce dan pemasaran digital turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing usaha mikro di pasar lokal dan regional.

12) Penanaman Modal

Bidang Urusan Penanaman Modal di Kota Kediri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan letak geografis yang strategis dan potensi ekonomi yang kompetitif, Kota Kediri berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, serta penguatan promosi investasi. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mengoptimalkan potensi investasi lokal melalui pengembangan kawasan industri, sektor pariwisata,

dan ekonomi kreatif, serta menarik investor nasional dan internasional untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis. Selain itu, kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan peningkatan kapasitas UMKM juga menjadi fokus utama dalam memperkuat daya saing ekonomi lokal. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan penanaman modal di Kota Kediri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

a) Nilai Akumulasi Realisasi Investasi

Nilai Akumulasi Realisasi Investasi mengukur total nilai investasi yang berhasil direalisasikan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) di Kota Kediri dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam menarik investor dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri, nilai realisasi investasi menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai investasi mencapai Rp 1.313,37 miliar, meningkat menjadi Rp 2.378,14 miliar pada tahun 2021, kemudian menurun pada tahun 2022 sebesar Rp 2.357,05 miliar. Pada tahun 2023, nilai investasi kembali menurun menjadi Rp 1.347,41 miliar, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 1.554,00 miliar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 93 Nilai Akumulasi Realisasi Investasi Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)	Kenaikan/Penurunan (%)
2020	1.313,37	-
2021	2.378,14	+81,10%
2022	2.357,05	-0,89%
2023	1.347,41	-42,84%
2024	1.554,00	+15,36%

Sumber: DPMPTSP, 2024

Tabel di atas menunjukkan fluktuasi nilai akumulasi realisasi investasi di Kota Kediri dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan signifikan pada tahun 2021 sebesar 81,10% didorong oleh peningkatan investasi di sektor perdagangan dan reparasi, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi

COVID-19. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan yang signifikan, terutama akibat selesainya investasi skala besar dari PTPN X PG Pesantren Baru pada tahun 2022 senilai Rp 1,62 triliun, sehingga pada tahun 2023 nilai investasi mengalami penurunan sebesar 42,84%.

Pada tahun 2024, nilai investasi kembali meningkat sebesar 15,36%, didukung oleh peningkatan investasi di sektor jasa dan kuliner serta optimalisasi layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem OSS berbasis risiko yang mempermudah proses perizinan usaha secara digital. Peningkatan nilai investasi ini mencerminkan efektivitas strategi promosi investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri melalui pameran, workshop, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan investor. Secara keseluruhan, tren fluktuasi nilai investasi di Kota Kediri menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar, namun tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal dan ketersediaan proyek investasi skala besar. Untuk meningkatkan nilai investasi secara berkelanjutan, diperlukan strategi diversifikasi sektor investasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal dan UMKM.

Mengingat potensi Kota Kediri dan tren global menuju keberlanjutan, Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan beberapa strategi untuk menarik investasi berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, antara lain:

1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan, melalui fokus pada Wisata Sejarah dan Budaya. Kediri memiliki warisan sejarah dan budaya yang kaya (misalnya, peninggalan Kerajaan Kediri). Investasi dapat diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan situs bersejarah, museum interaktif, pusat kebudayaan, dan festival budaya yang menarik wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian. Selain itu, Kota Kediri dapat memanfaatkan potensi alam di sekitar Kediri (misalnya, sungai brantas) untuk mengembangkan ekowisata yang bertanggung jawab. Ini melibatkan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan edukasi wisatawan.
2. Pengembangan Infrastruktur Hijau, melalui investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan seperti transportasi publik

yang efisien, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan ruang terbuka hijau.

3. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Lokal, melalui program pelatihan dan pendidikan, meningkatkan keterampilan masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan skala usahanya.
4. Promosi dan Branding Kota Kediri sebagai Destinasi Investasi Berkelanjutan, dengan mengembangkan citra kota yang menarik bagi investor yang peduli terhadap keberlanjutan melalui kampanye pemasaran yang efektif dan partisipasi dalam forum investasi berkelanjutan.
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, melalui kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, dan investor dengan fokus pada keberlanjutan untuk menarik investasi dan knowledge sharing.

b) Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sektor Perizinan

Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan mengukur tingkat kepatuhan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dan Ombudsman RI. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor perizinan, melalui pengukuran 4 dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Input, yang meliputi kompetensi pelaksana layanan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan.
2. Dimensi Proses, yang mengukur pemenuhan informasi standar pelayanan, seperti persyaratan, mekanisme prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, serta maklumat dan visi misi pelayanan.
3. Dimensi Output, yang menilai persepsi masyarakat terhadap maladministrasi, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Dimensi Pengaduan, yang mengukur pengelolaan pengaduan, termasuk mekanisme pengaduan, sarana pengaduan, pembinaan pengelola pengaduan, serta jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Berdasarkan hasil pengukuran keempat dimensi tersebut, skor kepatuhan pelayanan perizinan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir, mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 94 Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan Kota Kediri Tahun 2021-2024

Tahun	Skor Kepatuhan Pelayanan Perizinan	Zonasi
2021	57,78	Kuning
2022	65,22	Kuning
2023	80,13	Hijau
2024	93,84	Hijau

Sumber: Ombusmand, 2024

Tabel di atas menunjukkan tren peningkatan skor kepatuhan pelayanan perizinan di Kota Kediri dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, mencerminkan efektivitas implementasi sistem perizinan berbasis elektronik, peningkatan transparansi dalam proses perizinan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan publik. Kenaikan skor dari 57,78 pada tahun 2021 menjadi 93,84 pada tahun 2024 menunjukkan transformasi kualitas pelayanan publik dari Kategori C (Kualitas Sedang) menjadi Kategori A (Kualitas Tertinggi), dengan zonasi yang berubah dari Kuning menjadi Hijau.

Analisis Kenaikan Skor Kepatuhan Perizinan Berdasarkan Dimensi Penilaian

1. Dimensi Input: Peningkatan skor pada dimensi ini didukung oleh peningkatan kompetensi SDM, melalui pelatihan dan sertifikasi pelayanan publik, serta penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai, termasuk peningkatan aksesibilitas layanan bagi kelompok marginal dan rentan.
2. Dimensi Proses: Implementasi sistem perizinan berbasis elektronik melalui OSS (Online Single Submission) berbasis risiko berhasil meningkatkan transparansi proses perizinan, mempercepat waktu penyelesaian izin, serta meningkatkan efisiensi layanan. Pemenuhan informasi standar pelayanan yang lebih baik dan penyederhanaan mekanisme prosedur perizinan turut berkontribusi pada peningkatan skor pada dimensi ini.

3. Dimensi Output: Meningkatnya persepsi masyarakat terhadap transparansi dan kepuasan layanan publik, serta penurunan keluhan terkait maladministrasi, menjadi faktor utama peningkatan skor pada dimensi output. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan kualitas layanan yang lebih responsif dan transparan.
4. Dimensi Pengaduan: Peningkatan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif dan transparan, termasuk penggunaan platform digital untuk pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas pengelola pengaduan, serta informasi yang jelas mengenai jangka waktu penyelesaian pengaduan, menjadi faktor utama dalam peningkatan skor pada dimensi pengaduan.

Rekomendasi untuk Peningkatan Skor Kepatuhan di Masa Mendatang

Untuk mempertahankan dan meningkatkan skor kepatuhan perizinan di Kota Kediri, beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain:

- Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi pelayanan publik, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas layanan.
- Optimalisasi sistem perizinan berbasis elektronik (OSS berbasis risiko) dengan integrasi data antar perangkat daerah, sehingga mempermudah proses perizinan dan pengawasan.
- Peningkatan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses dan prosedur perizinan yang transparan, sehingga meminimalisir keluhan dan persepsi negatif masyarakat.
- Penyempurnaan pengelolaan pengaduan secara digital melalui pengembangan aplikasi pengaduan yang responsif dan transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan pengaduan yang efektif.

Secara keseluruhan, tren peningkatan skor kepatuhan perizinan di Kota Kediri menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Kediri berperan penting dalam membangun generasi muda yang berdaya saing, kreatif, dan berkarakter, serta mendorong pola hidup sehat melalui pengembangan olahraga yang berkelanjutan. Dengan populasi pemuda yang potensial, Kota

Kediri berkomitmen untuk memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan melalui penguatan kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan, dan kreativitas. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta penyelenggaraan event olahraga lokal, nasional, dan internasional menjadi fokus utama dalam mendorong prestasi olahraga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Melalui sinergi dengan komunitas pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis olahraga, diharapkan generasi muda Kota Kediri mampu bersaing di tingkat nasional dan global, serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

a) Persentase Kenaikan Atlet Dan Pemuda Berprestasi

Persentase Kenaikan Atlet dan Pemuda Berprestasi mengukur tingkat peningkatan jumlah atlet yang meraih prestasi olahraga dan pemuda yang meraih prestasi di bidang sains, seni, dan kewirausahaan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas program pembinaan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mengembangkan potensi generasi muda dan meningkatkan prestasi di berbagai bidang kompetisi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah atlet dan pemuda berprestasi setiap tahun dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase kenaikan. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kediri, jumlah atlet berprestasi dan prestasi kepemudaan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir, dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan kegiatan kompetisi.

Tabel 2. 95 Persentase Kenaikan Atlet dan Pemuda Berprestasi Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Atlet Berprestasi	Kenaikan Jumlah (Atlet)	Persentase Kenaikan Atlet (%)	Jumlah Prestasi Kepemudaan	Kenaikan Jumlah (Pemuda)	Persentase Kenaikan Pemuda (%)
2020	0	-	-	0	-	-
2021	32	+32	-	8	+8	-
2022	173	+141	+440,63%	6	-2	-25,00%
2023	168	-5	-2,89%	17	+11	+183,33%
2024	58	-110	-65,48%	17	0	0,00%

Sumber: Disbudparpora, 2024

Tabel di atas menunjukkan fluktuasi jumlah atlet dan pemuda berprestasi di Kota Kediri dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah atlet berprestasi mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 440,63%, seiring dengan pemulihan kegiatan kompetisi yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, serta peningkatan intensitas pelatihan dan dukungan fasilitas olahraga dari Pemerintah Kota Kediri. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis sebesar 65,48%, yang disebabkan oleh berkurangnya event olahraga seperti Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Kota Kediri dan tidak adanya event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur pada tahun 2024.

Jumlah prestasi kepemudaan menunjukkan tren peningkatan yang lebih stabil, terutama pada tahun 2023 sebesar 183,33%, didorong oleh peningkatan partisipasi pemuda dalam kompetisi sains, seni, dan kewirausahaan, serta pemulihan kegiatan kompetisi pasca pandemi. Namun, pada tahun 2024 tidak terjadi peningkatan, meskipun jumlah prestasi kepemudaan tetap stabil di angka 17. Stabilitas ini menunjukkan perlunya inovasi dalam program kepemudaan, khususnya pelatihan kewirausahaan dan kompetisi inovasi teknologi, untuk meningkatkan daya saing pemuda Kota Kediri di tingkat nasional dan internasional.

Secara keseluruhan, tren fluktuasi pada jumlah atlet dan pemuda berprestasi menunjukkan peningkatan namun masih terpengaruh ketersediaan event kompetisi terhadap capaian prestasi kepemudaan dan olahraga. Untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di tahun-tahun berikutnya, diperlukan penguatan kolaborasi dengan komunitas olahraga dan pendidikan, peningkatan kapasitas pelatih dan mentor, serta inovasi program kepemudaan yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan dan ekonomi kreatif. Selain itu, inovasi dalam promosi prestasi kepemudaan melalui media digital perlu ditingkatkan untuk memotivasi lebih banyak generasi muda dalam meraih prestasi di berbagai bidang kompetisi.

14) Statistik

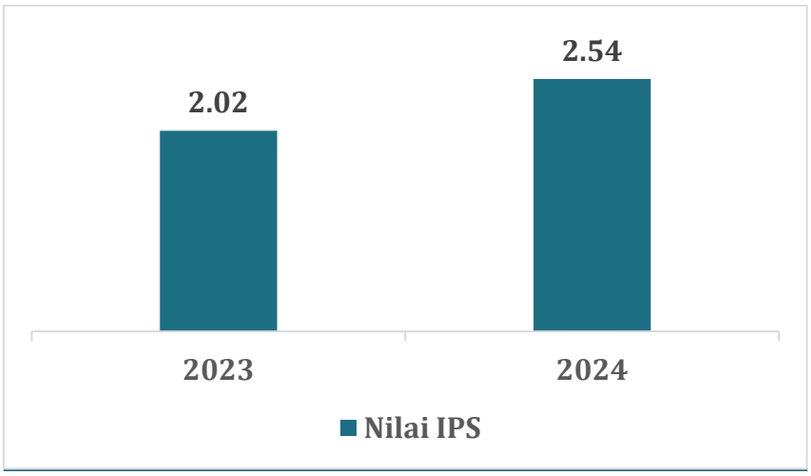
Urusan Statistik berperan krusial dalam mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dengan menyediakan data yang akurat dan mutakhir. Statistik sektoral membantu pemerintah mengidentifikasi tren ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga kebijakan lebih tepat sasaran. Selain itu, data yang terstandarisasi

memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan koordinasi antar OPD, serta mendukung reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik dan keterbukaan informasi..

a) Indeks Pembangunan Statistik

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Kediri mencapai 2,54, mengalami peningkatan signifikan dari 2,02 pada tahun sebelumnya. Capaian ini melampaui target Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 2,35, menunjukkan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.

Grafik 2. 47 Indeks Pembangunan Statistik Kota Kediri Tahun 2023-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi antara berbagai instansi dalam pengelolaan data statistik. BPS berperan sebagai pembina, Bappeda sebagai sekretariat, serta seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Kediri sebagai produsen data. Proses evaluasi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penilaian mandiri, verifikasi dokumen, wawancara, visitasi, hingga harmonisasi data.

Pada tahun 2024, dua aspek utama dalam kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah:

- Penyusunan dokumen Indeks Kota Layak Huni (IKLH) yang dikelola oleh Bappeda.
- Survei perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang menjadi tanggung jawab Disperdagin.

Peningkatan IPS ini mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan data di Kota Kediri, mendukung transparansi, akurasi, dan efektivitas kebijakan berbasis data. Dengan sistem statistik yang semakin baik,

diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyusunan kebijakan publik serta mendukung pencapaian Satu Data Indonesia. Upaya ini juga memperkuat sistem statistik nasional yang lebih handal, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih optimal.

15) Persandian

Bidang Urusan Persandian Kota Kediri bertanggung jawab menjaga keamanan informasi pemerintah melalui teknologi persandian yang andal. Dengan melindungi data strategis dari ancaman siber dan kebocoran, serta mengembangkan enkripsi data dan manajemen akses yang ketat, Bidang Persandian memastikan keamanan komunikasi elektronik. Mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bidang ini terus berinovasi dalam keamanan siber dan tata kelola informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang aman dan berintegritas.

Berdasarkan data, Persentase Informasi Persandian yang Diamankan di Kota Kediri mencapai 83% pada tahun 2023 dan berhasil mencapai 100% pada tahun 2024, yang menunjukkan keberhasilan dalam mengamankan seluruh informasi strategis pemerintah melalui jaringan komunikasi yang aman dan terenkripsi. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat Kota Kediri dalam memperkuat keamanan siber sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta keberhasilan dalam mengembangkan enkripsi data dan manajemen akses informasi yang efektif. Dengan capaian 100% pada tahun 2024, Kota Kediri berhasil mewujudkan tata kelola informasi yang aman, terpercaya, dan berintegritas, sekaligus menunjukkan kesiapan dalam menghadapi ancaman siber dan mewujudkan Smart City yang aman dan terpercaya.

a) Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) versi 5.0 merupakan instrumen evaluasi mandiri yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola keamanan informasi berbasis standar SNI ISO/IEC 27001. Melalui penilaian terhadap enam area utama—yakni tata kelola, manajemen risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi keamanan, dan pelindungan data pribadi—Indeks KAMI memberikan gambaran menyeluruh terhadap posisi dan kematangan pengelolaan keamanan informasi di

lingkungan instansi daerah. Instrumen ini tidak hanya menjadi alat ukur untuk memetakan kekuatan dan kelemahan sistem keamanan informasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun roadmap perbaikan dan persiapan menuju sertifikasi ISO 27001. Dengan pelaksanaan self-assessment yang terstandar dan proses verifikasi oleh BSSN, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ketahanan digitalnya, mencegah kebocoran data, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang berbasis sistem elektronik secara aman dan andal.

Capaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Kota Kediri menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir, dari skor 42,63 pada tahun 2023 menjadi 62,94 pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi, khususnya dalam menghadapi dinamika transformasi digital dan meningkatnya risiko siber pada sistem layanan publik. Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa Kota Kediri telah berhasil melakukan pembenahan pada area-area kritis seperti penyusunan kebijakan keamanan informasi, pelaksanaan manajemen risiko, pengelolaan aset digital, serta penerapan teknologi pengamanan yang lebih andal. Selain itu, capaian ini mengindikasikan kesiapan Kota Kediri untuk memasuki tahapan pengelolaan keamanan informasi berbasis risiko yang lebih terstruktur, sekaligus menjadi fondasi penting menuju pemenuhan standar sertifikasi SNI ISO/IEC 27001 yang menjadi target nasional untuk sistem elektronik strategis pemerintahan.

16) Kebudayaan

Bidang Urusan Kebudayaan di Kota Kediri memiliki peran strategis dalam melestarikan warisan budaya lokal, memperkuat identitas daerah, dan mendorong kreativitas masyarakat melalui pengembangan seni, tradisi, dan adat istiadat. Dengan kekayaan budaya yang beragam, termasuk seni pertunjukan tradisional, kesenian rakyat, upacara adat, dan warisan sejarah, Kota Kediri berkomitmen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi moral dan identitas masyarakat. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mendorong kolaborasi dengan komunitas budaya lokal, lembaga pendidikan, dan seniman lokal dalam mengembangkan program kebudayaan yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui promosi kebudayaan digital, pemberdayaan sanggar seni, dan penyelenggaraan event budaya, diharapkan kebudayaan lokal dapat

terus hidup dan berkembang di tengah dinamika globalisasi, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata budaya di Kota Kediri.

a) Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan

Warisan budaya adalah seperangkat elemen fisik dan atribut tak berwujud yang mewakili masyarakat atau masyarakat, yang telah diperoleh oleh warisan sosial leluhur. Warisan ini mencakup unsur-unsur budaya berwujud yang diwakili dalam bangunan dan monumen, benda, dan karya seni. Elemen-elemen ini juga terwakili dalam buku dan kreasi sastra lainnya, alat musik, kostum, keahlian memasak, dan lain-lain. Selain itu, ada unsur- unsur yang sifatnya tidak berwujud, seperti cerita rakyat, tradisi, bahasa dan pengetahuan dari berbagai jenis. Warisan budaya adalah barang yang memiliki nilai bagi masyarakat; karena alasan inilah warisan itu dihargai dan dilestarikan. Indikator warisan budaya yang dilestarikan dihitung dari jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan cagar budaya yang ditetapkan. Pemerintah Kota Kediri telah mengidentifikasi warisan budaya yang perlu untuk dilestarikan dan ditetapkan dengan berupaya mengajukan penetapan dan penilaian setiap tahun kepada Provinsi. Adapun capaian persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 96 Persentase Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Persentase Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan	0	100%	100%	100%	100%	Tahun 2020 tidak ada penetapan warisan budaya

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

17) Perpustakaan

Bidang Urusan Perpustakaan di Kota Kediri bertujuan untuk meningkatkan minat baca, literasi informasi, dan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan layanan perpustakaan yang modern, inklusif, dan mudah diakses. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertanggung jawab dalam pengelolaan perpustakaan daerah, pengembangan koleksi bahan bacaan, serta penyediaan akses informasi yang relevan dan berkualitas. Dengan pendekatan digitalisasi dan inovasi

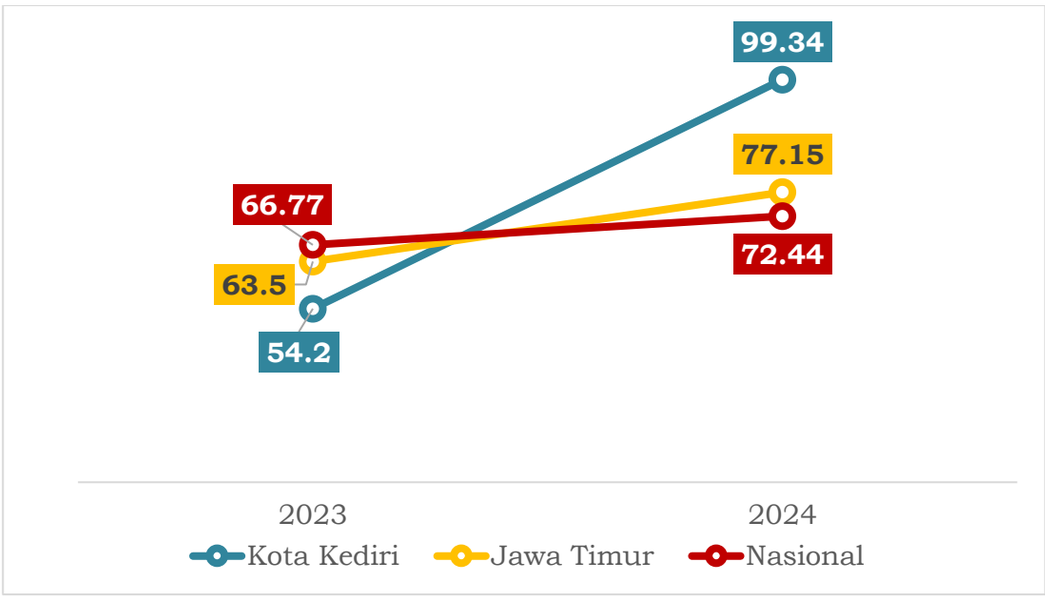
layanan perpustakaan, program ini difokuskan pada peningkatan akses literasi digital, penyediaan ruang baca yang nyaman dan inspiratif, serta penguatan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan komunitas. Melalui sinergi yang kuat dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas literasi, Kota Kediri berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berwawasan luas, dan berdaya saing global.

a) Tingkat Kegemaran Membaca

Tingkat Kegemaran Membaca merupakan indikator penting dalam menilai budaya literasi di suatu daerah. Indikator dihitung berdasar 5 (lima) dimensi utama, yaitu frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan yang dikonsumsi, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet untuk memperoleh informasi. Perkembangan capaian Kota Kediri pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 2. 48 Tingkat Kegemaran Membaca Kota Kediri

Tahun 2023-2024



Sumber : Perpusnas, 2024

Berdasar hasil survei Perpusnas, pada tahun 2024 Kota Kediri mencatat peningkatan nilai secara signifikan mencapai sebesar 99,34 atau termasuk dalam kategori **sangat tinggi** dan berada pada posisi tertinggi kedua setelah Kota Surabaya diantara Kab/Kota di Jawa Timur.

Tingginya capaian Kota Kediri diupayakan melalui perluasan akses terhadap bahan bacaan melalui beragam fasilitas literasi, seperti perpustakaan daerah, taman baca, dan keberadaan toko buku yang mudah diakses oleh masyarakat; penguatan budaya membaca yang didukung

komunitas literasi, serta kegiatan kampanye literasi di sekolah, rusunawa, panti asuhan, maupun lingkungan masyarakat; pemanfaatan teknologi digital dengan munculnya pojok literasi digital di RTH, penyediaan e-book dan literasi digital gratis pada Inlis Perpustakaan Daerah maupun website Pemerintah Kota Kediri.

b) Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat

Indikator Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat Kota Kediri dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan, baik secara *online* maupun *onsite*. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kunjungan pemustaka, termasuk layanan baca di tempat, peminjaman buku, akses layanan digital, dan keikutsertaan dalam program literasi, terhadap jumlah penduduk Kota Kediri. Data capaian menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah ini. Tahun 2020-2021 Perpustakaan tidak dibuka karena adanya pandemi Covid 19.

Tabel 2. 97 Ketermanfaatan Perpustakaan Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kunjungan	Jumlah Penduduk	% Ketermanfaatan Perpustakaan
2022	8.474	292.199	2,90
2023	44.136	295.225	14,95
2024	81.863	298.227	27,45

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan layanan perpustakaan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Implementasi berbagai inovasi seperti penyediaan pojok baca digital yang terintegrasi dengan koleksi fisik dan digital, layanan ruang baca terbuka yang nyaman, serta penyediaan akses internet gratis, telah mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Tren positif tersebut juga menunjukkan pergeseran peran perpustakaan, yang tidak hanya sekedar sebagai penyedia layanan baca, tetapi juga menjadi pusat literasi yang multifungsi, mencakup aspek edukasi, rekreasi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini menjadi modal penting untuk mencapai masyarakat yang berpengetahuan (*knowledge based society*) dan berdaya saing di Kota Kediri.

18) Kearsipan

Bidang Urusan Kearsipan di Kota Kediri memiliki peran penting dalam mengelola informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien guna

mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan yang modern, kearsipan berfungsi untuk menghimpun, menyimpan, mengamankan, dan menyelamatkan arsip-arsip penting, baik yang bersifat administratif maupun historis. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mendorong transformasi digital dalam pengelolaan arsip melalui sistem kearsipan elektronik yang mempermudah akses informasi publik, serta meningkatkan efisiensi kerja organisasi perangkat daerah. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kearsipan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip menjadi fokus utama dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Kota Kediri.

a) Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Indikator Indeks Penyelenggaraan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan arsip oleh Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan Standar Nasional Kearsipan (SNK) yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Indeks ini mencerminkan kualitas tata kelola kearsipan, transparansi informasi publik, serta akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan dokumen dan arsip daerah.

Tabel 2. 98 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Kota Kediri Tahun 2022-2024

Tahun	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Kategori
2022	65,63	Cukup
2023	67,58	Cukup
2024	60,41	Cukup

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2024

Tabel di atas menunjukkan fluktuasi capaian Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Kediri dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan pada tahun 2023 mencerminkan adopsi sistem kearsipan elektronik yang efektif, namun penurunan pada tahun 2024 menunjukkan tantangan dalam pengelolaan arsip dinamis dan keterbatasan SDM. Perlu strategi yang komprehensif untuk meningkatkan tata kelola kearsipan yang lebih baik dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan di Kota Kediri.

Penurunan indeks pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh tantangan dalam implementasi sistem kearsipan digital, terutama dalam integrasi data

antar perangkat daerah serta kurangnya kesadaran akan pentingnya kearsipan yang tertib. Untuk meningkatkan kembali indeks kearsipan, diperlukan strategi penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi kearsipan, optimalisasi sistem kearsipan elektronik yang terintegrasi, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi kearsipan secara berkala. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya arsip sebagai aset informasi publik perlu ditingkatkan untuk menciptakan budaya tertib arsip di lingkungan pemerintahan Kota Kediri. Dengan peningkatan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien, diharapkan indeks penyelenggaraan kearsipan dapat kembali meningkat dan mendukung akuntabilitas pemerintahan yang transparan.

b) Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang Bernilai Baik

Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan perangkat daerah Kota Kediri yang bernilai minimal baik. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal dengan fokus pada pengelolaan arsip dinamis, sumber daya kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan. Berdasarkan data, capaian persentase audit kearsipan yang bernilai baik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini didorong oleh upaya pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, serta pendampingan penataan arsip di seluruh unit kearsipan di Kota Kediri.

Tabel 2. 99 Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Perangkat Daerah Bernilai Baik	Jumlah Perangkat Daerah Diaudit	Persentase (%)
2022	14	36	38%
2023	18	36	50%
2024	18	30	60%

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2024

Tabel di atas menunjukkan tren peningkatan persentase nilai audit internal kearsipan yang bernilai baik di Kota Kediri dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan efektivitas strategi pembinaan dan pengawasan kearsipan, serta

peningkatan kapasitas SDM kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Secara keseluruhan, nilai audit internal kearsipan yang semakin baik menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik.

III. Urusan Pilihan

1) Perikanan

Pengembangan usaha perikanan di Kota Kediri dilanjutkan dari tahun ke tahun dengan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pembinaan, penyuluhan dan pengembangan bibit ikan unggul.

a) Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 100 Produksi Perikanan (dalam Kwintal) Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan	1466,5	1840	1861	1878	1898

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan gurame telah menjadi fokus di Kota Kediri. Program-program pelatihan dan bantuan teknis diberikan kepada para petani ikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya namun masih perlunya ditingkatkan dan dilakukan pembinaan untuk pemanfaatan teknologi perikanan. Selain itu, Kota Kediri sudah terkenal sebagai salah satu penghasil ikan hias ikan Berta sehingga perlu untuk lebih diperkenalkan dan ditingkatkan pemasarannya.

b) Angka Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan adalah jumlah atau banyaknya ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. penghitungan angka konsumsi ikan bertujuan untuk mengetahui kecukupan asupan gizi masyarakat. Peningkatan konsumsi ikan dilakukan dengan cara Kampanye Gemarikan yaitu memberikan makanan berbahan baku ikan kepada masyarakat. Angka konsumsi ikan tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 101 Angka Konsumsi Ikan (dalam Kg/Kapita/Tahun)
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Konsumsi Ikan	29,22	32,60	34,80	36,54	40.34

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

*Data bersifat sementara

Faktor penyebab terjadi peningkatan konsumsi ikan setiap tahun karena kegiatan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) yang menjadi agenda rutin oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri dengan sasaran masyarakat umum, anak usia sekolah, dan balita sehingga menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya makan ikan.

2) Pariwisata

Bidang Urusan Pariwisata di Kota Kediri memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan destinasi wisata budaya, sejarah, dan alam. Dengan kekayaan budaya dan warisan sejarah yang unik, seperti Gunung Klotok, Goa Selomangleng, dan Museum Airlangga, Kota Kediri terus mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan edukasi. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mendorong promosi pariwisata digital, peningkatan infrastruktur wisata, serta penguatan ekonomi kreatif yang berbasis pada produk lokal dan seni budaya. Melalui kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal, sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Kediri.

a) Jumlah kunjungan wisata

Indikator Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Kediri mengukur tingkat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke berbagai destinasi wisata, termasuk wisata budaya, alam, religi, kuliner, dan event khusus. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kediri, jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

Pemerintah Kota Kediri secara proaktif mengembangkan sektor pariwisata dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata, seperti Kawasan Selomangleng, GOR Jayabaya, Tirtoyoso Park, dan Kolam Renang Pagora.

Selain itu, event budaya dan olahraga seperti Jazz Brantas, Kediri Nite Carnival, dan Festival Pecut juga menjadi daya tarik utama yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Strategi promosi digital dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata lokal. Namun, untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, diperlukan diversifikasi produk wisata, peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif lokal, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi ke destinasi wisata utama. Secara keseluruhan, jumlah kunjungan wisata di Kota Kediri menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, mencerminkan potensi ekonomi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan. Adapun jumlah kunjungan wisata dan persentase kenaikannya pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 102 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	% kenaikan
2020	721.141	-64,8%
2021	984.930	+36,6%
2022	1.329.737	+35,0%
2023	1.695.361	+27,5%
2024	1.758.977	+3,75%

Sumber: Disbudparpora, 2024

Tabel di atas menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan positif dalam jumlah kunjungan wisatawan di Kota Kediri dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan jumlah wisatawan ini mencerminkan efektivitas strategi promosi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan daya tarik pariwisata lokal.

b) Persentase pertumbuhan tamu hotel

Persentase Pertumbuhan Tamu Hotel merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan sektor pariwisata di Kota Kediri. Kunjungan wisatawan yang datang ke suatu daerah akan tercermin dari tingkat hunian serta pertumbuhan jumlah tamu hotel, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Semakin tinggi pertumbuhan tamu hotel dari tahun ke tahun, semakin kuat pula bukti bahwa daya tarik wisata, aksesibilitas, serta kualitas layanan pariwisata di daerah tersebut mengalami peningkatan.

Pertumbuhan tamu hotel menjadi indikator turunan yang secara langsung mendukung capaian indikator utama yaitu Jumlah Kunjungan Wisata. Hal ini karena wisatawan yang menginap di hotel pada umumnya memiliki lama tinggal lebih panjang dibandingkan dengan wisatawan yang hanya melakukan kunjungan singkat. Dengan demikian, peningkatan persentase tamu hotel tidak hanya menggambarkan peningkatan kunjungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan perputaran ekonomi lokal, seperti konsumsi makanan, belanja, transportasi, serta jasa hiburan. Pertumbuhan tamu hotel juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan wisatawan terhadap fasilitas akomodasi di Kota Kediri. Faktor ini sangat penting dalam menciptakan citra destinasi yang nyaman dan layak dikunjungi. Pertumbuhan tamu hotel dihitung dengan menggunakan formula jumlah tamu hotel tahun N dikurangi jumlah tamu hotel tahun N-1 dikalikan 100%. Indikator ini menjadi indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga baru tersedia data tahun 2024 yaitu -4,57%. Artinya jumlah tamu hotel pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pendataan dan pelaporan dari hotel yang ada di Kota Kediri.

3) Pertanian

Bidang Urusan Pertanian di Kota Kediri berperan penting dalam menopang ketahanan pangan dan mendukung perekonomian lokal melalui produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Dengan potensi lahan yang produktif dan sumber daya manusia yang kompeten, sektor pertanian terus berkembang sebagai pilar utama ekonomi daerah. Pemerintah Kota Kediri mendorong modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi cerdas, penguatan kapasitas petani, dan akses pasar yang lebih luas untuk komoditas unggulan seperti beras premium, cabai, dan bawang merah. Sektor pertanian di Kota Kediri berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal guna mewujudkan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

a) Nilai Peningkatan PDRB sektor pertanian

PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Kediri mengukur nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Indikator ini penting untuk melihat kontribusi sektor pertanian terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan pangan lokal. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB).

Pertumbuhan nilai PDRB sektor pertanian didorong oleh peningkatan produktivitas tanaman pangan, terutama pada komoditas beras premium, cabai, dan bawang merah, yang menjadi produk unggulan Kota Kediri. Selain itu, diversifikasi komoditas hortikultura dan pengembangan budidaya perikanan air tawar juga turut mendorong peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mendorong modernisasi pertanian melalui adopsi teknologi pertanian cerdas, pelatihan petani, dan akses pasar yang lebih luas. Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB yang relatif kecil menunjukkan transformasi ekonomi yang lebih didominasi oleh sektor perdagangan dan industri. Untuk meningkatkan kontribusi sektor ini, diperlukan strategi diversifikasi produk pertanian, pengembangan agribisnis berbasis digital, serta penguatan daya saing komoditas lokal di pasar regional dan nasional.

Tabel 2. 103 Peningkatan PDRB Sektor Pertanian Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah)	Kontribusi Terhadap PDRB (%)
2020	323,44	0,24
2021	339,82	0,24
2022	356,81	0,23
2023	373,31	0,23
2024	397,35	0,21

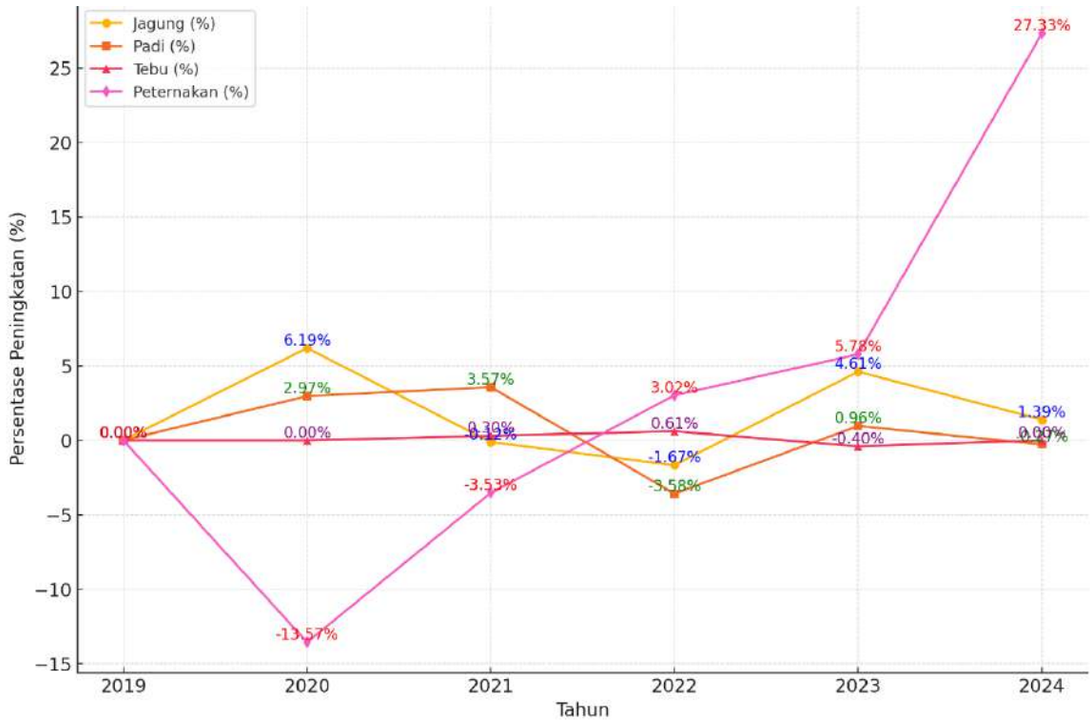
Sumber: BPS Kota Kediri, 2025

Tabel di atas menunjukkan peningkatan nilai PDRB sektor pertanian secara konsisten, menunjukkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang positif. Namun, kontribusi terhadap total PDRB mengalami penurunan walaupun secara nominal mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan merupakan sektor utama dalam perekonomian Kota Kediri. Meskipun transformasi ekonomi Kota Kediri lebih didominasi oleh sektor perdagangan dan industri, pertumbuhan absolut sektor pertanian yang positif menunjukkan potensi ekonomi lokal yang kuat, terutama dalam komoditas pangan dan hortikultura yang menjadi unggulan Kota Kediri.

b) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Kediri mengukur produksi pangan dibandingkan dengan luas lahan tanaman pangan, yang mencerminkan efisiensi penggunaan lahan dalam menghasilkan produksi pangan. Berdasarkan data, produktivitas jagung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 7,91 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 8,63 ton/ha pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 8,75 ton/ha pada tahun 2024, mencerminkan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,02% per tahun. Produktivitas padi juga mengalami peningkatan stabil dari 7,08 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 7,35 ton/ha pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 7,33 ton/ha pada tahun 2024. Peningkatan produktivitas tanaman pangan ini didukung oleh adopsi teknologi pertanian modern, penggunaan benih unggul, serta akses terhadap pupuk dan irigasi yang memadai.

Grafik 2. 49 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kota Kediri Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kota Kediri difokuskan pada komoditas tebu, yang mengalami stabilitas produktivitas dari 98,5 ton/ha pada tahun 2020 hingga 99 ton/ha pada tahun 2023 dan 2024, dengan pertumbuhan yang moderat. Stabilitas produktivitas tebu dipengaruhi oleh

pengelolaan lahan yang efisien, penerapan teknologi budidaya tebu, serta dukungan irigasi yang memadai. Produktivitas peternakan menunjukkan tren fluktuasi, mencerminkan upaya pemulihan melalui pemantauan kesehatan ternak dan penerapan protokol kesehatan hewan. Secara keseluruhan, produktivitas sektor pertanian di Kota Kediri menunjukkan potensi pertumbuhan yang positif, didukung oleh kebijakan modernisasi pertanian dan penguatan kapasitas petani dan peternak lokal.

Tabel 2. 104 Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Jagung (ton/ha)	Padi (ton/ha)	Tebu (ton/ha)	Peternakan (ton)
2020	8,40	7,29	98,5	2.802,22
2021	8,39	7,55	98,8	2.703,30
2022	8,25	7,28	99,4	2.785,06
2023	8,63	7,35	99,0	2.946,00
2024	8,75	7,33	99,0	3.751,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Secara keseluruhan, produktivitas sektor pertanian di Kota Kediri menunjukkan potensi pertumbuhan yang positif, terutama pada komoditas jagung dan peternakan yang berhasil meningkatkan nilai ekonomi lokal.

4) Perdagangan

Bidang urusan Perdagangan di Kota Kediri memegang peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui aktivitas distribusi barang dan jasa yang dinamis. Sebagai pusat perdagangan di wilayah Jawa Timur bagian barat, Kota Kediri memiliki potensi besar dalam mengembangkan jaringan pasar tradisional dan modern yang terintegrasi. Didukung oleh letak geografis yang strategis serta aksesibilitas yang mudah, sektor perdagangan di Kota Kediri terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur pasar yang memadai, promosi digitalisasi perdagangan, serta perlindungan konsumen yang efektif, guna mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

a) Rasio PDRB Sektor Perdagangan

Indikator PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Kediri mengukur nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan besar, eceran, serta jasa reparasi kendaraan bermotor, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi daerah. Data PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB Kota Kediri, mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat serta kinerja daya beli konsumen. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, meski sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Data tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 105 Rasio PDRB Sektor Perdagangan Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah)	Kontribusi Terhadap PDRB (%)
2020	8.195,45	9,71
2021	8.999,41	10,40
2022	9.774,06	10,87
2023	10.362,54	11,31
2024	10.804,33	11,40

Sumber: BPS Kota Kediri, 2025

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan di Kota Kediri didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat, transformasi digital dalam perdagangan, serta kebijakan pemerintah yang meningkatkan daya saing pelaku usaha melalui program bantuan modal usaha, pelatihan digitalisasi perdagangan, dan pengembangan pasar rakyat serta sentra IKM. Persaingan dengan perdagangan modern dan e-commerce nasional tetap menjadi tantangan yang membutuhkan strategi diversifikasi produk, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, dan penguatan ekosistem perdagangan berbasis digital. Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan di Kota Kediri memiliki ketahanan ekonomi yang baik dan potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan

b) Indeks Tertib Ukur

Indikator Indeks Tertib Ukur mengukur tingkat kepatuhan penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang beredar di masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks ini penting untuk melindungi konsumen dan menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan. Indeks Tertib Ukur Kota Kediri menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan kepatuhan yang semakin baik dalam penggunaan UTTP dan BDKT sesuai standar metrologi.

Berdasarkan data, Indeks Tertib Ukur Kota Kediri pada tahun 2020 tercatat sebesar 37%. Pada tahun 2021, indeks ini meningkat tajam menjadi 73,3% seiring dengan peningkatan pengawasan UTTP dan BDKT. Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2022 mencapai 81,27%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 70,6% akibat penemuan BDKT yang tidak memenuhi standar, terutama pada produk LPG 3 kg melon. Pada tahun 2024, Indeks Tertib Ukur Kota Kediri meningkat menjadi 79,43%.

Tabel 2. 106 Indeks Tertib Ukur Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Tertib Ukur (%)
2020	37
2021	73,3
2022	81,27
2023	70,6
2024	79,43

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Peningkatan Indeks Tertib Ukur di Kota Kediri didukung oleh optimalisasi sumber daya, kolaborasi dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal, serta peningkatan pelayanan tera dan tera ulang bagi pemilik UTTP. Selain itu, pengawasan intensif terhadap BDKT, khususnya pada produk yang sering dipalsukan seperti LPG dan makanan ringan, turut membantu dalam menjaga kualitas dan keakuratan pengukuran. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, upaya perbaikan dilakukan dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pengembangan kompetensi SDM dalam bidang kemetrologian. Secara keseluruhan, Indeks Tertib Ukur di Kota Kediri menunjukkan tren yang positif, mencerminkan kepatuhan yang semakin baik dalam penggunaan

UTTP dan BDKT, sehingga keadilan dalam transaksi perdagangan dapat terjamin.

5) Perindustrian

Bidang urusan Perindustrian di Kota Kediri merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai pusat industri pengolahan di Jawa Timur, Kota Kediri memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menyerap tenaga kerja lokal, sektor industri menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan visi pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Kediri terus berupaya meningkatkan daya saing industri melalui kebijakan yang inovatif, dukungan modal usaha, serta akses pasar yang lebih luas, sehingga mampu menciptakan ekosistem industri yang kompetitif dan inklusif.

a) Pertumbuhan Industri

Indikator pertumbuhan industri di Kota Kediri diukur berdasarkan persentase pertumbuhan jumlah unit usaha industri dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 hingga 2024, sektor industri di Kota Kediri menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif namun positif. Jumlah unit industri mengalami peningkatan signifikan dari 8.424 unit pada tahun 2022 menjadi 13.133 unit pada tahun 2023, dan menjadi 18.066 tahun 2024 dengan pertumbuhan mencapai 37,26% pada tahun 2024. Capaian ini menjadikan kinerja sektor industri Kota Kediri dalam kategori Sangat Tinggi, dengan kontribusi terbesar berasal dari industri pengolahan yang menyumbang rata-rata 79,99% dari total PDRB Kota Kediri dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan Industri Kota Kediri Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 107 Pertumbuhan Industri Kota Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Industri	Pertumbuhan Industri (%)
2020	8,424	12.12
2021	8,424	18.00
2022	13,133	79.46
2023	13,133	55.90
2024	18,032	37.26

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Pertumbuhan industri di Kota Kediri didukung oleh kebijakan pemerintah, seperti Program Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan fasilitasi sertifikasi halal serta promosi digital melalui pusakaumkm.id. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sektor industri pengolahan tembakau menjadi tantangan utama karena rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal, seperti kenaikan tarif cukai. Untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri kreatif dan teknologi diperlukan, serta peningkatan kapasitas UMKM dan adaptasi terhadap ekosistem pemasaran digital.

IV. Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung Walikota melalui perumusan kebijakan dan koordinasi administratif guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Fungsinya mencakup koordinasi kebijakan daerah, pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan, pembinaan ASN, serta penyelenggaraan layanan administratif yang profesional sesuai arahan Walikota.

a) Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen yang dirancang untuk menilai kualitas kebijakan publik di Indonesia. IKK berfokus pada proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Pengukuran IKK bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah bersifat efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024, IKK menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB). Instrumen ini juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, yang mengharuskan proses perumusan kebijakan disertai dengan analisis dampak, analisis risiko, dan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

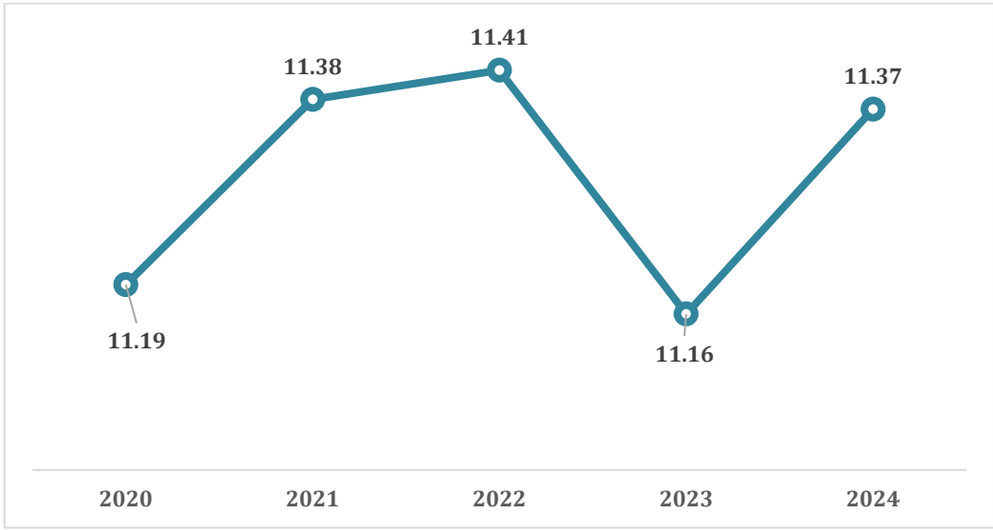
Pengukuran IKK dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran ini memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana kebijakan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Melalui

pengukuran IKK, diharapkan instansi pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat. Realisasi indeks kualitas kebijakan Kota Kediri tahun 2024 sebesar 51,62 dengan kategori Sedang. Terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki dan meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik.

b) Nilai SAKIP Komponen Pelaporan

Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja di Kota Kediri mengukur kualitas penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu dalam mengevaluasi capaian tujuan organisasi. Komponen ini mencakup kelengkapan data kinerja, konsistensi narasi dan angka, analisis pencapaian kinerja, serta keterkaitan antara laporan kinerja dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, capaian Nilai Pelaporan Kinerja menunjukkan tren yang relatif stabil namun belum optimal. Pada tahun 2020 nilai yang dicapai adalah 11,19, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 (11,38) dan 2022 (11,41). Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023 (11,16) dan sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 11,37.

Grafik 2. 50 Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber: KemenPAN-RB, 2024

Meskipun tren menunjukkan konsistensi dalam penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan hasil analisis, meskipun laporan kinerja telah disusun dengan analisis yang cukup lengkap dan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding, serta faktor hambatan dan pendukung, namun masih ditemukan laporan kinerja PD yang belum disertai dengan solusi yang sudah dilakukan dalam mempertahankan atau mencapai kinerja tahun berkenaan. Selain itu, terdapat ketidakselarasan antara narasi dan formulasi perhitungan yang ada pada laporan kinerja sehingga terdapat perbedaan data.

Untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja, diperlukan peningkatan konsistensi dan akurasi data dalam penyusunan laporan kinerja, penyelarasan antara narasi dan formulasi perhitungan, serta penambahan analisis solusi yang lebih komprehensif dalam menghadapi hambatan pencapaian kinerja. Pemerintah Kota Kediri juga perlu mengoptimalkan penggunaan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan program/kegiatan. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja dapat meningkat secara signifikan dan lebih akuntabel di masa mendatang.

c) Posyandu SPM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memberikan pengertian bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/ kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Posyandu memiliki tugas membantu lurah melakukan pemberdayaan masyarakat. Tugas posyandu dilaksanakan berdasar standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial. Posyandu berfungsi untuk mendukung:

1. Penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat
2. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat
3. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif

4. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembentukan posyandu ini disertai dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Pada tahun 2025 ini, Kota Kediri masih melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk pembentukan posyandu sesuai dengan aturan terbaru. Posyandu yang berjalan pada saat ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan yang dikelola serta diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat kelurahan setempat. Tugas posyandu saat ini adalah membantu lurah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan dan mempunyai fungsi penyelenggara pusat kegiatan masyarakatdalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola serta diselenggarakan dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. Untuk selanjutnya akan diproses untuk perubahan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2023 menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, Sekretariat DPRD berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan memastikan ketersediaan sumber daya, fasilitas, serta koordinasi tenaga ahli yang diperlukan. Seluruh tugas ini dijalankan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Adapun kinerja Sekretariat DPRD diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan sekretariat DPRD.

a) Tingkat Kepuasan layanan terhadap anggota DPRD

Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD di Kota Kediri digunakan untuk mengukur efektivitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Indikator ini mencakup layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD,

layanan administrasi, serta fasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Indikator ini merupakan indikator baru yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada anggota DPRD, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja legislatif dan mendukung akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sebagai indikator baru, penilaian terhadap kepuasan layanan ini difokuskan pada responsivitas dan efektivitas layanan administrasi, kualitas fasilitas pendukung kinerja DPRD, serta kepuasan terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan. Penerapan indikator ini diharapkan mampu mendorong Sekretariat DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan. Dengan adanya indikator ini, diharapkan Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD di Kota Kediri dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja DPRD secara keseluruhan.

b) Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi

Persentase Kegiatan dan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terfasilitasi di Kota Kediri digunakan untuk mengukur efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD. Indikator ini mencakup pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD, serta penyediaan kelompok pakar dan tim ahli untuk mendukung kinerja DPRD. Berdasarkan data yang tersedia, indikator ini menunjukkan capaian yang cukup baik, mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kapasitas anggota DPRD agar lebih efektif dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan efektivitas dalam fasilitasi kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang telah berjalan dengan baik. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan peningkatan kualitas program peningkatan kapasitas, penguatan peran tim ahli dan kelompok pakar, serta peningkatan keterlibatan anggota DPRD dalam kegiatan pendalaman tugas dan fungsi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk publikasi dan dokumentasi kegiatan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan Persentase Kegiatan dan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terfasilitasi dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja DPRD secara keseluruhan.

V. Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Bidang urusan Perencanaan di Kota Kediri berperan penting dalam merumuskan arah pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Renstra dan Renja perangkat daerah. Urusan ini memastikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta melibatkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk menghasilkan perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, urusan perencanaan juga bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga capaian kinerja dapat terukur dan terarah sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

a) Nilai Sakip Komponen Perencanaan

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja di Kota Kediri mengukur kualitas perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Komponen ini mencakup kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan capaian kinerja, keterkaitan antara tujuan dan sasaran, serta konsistensi indikator kinerja utama dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, Nilai Perencanaan Kinerja menunjukkan tren yang relatif stabil namun belum optimal. Pada tahun 2020 sebesar 23,52, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 (23,71) dan 2022 (23,72). Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 23,07, dan sedikit meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 23,25.

Grafik 2. 51 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber: KemenPAN-RB, 2024

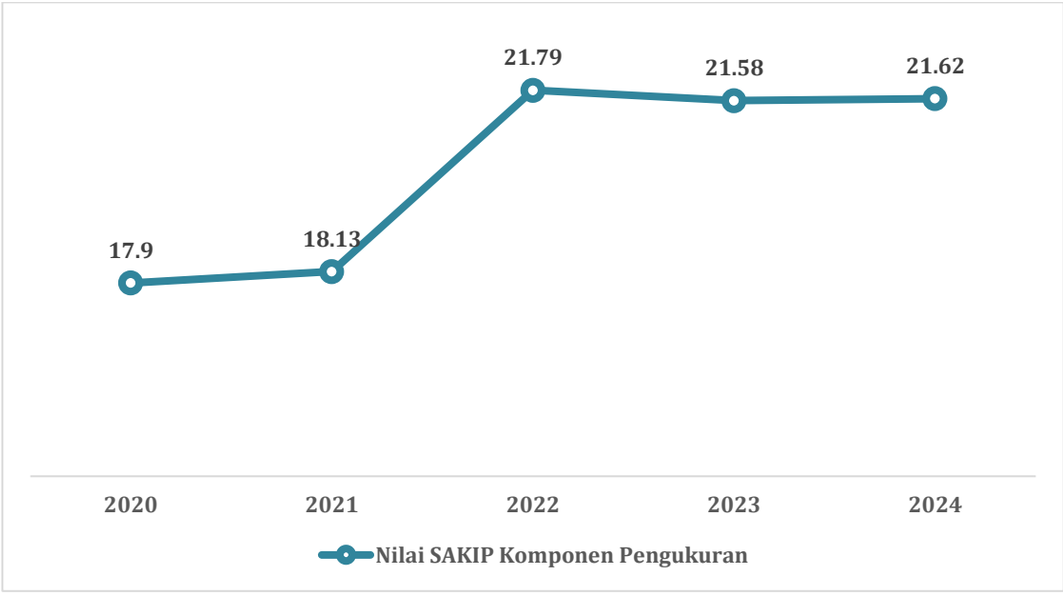
Meskipun capaian ini menunjukkan konsistensi perencanaan, masih terdapat tantangan dalam menjaga kualitas perencanaan yang efektif dan terintegrasi. Berdasarkan evaluasi, meskipun sudah dilakukan perbaikan dalam Perencanaan Kinerja (PK), namun masih ditemukan indikator kinerja yang belum relevan dan kurang menjawab kondisi atau sasaran strategis. Selain itu, meskipun pohon kinerja dan penjenjangan kinerja sudah disusun hingga level kota dan perangkat daerah (PD), namun belum sepenuhnya menggambarkan hubungan logis atau sebab-akibat yang secara langsung menunjang kinerja atasannya dan belum dijabarkan secara operasional. Hubungan antara kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang juga belum terbangun secara optimal, terutama pada level PD yang membutuhkan dukungan lintas sektor. Untuk meningkatkan nilai komponen perencanaan, diperlukan peningkatan kualitas indikator kinerja, perbaikan pohon kinerja yang lebih logis dan operasional, serta pembangunan hubungan *crosscutting* yang kuat antar perangkat daerah. Hal ini diharapkan dapat memperkuat integrasi perencanaan kinerja dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang lebih efektif di Kota Kediri.

b) Nilai Sakip Komponen Pengukuran

Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja di Kota Kediri mengukur kualitas mekanisme pengukuran kinerja yang akuntabel, transparan, dan efektif dalam mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi. Komponen ini

mencakup perumusan indikator kinerja utama (IKU), metode pengukuran kinerja, dan evaluasi capaian kinerja pada level organisasi maupun individu. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, capaian Nilai Pengukuran Kinerja menunjukkan tren yang meningkat namun belum optimal. Pada tahun 2020 nilai yang dicapai adalah 17,9, mengalami peningkatan pada tahun 2021 (18,13) dan 2022 (21,79). Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023 (21,58) dan sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 21,62.

Grafik 2. 52 Nilai SAKIP komponen Pengukuran Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber: KemenPAN-RB, 2024

Meskipun tren menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengukuran kinerja di Kota Kediri masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan hasil analisis, formulasi perhitungan atau data yang digunakan belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja kondisi yang diharapkan, terutama pada level perangkat daerah (PD). Selain itu, pengukuran kinerja individu yang menggunakan aplikasi PUSDASIP belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan kinerja individu dengan pencapaian kinerja organisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi dengan aplikasi pengukuran kinerja organisasi (APKPD). Sementara itu, meskipun Pemerintah Kota Kediri telah melakukan pengukuran kinerja secara teratur, hasil pengukuran belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment berdasarkan capaian kinerja organisasi.

Untuk meningkatkan nilai komponen pengukuran kinerja, diperlukan peningkatan kualitas data dan metode perhitungan agar lebih akurat dan relevan dalam mengukur capaian kinerja. Selain itu, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara aplikasi PUSDASIP dengan APKPD untuk memastikan keterkaitan antara kinerja individu dan organisasi. Pemerintah Kota Kediri juga perlu mengoptimalkan penggunaan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan pemberian reward and punishment. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dapat meningkat secara signifikan dan lebih akuntabel di masa mendatang.

c) Persentase capaian indikator Sasaran RPJMD berkategori berhasil

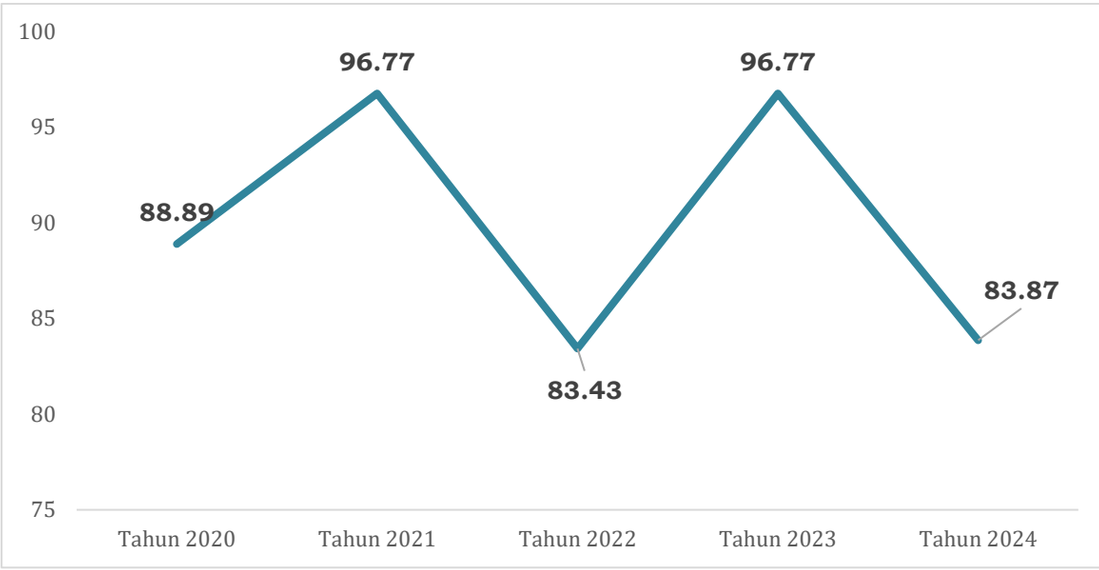
Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai (sesuai target). Persentase yang tinggi mencerminkan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan program, serta efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Capaian indikator selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun tetap berada pada kategori tinggi:

- Tahun 2020, capaian mencapai 88,89%, menandakan sebagian besar sasaran pembangunan berhasil diwujudkan.
- Tahun 2021, kinerja meningkat signifikan menjadi 96,77%, menggambarkan keberhasilan hampir menyeluruh dalam pencapaian sasaran.
- Tahun 2022, terjadi penurunan capaian menjadi 83,43%, yang mengindikasikan adanya beberapa hambatan dalam realisasi target.
- Tahun 2023, capaian kembali melonjak menjadi 96,77%, mencerminkan perbaikan kinerja dan penguatan implementasi program.
- Tahun 2024, persentase turun kembali menjadi 83,87%, meskipun masih menunjukkan mayoritas sasaran tetap tercapai.

Secara umum, capaian indikator menunjukkan dua kali puncak kinerja (2021 dan 2023) dengan persentase hampir sempurna (96,77%). Penurunan capaian terjadi di tahun 2022 dan 2024, menunjukkan adanya tantangan konsistensi dalam pemenuhan indikator sasaran. Rata-rata capaian selama 2020–2024 berada pada kisaran 90,35%, yang masih

tergolong tinggi dan menunjukkan mayoritas sasaran RPJMD berhasil diwujudkan. Ke depan, perlu dilakukan evaluasi mendalam pada faktor-faktor yang memengaruhi penurunan di tahun 2022 dan 2024 agar capaian kinerja dapat lebih stabil dan konsisten.

Grafik 2. 53 Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD Berkategori Berhasil Tahun 2020-2024



Sumber: BAPPEDA Kota Kediri, 2025

Untuk meningkatkan capaian indikator ini, Pemerintah Kota Kediri perlu memperkuat perencanaan dengan target yang realistis dan berbasis data, memastikan pelaksanaan program lebih efektif, efisien, serta berkontribusi langsung pada sasaran, dan melakukan monitoring-evaluasi berkala agar potensi masalah terdeteksi lebih awal. Selain itu, penguatan kapasitas SDM serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pencapaian kinerja.

2) Keuangan

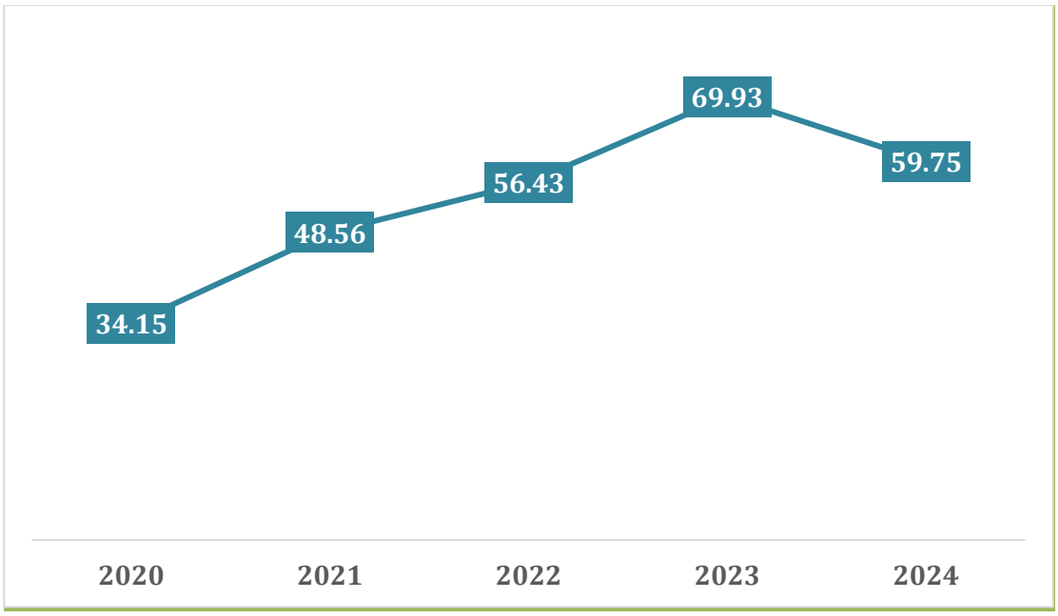
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu pilar fiskal Kota Kediri yang harus dimaksimalkan demi percepatan pembangunan. Sumber PAD, termasuk pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset, perlu dikelola dengan strategi optimal berbasis transparansi, inovasi, dan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan digitalisasi dan penguatan regulasi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PAD. Optimalisasi manajemen pendapatan, memperluas kapasitas fiskal, memastikan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan merupakan langkah progresif untuk

memperkokoh kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

a) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

IPKD digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indikator ini diukur melalui enam dimensi, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD. Perhitungan indeks tahun n dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun n-1. Adapun capaian IPKD Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 54 IPKD Kota Kediri Tahun 2020-2024



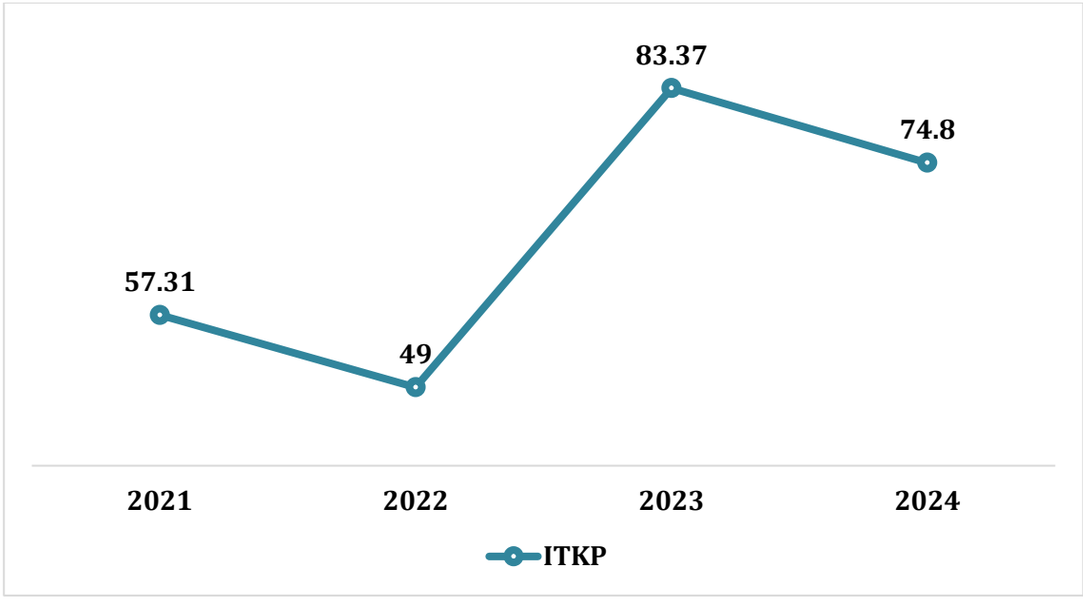
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, 2025

Capaian ini masih berada pada peringkat C (sangat perlu perbaikan). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dan akuntabel yang mengindikasikan bahwa Kota Kediri masih menghadapi tantangan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penyesuaian terhadap regulasi keuangan yang dinamis serta kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam pengalokasian anggaran, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan, serta penguatan peran pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

b) Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan regulasi penganggaran dan pelaksanaan APBD terkait pengadaan barang/jasa. ITKP menilai efektivitas penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Tendering, e-Purchasing, Toko Daring, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Kontrak, Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), serta Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Grafik 2. 55 Rasio ITKP Kota Kediri Tahun 2021-2024



Sumber: LKPP, 2024

Berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2024, capaian ITKP Kota Kediri menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai ITKP sebesar 57,31 dengan kategori Cukup, namun menurun pada tahun 2022 menjadi 49 yang masuk dalam kategori Kurang. Pada tahun 2023, ITKP mengalami peningkatan signifikan menjadi 83,37 dengan kategori Baik, meskipun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 74,8, namun tetap dalam kategori Baik. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan dalam penerapan SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, dan e-Kontrak, serta peningkatan kompetensi SDM pengadaan.

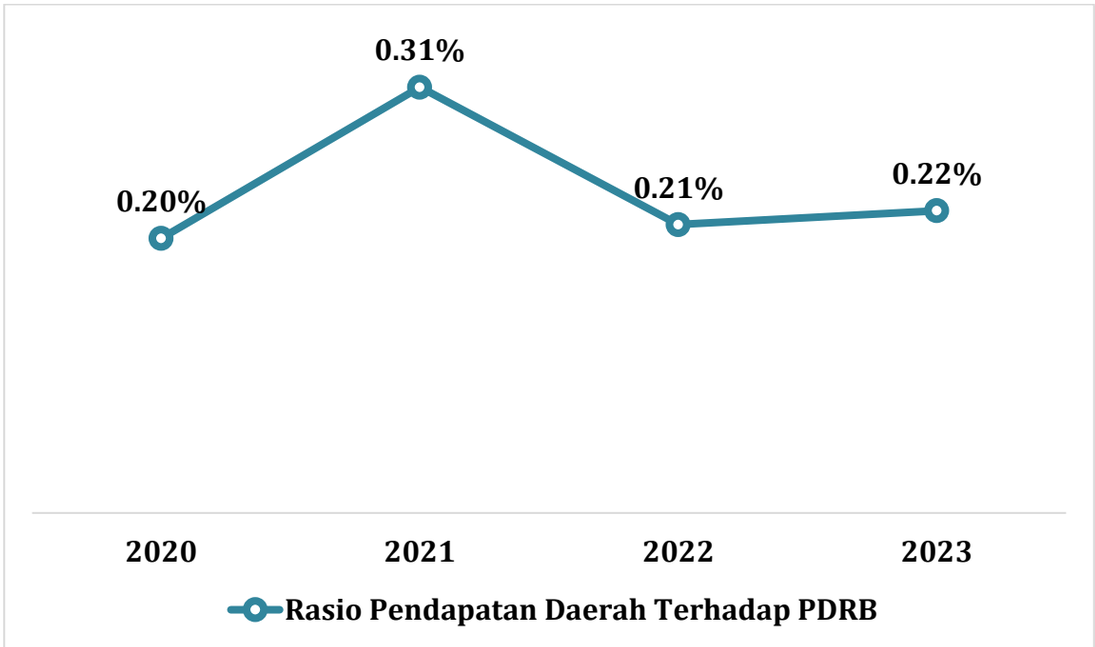
Fluktuasi capaian ITKP menunjukkan bahwa meskipun Kota Kediri telah berhasil meningkatkan efektivitas pengadaan barang/jasa, namun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi kepatuhan perangkat

daerah dan optimalisasi penggunaan Toko Daring serta Non e-Tendering/Non e-Purchasing. Untuk meningkatkan capaian ITKP secara konsisten, diperlukan peningkatan kompetensi SDM pengadaan, penguatan pengawasan dan transparansi, serta optimalisasi penerapan e-Kontrak dan SPSE. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan capaian ITKP di Kota Kediri dapat meningkat secara signifikan dan lebih stabil di masa mendatang

c) Rasio Pendapatan Daerah Terhadap PDRB

Indikator rasio pendapatan daerah terhadap PDRB mencerminkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keseluruhan perekonomian Kota Kediri. Indikator ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total PAD dengan total PDRB pada tahun yang sama. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dengan mengandalkan sumber daya sendiri, dan semakin rendah ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Grafik 2. 56 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap PDRB Kota Kediri Tahun 2020-2023



Sumber: BPPKAD Kota Kediri, BPS Kota Kediri (Data Diolah), 2024

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2023, rasio ini menunjukkan fluktuasi, yaitu 0,20% pada tahun 2020, meningkat menjadi 0,31% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 0,21% pada tahun 2022, dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,22% pada tahun 2023.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Kediri mampu meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2021, namun konsistensi dalam mempertahankan pertumbuhan pendapatan masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap PDRB masih perlu ditingkatkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, optimalisasi sektor-sektor potensial, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah agar dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

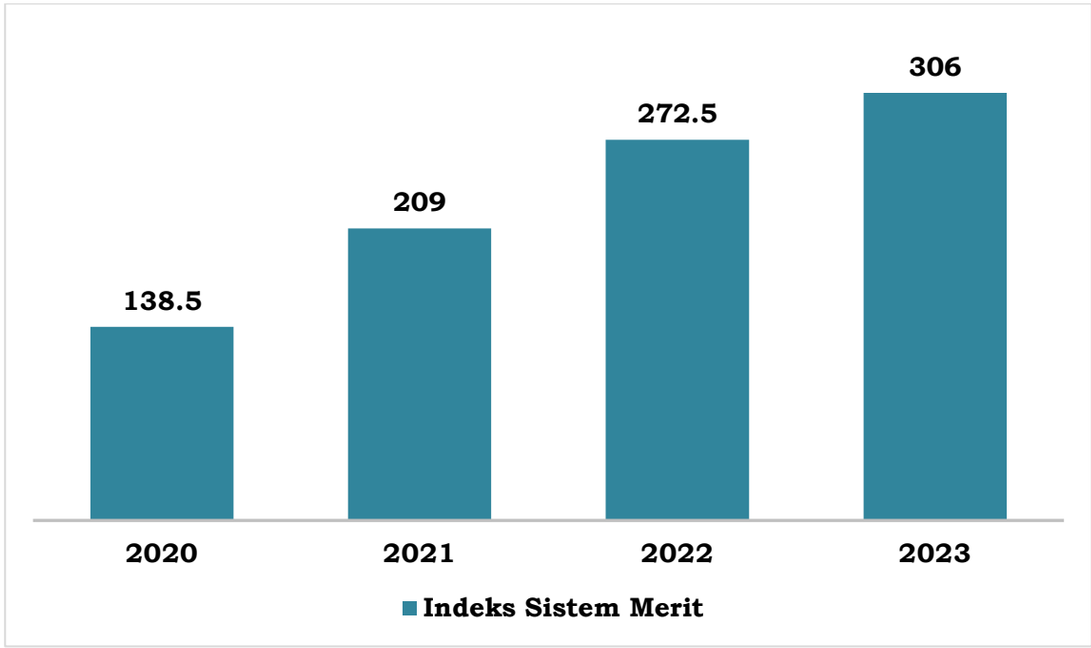
3) Kepegawaian

Bidang urusan kepegawaian di Kota Kediri berfokus pada pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional, efektif, dan berintegritas dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus utama dalam bidang ini adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, memperkuat sistem manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu, urusan kepegawaian juga diarahkan untuk mendorong budaya kerja yang inovatif dan adaptif guna mendukung pelayanan publik yang efektif dan responsif. Upaya reformasi birokrasi terus dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang berkualitas

a) Indeks Sistem Merit

Penerapan Sistem Merit di Kota Kediri menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan RKPD 2025, Indeks Sistem Merit Kota Kediri mengalami kenaikan dari 138,5 (buruk) pada tahun 2020, meningkat menjadi 272,5 (baik) pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 306 (baik) pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Kediri dalam mengimplementasikan sistem merit secara objektif dan transparan, dengan mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam pengangkatan, penempatan, promosi, dan mutasi pegawai.

Grafik 2. 57 Indeks Sistem Merit Kota Kediri Tahun 2020-2023



Sumber: BKPSDM Kota Kediri, 2024

Untuk mencapai target penerapan sistem merit yang lebih optimal, Pemerintah Kota Kediri melakukan berbagai upaya strategis, seperti penguatan manajemen talenta ASN, perluasan cakupan uji kompetensi bagi ASN, pemenuhan kebutuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi, serta pengembangan karir ASN yang meliputi promosi, rotasi, mutasi, dan pengembangan kompetensi. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kota Kediri menargetkan peningkatan indeks sistem merit menjadi 350 pada tahun 2024, sehingga diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mencegah praktik nepotisme dalam manajemen ASN.

b) Indeks Profesionalitas ASN

Penyelenggaraan Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN. Formula yang digunakan dalam menghitung Indeks Profesionalisme ASN adalah jumlah dari Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, kriteria dari masing-masing dimensi tersebut yaitu:

a. Dimensi Kualifikasi

   Dimensi ini digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan dengan bobot 25% dari keseluruhan pengukuran.

b. Dimensi Kinerja

   Dimensi ini digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan dengan bobot 30% dari keseluruhan pengukuran.

c. Dimensi Kompetensi

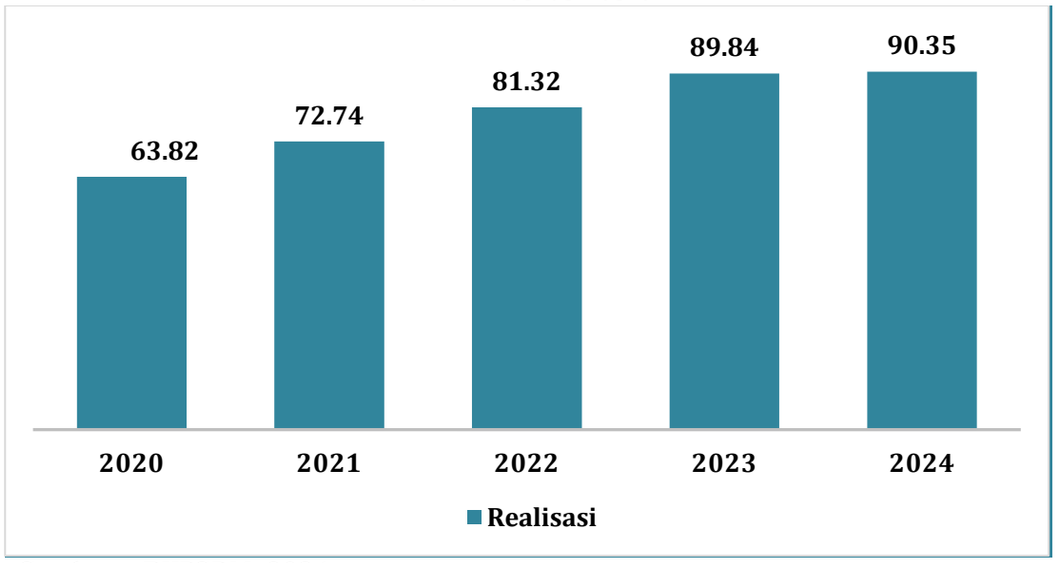
   Dimensi ini digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi (Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Bimtek/Seminar/Workshop/Sejenis) yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan dengan bobot 40% dari keseluruhan pengukuran.

d. Dimensi Disiplin

   Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat). Dimensi Disiplin diperhitungkan dengan bobot 5% dari keseluruhan pengukuran.

Realisasi Indeks Profesionalisme ASN pada awal tahun perencanaan RPJMD sebesar 63,82. Adapun target yang ditetapkan pada akhir tahun perencanaan sebesar 68,00, telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 90,35 dengan capaian kinerja sebesar 132,87%, masuk kategori **Sangat Tinggi**. Gambaran target kinerja Indeks Profesionalisme ASN serta realisasi awal dan akhir tahun RPJMD ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 58 Indeks Profesionalitas ASN Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber : BKPSDM, 2024

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 sebesar 90.35 terdiri dari nilai dimensi kompetensi 35,71 dari bobot tertinggi 40; nilai dimensi kualifikasi 22,18 dari bobot tertinggi 30; nilai dimensi kinerja 27.47 dari bobot tertinnggi 30; dan nilai dimensi disiplin 4,99 dari bobot tertinggi 5.

c) Persentase Pengembangan Karir ASN berdasarkan Hasil Talenpool ASN

Indikator persentase pengembangan karir ASN di Kota Kediri didasarkan pada hasil Talenpool ASN yang mengukur potensi dan kompetensi ASN untuk mendukung kebutuhan organisasi secara efektif. Target pengembangan karir ASN pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 90%, dengan realisasi pada tahun 2023 mencapai 88%, menunjukkan capaian yang cukup baik namun masih ada ruang untuk perbaikan. Program pengembangan karir ini mencakup promosi, rotasi, dan pengembangan kompetensi yang berbasis hasil penilaian potensi pada kotak manajemen talenta, dengan tujuan menciptakan ASN yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, pendekatan Talenpool ASN memberikan kekuatan dalam mengidentifikasi potensi ASN secara objektif dan memperkuat penerapan Sistem Merit yang adil dan transparan. Namun, terdapat kelemahan berupa kesenjangan antara hasil penilaian potensi dengan pelaksanaan pengembangan karir secara merata. Peluang untuk meningkatkan efektivitas program ini dapat dicapai melalui perluasan cakupan uji kompetensi dan penerapan sistem merit yang lebih menyeluruh.

Meskipun demikian, ancaman berupa resistensi terhadap perubahan dan kurangnya komitmen dari beberapa pihak dapat menjadi tantangan dalam optimalisasi pengembangan karir ASN di Kota Kediri.

4) Penelitian dan Pengembangan

a. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, merupakan segala bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah guna mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi daerah mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, yang berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan.
2. Inovasi dalam pelayanan publik, yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Inovasi daerah lainnya, yang berkaitan dengan bidang urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab aspek daya saing daerah, Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 mengalami peningkatan dengan mencapai skor 51,52. Meskipun skor tersebut belum mencapai kategori Sangat Inovatif, kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam manajemen inovasi serta implementasi program yang lebih efektif. Dengan adanya mekanisme penilaian ini, pemerintah daerah diharapkan terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Penelitian dan Pengembangan

Indikator Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah merupakan ukuran penting yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan pembaruan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Indikator ini juga memiliki keterkaitan erat dengan Indeks Inovasi Daerah, karena pertumbuhan inovasi yang berkesinambungan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai indeks secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang tersedia, capaian indikator di tahun 2024 sebesar 16,13%. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan inovasi yang cukup signifikan, sekaligus menandai adanya upaya nyata Pemerintah Kota Kediri dalam menciptakan terobosan-terobosan baru. Meskipun data tahun 2020 hingga 2023 tidak tersedia sehingga tren pertumbuhan belum dapat digambarkan secara utuh, capaian di tahun 2024 dapat dijadikan pijakan awal untuk mengukur arah pengembangan inovasi ke depan.

Keberhasilan mempertahankan dan meningkatkan persentase pertumbuhan inovasi sangat bergantung pada konsistensi perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan inovasi yang relevan, adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal, capaian pertumbuhan inovasi diharapkan tidak hanya meningkat, tetapi juga berkelanjutan.

Dengan demikian, angka 16,13% pada tahun 2024 dapat dipandang sebagai langkah awal yang menjanjikan, namun tetap membutuhkan perhatian lebih lanjut agar pertumbuhan inovasi daerah benar-benar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

VI. Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

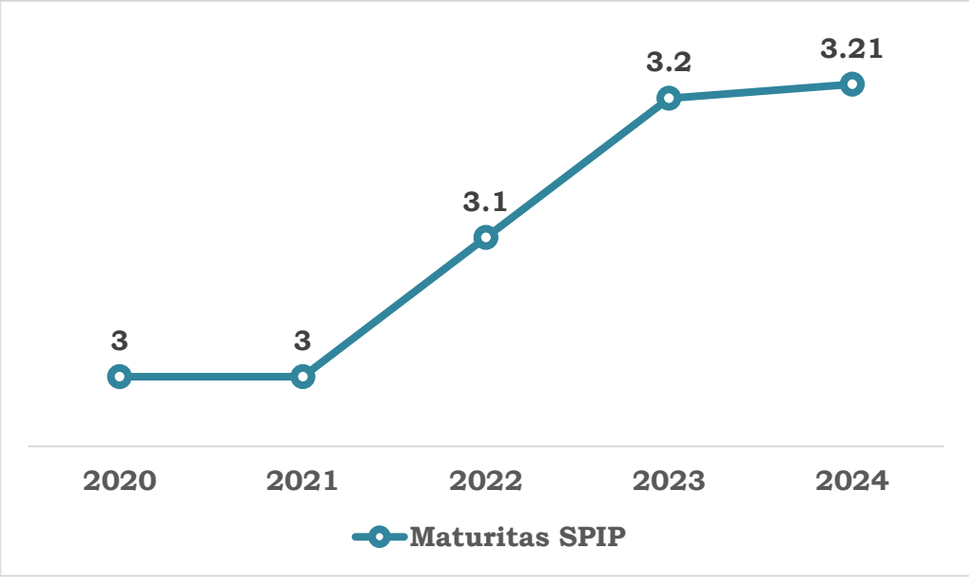
Bidang Urusan Inspektorat Daerah Kota Kediri bertanggung jawab dalam mengawasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, Inspektorat Daerah juga berperan dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran dan mendorong efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan pengawasan yang profesional dan independen, Inspektorat Daerah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik.

a) Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Kediri pada periode tahun 2022 hingga 2024 berada pada Level 3 dengan kategori “terdefinisi”. Hal ini menunjukkan bahwa praktik-praktik pengendalian terhadap proses penyelenggaraan pemerintah telah

terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kediri dalam mencapai peningkatan maturitas SPIP antara lain melalui koordinasi intensif dengan instansi pembina seperti BPKP, peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pengendalian intern, serta implementasi Aplikasi E-Integrity untuk penilaian mandiri SPIP secara terintegrasi. Aplikasi ini mencakup penilaian kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.

Grafik 2. 59 Tingkat Maturitas SPIP Kota Kediri 2020-2024



Sumber: Inspektorat, 2024

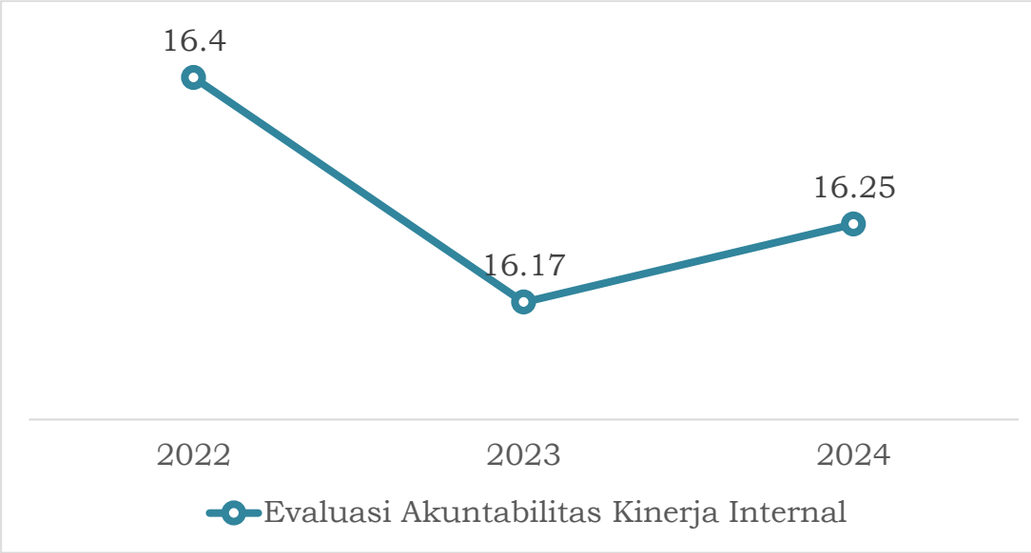
Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, terutama pada aspek teknis penggunaan Aplikasi E-Integrity yang menyebabkan mundurnya jadwal penilaian yang seharusnya selesai pada Juli, namun diundur hingga Agustus. Meski demikian, Pemerintah Kota Kediri tetap optimis dalam meningkatkan tingkat maturitas SPIP. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan Nilai Maturitas SPIP dari tahun 2022 sampai 2024. Capaian in tersebut mencerminkan bahwa kualitas penyelenggaraan SPIP di Kota Kediri terus mengalami perbaikan yang signifikan

b) Nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP

Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada SAKIP Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai ini mencapai 16,40, kemudian mengalami

sedikit penurunan menjadi 16,17 pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 16,25 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi penerapan akuntabilitas kinerja, terutama dalam hal perencanaan dan pengukuran kinerja yang masih memerlukan peningkatan kualitas. Penurunan pada tahun 2023 menunjukkan adanya kendala dalam integrasi pengukuran kinerja dan inkonsistensi dalam pelaporan kinerja, namun peningkatan pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas evaluator internal dan penyempurnaan indikator kinerja yang lebih outcome-oriented.

Grafik 2. 60 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kota Kediri Tahun 2022-2024



Sumber: KemenPAN-RB, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi, Inspektorat Pemerintah Kota Kediri telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah (PD) dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yaitu laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup konkrit pada setiap komponen evaluasi, serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa kinerja yang capaiannya belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat Kota Kediri diharapkan dapat memberikan temuan dan rekomendasi yang lebih konkrit pada setiap komponen evaluasi, serta mendorong hasil

evaluasi untuk memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata guna peningkatan capaian kinerja yang lebih efektif dan berkelanjutan.

VII. Kewilayahan

1) Kecamatan

Bidang Urusan Kecamatan di Kota Kediri berperan penting dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien di tingkat wilayah, sekaligus menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Sebagai unit administratif yang membawahi kelurahan, kecamatan bertanggung jawab dalam koordinasi dan pembinaan kelurahan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan merata. Kelurahan sebagai bagian integral dari kecamatan memiliki peran strategis dalam melayani kebutuhan masyarakat secara langsung, mulai dari administrasi kependudukan hingga pelayanan sosial. Dengan fungsi pengawasan dan pembinaan wilayah, kecamatan berperan dalam menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai alat ukur yang objektif, sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan di Kota Kediri menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data, IKM Kecamatan Mojoroto pada tahun 2023 adalah 3,84, sedangkan IKM Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren masing-masing sebesar 3,53 dan 3,41. Pada tahun 2024, terjadi perubahan dengan IKM Kecamatan Mojoroto sebesar 3,72, IKM Kecamatan Kota meningkat menjadi 3,89, sedangkan IKM Kecamatan Pesantren mencapai 3,44.

Perkembangan ini menunjukkan adanya dinamika kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat kecamatan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbaikan kualitas layanan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan pemerintahan yang semakin responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut disajikan nilai IKM per Kecamatan di Kota Kediri Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 108 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Mojoroto	3,57	3,46	3,65	3.84	3.72
Kota	3,52	3,65	3,68	3.53	3.89
Pesantren	3,52	3,65	3,60	3.41	3.44

Sumber: Bappeda, 2025

VIII. Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Kediri berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan kerukunan masyarakat guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban umum. Melalui upaya pembinaan ideologi Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, serta pendidikan politik bagi masyarakat, bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Selain itu, Koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi politik terus diperkuat untuk mencegah konflik sosial dan memastikan kondisi masyarakat yang aman, damai, dan kondusif dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang stabil dan harmonis di Kota Kediri.

a) Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA

Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA di Kota Kediri mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan keberhasilan dalam mencegah dan menangani potensi konflik SARA secara efektif. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat Kota Kediri dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), TNI/Polri, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan sistem deteksi dini dan respons cepat, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi konflik secara proaktif dan menyelesaikannya secara damai melalui mediasi dan dialog antarumat beragama.

Upaya yang dilakukan meliputi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara yang inklusif, sosialisasi dan dialog antar umat beragama untuk memperkuat

kerukunan, serta pemantauan isu-isu sensitif di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah konflik SARA. Capaian 100% dalam penanganan potensi kasus SARA menunjukkan bahwa Kota Kediri berhasil menciptakan kondisi sosial yang aman dan harmonis, serta membuktikan efektivitas strategi koordinasi lintas sektor dan deteksi dini dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.

b) Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kota Kediri

Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial di Kota Kediri mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan efektivitas strategi kewaspadaan dini dan koordinasi lintas sektor dalam mencegah konflik sosial. Capaian ini melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai koordinator utama, bekerja sama dengan TNI/Polri, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tokoh masyarakat dalam melaksanakan pendidikan politik, dialog antar kelompok, dan mediasi konflik. Upaya yang dilakukan mencakup deteksi dini potensi konflik, sosialisasi wawasan kebangsaan, serta penguatan kerukunan sosial dan toleransi antar umat beragama. Koordinasi intensif dan rapat bersama antar instansi terkait juga menjadi kunci dalam merespons potensi konflik secara cepat dan tepat. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Kota Kediri dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, serta menjadi bukti efektivitas pendekatan preventif dan kolaboratif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2) transfer pemerintah pusat terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah;
3) transfer pemerintah provinsi yang terdiri dari bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan;
4) lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, belanja daerah dialokasikan untuk:

1) belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
2) belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, aset tetap lainnya.

Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan tahun anggaran 2021 – 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 109 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Kode	Uraian Rekening	2020	2021	2022	2023	2024
4	Pendapatan Daerah	1.283.093.769.233,74	1.508.822.569.048,64	1.453.556.698.954,24	1.478.072.837.267,84	1.507.326.107.383,27
4.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	262.886.289.227,78	439.896.279.120,18	319.295.604.320,24	351.169.614.811,84	389.833.521.688,27
4.2	Pendapatan Transfer	989.006.560.735,00	1.040.498.864.867,00	1.133.953.936.329,00	1.126.903.222.456,00	1.117.492.585.695,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31.200.919.270,96	28.427.425.061,46	307.158.305,00	0,00	0,00
5	Belanja	1.207.691.610.980,16	1.344.272.318.953,32	1.482.748.596.777,33	1.566.450.723.233,10	1.558.866.792.688,00
5.1	Belanja Operasi	1.004.241.841.088,26	1.205.523.929.891,64	1.305.109.605.559,02	1.359.299.691.282,10	1.400.659.943.318,00
5.2	Belanja Modal	98.314.709.094,90	106.605.344.496,68	169.126.180.227,31	198.705.950.406,00	152.123.432.240,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	104.369.697.897,00	31.645.668.465,00	8.019.442.791,00	7.951.300.595,00	5.498.896.830,00
5.4	Belanja Transfer	765.362.900,00	497.376.100,00	493.368.200,00	493.780.950,00	584.520.300,00
	Total Surplus/(Defisit)	75.402.158.253,58	164.550.250.095,32	(29.191.897.823,09)	(88.377.885.965,26)	(51.540.685.304,73)
6	Pembiayaan	267.341.428.526,01	342.743.586.779,59	507.293.846.874,91	468.042.829.031,82	389.724.063.086,56
6.1	Penerimaan Pembiayaan	267.341.428.526,01	342.743.586.779,59	507.293.846.874,91	493.042.829.031,82	389.724.063.086,56
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	342.743.586.779,59	507.293.836.874,91	478.101.949.051,82	379.664.943.066,56	338.183.377.781,83

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Struktur APBD yang digunakan pada tabel diatas mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Struktur anggaran dan realisasi APBD tahun anggaran 2019-2020 disesuaikan berdasarkan ketentuan tersebut. Data tahun 2020-2021 terdapat anggaran dan realisasi pendapatan hibah dana BOS yang seharusnya masuk pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, namun untuk kepentingan analisis dimasukkan pada pendapatan transfer pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sejak tahun 2022 pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masuk kategori pendapatan transfer pemerintah pusat.

2.2.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah, memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pada masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel yang tersaji berikut ini:

Tabel 2. 110 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	Saldo (Rp)					Rata-rata Pertum-buhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**ASET**						
2	**ASET LANCAR**	**414.614.594.346,21**	**561.018.099.073,79**	**531.783.296.143,53**	**467.734.238.708,70**	**408.396.671.497,06**	**1,34%**
3	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**216.253.872.213,80**	**212.260.906.528,44**	**212.472.344.885,92**	**215.851.110.089,29**	**220.621.457.483,26**	**0,51%**
4	**ASET TETAP**	**2.459.527.107.307,75**	**2.522.745.226.889,41**	**2.715.292.996.907,19**	**2.837.336.140.700,94**	**2.596.464.179.777,48**	**1,55%**
5	**ASET LAINNYA**	**33.843.228.241,57**	**36.857.887.726,08**	**59.477.919.331,04**	**41.056.252.245,43**	**27.596.460.140,01**	**1,63%**
6	**JUMLAH ASET**	**3.124.238.802.109,33**	**3.332.882.120.217,72**	**3.519.026.557.267,68**	**3.572.036.861.764,36**	**3.517.369.318.963,81**	**3,06%**
7	**KEWAJIBAN**						
63	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**19.797.650.145,23**	**67.693.753.108,58**	**24.419.073.421,11**	**16.807.732.301,67**	**29.429.150.022,30**	**55,48%**
64	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**19.797.650.145,23**	**67.693.753.108,58**	**24.419.073.421,11**	**16.807.732.301,67**	**29.429.150.022,30**	**55,48%**
73	EKUITAS	3.104.441.151.964,10	3.265.188.367.109,14	3.494.607.483.846,57	3.555.229.129.462,69	3.487.940.168.941,51	**3,01%**
74	**JUMLAH EKUITAS**	**3.104.441.151.964,10**	**3.265.188.367.109,14**	**3.494.607.483.846,57**	**3.555.229.129.462,69**	**3.487.940.168.941,51**	**3,01%**
75	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**3.124.238.802.109,33**	**3.332.882.120.217,72**	**3.519.026.557.267,68**	**3.572.036.861.764,36**	**3.517.369.318.963,81**	**3,06%**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi kerangka keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026-2030 disusun berdasarkan hasil analisis atas realisasi keuangan daerah tahun 2020-2024 dan asumsi kondisi daerah tahun 2025. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026-2030 didasarkan pada analisis tren pertumbuhan tahun 2020-2024 serta mempertimbangkan proyeksi anggaran tahun 2025.

Berdasarkan analisis tren pertumbuhan, pendapatan daerah selama tahun 2020-2021 mengalami anomali disebabkan adanya pandemi Covid-19. Memperhatikan hal tersebut data tahun 2020-2021 untuk pendapatan yang berasal dari bagi hasil pendapatan BLUD dan retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan. Dalam memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026-2030 juga memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan berlaku pada tahun 2025.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030 dijelaskan berdasarkan analisis, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat setiap tahun sebesar 5,62 persen. Berdasarkan analisis pertumbuhan komponen PAD, pada tahun 2025-2029 pajak daerah diproyeksikan tumbuh sebesar 5,0 persen, retribusi daerah 9,0 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 10 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar 6 persen. Perhitungan proyeksi pajak daerah tahun 2025-2029 memperhitungkan pendapatan opsen PKB dan BBNKB yang awalnya masuk kategori pendapatan transfer antar daerah selanjutnya masuk kategori pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan PKB dan BBNKB mampu tumbuh rata-rata sebesar 8.25 persen dan 5.51 persen pada periode 2019-2023. Sedangkan, pendapatan lain-lain PAD yang sah pada komponen pendapatan BLUD mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2021 sebagai dampak peningkatan layanan selama pandemi Covid-19. Dalam menganalisis lain-lain PAD yang sah, data pertumbuhan pendapatan BLUD yang terdampak pandemi Covid-19 dikeluarkan dari perhitungan agar diperoleh pertumbuhan yang riil.
2) Pendapatan transfer diproyeksikan tumbuh sebesar 1,16 persen. Berdasarkan analisis pertumbuhan komponen pendapatan transfer, pada tahun 2025-2026 pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer antar

daerah diproyeksikan tumbuh 1,25 persen. Namun demikian, sesuai ketentuan yang berlaku, pendapatan transfer antar daerah secara jumlah mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 karena dialihkan pada komponen pajak daerah.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2025-2029 tidak dialokasikan dengan pertimbangan bahwa selama tahun 2020-2023 hanya terealisasi pada tahun 2021 dan 2022 berupa pendapatan hibah BOS. Selanjutnya pendapatan hibah BOS masuk kategori pendapatan transfer.

Untuk mendukung pencapaian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2026-2030 ditetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, sebagai berikut:

1) Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2) Optimalisasi pendapatan dari dana transfer untuk mendanai program prioritas;
3) Optimalisasi kerja sama aset daerah;
4) Optimalisasi lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Pendanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah dihitung berdasarkan penerimaan daerah dikurangi pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah) serta penerimaan pembiayaan daerah. Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, formulasi penghitungan kapasitas riil keuangan daerah disesuaikan dengan tidak menyertakan belanja tidak langsung sebagai komponen pengurang penerimaan, semua jenis belanja masuk dalam program dan kegiatan pembangunan.

Belanja daerah tahun anggaran 2026-2030 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Sedangkan,

urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja daerah tahun 2026-2030 dilaksanakan secara akuntabel, proporsional, efektif dan efisien. Kebijakan belanja daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut.

1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan pelayanan dasar bagi kesejahteraan masyarakat;
2) Belanja daerah digunakan untuk menunjang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan prioritas daerah;
3) Belanja daerah yang bersifat wajib untuk fungsi pendidikan dialokasikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan belanja Infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan belanja transfer ke daerah; serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota atas target pendapatan pajak daerah;
4) Belanja daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
5) Belanja daerah dengan sumber dana *specific grant* (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, Badan Layanan Umum Daerah) dialokasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dioptimalkan untuk pendanaan prioritas pembangunan daerah; dan
6) Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, gaji PPPK, Tambahan Penghasilan PPPK, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Proyeksi pendapatan dan belanja akan mempengaruhi proyeksi pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam kondisi defisit anggaran, pemerintah daerah dapat menutup dengan sumber penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Sedangkan dalam kondisi surplus anggaran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan surplus melalui pengeluaran pembiayaan daerah

diantaranya untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi daerah), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan analisis dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan maka proyeksi kerangka pendanaan APBD tahun anggaran 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 111 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	Pendapatan Daerah						
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	389.833.521.688,27	417.493.521.207,72	423.982.529.465,86	431.252.138.336,29	438.901.670.200,40	446.943.606.907,72
4.2	Pendapatan Transfer	1.117.492.585.695,00	1.009.034.407.000,00	1.009.034.407.000,00	1.009.034.407.000,00	1.009.034.407.000,00	1.009.034.407.000,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-				
	Jumlah Pendapatan	1.507.326.107.383,27	1.426.527.928.207,72	1.433.016.936.465,86	1.440.286.545.336,29	1.447.936.077.200,40	1.455.978.013.907,72
5	Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasi	1.400.659.946.964,00	1.486.932.085.359,60	1.476.718.311.998,46	1.463.987.920.868,89	1.466.637.452.733,00	1.454.679.389.440,32
5.2	Belanja Modal	152.123.432.240,00	186.298.624.467,40	176.298.624.467,40	176.298.624.467,40	151.298.624.467,40	141.298.624.467,40
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.498.896.830,00	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	584.520.300,00	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	1.558.866.796.334,00	1.685.230.709.827,00	1.665.016.936.465,86	1.652.286.545.336,29	1.629.936.077.200,40	1.607.978.013.907,72
	Surplus / Defisit	(51.540.688.950,73)	(258.702.781.619,28)	-232.000.000.000,00	-212.000.000.000,00	-182.000.000.000,00	-152.000.000.000,00
6	Pembiayaan	389.724.063.086,56	258.702.781.619,28	232.000.000.000,00	212.000.000.000,00	182.000.000.000,00	152.000.000.000,00
6,1	Penerimaan Pembiayaan	389.724.063.086,56	258.702.781.619,28	240.000.000.000,00	220.000.000.000,00	190.000.000.000,00	160.000.000.000,00
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	338.183.374.135,83	258.702.781.619,28	232.000.000.000,00	212.000.000.000,00	182.000.000.000,00	152.000.000.000,00

2.2.3.3 Skema Pembiayaan Lainnya

Kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat. Kebijakan dana transfer pusat yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, menunjukkan aliran fiskal Pemerintah Pusat tidak lagi dapat dijadikan penopang utama pembiayaan pembangunan daerah. Di sisi lain, kapasitas untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain basis pajak yang terbatas, resistensi sosial-politik terhadap peningkatan tarif atau perluasan objek pajak dan potensi daerah yang terbatas.

Dalam kondisi seperti ini, diperlukan inovasi dan pendekatan pembiayaan lainnya. Pembiayaan alternatif ini menjadi sebuah instrument strategis untuk mengurangi ketergantungan pada skema pendanaan konvensional seperti pajak, sekaligus mampu memperluas ruang fiscal daerah. Tanpa adanya inovasi dan terobosan pembiayaan, maka pembangunan daerah berpotensi terhambat, daya saing daerah melemah, dan kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah daerah akan semakin berkurang. Oleh karena itu, skema pembiayaan inovatif bukan lagi sekadar pilihan, namun menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan UNICEF dan Kementerian Keuangan RI menembangkan *Integrated Subnational Financing Framework* (ISFF) periode 2025–2030 yang dirancang untuk memperkuat mobilisasi sumber daya keuangan secara terpadu dan mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil. ISFF juga menawarkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada pencapaian dampak pembangunan yang terukur. Provinsi Jawa Timur telah menerapkan berbagai skema pembiayaan alternatif untuk memperkuat pendanaan pembangunan di luar sumber konvensional di antaranya pelibatan unsur swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur publik, pengelolaan zakat produktif di bawah pengelolaan BAZNAS yang dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Melalui program Prokesra, Pemerintah Provinsi juga mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan dengan menyediakan subsidi bunga bagi kredit murah yang menyasar pelaku usaha mikro. Selain itu, inisiasi awal sukuk daerah juga mulai diwacanakan sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah, serta optimalisasi

pemanfaatan dana CSR dalam mendukung sektor-sektor pembangunan prioritas agar lebih terarah dan kolaboratif.

Sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa alternatif sumber pendanaan pembangunan antara lain:

1. Pinjaman Daerah

   Konsep dasar pinjaman daerah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

   KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. keterlibatan swasta bukan hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi bagi pengguna akhir. Regulasi terkait KPBU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adanya regulasi tersebut diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan khususnya dalam penyediaan infrastruktur publik.

3. Obligasi Pemerintah Daerah

   Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. *Revenue Bond* adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan

memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

4. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

   Dinamika lingkungan bisnis dan liberalisasi menuntut perubahan pola usaha yang berorientasi lebih holistik, berbasis nilai-nilai Good Corporate Governance karena perusahaan memerlukan citra yang positif sehingga diperlukan program tanggung jawab sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dari segi pemerintah, CSR bisa jadi merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan. Pengelolaan dana CSR jika diarahkan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah dapat meringankan beban fiskal daerah. Pelaksanaan CSR di Kota Kediri diatur melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Kediri. Selanjutnya Forum CSR dibentuk dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/574/419.16/2016 tanggal 14 September 2026.

5. Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

   Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerja sama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Internasional disebut juga dengan ‘NGO’ (Non Govermental Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada Masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan manfaat dari mitra kerja sama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, *Transfer of knowledge*, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

6. Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA)

   Pemerintah Pusat melalui Bappenas mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur. Skema ini menggali sumber pembiayaan alternatif, seperti modal swasta, perbankan, pasar modal, asuransi, dana kelolaan, hingga lembaga keuangan lainnya untuk mendanai proyek yang memiliki nilai komersial dan manfaat sosial-ekonomi. Empat kriteria utama agar dapat menggunakan skema PINA yaitu:

   a. Mendukung target prioritas pembangunan nasional
   b. Memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas
   c. Kelayakan komersial (proyek harus dapat menghasilkan *return*)
   d. Kesiapan proyek (*readiness criteria*).

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun dapat secara efektif mengatasi atau meminimalkan permasalahan yang ada, sehingga solusi yang diterapkan lebih tepat sasaran. Berdasarkan identifikasi kinerja pembangunan yang telah disajikan dalam gambaran umum kondisi Kota Kediri pada Bab II, terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi, antara lain:

1. Rendahnya Kualitas SDM dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Kualiyas layanan kesehatan masih menjadi permasalahan di Kota Kediri. Angka Kematian Ibu yang meningkat pada tahun 2024, meskipun berhasil 0 pada tahun 2023. Masih adanya balita gizi buruk dan gizi kurang, dam masih diperlukannya intervensi pemerintah kota untuk menekan prevalensi stunting lebih jauh guna memastikan generasi mendatang mendapatkan nutrisi yang cukup. Program penanganan stunting masih menghadapi kendala di beberapa kelurahan yang mengalami keterbatasan anggaran untuk Pemberian Makanan

Tambahan (PMT) dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap gizi anak. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan program pemberian gizi tambahan yang berkelanjutan dan peningkatan wawasan serta kebiasaan makan bergizi di keluarga.

Dalam sektor pendidikan, rendahnya literasi digital dan minat baca menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengalami penurunan menjadi 51,21 pada 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang mencapai 75,18. Angka putus sekolah juga menjadi perhatian, dengan jumlah mencapai 1.548 anak, di mana 229 di antaranya belum tertangani secara optimal. Akses terhadap pendidikan berkualitas serta ketersediaan tenaga pendidik di beberapa wilayah masih belum merata, yang berkontribusi terhadap ketimpangan kualitas pendidikan di Kota Kediri.

Ketidaksesuaian keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri semakin memperparah kondisi ketenagakerjaan di Kota Kediri. Angka pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 6,09%, SMA sebesar 4,65%, dan perguruan tinggi sebesar 5,41%. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan program pelatihan vokasi, magang industri, dan wirausaha mandiri guna meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif.

Selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan dari 7,69% menjadi 6,51%, namun hal ini belum cukup untuk menjawab tantangan kemiskinan secara menyeluruh. Kenaikan signifikan Garis Kemiskinan dari Rp 493.438 menjadi Rp621.051 menunjukkan bahwa beban hidup masyarakat terus meningkat dan menjadi tekanan berat bagi keluarga miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang sempat melonjak menandakan masih banyak warga miskin yang hidup jauh di bawah ambang minimum yang layak. Lebih dari itu, peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan memperlihatkan bahwa ketimpangan di antara sesama penduduk miskin makin tajam, menuntut intervensi yang lebih terarah dan berkeadilan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga mengalami peningkatan, dengan rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) per 100.000 keluarga pada tahun 2024 sebesar 7.90. Kondisi ini mengindikasikan perlunya edukasi gender yang lebih masif serta penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Optimalisasi peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) serta peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi bagi

korban kekerasan harus menjadi prioritas kebijakan untuk menekan angka kasus tersebut.

Selain itu, pemanfaatan layanan kesehatan *Universal Health Coverage* (UHC) masih belum maksimal, sehingga perlu adanya penguatan sistem rujukan dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal fasilitas kesehatan tingkat pertama, Kota Kediri masih memiliki keterbatasan dengan hanya tiga puskesmas yang menyediakan layanan rawat inap. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas serta sarana dan prasarana puskesmas menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung program nasional pemeriksaan kesehatan gratis.

Upaya pengembangan layanan kesehatan juga harus diperluas dengan peningkatan kapasitas Rumah Sakit Gambiran guna memberikan pelayanan yang lebih komprehensif bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan layanan kesehatan berbasis teknologi, seperti program Halo Dokter atau Dokter Keluarga, perlu diperluas agar dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam menangani keluhan kesehatan minor secara cepat dan efisien. Terdapat pula 144 jenis penyakit yang tidak dapat dicover oleh BPJS di rumah sakit, tetapi hanya bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga penguatan layanan kesehatan primer menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Penanganan kelompok rentan, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri belum optimal karena belum tersedianya shelter yang representatif sebagai tempat rehabilitasi sosial, saat ini fungsi shelter masih dijalankan oleh Barak PPKS yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaannya.

2. Lemahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Tarik Investasi

Keterbatasan akses pasar masih menjadi tantangan utama bagi UMKM Kota Kediri, meskipun jumlah usaha mikro yang terdaftar meningkat pesat dari 682 unit pada 2019 menjadi 18.013 unit pada 2024. Namun, peningkatan omzet hanya terjadi pada 695 UMKM, menunjukkan bahwa sebagian besar usaha masih kesulitan memperluas jangkauan pasar. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya integrasi dengan pasar modern dan digital, serta keterbatasan permodalan akibat tingginya tingkat Non-Performing Loan (NPL) dalam program kredit usaha. Hal ini menghambat pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian Kota Kediri.

Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Kediri tercatat sebesar 70,74% pada 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata

Provinsi Jawa Timur yang mencapai 73,45%. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor perdagangan dan jasa berkontribusi terhadap rendahnya angka partisipasi tenaga kerja di sektor formal. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Kediri sebesar 3,91% tetap lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4,19%. Stabilitas ekonomi lokal serta peran signifikan UMKM dalam menyerap tenaga kerja turut memberikan kontribusi dalam menjaga keseimbangan ketenagakerjaan.

Fluktuasi investasi juga menjadi tantangan serius, dengan nilai investasi Kota Kediri mengalami penurunan drastis dari Rp 2.357,05 miliar pada 2022 menjadi Rp 1.546 miliar pada 2024. Ketergantungan ekonomi daerah pada satu perusahaan besar, yakni PT Gudang Garam Tbk., yang menyumbang 79,64% PDRB, semakin membuat ekonomi Kota Kediri rentan terhadap dinamika industri tembakau. Sementara itu, sektor perdagangan dan jasa hanya memberikan kontribusi sebesar 11,40% terhadap PDRB, menunjukkan rendahnya diversifikasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, strategi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri kreatif, teknologi, dan pariwisata perlu dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dari sisi identitas kota, Kediri hingga kini belum memiliki ikon resmi yang mencerminkan identitasnya sebagai kota industri dan sejarah. Pengembangan landmark kota dapat memperkuat citra Kediri di tingkat nasional dan global. Kota Kediri memiliki 27 destinasi wisata unggulan yang mencakup wisata sejarah, religi, alam, dan buatan, seperti Goa Selomangleng dan Kelenteng Tjoe Hwie Kiong. Ruang publik seperti Taman Brantas dan Alun-Alun Kediri terus berkembang, sementara wisata belanja dan kuliner juga menjadi daya tarik utama. Namun, potensi wisata ini belum dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan meningkatkan daya tarik wisatawan. Oleh karena itu, perencanaan yang lebih strategis dalam pengelolaan destinasi wisata dan ekowisata berbasis budaya serta sejarah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Kediri.

Selain ketergantungan ekonomi pada satu industri besar, Kota Kediri juga menghadapi permasalahan lain yang menghambat pertumbuhan ekonominya. Turunnya investasi daerah dari Rp 2.357,05 miliar pada 2022 menjadi Rp 1.546 miliar pada 2024 menunjukkan minimnya investasi industri non-tembakau. Ketidaksesuaian keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri juga memperlambat serapan tenaga kerja, yang berimbas pada produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang

lebih progresif untuk mendorong insentif investasi di sektor industri kreatif dan teknologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhap perubahan industri yang dinamis.

3. Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Merata dan Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kurangnya koordinasi dalam perencanaan tata kota menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan dan degradasi lingkungan. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri pada tahun 2024 mencapai 85,46%, meningkat dari 84,23% pada tahun 2023, namun masih menunjukkan banyak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Dari total 6.723 hektar pemanfaatan lahan di Kota Kediri, seluas 5.338,57 hektar telah sesuai rencana tata ruang. Selama periode 2020-2024, ketaatan terhadap rencana tata ruang meningkat menunjukkan kesadaran masyarakat dan sektor swasta akan pentingnya pembangunan ruang sesuai aturan. Pertumbuhan permukiman di area tidak terencana, seperti sekitar cagar budaya Maskumambang dan makam Cina di Kelurahan Pojok, semakin memperparah ketimpangan infrastruktur. Selain itu, penggunaan ruang terbuka hijau (RTH) publik masih jauh dari standar ideal, sehingga banyak kawasan hijau beralih fungsi.

Potensi pariwisata yang ada masih kurang terkelola dengan optimal. Kawasan Wisata Goa Selomangleng, kawasan Jl. Dhoho, Taman Brantas, dan lain sebagainya. Minimnya ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kawasan hijau yang berfungsi ekologis dan rekreasi masyarakat masih menjadi tantangan. Luas RTH publik di Kota Kediri pada tahun 2024 hanya mencapai 9,74% dari total luas kota, jauh di bawah target 20% sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH terbesar berada di Kecamatan Mojoroto dengan 28,05 ha, sementara Kecamatan Kota hanya memiliki 5,8 ha, menunjukkan ketimpangan distribusi yang signifikan.

Aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah, masih menjadi tantangan. Fasilitas publik yang ramah disabilitas masih minim, trotoar belum dilengkapi *guiding block* untuk penyandang tunanetra, halte transportasi tidak memiliki akses ramah kursi roda, serta gedung layanan publik, fasilitas kesehatan, dan sekolah masih kurang dalam memenuhi standar aksesibilitas. Hasil Indeks Kota Layak Huni menunjukkan bahwa sektor informal, fasilitas pejalan kaki, dan pengelolaan drainase masih dalam kategori cukup, mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat konversi lahan hijau menjadi permukiman dan pertumbuhan industri yang belum ramah lingkungan terus berlanjut. Data dari KLHS RPJMD Kota Kediri menunjukkan bahwa luas kawasan pertanian terus berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman dan industri. Guna mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, Kota Kediri telah menetapkan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dimana KP2B dikunci seluas kurang lebih 1.441 Ha, dengan rincian LP2B seluas 509 Ha dan 932 merupakan LCP2B. Pada tahun 2024, luas lahan pertanian yang tersisa hanya 2.504 Ha, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penggunaan energi di sektor industri dan transportasi masih didominasi oleh bahan bakar fosil, yang menyebabkan peningkatan polusi udara. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri menurun. Konversi lahan hijau, pencemaran sungai, dan emisi kendaraan menjadi penyebab utama degradasi lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat serta rehabilitasi ekosistem yang efektif.

Degradasi lingkungan dan keterbatasan mitigasi perubahan iklim semakin mempengaruhi kondisi lingkungan di Kota Kediri. Kota Kediri menghadapi tantangan besar dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), dengan capaian 1.247.635,36 ton CO_2Eq pada tahun 2024, yang merupakan 67,64% dari total capaian Provinsi Jawa Timur. Kota Kediri belum memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang menyebabkan lambatnya transisi ke energi terbarukan. Hingga 2024, sebagian besar konsumsi energi di Kota Kediri masih bergantung pada sumber energi fosil, dengan pemanfaatan energi terbarukan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi perubahan iklim yang lebih komprehensif agar dampak lingkungan dan kesehatan dapat diminimalkan serta Kota Kediri dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya air yang cukup besar juga terancam oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Proyeksi kebutuhan air meningkat dari 51 juta m^3 pada 2023 menjadi 85 juta m^3 pada 2029, diperburuk oleh alih fungsi lahan, pencemaran limbah domestik dan industri, serta penurunan daerah resapan di Kecamatan Mojoroto dan Pesantren. Perubahan tata guna lahan yang tidak terkontrol semakin mempersempit wilayah resapan air, yang berdampak pada penurunan debit air tanah dan peningkatan risiko kekeringan pada musim kemarau. Jika tidak ada strategi mitigasi dan konservasi air yang tepat, Kota Kediri akan menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduknya dalam beberapa tahun ke depan.

4. Kurangnya Pengelolaan Sampah dan Mitigasi Bencana yang Belum Optimal

Sistem pengelolaan sampah di Kota Kediri masih belum optimal, dengan peningkatan timbulan sampah yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, timbulan sampah mencapai 66.532,27 ton, dengan 99,05% sampah telah dikelola. Kota Kediri menghadapi kendala kapasitas TPA yang hampir penuh. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang sampah menyebabkan hanya sekitar 20% sampah yang didaur ulang, sementara mayoritas masih dibuang ke TPA tanpa pengolahan lanjutan. Kota Kediri memiliki 61 unit bank sampah dan 8 TPS3R, namun belum mampu mengoptimalkan sistem daur ulang sampah berbasis ekonomi sirkular untuk mengurangi volume yang berakhir di TPA.

Kota Kediri menghadapi berbagai ancaman bencana perkotaan, termasuk banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan dan kebakaran hutan. Tanpa mitigasi yang optimal, risiko ini dapat merusak infrastruktur, menghambat perekonomian, dan meningkatkan jumlah korban jiwa. Kota Kediri juga mengalami tingginya risiko bencana akibat banjir, tanah longsor, dan kebakaran di beberapa wilayah rawan, yang diperburuk oleh minimnya sistem peringatan dini bencana dan kapasitas respons tanggap darurat. Risiko tanah longsor cukup tinggi di Kecamatan Mojoroto dengan luas area terdampak mencapai 353,52 hektar, terutama di kawasan perbukitan seperti Kelurahan Pojok.

Belum optimalnya penerapan teknologi mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini berbasis teknologi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam dan iklim ekstrem, masih menjadi kendala dalam pengurangan dampak bencana di Kota Kediri. Indeks Infrastruktur Kota Kediri tahun 2024 mencapai 87,41%, dengan kinerja infrastruktur drainase sebesar 83,01%. Meskipun meningkat, sistem drainase masih mengalami tantangan, terutama dalam penanganan genangan air selama musim hujan yang berulang di beberapa titik perkotaan.

Tantangan lain yang dihadapi Kota Kediri adalah kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendorong partisipasi swasta dalam pengelolaan sampah dan mitigasi bencana, sehingga peluang investasi dalam solusi lingkungan belum maksimal. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama mengingat timbulan sampah yang terus meningkat. Infrastruktur pengelolaan sampah masih terbatas, dengan hanya 63 unit bank sampah aktif dan 8 TPS3R. Kapasitas TPA yang hampir

penuh berisiko mengalami *over capacity* dalam waktu dekat jika tidak ada solusi pengelolaan sampah yang lebih baik dan inovatif.

5. Akses masyarakat terhadap layanan publik masih terbatas dan Digitalisasi Pelayanan Publik yang belum Merata

Kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan anggaran daerah masih menjadi tantangan di Kota Kediri. Meskipun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2014, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih belum optimal. Penurunan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam aspek pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi pajak menunjukkan masih adanya celah dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah. Data dari RKPD 2025 mengindikasikan bahwa Kota Kediri mencatatkan nilai MCP pada aspek Pengadaan Barang/Jasa sebesar 67,43%, Barang Milik Daerah sebesar 76%, dan Optimalisasi Pajak sebesar 79,12%, yang merupakan nilai terendah dibandingkan aspek lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan dalam pengelolaan anggaran agar lebih akuntabel dan transparan.

Birokrasi yang lambat dan kurang efisien dalam pelayanan publik masih menjadi hambatan bagi efektivitas pemerintahan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan peningkatan dari 62,78 (2022) menjadi 74,63 (2023), namun capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Meskipun Kota Kediri telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas perangkat daerah, implementasinya masih menghadapi hambatan dalam sinkronisasi sistem dan koordinasi lintas perangkat daerah, yang menghambat proses pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan digital di Kota Kediri juga belum optimal. Meskipun Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Kediri pada tahun 2024 telah mencapai skor 3,89 dengan predikat Sangat Baik, penerapan infrastruktur digital masih belum merata. Kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses internet, di mana hanya 58,3% warga yang rutin mengakses internet dengan durasi rata-rata 1 jam 59 menit per hari, menghambat optimalisasi layanan digital. Selain itu, kurangnya integrasi layanan administrasi pemerintahan dengan aplikasi pendukung lainnya menjadi kendala dalam efektivitas layanan berbasis elektronik.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Kota Kediri telah mengembangkan sistem pengaduan publik berbasis digital, tetapi

pemanfaatannya masih belum maksimal. Masyarakat masih kurang terlibat dalam pengawasan kebijakan daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Perlu adanya edukasi dan literasi digital bagi masyarakat agar lebih aktif dalam memberikan masukan serta mengakses layanan digital yang telah disediakan pemerintah.

Minimnya penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam inovasi dan transformasi digital juga menjadi tantangan utama. Indeks Inovasi Daerah Kota Kediri mengalami fluktuasi selama periode 2021-2024, dengan penurunan dari 55,03 pada 2021 menjadi 47,63 pada 2023, sebelum meningkat kembali menjadi 51,52 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penerapan inovasi di sektor pemerintahan. Untuk meningkatkan efektivitas transformasi digital, perlu dilakukan penguatan kapasitas ASN dalam pemanfaatan teknologi, analisis data, serta integrasi sistem layanan elektronik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa Kota Kediri masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan transparansi anggaran, efisiensi birokrasi, optimalisasi layanan digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan yang lebih progresif dalam integrasi sistem digital, edukasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas ASN sangat diperlukan untuk mendukung visi Kota Kediri sebagai kota yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif dalam tata kelola pemerintahan.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang. Selain dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka isu strategis pembangunan Kota Kediri diidentifikasi melalui berbagai pertimbangan di antaranya dengan mempertimbangkan (1). Dinamika internasional, nasional dan regional, serta tujuan pembangunan berkelanjutan yang mempengaruhi pembangunan Kota Kediri; (2). Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang mempengaruhi pembangunan Kota Kediri; (3). Kebijakan pembangunan Kota Kediri yang terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Kediri.

2.1.4.5 Isu Strategis Global

Pembangunan Kota Kediri ke depan perlu merespon berbagai isu strategis global yang berdampak signifikan terhadap arah pembangunan daerah. Isu-isu ini berhubungan dengan perubahan megatren dunia, dinamika geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan krisis global lainnya, sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, hasil forum G20, World Economic Forum, serta target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Pertama, perubahan demografi global menunjukkan peningkatan populasi usia lanjut di berbagai belahan dunia. Kondisi ini berdampak pada tingginya kebutuhan layanan kesehatan, sistem jaminan sosial yang berkelanjutan, serta perlunya strategi untuk memperluas kesempatan kerja bagi usia produktif. Kota Kediri perlu memperkuat kapasitas layanan kesehatan lansia, menyiapkan program ketenagakerjaan yang inklusif, serta mengantisipasi perubahan struktur penduduk dengan kebijakan sosial yang adaptif.

Kedua, ketegangan geopolitik dan geoekonomi dunia, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menciptakan ketidakpastian global yang memengaruhi jalur perdagangan, investasi, dan rantai pasok internasional. Perang tarif ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, naiknya harga komoditas, dan volatilitas pasar keuangan. Bagi Kota Kediri, hal ini menuntut penguatan ketahanan ekonomi lokal melalui diversifikasi ekonomi, penguatan sektor UMKM, pengembangan industri berbasis potensi lokal, serta membangun kemandirian rantai pasok dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap dinamika eksternal.

Ketiga, revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi global. Penerapan kecerdasan buatan (AI), big data, Internet of Things (IoT), serta otomasi, menjadi keniscayaan. Kota Kediri perlu mendorong pengembangan ekosistem digital, meningkatkan literasi teknologi di kalangan masyarakat, dan menyiapkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri berbasis teknologi masa depan.

Keempat, percepatan urbanisasi global menuntut pengelolaan kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas. Kota Kediri harus memperkuat layanan dasar di tingkat kelurahan, membangun infrastruktur hijau, memperbaiki sistem transportasi ramah lingkungan, serta memperluas ruang terbuka hijau untuk menghadapi tekanan urbanisasi.

Kelima, perubahan iklim dan krisis lingkungan hidup menjadi tantangan besar dunia. Meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, naiknya permukaan laut, dan krisis sumber daya alam menuntut Kota Kediri untuk memperkuat strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengembangkan pembangunan rendah karbon, serta menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Keenam, krisis pangan global sebagai dampak konflik, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok, menuntut daerah untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Kota Kediri perlu mendorong pengembangan pertanian modern, memperkuat logistik pangan, serta mengembangkan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Ketujuh, kebutuhan global akan kota inklusif dan ramah difabel menjadi standar baru dalam pembangunan perkotaan. Kota Kediri perlu mendorong terciptanya ruang publik yang ramah semua kalangan, layanan sosial berbasis komunitas, dan kota yang mendukung konsep inklusivitas sosial.

Kedelapan, penguatan *city branding* berbasis budaya dan sejarah menjadi tren global. Kota-kota besar dunia berlomba membangun citra kota untuk menarik investasi, wisatawan, dan talenta global. Kota Kediri harus mengembangkan ikon kota berbasis warisan budaya dan sejarah, serta mengintegrasikan strategi city branding dalam pengembangan pariwisata dan industri kreatif.

Kesembilan, resiliensi terhadap krisis kesehatan global pasca pandemi COVID-19 menuntut setiap daerah untuk memperkuat sistem layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kapasitas respons bencana kesehatan, serta membangun jejaring kolaborasi antar-daerah dan internasional.

2.1.4.6 Isu Strategis Nasional

Pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 harus selaras dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN yang merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden menjadi panduan utama dalam merumuskan strategi pembangunan di tingkat daerah agar lebih terarah dan efektif dalam mencapai target nasional. Visi RPJMN 2025-2029 menekankan pada "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", dengan misi utama yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan

ekonomi inklusif dan berkelanjutan, penguatan ketahanan nasional, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih.

Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMN 2025-2029 menetapkan 17 Program Prioritas yang meliputi: (1) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, (2) Penguatan sistem kesehatan nasional, (3) Transformasi ekonomi berbasis inovasi dan industri hijau, (4) Digitalisasi ekonomi dan peningkatan daya saing UMKM, (5) Pengembangan infrastruktur berkelanjutan, (6) Ketahanan pangan dan energi, (7) Pembangunan perdesaan dan perkotaan inklusif, (8) Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, (9) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, (10) Peningkatan tata kelola hukum dan demokrasi, (11) Penguatan ekonomi maritim dan industri berbasis sumber daya alam, (12) Perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, (13) Pembangunan berbasis kebudayaan dan penguatan identitas nasional, (14) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset, (15) Peningkatan ketahanan dan keamanan nasional, (16) Penguatan konektivitas antarwilayah dan logistik nasional, serta (17) Penguatan kerja sama internasional untuk mendukung kepentingan nasional.

Selain program prioritas tersebut, pemerintah juga menargetkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dirancang untuk memberikan dampak nyata dalam waktu singkat. Program ini mencakup: (1) Percepatan digitalisasi layanan publik, (2) Penguatan jaminan sosial untuk kelompok rentan, (3) Pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (4) Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja, (5) Akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik, (6) Percepatan program ketahanan pangan berbasis teknologi, (7) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan digital, serta (8) Peningkatan akses kesehatan melalui layanan berbasis teknologi dan telemedisin.

Dalam konteks pembangunan daerah, penyelarasan RPJMD dengan RPJMN menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Permasalahan utama yang dihadapi daerah mencakup ketimpangan sosial-ekonomi, masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan infrastruktur yang belum merata. Selain itu, tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta reformasi tata kelola pemerintahan juga menjadi isu strategis yang harus diselesaikan.

Sejalan dengan fokus utama RPJMN, pembangunan dalam lima tahun ke depan menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditargetkan untuk mencapai angka yang tinggi, tetapi juga harus inklusif dan berkelanjutan, dengan mengedepankan transformasi ekonomi hijau, inovasi digital, dan penguatan industri berbasis sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dalam aspek kemiskinan, pendekatan yang digunakan adalah peningkatan jangkauan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif dan digital yang mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mewujudkan daya saing global, dengan penekanan pada perbaikan sistem pendidikan, penguatan pelatihan vokasi dan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang merata.

Untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif dan berbasis data. Dengan memperkuat koordinasi antara berbagai sektor dan memperhatikan potensi spesifik daerah, diharapkan RPJMD 2025-2029 dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Gambar 2. 10 Kerangka Pikir RPJMN 2025-2029



Wilayah Jawa sebagai pusat perekonomian nasional menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam pengelolaan perkotaan, industri, infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan utama adalah

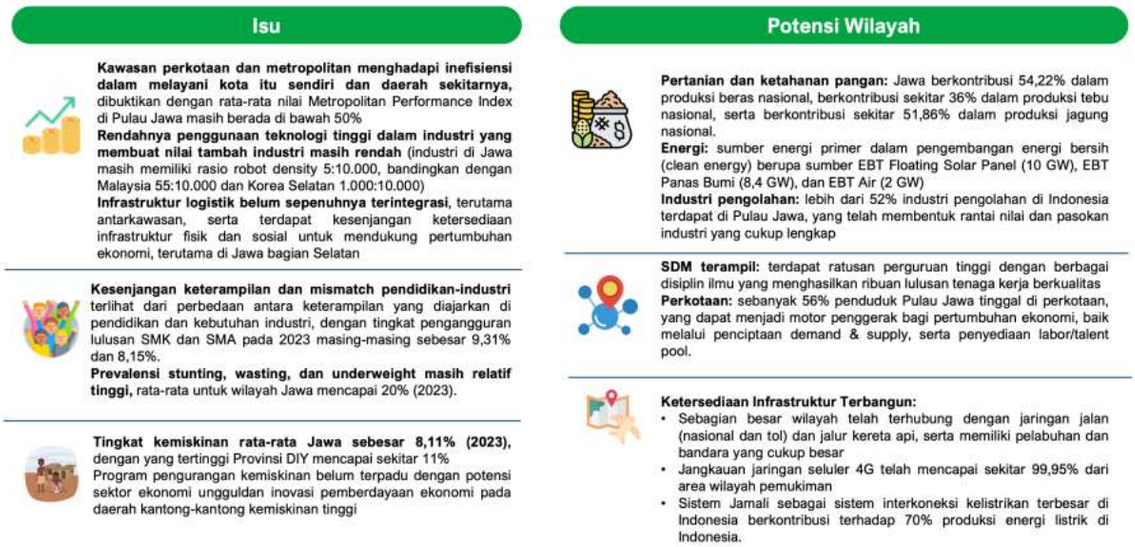
inefisiensi kawasan perkotaan dan metropolitan dalam melayani kebutuhan kota itu sendiri maupun daerah sekitarnya. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa yang masih berada di angka 50%, menunjukkan bahwa kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan yang efektif dan berdaya saing tinggi. Keterbatasan dalam tata kelola perkotaan, aksesibilitas layanan publik, serta pengelolaan ruang kota yang belum optimal menyebabkan masalah kepadatan, kemacetan, dan tekanan terhadap infrastruktur. Selain itu, rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi Jawa. Nilai tambah industri masih rendah karena masih dominannya industri manufaktur berbasis tenaga kerja murah dibandingkan industri berbasis inovasi dan riset. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi industri ke arah digitalisasi dan otomatisasi masih perlu ditingkatkan guna memperkuat produktivitas dan nilai ekspor industri di Jawa.

Tantangan lain yang dihadapi wilayah Jawa adalah infrastruktur logistik yang belum sepenuhnya terintegrasi, terutama dalam konektivitas antar kawasan. Meskipun Jawa memiliki jaringan jalan tol yang cukup luas, kesenjangan infrastruktur fisik dan sosial masih terlihat, terutama dalam aksesibilitas kawasan industri ke pelabuhan dan bandara utama. Hal ini berdampak pada efisiensi distribusi barang serta biaya logistik yang masih relatif tinggi. Selain itu, kesenjangan keterampilan tenaga kerja dan mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri menjadi permasalahan yang signifikan. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di institusi pendidikan dengan permintaan tenaga kerja di industri menyebabkan tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada tahun 2023, masing-masing sebesar 9,31% dan 8,15%. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan vokasi perlu lebih diarahkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja agar dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, terutama di wilayah perdesaan dan kantong-kantong kemiskinan perkotaan. Masalah ini menunjukkan perlunya peningkatan intervensi dalam program gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan akses pangan bergizi bagi kelompok rentan. Selain itu, tingkat kemiskinan rata-rata di Jawa masih sebesar 8,11% pada tahun 2023, dengan kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di daerah perdesaan dan kawasan industri dengan upah rendah. Program pengurangan kemiskinan yang

ada belum sepenuhnya terpadu dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan serta inovasi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Padahal, potensi sektor pertanian modern, ekonomi kreatif, dan digitalisasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Gambar 2. 11 Isu dan Potensi Wilayah Jawa di RPJMN 2025-2029



Dalam menghadapi tantangan tersebut, arah pembangunan wilayah Jawa akan difokuskan pada penguatan daya saing ekonomi berbasis inovasi, peningkatan efisiensi kawasan perkotaan dan metropolitan, serta penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas antar kawasan. Transformasi industri ke arah pemanfaatan teknologi tinggi akan menjadi prioritas utama guna meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing global. Pembangunan infrastruktur fisik dan sosial akan diarahkan untuk menciptakan sistem logistik yang lebih efisien serta memperkuat aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi utama. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi perhatian utama guna mengatasi mismatch keterampilan tenaga kerja, sehingga lulusan pendidikan dapat lebih siap memasuki dunia kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, program pengurangan kemiskinan akan dikembangkan melalui pendekatan berbasis potensi lokal, dengan mengintegrasikan program bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi. Sementara itu, peningkatan akses layanan kesehatan dan gizi menjadi prioritas untuk menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dengan strategi pembangunan yang terintegrasi dan berbasis inovasi, diharapkan wilayah Jawa dapat terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Gambar 2. 12 Arah Pembangunan Wilayah Jawa di RPJMN 2025-2029



Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV RPJMN 2025–2029, Kota Kediri ditetapkan sebagai bagian dari fokus intervensi kawasan perkotaan yang diarahkan untuk mempercepat transformasi wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan. Beberapa bentuk intervensi nasional yang menjadi arahan pengembangan di Kota Kediri antara lain:

- **Penataan kawasan perkotaan secara terpadu**, melalui penyusunan masterplan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan permasalahan perkotaan secara menyeluruh.
- **Pemenuhan layanan dasar**, khususnya dalam penyediaan air minum, pengelolaan limbah, serta perluasan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
- **Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja**, dengan mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia melalui kolaborasi erat antara sektor pendidikan dan sektor ketenagakerjaan.
- **Penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu**, guna menciptakan kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan di wilayah perkotaan.
- **Pembangunan rumah murah bersanitasi baik**, yang diperuntukkan bagi pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), generasi Z, dan generasi milenial, khususnya di Kawasan Perkotaan Kediri (PHTC).

- **Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Kediri**, untuk mendukung pengelolaan sampah regional berbasis prinsip berkelanjutan.
- **Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kediri**, untuk memperluas cakupan pelayanan air minum yang aman dan layak.
- **Pengembangan konsep kota agropolitan Kediri**, dengan mendorong integrasi sektor pertanian modern dan pengolahan hasil pertanian berbasis kawasan.
- **Pembangunan Jalan Tol Kertosono–Kediri**, yang akan mempercepat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.
- **Pengembangan layanan unggulan kesehatan**, khususnya layanan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan diabetes berbasis kompetensi di RSUD Provinsi maupun RSUD Daerah, dengan penguatan khusus pada RSUD di Kawasan PHTC Kediri.
- **Peningkatan ketahanan banjir di kawasan perkotaan Kediri**, melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan sistem drainase yang terintegrasi.
- **Preservasi jalan strategis**, termasuk ruas Kediri–Tulungagung–Trenggalek dan Kediri–Tulungagung–Blitar, untuk memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga dan mendukung mobilitas barang dan jasa.
- **Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Kelud**, dengan memperkuat sistem mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah terdampak.

Intervensi-intervensi ini menjadi pilar utama dalam penguatan posisi Kota Kediri sebagai kawasan strategis nasional, sekaligus mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dan penguatan daya saing wilayah di tingkat regional dan nasional.

2.1.4.7 Isu Strategis Regional

Pembangunan Kota Kediri tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan regional di Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di kawasan Kediri Raya, Kota Kediri memiliki posisi strategis dalam mendukung arah pembangunan regional dan nasional. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis regional dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2025-2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Adapun isu strategis Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

   Isu strategis mengenai pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Dalam rangka pemerataan ekonomi, dibutuhkan percepatan keseimbangan Pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Secara umum, Disparitas di Jawa Timur disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas dan belum meratanya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di Jawa Timur (transportasi, sumber daya air, dan layanan dasar), serta belum efektifnya implementasi konsep pengembangan wilayah yang ada di Jawa Timur seperti Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, Industri, dan sebagainya.

2. Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan.

   Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan pendekatan yang holistik dalam upaya untuk mengatasinya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan meliputi PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kenaikan Harga Barang Secara umum (Inflasi) dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dan stabilitas ekonomi baik nasional maupun global menjadi salah satu akar masalah kemiskinan yang memberikan pengaruh pada sulitnya pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Kondisi ketidakpastian iklim perekonomian menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan bertahan usaha pada sektor primer di Jawa Timur,

sehingga mendorong masyarakat untuk bergeserpada sektor lain atau kehilangan pendapatan. Potensi pengembangan usaha ekonomi mandiri dinilai mampu menjadi penyerap tenaga kerja dan diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas
   Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi disebabkan secara alami ataupun migrasi masuk pada perkotaan maupun pedesaan terlebih sebagai dampak pengurangan lapangan kerja saat COVID di tahun 2020-2021. Perubahan demografi menyebabkan kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya menjadi terbatas. Keterbatasan akses ini menyebabkan sulitnya kendali pemerintah terhadap konflik sosial-ekonomi yang terjadi, tingkat pendidikan yang terdominasi di level menengah, serta marginalisasi kelompok rentan (terutama wanita dan kaum tidak berkemampuan). Ketika kualitas SDM masih belum dapat bersaing, fenomena unemployment dan under employment sangat rentan berkembang dan memicu permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi yang lebih kompleks dan rumit.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik
   Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Alam dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
   Lingkungan hidup beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Adanya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan ketersediaan sumber daya alam menjadi semakin terbatas seiring dengan meningkatnya kebutuhan makhluk hidup melebihi

ketersediaan sumber daya alam yang ada. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur yang perlu menjadi perhatian antara lain terkait dengan adanya ancaman krisis pangan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan maraknya alih fungsi lahan, penurunan ketersediaan air terutama di kawasan perkotaan, serta peningkatan resiko bencana bencana hidrometrologi terutama banjir. Peningkatan resiko bencana dalam diidentifikasi memiliki keterkaitan akar masalah dengan beberapa hal penting yaitu: peningkatan kerentanan terkait dampak perubahan iklim, kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung penanggulangan bencana, serta alih fungsi lahan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, ekonomi dan kesehatan masyarakat dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pelestarian warisan budaya lokal memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Tradisi agraris, arsitektur ramah lingkungan, serta sistem peringatan dini berbasis budaya mengandung nilai-nilai konservasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun demikian ancaman globalisasi dan digitalisasi, lemahnya pendidikan budaya, serta rendahnya partisipasi masyarakat juga berpotensi menggerus nilai-nilai tersebut. Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan percepatan penetapan cagar budaya menjadi langkah krusial untuk memastikan kesinambungan ekosistem dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial-ekologis sertamenciptakan lingkungan yang lebih tangguh terhadap bencana

6. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

   Provinsi Jawa Timur juga merupakan penyumbang terbesar nasional untuk produksi komoditas strategis : jagung, kacang hijau, cabai rawit, daging sapi, telur ayam, susu, tebu, hingga hasil perikanan tangkap, garam, rumput laut dan juga nilai ekspor perikanan. Adapun demikian, masih didapati di Jawa Timur adanya kelangkaan bahan pangan pokok di tempat dan waktu tertentu. Hal ini karena ada hasil produksi pangan dan Agro Jawa Timur dibeli oleh Provinsi lain dengan jumlah yang banyak sehingga pernah terjadi kelangkaan stok. Ke depan Jawa Timur memerlukan penataan logistic dan stok pangan dan pertanian strategis lainnya untuk menjaga kestabilan stok dan harga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk menjaga kedaulatan pangan Jawa Timur dan mendukung swasembada pangan nasional ke depan,

perlu dilakukan upaya regenerasi petani sebagai produsen komoditas pangan pertanian. Dengan dirilisnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah pusat, maka Jawa Timur sebagai daerah lumbung pangan nasional memiliki kesempatan untuk mendukung langsung dari produksi komoditas pangan dan pertanian yang menjadi bahan makanan dari program ini dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. Kesempatan ini perlu didukung dengan kestabilan produksi pangan dan pertanian agar mampu menopang program MBG ini, yang kelanjutannya guna membangun pondasi fisik dan psikis Sumber Daya Manusia ke depan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari sisi kesejahteraan pelaku usaha pangan dan agro, Nilai Tukar Petani (NTP) tahunan di Provinsi Jawa Timur beberapa tahun terakhir terus tumbuh. Pertumbuhan NTP tahunan pada beberapa kurun waktu ini, selain terdorong dari naiknya harga beras, juga ditopang dari kondisi makro ekonomi pedesaan yang meningkat.

2.1.4.8 Telaah Isu Strategis KLHS RPJMD

Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario, analisis enam muatan KLHS RPJMD, serta masukan saran yang disepakati dari kegiatan Konsultasi Publik KLHS sehingga menghasilkan isu paling strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2025-2029. Isu Paling Strategis dikelompokkan menjadi 5 (lima) Isu Paling Strategis yang ditetapkan dengan beberapa tahapan sintesa yaitu (1) skoring berdasarkan hasil Konsultasi Publik 1, (2) Keterkaitan dengan 6 Muatan KLHS, (3) Keterkaitan dengan shortlist dan longlist berdasarkan telaah dokumen lingkungan dan dokumen perencanaan di Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur, dan (4) Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan analisis Isu Paling Strategis, Kota Kediri memerlukan perhatian secara lebih pada Tahun 2025-2029 terhadap:

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*).
2. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Perempuan dan Anak terutama;
    a. Kualitas Akses Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial;
    b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis IPTEK;
    c. Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan.
3. Transformasi Ekonomi terutama;
    a. Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Kota;
    b. Peningkatan Lapangan Pekerjaan;
    c. Stabilisasi Investasi dan Transformasi Ekonomi;

d. Infrastruktur dan Tata Kota.

4. Kualitas Lingkungan Hidup terutama;
   a. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Konservasi Sumberdaya Air Tanah;
   c. Kota Inklusif;
   d. Pemanfaatan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5. Persampahan dan Mitigasi Bencana terutama;
   a. Pengelolaan Sampah dan Limbah Perkotaan;
   b. Peningkatan Sanitasi Lingkungan;
   c. Mitigasi Risiko Bencana Perkotaan;
   d. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

2.1.4.9 Isu Strategis Kota Kediri

Berdasarkan hasil telaah isu strategis global, nasional, regional, dan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029, isu strategis Kota Kediri adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan karena masih terdapat ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kesenjangan dalam distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan utama, sementara angka prevalensi stunting yang masih perlu perhatian menunjukkan perlunya peningkatan intervensi gizi dan kesehatan anak. Di sektor pendidikan, masih terdapat keterbatasan dalam akses ke pendidikan berkualitas, rendahnya literasi digital, serta kurangnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi industri berbasis teknologi. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengindikasikan perlunya penguatan sistem perlindungan sosial dan regulasi yang lebih ketat untuk menjamin hak dan keselamatan kelompok rentan.

2. Transformasi Ekonomi dan Penguatan Investasi

a. Transformasi Ekonomi

Selama kurun waktu 2020-2024, kontribusi PDRB ADHB berdasarkan lapangan usaha di Kota Kediri menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Industri Pengolahan tetap menjadi sektor dominan dengan kontribusi sebesar 79,64% pada tahun 2024, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,40%, Informasi dan Komunikasi sebesar 3,47%, Konstruksi sebesar 1,90%, serta Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum sebesar 1,90%. Namun demikian, terdapat tren penurunan kontribusi pada sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, sedangkan sektor Perdagangan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi justru menunjukkan kecenderungan peningkatan kontribusi.

Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran struktur ekonomi Kota Kediri dari sektor pengolahan menuju sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis untuk memperkuat sektor jasa dan perdagangan, terutama melalui peningkatan kapasitas UMKM agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global dan memperluas keterlibatan dalam rantai nilai global.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri yang selama ini bergantung pada satu industri besar menjadikan perekonomian rentan terhadap guncangan eksternal. Penurunan nilai investasi beberapa tahun terakhir mengindikasikan perlunya upaya yang lebih terarah dalam menarik investasi baru. Sementara itu, sektor UMKM, meskipun mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah, masih menghadapi tantangan dalam hal peningkatan omzet, akses pasar, serta keterlibatan dalam perdagangan global.

Transformasi ekonomi global, termasuk percepatan digitalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif, menjadi peluang strategis bagi Kota Kediri untuk memperkuat daya saing lokal. Tren ini menuntut percepatan pengembangan ekosistem digital, penguatan inovasi, serta fasilitasi keterlibatan UMKM dalam platform e-commerce dan jaringan rantai nilai internasional.

Pemerintah pusat mendorong pengembangan branding kota melalui pariwisata berbasis sejarah dan budaya, yang dapat dimanfaatkan oleh Kota Kediri untuk memperkuat identitas dan posisi tawarnya di tingkat nasional maupun global. Di sisi lain, kebijakan nasional mengenai penguatan investasi dan ekonomi digital menjadi landasan untuk mempercepat transformasi ekonomi Kota Kediri.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kota Kediri memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri berbasis teknologi. Keberadaan 27 destinasi wisata unggulan membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, perluasan infrastruktur digital, program pendampingan UMKM, serta fasilitasi integrasi UMKM ke dalam rantai nilai global menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor jasa, industri kreatif, teknologi informasi, dan pariwisata harus menjadi prioritas utama. Upaya ini

akan memperkuat struktur ekonomi Kota Kediri, mengurangi ketergantungan pada satu sektor, memperluas peluang kerja baru, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, menurunkan kesenjangan, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan.

b. Penguatan Investasi

Pada Tahun 2024, nilai investasi daerah Kota Kediri mencapai 1,546 triliun Rupiah. Adapun untuk meningkatkan nilai investasi tersebut diperlukan peningkatan dan optimalisasi program inovasi yang dapat menarik minat masyarakat untuk berinvestasi, terlebih lagi dengan adanya pembangunan Bandara Dhoho serta rencana pembangunan Tol Kertosono–Kediri dan Tol Kediri–Tulungagung, dimana keberadaan infrastruktur ini diproyeksikan akan memberikan multiplier effects secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.

Meskipun Tol Kertosono–Kediri, Bandara Dhoho, dan Tol Kediri–Tulungagung tidak tercantum secara spesifik sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025-2029, ketiganya tetap menjadi infrastruktur vital dalam meningkatkan daya saing Kota Kediri. Namun, status non-PSN ini meningkatkan risiko ketergantungan pada penyelesaian proyek oleh pihak swasta. Oleh karena itu, Kota Kediri perlu mengantisipasi potensi keterlambatan proyek tersebut dengan memperkuat ekonomi lokal, mempercepat transformasi UMKM, optimalisasi sektor ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya tarik investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk dapat menangkap peluang tersebut, Kota Kediri perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, serta menata kota dan kawasan seperti pengembangan *Central Business District* (CBD), penyediaan fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), dan pembentukan *Kediri Creative Center* (KCC). Penyediaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata.

Sebagai upaya meningkatkan daya saing investasi, Pemerintah Kota Kediri mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan pelayanan investasi secara terintegrasi. MPP berfungsi sebagai instrumen percepatan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses layanan, penguatan koordinasi lintas instansi, dan digitalisasi pelayanan publik. Optimalisasi MPP menjadi strategi kunci dalam mempercepat realisasi investasi, meningkatkan transparansi dan kepastian layanan, serta memperkuat iklim

investasi yang kondusif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, untuk menangkap peluang investasi yang lebih luas seiring dengan hadirnya infrastruktur bandara dan jalan tol, diperlukan kesiapan regulasi tata ruang daerah yang lebih adaptif. Pemerintah Kota Kediri telah merevisi regulasi tata ruang melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2024–2044. Selanjutnya, Pemerintah Kota Kediri perlu segera menindaklanjuti dengan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang saat ini berlaku, agar perencanaan ruang kota dapat lebih responsif terhadap dinamika investasi dan pembangunan berkelanjutan.

3. Peningkatan Infrastruktur, Lingkungan, dan Kota Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur di Kota Kediri masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan distribusi serta degradasi lingkungan yang terus meningkat. Ketidakselarasan antara rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan menyebabkan tumbuhnya permukiman yang tidak terkendali, terutama di sekitar kawasan cagar budaya. Meskipun jaringan trotoar mengalami peningkatan, aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah masih perlu diperbaiki. Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri menunjukkan tren penurunan akibat konversi lahan hijau menjadi area terbangun, berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), serta meningkatnya polusi udara dan pencemaran lingkungan. Pembangunan kota berkelanjutan menjadi semakin relevan seiring dengan kebijakan global yang mendorong konsep net-zero emissions dan penguatan regulasi nasional terkait pengelolaan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kota Kediri perlu mengembangkan konsep smart city yang terintegrasi dengan teknologi hijau guna memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas lingkungan secara simultan. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan drainase dan pengurangan emisi kendaraan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perluasan dan perlindungan ruang terbuka hijau, pembangunan trotoar dengan guiding block, serta penguatan sistem transportasi ramah lingkungan akan menciptakan kota yang lebih inklusif dan nyaman. Dengan strategi yang tepat, Kota Kediri memiliki potensi besar untuk menjadi model kota berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Persampahan dan Mitigasi Bencana

Pengelolaan sampah di Kota Kediri masih menjadi tantangan yang kompleks dengan peningkatan timbulan sampah yang signifikan setiap tahunnya. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin terbatas, sementara tingkat daur ulang yang masih rendah menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Di sisi lain, risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin meningkat akibat perubahan iklim dan ketidakseimbangan tata ruang. Tanpa upaya mitigasi yang optimal, permasalahan ini dapat mengancam infrastruktur kota serta berdampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan ini, Kota Kediri perlu menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dengan memperluas cakupan bank sampah dan fasilitas TPS3R. Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem peringatan dini bencana dan peningkatan edukasi kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampak bencana. Penguatan regulasi terkait pengelolaan sampah serta investasi dalam infrastruktur hijau juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Kediri..

Pemetaan permasalahan dan isu strategis secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 112 Isu Strategis RPJMD Kota Kediri 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Tingginya potensi SDM usia produktif	Rendahnya Kualitas SDM dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Ketimpangan layanan kesehatan akibat krisis global, kesenjangan fasilitas kesehatan	Reformasi sistem kesehatan nasional, pemerataan tenaga medis	Optimalisasi rumah sakit daerah, peningkatan kader kesehatan	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatnya jumlah UMKM dan ekonomi kreatif	Lemahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Tarik Investasi	Transformasi Ekonomi	Digitalisasi ekonomi global, persaingan pasar bebas, Dinamika perdagangan global	Kebijakan nasional penguatan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM	Program peningkatan daya saing UMKM, penguatan ekosistem startup	Transformasi Ekonomi dan Penguatan Investasi
Potensi wisata berbasis sejarah dan budaya	Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Merata dan Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	Transformasi Ekonomi	Tren wisata berbasis budaya dan sejarah, pariwisata berkelanjutan	Penguatan destinasi wisata berbasis heritage, branding kota wisata	Persaingan wisata regional, minimnya diferensiasi pariwisata	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pertumbuhan permukiman	Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Merata dan Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	Urbanisasi pesat dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur	Kebijakan nasional pengembangan infrastruktur perkotaan dan tata ruang, Konektivitas Wilayah	Penguatan perencanaan tata ruang dan pembangunan kawasan perkotaan	Peningkatan Infrastruktur, Lingkungan, dan Kota Berkelanjutan
Peningkatan produksi sampah perkotaan	Kurangnya Pengelolaan Sampah dan Mitigasi Bencana yang Belum Optimal	Persampahan dan Mitigasi Bencana	Krisis sampah global, limbah industri meningkat	Regulasi pengelolaan sampah dan daur ulang	Pengelolaan sampah berbasis komunitas, penguatan bank sampah	Persampahan dan Mitigasi Bencana
Wilayah dengan risiko bencana tinggi	Kurangnya Pengelolaan Sampah dan Mitigasi Bencana yang Belum Optimal	Persampahan dan Mitigasi Bencana	Perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat,	
Digitalisasi layanan publik	Akses masyarakat terhadap layanan publik masih terbatas dan Digitalisasi Pelayanan Publik yang belum Merata	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)	Percepatan digitalisasi global, *smart governance*	Digitalisasi pemerintahan daerah, kebijakan keterbukaan data dan Efisiensi Anggaran	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan, optimalisasi *e-government*	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan bukan sekadar pernyataan arah, melainkan kompas strategis yang menggambarkan kondisi ideal masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Visi ini menjadi Fondasi utama dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan, yang secara substansial harus berpijak pada kesinambungan arah pembangunan jangka panjang daerah maupun nasional. Dalam kerangka tersebut, visi pembangunan jangka menengah Kota Kediri untuk periode 2025–2029 disusun secara selaras dan integral dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Visi jangka menengah ini tidak hanya menjadi jembatan antara rencana jangka pendek dan panjang, tetapi juga mencerminkan tekad kolektif masyarakat dan pemerintah untuk menapaki jalur transformasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berlandaskan pada cita-cita jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kota Kediri Tahun 2025 – 2045 yaitu “Terwujudnya Kediri sebagai Kota Harmoni yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”, visi pembangunan jangka menengah akan menjadi katalisator bagi terbangunnya ekosistem kota yang berdaya saing tinggi, berpihak pada kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keselarasan antara pertumbuhan dan kelestarian. Periode tahun 2025-2029 merupakan periode pembangunan lima tahun pertama dengan arah kebijakan Penguatan Fondasi Transformasi. Prioritas utama dalam kebijakan pada periode pertama adalah memperkuat fondasi pembangunan di Kota Kediri untuk mempersiapkan Indonesia Emas Tahun 2045. Langkah-langkah yang diambil mencakup peningkatan aspek sosial, ekonomi, budaya, tata kelola, dan lingkungan. Dengan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia melalui perbaikan di sektor sosial, ekonomi, budaya, serta penciptaan kondisi lingkungan yang optimal, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk pembangunan daerah di periode berikutnya.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 juga diperlukan sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah. Fondasi utama dari sinergi tersebut adalah keselarasan visi pembangunan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga ke kota dan kabupaten. Mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam periode yang sama dengan visinya “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul,

dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045", maka Kota Kediri pun menetapkan komitmen yang teguh untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menuju masa depan.

Kota Kediri sebagai kekuatan daerah yang progresif, adaptif, dan inklusif untuk menyiapkan fondasi transformasi, memperkuat daya saing, serta memastikan keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat menetapkan visi Tahun 2025-2029 yaitu:

" Membangun Kota Kediri yang MAPAN
Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, *Ngangeni* ".

Dalam visi tersebut, tercakup substansi dan pokok-pokok pemikiran yang merepresentasikan cita-cita, aspirasi kolektif, potensi daerah, serta arah transformasi yang ingin dicapai. Nilai-nilai strategis ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan misi pembangunan yang lebih operasional, konkret, dan terukur. Dari sinilah visi diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata yang mampu menjawab tantangan, mengoptimalkan peluang, serta menggerakkan seluruh elemen pembangunan menuju tujuan bersama. Adapun pokok-pokok utama yang membentuk esensi visi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kota Kediri Maju

Maju berarti Kota Kediri menjadi kota yang mampu bersaing di level nasional dengan ekosistem perekonomian yang merata dan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Perekonomian kota yang merata berarti kesenjangan dan kemiskinan juga berkurang. Diversifikasi sektor usaha, mulai dari sektor jasa, ekonomi kreatif dan teknologi serta iklim investasi yang kondusif diharapkan meluaskan peluang lapangan pekerjaan. Kota yang mampu menciptakan inovasi, menarik investasi dan mendorong penguatan UMKM dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menjadi penopang dan mewujudkan Kota Kediri sebagai kota yang sejahtera, berdaya saing, mandiri, dan berkembang pesat.

2. Kota Kediri Agamis

Kota Kediri Agamis berarti Kota Kediri menjadi kota yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kedamaian, toleransi dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kerukunan dan keselarasan masyarakat. Mewujudkan kegiatan inovatif untuk meluaskan cakupan kerukunan antar umat beragama. Pengembangan pusat-pusat keagamaan untuk mendukung aspek spiritual, sosial dan karakter masyarakat secara holistik. Nilai ketuhanan dan wawasan kebangsaan menjadi pegangan dan membentuk karakter masyarakat yang ramah dan mewujudkan lingkungan yang toleran dan damai.

3. Kota Kediri Produktif

Kota Kediri Produktif berarti kota yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yaitu manusia yang sehat secara fisik dan mental, memiliki pengetahuan luas, memiliki mental yang tangguh, inovatif, berprestasi, berkarakter dan memiliki motivasi serta kemampuan beradaptasi dalam dinamika global. Produktif juga berarti memiliki kesetaraan gender, memberikan perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, peluang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk menciptakan SDM produktif dan inovatif yang menjadi salah satu kunci utama pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Kota Kediri Aman

Kota Kediri Aman berarti kota yang memiliki pemerintahan yang bersih, responsif dan berintegritas. Pemerintahan yang transparan, inovatif dan cepat merespons kebutuhan masyarakat akan menghasilkan pelayanan publik berkualitas, kota yang aman, tangguh terhadap bencana, tentram dan tertib. Memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan reformasi birokrasi, dan memastikan penggunaan sumber daya yang tepat untuk mendukung keamanan, ketahanan pangan serta ketahanan daerah.

5. Kota Kediri *Ngangeni*

Kota Kediri *Ngangeni* berarti kota yang dirindukan karena keramahan masyarakatnya, kekuatan seni dan budaya, kerapian, tata kota, bersih, indah dan lingkungan hidup berkelanjutan. Dengan mengembangkan kekayaan budaya, pariwisata dan penataan kota, mewujudkan kota yang nyaman, menarik, dan selalu dirindukan, baik oleh warganya maupun oleh para wisatawan dalam maupun luar negeri. Pengembangan inovasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan akan ditingkatkan demi memastikan keberlanjutan tanah, air dan udara di Kota Kediri. Memastikan lingkungan hidup berkualitas untuk memastikan keberlanjutan kehidupan yang optimal pada generasi kota selanjutnya.

Untuk sukses mencapai visi yang telah ditetapkan tahun 2025-2029, diperlukan perumusan misi yang strategis dan inspiratif sebagai pijakan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjadi panduan utama yang menjelaskan langkah-langkah progresif dan inovatif yang akan dilakukan demi tercapainya tujuan besar. Misi ini juga berfungsi sebagai penggerak yang menyatukan semangat, tindakan nyata, dan kolaborasi dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan penuh komitmen dan keselarasan terhadap tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi " Membangun Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, *Ngangeni*", ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang menguraikan setiap visi. Adapun visi dan misi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
Membangun Kota Kediri yang Mapan Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, *Ngangeni*	**Kota Kediri Maju**	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan
	Kota Kediri Agamis	Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan
	Kota Kediri Produktif	Mewujudkan Produktivitas Sumber Daya Manusia
	Kota Kediri Aman	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas
	Kota Kediri *Ngangeni*	Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Adapun penjelasan setiap misi Kota Kediri Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Misi 1

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dukungan berupa akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing pengusaha lokal. Selain itu, peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat terus didorong guna mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Upaya ini juga disertai dengan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan wirausaha di berbagai sektor baik formal maupun informal, untuk mengurangi pengangguran. Peningkatan kesejahteraan juga berarti menurunkan angka kemiskinan yang dilaksanakan dengan kolaborasi dan integratif berbagai pihak untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meminimalisir kantong kemiskinan. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni dan pengurangan kawasan kumuh didorong untuk menurunkan kesenjangan. Peningkatan akses hunian yang aman, layak dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas kehidupan. Pembangunan infrastruktur publik yang merata, berkualitas dan berkelanjutan seperti transportasi, sanitasi, energi, pembangunan *icon* ciri khas kota, infrastruktur MICE (*meeting, incentive, convention and exhibition),* perbaikan fasilitas umum menjadi prioritas dalam menunjang aktivitas ekonomi serta meningkatkan daya saing perkotaan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Misi 2

Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan

Memperkuat kerukunan sosial dan solidaritas masyarakat dengan meningkatkan nilai-nilai masyarakat untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, pemahaman nilai toleransi, serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi keberagaman. Selain itu, nilai kemanusiaan dimaksudkan untuk membangun empati dan hubungan kedekatan emosi yang dilakukan dengan wawasan kebangsaan dan memperkuat program berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek sosial dan pembangunan. Upaya ini juga didukung oleh penguatan kesadaran kolektif untuk menyelaraskan nilai tradisional dengan dinamika masyarakat modern. Peningkatan peran lembaga sosial, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat diperkuat untuk mendorong solidaritas dan kebersamaan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang bersatu, toleran, dan memiliki solidaritas kuat sebagai fondasi kesejahteraan bersama.

Misi 3

Mewujudkan Produktivitas Sumber Daya Manusia

Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, aktif, dan kreatif dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan peran masyarakat, serta perluasan akses terhadap kesempatan belajar dan berprestasi. Perluasan akses pendidikan yang merata dengan memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Literasi dan numerasi terus didorong untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berpikir kritis dan berdaya saing. Peningkatan prestasi melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi, pengembangan potensi atlet melalui pembinaan, beasiswa atlet berprestasi, dan pembangunan infrastruktur olahraga yang memadai. Kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas dengan menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata. Pemerataan kualitas fasilitas kesehatan, perluasan cakupan layanan, upaya pencegahan dan pengobatan penyakit, perilaku hidup bersih dan sehat.

Prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) diarusutamakan dalam berbagai program pembangunan lintas urusan. Upaya aktif untuk mendorong partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan diwujudkan melalui penyediaan akses pendidikan inklusif, pelatihan, peluang kerja, serta keterlibatan mereka dalam forum-forum pengambilan keputusan. Selanjutnya, perlindungan anak menjadi upaya yang wajib dilakukan untuk memastikan generasi penerus yang sehat, unggul dan berkualitas. Pemenuhan hak anak mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi dan menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh pihak baik pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha.

Misi 4

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas

Pemerintahan yang inovatif, cepat merespons kebutuhan masyarakat, dan menjunjung tinggi integritas merupakan landasan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan berkualitas. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya nyata membangun sistem pelayanan yang transparan, mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai dinamika secara tepat dan cepat. Inovasi menjadi kunci yang terus diperkuat sebagai budaya kerja di seluruh tingkat pemerintahan. Upaya mendorong terobosan kebijakan, digitalisasi pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi yang relevan, mudah diakses, dan memberikan dampak nyata bagi warga. Komitmen terhadap inovasi daerah diwujudkan melalui sistem penghargaan untuk mendorong aparatur bekerja lebih efektif, inovatif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan diperkuat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, mendorong aparatur yang profesional, adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Konsistensi dalam menegakkan peraturan daerah, untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial serta penguatan kelembagaan menjadi elemen pendukung dalam menciptakan *good governance*. Upaya ini diselaraskan dengan peningkatan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi pendapatan daerah, kerja sama dengan berbagai pihak, dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan bebas korupsi.

Ketahanan pangan dan ketangguhan terhadap bencana juga menjadi fokus penting dalam tata kelola daerah. Penguatan sistem distribusi pangan yang adil dan merata, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal dan teknologi ramah lingkungan. Kesiapsiagaan terhadap bencana diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pelibatan aktif masyarakat dalam berbagai program mitigasi dan adaptasi risiko, sehingga kota memiliki daya tahan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim.

Misi 5

Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih Bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata yang menggabungkan potensi wisata lokal dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan secara terpadu. Promosi pariwisata diarahkan agar lebih inklusif dan ramah. Penyelenggaraan event berkelas nasional yang mengangkat tema-tema budaya khas Kediri, revitalisasi destinasi wisata berbasis sejarah, serta pengembangan sarana dan prasarana *meeting, incentive, convention, exhibition* (MICE), dan pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan atraksi wisata. Penguatan kelompok pariwisata melalui fasilitasi maupun peningkatan kualitas pelayanan wisata berjalan selaras. Dengan cara ini, masyarakat menjadi

pelaku utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang ramah, otentik dan berkelanjutan. Pemberdayaan komunitas untuk mengelola atraksi wisata mendorong partisipasi warga dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat sendiri.

Dalam konteks transformasi ekonomi lokal, dukungan terhadap transformasi digital, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas kota dan daya tarik pengembangan ekonomi kreatif menjadi strategi penting untuk mendukung ekonomi berbasis potensi lokal. Sejumlah 17 (tujuh belas) sektor ekonomi kreatif yaitu arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film/animasi/video, fotografi, kriya/ *crafting,* kuliner, musik, penerbitan, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, televisi/radio, dan aplikasi serta pengembangan teknologi menjadi sebuah potensi lokal yang dapat dioptimalkan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan, kelembagaan, SDM, dan infrastruktur, sektor ini bisa menjadi motor pertumbuhan baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kota Kediri yang menyimpan sejarah sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan pada masa kerajaan menjadi sebuah potensi yang dikembangkan. Pelestarian benda-benda cagar budaya, pembinaan kelompok-kelompok budaya, penguatan karakteristik budaya lokal/ khas kediri, kepribadian dan penguatan karakter masyarakat serta pemeliharaan situs-situs religi maupun budaya diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan terhadap identitas kota dan dapat menarik kunjungan wisatawan lokal, internasional maupun kunjungan akademisi kebudayaan.

Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, Kota Kediri juga menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Program pengelolaan sampah yang modern, efektif dan terpadu, pengendalian limbah domestik dan industri, penghijauan wilayah kota, serta upaya pengurangan emisi karbon diimplementasikan secara konsisten. Pengembangan Koridor Brantas sebagai bagian dari pengembangan taman kota diharapkan turut meningkatkan daya tarik kota. Pengelolaan RTH publik baik taman kota maupun taman kelurahan sebagai paru-paru kota dan ruang aktivitas publik akan meningkatkan kenyamanan perkotaan. Dengan pendekatan ini, Kota Kediri tidak hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman dan estetis, tetapi juga menjadi warisan hidup yang bernilai tinggi bagi generasi masa depan.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

3.1.2.1 Tujuan

Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi. Penetapan tujuan didasarkan pada visi dan misi yang telah dirumuskan, serta diperkaya dengan analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis yang relevan. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tantangan strategis yang dihadapi, dirumuskanlah tujuan yang menjadi fokus utama pembangunan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Tujuan ini dirancang secara spesifik untuk memberikan arah yang jelas bagi upaya pembangunan Kota Kediri, sejalan dengan kebutuhan prioritas dan potensi yang dimiliki. Melalui

pendekatan yang strategis ini, diharapkan semua elemen dapat bersinergi menuju pencapaian visi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan yang ingin diwujudkan Kota Kediri dalam lima tahun ke depan antara lain :

1. Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan;
2. Terwujudnya masyarakat yang agamis, rukun dan toleran;
3. Terwujudnya sumber daya manusia yang produktif;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berintegritas; serta
5. Terwujudnya kota wisata yang tertata, nyaman dan berkelanjutan.

Sedangkan keterkaitan antara misi dan tujuan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
Misi 1 : **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata dan penguatan infrastruktur berkelanjutan**	1. Terwujudnya Ekonomi yang Merata dan Infrastruktur Berkelanjutan
Misi 2 : **Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan**	2. Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Rukun dan Toleran
Misi 3 : **Mewujudkan produktivitas sumber daya manusia**	3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif
Misi 4 : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas**	4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas
Misi 5 : **Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**	5. Terwujudnya Kota Wisata yang Tertata, Nyaman dan Berkelanjutan

3.1.2.2 Sasaran

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Terdapat 14 (empat belas) sasaran yang ingin dihasilkan yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal;
2. Meningkatnya daya saing kota di level nasional;
3. Menurunnya angka kemiskinan;
4. Menurunnya tingkat pengangguran;
5. Meningkatnya kerukunan umat beragama;
6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
7. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat;
8. Meningkatnya kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan;

9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
12. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
13. Meningkatnya daya tarik wisata kota; dan
14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang digunakan dalam upaya pencapaian misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
	VISI: MEMBANGUN KOTA KEDIRI YANG MAPAN, KOTA YANG MAJU, AGAMIS, PRODUKTIF, AMAN, *NGANGENI*										
	Misi Maju - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata dan penguatan infrastruktur berkelanjutan										
1.	Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	3.43	3.5–4.5	3.5–4.5	3.7–4.7	3.9–4.9	4.0–5.0	4.5–5.5	4.5–5.5
		Indeks Gini	Indeks	0.337	0,327-0,364	0,327-0,364	0,325-0,362	0,323-0,363	0,321-0,358	0,319-0,356	0,319-0,356
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal	% Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian Dan Perikanan Terhadap PDRB	%	10.55	10.97	11.27	11.53	11.78	12.00	12.21	12.21
1.2	Meningkatnya Daya Saing Kota di Level Nasional	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.65	3.75	3.84	3.93	4.02	4.11	4.2	4.2
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	6.51	6.45-6.32	6.35-6.15	6.22-5.73	6.19-5.61	5.95-5.54	5.72-5.40	5.72-5.40
1.4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.910	3.87–3.54	3.84–3.51	3.80–3.47	3.75–3.43	3.71–3.39	3.66–3.35	3.66–3.35
	Misi Agamis - Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan										
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Rukun dan Toleran	Indeks Kota Toleran	Indeks	6.073	6.215	6.283	6.384	6.412	6.452	6.511	6.511
2.1	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	4.56	4.58	4.6	4.63	4.66	4.69	4.72	4.72
	Misi Produktif - Mewujudkan Produktivitas Sumber Daya Manusia										
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81.88	82.77	83.00	84.24	84.76	85.15	85.42	85.42
3.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0.8606	0.8607	0.8627	0.8647	0.8667	0.8687	0.8707	0.8707
3.2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.86
3.3	Meningkatnya kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.99	96.22	96.56	96.94	97.35	97.76	98.17	98.17

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
	VISI: MEMBANGUN KOTA KEDIRI YANG MAPAN, KOTA YANG MAJU, AGAMIS, PRODUKTIF, AMAN, *NGANGENI*										
	Misi Aman - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas										
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85.42	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	91.5
4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.20	4.25	4.30	4.35	4.4	4.45	4.51	4.51
4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	72.49	72.99	73.19	74.55	78.45	79.72	80.21	80.21
4.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	59.75	62	65	68	72	76	80	80
4.4	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	78.20	73-70	70-67	67-64	64-62	62-61	61-60	61-60
	Misi *Ngangeni* - Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan										
5.	Terwujudnya Kota Wisata yang Tertata, Nyaman dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	81.02	81.42	81.82	82.22	82.62	83.02	83.42	83.42
5.1	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	1,781,197	1,800,000	2,155,000	2,371,000	2,608,000	2,869,000	3,156,000	3,156,000
5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67.09	69.79	69.88	69.97	70.07	70.16	70.25	70.25

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Dalam menentukan arah kebijakan, Kota Kediri memperhatikan arah kebijakan transformasi dalam RPJPD.

3.2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Kediri Maju

Strategi untuk mencapai Kota Kediri Maju adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan ekonomi lokal, UMKM, koperasi, pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, mendorong inovasi pada sektor perekonomian, penguatan kerja sama antar wilayah, kemitraan dengan swasta dan masyarakat, perluasan akses terhadap pembiayaan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk menurunkan kesenjangan. Arah kebijakan untuk setiap sasaran adalah:

Sasaran	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal	1. Pengelolaan dan pengembangan sektor perekonomian daerah 2. Diversifikasi ekonomi dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah 3. Pendampingan, fasilitasi, dan akses pembiayaan bagi UMKM 4. Pembinaan dan pendampingan koperasi 5. Penguatan proses bisnis UMKM dan akses ke ekosistem digital dan inkubator 6. Penguatan produktivitas BUMD 7. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan terintegrasi dengan ketahanan pangan 8. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional 9. Penguatan kawasan strategis ekonomi lokal di setiap kecamatan berbasis potensi lokal
2. Meningkatnya daya saing kota di level nasional	1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan perizinan dan pemberian insentif 2. Penyediaan infrastruktur layanan dasar yang adil dan merata 3. Promosi penanaman modal 4. Peningkatan kualitas layanan perhubungan

Sasaran	Arah Kebijakan
	5. Penguatan ekosistem ekonomi lokal 6. Penguatan koordinasi kawasan strategis 7. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah maupun swasta untuk pengelolaan kawasan perkotaan 8. Penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan perekonomian daerah
3. Menurunnya angka kemiskinan	1. Perluasan penyediaan bantuan sosial 2. Perluasan penyediaan jaminan sosial 3. Pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis kerakyatan 4. Perluasan akses pendidikan dan beasiswa 5. Penguatan perlindungan sosial adaptif 6. Penguatan pemberdayaan masyarakat rentan
4. Menurunnya tingkat pengangguran	1. Pengembangan program pelatihan kerja 2. Pengembangan keterampilan tenaga kerja 3. Perluasan akses informasi pasar kerja 4. Pemberdayaan ekonomi lokal 5. Pelibatan sektor swasta dalam pelatihan, akses informasi maupun *link and match* tenaga kerja

Strategi dan arah kebijakan Kota Kediri Maju akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
4. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5. PHTC 3: Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
6. PHTC 5: Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
7. PHTC 7: Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, Generasi Z, dan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).

Kota Kediri Maju juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Jatim Sejahtera : Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu
2. Jatim Kerja : Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi

3. Jatim Akses : Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
4. Jatim Agro: Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional

3.2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Kediri Agamis

Strategi untuk mencapai Kota Kediri Agamis adalah memperkuat kohesi sosial, kerukunan dan kondusivitas masyarakat melalui pengarusutamaan nilai kebangsaan, penguatan nilai keagamaan, penguatan inovasi, pencegahan konflik serta fasilitasi interaksi lintas agama dan sosial secara partisipatif dengan arah kebijakan:

Sasaran	Arah Kebijakan
5. Meningkatnya kerukunan umat beragama	1. Penguatan kerukunan antar etnis dan agama 2. Peningkatan pemahaman ideologi Pancasila 3. Penguatan pencegahan dan deteksi dini konflik 4. Penguatan riset dan inovasi untuk memperkuat kondusivitas masyarakat 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan

Strategi dan arah kebijakan Kota Kediri Agamis akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kota Kediri Agamis juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu Jatim Harmonis : Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga

3.2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Kediri Produktif

Strategi untuk mencapai Kota Kediri Produktif adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif, riset dan inovasi, peningkatan prestasi akademis maupun prestasi olah raga, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pemberdayaan kelompok rentan secara terintegrasi dan berkeadilan. Arah kebijakan untuk setiap sasaran adalah:

Sasaran	Arah Kebijakan
6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional 2. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar 3. Pengembangan layanan kesehatan yang berkualitas 4. Percepatan penuntasan stunting dan TBC.

Sasaran	Arah Kebijakan
	5. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang aman 6. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 7. Penguatan layanan Posyandu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun 2. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif 3. Penguatan kurikulum berbasis karakter, teknologi, literasi dan numerasi 4. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 5. Perluasan akses pendidikan tinggi 6. Penguatan riset dan inovasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8.Meningkatnya kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan	1. Pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial 2. Perlindungan terhadap perempuan, anak, disabilitas dan lansia 3. Pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok rentan 4. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 5. Penguatan pelayanan publik yang mengedepankan kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) 6. Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara inklusif

Strategi dan arah kebijakan Kota Kediri Produktif akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
2. PHTC 1: Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
3. PHTC 2: Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
4. PHTC 4: Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. PHTC 6: Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara

Kota Kediri Produktif juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Jatim Cerdas: Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua *(Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
2. Jatim Sehat: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC)

3. Jatim Harmoni: Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga

3.2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Kediri Aman

Strategi untuk mencapai Kota Kediri Aman adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital, inovasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sistem kinerja, keuangan, dan ketangguhan daerah terhadap bencana. Arah kebijakan untuk setiap sasaran adalah:

Sasaran	Arah Kebijakan
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Digitalisasi dan integrasi aplikasi pelayanan publik (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 3. Penguatan adaptasi dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik 4. Percepatan keterpaduan layanan publik 5. Penguatan tata kelola kelembagaan 6. Optimalisasi manajemen, distribusi dan kapasitas ASN 7. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik 8. Penguatan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat 9. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 10. Penguatan penegakan Peraturan Daerah 11. Optimalisasi fasilitasi kerja sama daerah dan swasta dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik 12. Penguatan layanan Posyandu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Penguatan reformasi birokrasi 2. Penguatan sistem manajemen kinerja 3. Penguatan pengawasan dan evaluasi 4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang tertib dan berintegritas
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah 3. Optimalisasi belanja daerah 4. Penguatan tata kelola keuangan berbasis kinerja
12. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Penguatan ketahanan bencana berbasis komunitas 2. Penguatan sistem respon cepat dan tanggap darurat 3. Pengelolaan risiko bencana dengan

Sasaran	Arah Kebijakan
	meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya serta mitigasi bencana

Strategi dan arah kebijakan Kota Kediri Aman akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
3. PHTC 6: Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;

Kota Kediri Aman juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Jatim Berkah Amanah: Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif
2. Jatim Harmoni: Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga
3. Jatim Lestari: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

3.2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Kediri *Ngangeni*

Strategi untuk mencapai Kota Kediri *Ngangeni* adalah mendorong pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hidup melalui pembangunan destinasi unggulan, penataan ruang kota, pelestarian budaya lokal, penguatan kepribadian dan karakteristik masyarakat, penguatan ekonomi kreatif, inovasi, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi. Arah kebijakan untuk setiap sasaran adalah:

Sasaran	Arah Kebijakan
13. Meningkatnya daya tarik wisata kota	1. Penguatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang kota 2. Pengembangan destinasi wisata terpadu 3. Penguatan pemasaran dan promosi pariwisata 4. Peningkatan kualitas infrastruktur wisata 5. Pelestarian seni, budaya lokal dan benda cagar budaya 6. Pengembangan sektor ekonomi kreatif 7. Penguatan riset, inovasi dan kerja sama untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata kota 8. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, pelestarian budaya dan ekonomi kreatif 9. Penguatan kepribadian dan karakteristik

Sasaran	Arah Kebijakan
	masyarakat
14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Penguatan teknologi pengelolaan sampah 2. Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan 3. Pengembangan, pembangunan maupun perluasan ruang terbuka hijau, penanaman pohon dan konservasi lingkungan 4. Edukasi publik untuk perubahan perilaku ramah lingkungan 5. Pelestarian mata air 6. Kolaborasi lintas sektor untuk penurunan emisi gas rumah kaca

Strategi dan arah kebijakan Kota Kediri *Ngangeni* akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kota Kediri *Ngangeni* juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Jatim Kerja : Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi
2. Jatim Harmoni: Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga
3. Jatim Lestari: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan

Untuk memastikan keterpaduan pembangunan dengan pusat maka diperlukan penyelarasan arah kebijakan kewilayahan berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Berdasar pada Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 terkait arah pembangunan kewilayahan terdapat highlight indikasi intervensi yang berfungsi untuk menciptakan pemerataan pembangunan melalui melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan kawasan

komoditas unggulan, pengembangan pusat pertumbuhan, dan menjaga kawasan konservasi, serta memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Untuk menyelaraskan lokus arah pembangunan Kewilayahan RPJMN tahun 2025-2029 dilakukan pemetaan lokus tersebut dengan arah pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur yaitu Koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan, yang meliputi Kawasan Gerbangkertosusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Selingkar Ijen serta Kawasan Madura dan Kepulauan.

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Selatan merupakan kawasan strategis yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur dengan akses jalan nasional lintas selatan. Dikelilingi oleh pegunungan dan potensi alam yang belum banyak tereksplorasi, kawasan ini memiliki kekuatan dalam pengembangan pertanian, energi terbarukan, serta pariwisata berbasis alam dan petualangan. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ini membuka peluang besar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan, minapolitan dan agroindustri dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga memiliki keunggulan dalam pariwisata alam.

Untuk mewujudkan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagai pusat agropolitan dan minapolitan, serta berkembang untuk menjadi kawasan agroindustri di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan perlu adanya peningkatan akses layanan dasar seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing dan kompetensi sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan serta perluasan penyediaan jaminan sosial. Dalam aspek ekonomi, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan ini perlu didorong untuk optimalisasi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi produk unggulan, peningkatan akses pendanaan, peningkatan kerja sama antar daerah dan juga perluasan pemasaran produk sebagai upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dan pasar regional. Pengembangan tersebut juga harus didukung dengan peningkatan konektivitas ekonomi dan transportasi pendukung sistem logistik seperti jalan tol dan bandara. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan perlu didukung dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan wilayah dalam RPJMN untuk Selingkar Wilis dan Lintas Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Matriks Koridor Penghubung antar Kawasan dan Sistem Pusat Pemukiman Jawa Timur dengan Strategi Pengembangan Wilayah RPJMN: Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Koridor Penghubung Antar Kawasan dan Sistem Pusat Permukiman	Kawasan Pertumbuhan (A)	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (C)	Kawasan Afirmasi (D)	Kawasan Komoditas Unggulan (B)	Kawasan Konservasi dan Kawasan Geopark/ Rawan Bencana (E)
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan: Kota Kediri (PKW) Kab. Kediri (PKL) Kota Madiun (PKW) Kab. Madiun (PKL) Kab. Nganjuk (PKL) Kota Blitar (PKW) Kab. Blitar (PKL) Kab. Tulungagung (PKW) Kab. Ngawi (PKL) Kab. Trenggalek (PKW) Kab. Pacitan (PKW) Kab. Magetan (PKL) Kab. Ponorogo (PKL)	**Kawasan Perkotaan Kediri:** Kota Kediri Kab. Kediri **Kawasan Perkotaan Madiun:** Kota Madiun Kab. Madiun Kab. Magetan **Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi:** DPP Karst Pacitan - Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya	**Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur:** Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Ponorogo Kab. Pacitan **Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas:** Kab. Kediri Kab. Blitar Kab. Nganjuk Kab. Tulungagung Kab. Trenggalek	**Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur (Pemerataan Pembangunan):** Kab. Pacitan Kab. Trenggalek **Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng-Lingkar Lawu:** Kab. Ngawi Kab. Magetan **Kawasan Komoditas Unggulan (Ekonomi Biru Pacitan Trenggalek Tulungagung):** Kab. Pacitan Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung	**Kawasan Komoditas Unggulan Tebu lingkar Kelud-Kawi-Arjuna Welirang:** Kab. Kediri Kab. Blitar **Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi:** DPP Karst Pacitan - Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur:** Kota Blitar **Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo** Kab. Kediri ***Geopark*** Gunung Sewu: Kab. Pacitan ***Geopark*** Ngawi: Kab. Ngawi **Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas:** Kab. Kediri Kab. Blitar Kab. Nganjuk Kab. Tulungagung Kab. Trenggalek

Kawasan Selingkar Wilis difokuskan untuk pengembangan sektor pertanian, energi terbarukan, serta pariwisata berbasis alam dan petualangan. Mendukung pengembangan di wilayah tersebut diperlukan highlight Indikasi intervensi yang mampu memberikan dampak positif serta meningkatkan ekonomi di Kawasan Selingkar Wilis. Adapun highlight indikasi intervensi di wilayah tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 *Highlight* Indikasi Intervensi Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	*Highlight* Indikasi Intervensi
● Kota Kediri (PKW) ● Kabupaten Kediri (PKL) ● Kota Madiun (PKW) ● Kabupaten Madiun (PKL) ● Kabupaten Nganjuk (PKL) ● Kota Blitar (PKW) ● Kabupaten Blitar (PKL) ● Kabupaten Tulungagung (PKW) ● Kabupaten Ngawi (PKL) ● Kabupaten Trenggalek (PKW) ● Kabupaten Pacitan (PKW) ● Kabupaten Magetan (PKL) ● Kabupaten Ponorogo (PKL)	**Kawasan Perkotaan Kediri dan Kawasan Perkotaan Madiun** Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan kediri dan Kawasan Perkotaan Madiun melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan pemukiman kumuh terpadu perkotaan **Pengembangan dalam urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman** • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Kediri (PHTC) • Inisiasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Madiun (PHTC) **Pengembangan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** • Inisiasi pembangunan TPST Regional Kediri\ • Inisiasi pembangunan TPST Regional Madiun • Inisiasi pengembangan SPAM Regional Lintas Tengah • Inisiasi pengembangan SPAM Regional Madiun • Pengembangan kota agropolitan Kediri • Pengembangan kota agropolitan Madiun • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Madiun • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Kediri • Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri dan Kediri-Tulungagung • Preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan Kediri-Blitar • Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-Pacitan

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, kawasan industri dan pergudangan, simpul transportasi, jalan tol, dan kawasan strategis • Penanganan banjir pada wilayah sungai kewenangan provinsi • Pengembangan dalam urusan Kesehatan • Fasilitasi Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Gambiran Kediri dan RSUD Dr. Soedono Madiun (PHTC) **Pengembangan dalam urusan Industri** • Pengembangan Kawasan Industri Ngawi, sebagai hinterland dari Kawasan Perkotaan Madiun • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedangbesar yang ada di KI/KEK prioritas **Pengembangan dalam urusan Perhubungan** • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) JakartaSurabaya • Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api, pelabuhan, bandara) **Pengembangan dalam urusan Pariwisata** Revitalisasi Museum PETA Blitar Pengembangan dalam urusan Kebencanaan • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Kelud

3.2.3 Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 3.6 Penahapan Pembangunan RPJMD
Visi : Membangun Kota Kediri yang MAPAN Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, *Ngangeni*

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan fondasi transformasi	Mendukung transformasi dengan	Implementasi dan inovasi untuk	Optimalisasi pembangunan dengan	Memastikan keberlanjutan pembangunan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
pembangunan untuk menjadi kota yang MAPAN dengan meningkatkan daya saing ekonomi, nilai kerukunan, inovasi, kualitas pendidikan, Kesehatan, layanan pemerintahan dan infrastruktur	pembangunan infrastruktur strategis, penataan kota, penguatan kerukunan sosial masyarakat, inovasi dan kompetensi SDM	meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dengan peningkatan infrastruktur publik, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja pemerintahan	memperluas ekosistem inovasi, kebijakan sosial yang inklusif dan responsif, serta mempercepat transformasi untuk efektivitas layanan publik	Kota untuk menyiapkan percepatan transformasi menuju Kota Kediri berdaya saing global

3.2.4 Pengarustamaan Pembangunan

3.2.4.1 Pengarustamaan SDGs

Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kerangka pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya bersifat global, tetapi juga diadopsi secara nasional hingga ke tingkat daerah. Bagi Kota Kediri, pengarusutamaan SDGs dilakukan dengan memastikan setiap arah kebijakan dan program pembangunan sejalan dengan upaya percepatan pencapaian tujuan SDGs 2030.

Langkah pengarusutamaan tersebut diwujudkan melalui beberapa strategi utama, yaitu: (a) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD Kota Kediri 2025–2029; (b) memperkuat mekanisme kerja sama multipihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal; (c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian indikator SDGs; serta (d) memastikan prinsip inklusivitas sosial dan keberlanjutan lingkungan terintegrasi di setiap program pembangunan, terutama yang menyasar kelompok rentan.

Landasan hukum integrasi SDGs di Kota Kediri mengacu pada Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional. Melalui RPJMD 2025–2029, Kota Kediri menegaskan komitmen untuk menerjemahkan agenda global SDGs ke dalam konteks lokal, dengan menyusun indikator pembangunan yang sejalan dengan 17 tujuan SDGs. Dengan demikian, arah pembangunan Kota Kediri dapat lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 3.7 Kontribusi Kota Kediri terhadap SDGs

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Kediri
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan	Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kota Kediri. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 6,51 persen, angka yang

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Kediri
	lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur namun tetap menyisakan persoalan kerentanan bagi rumah tangga miskin. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, ketimpangan pendapatan, serta kerentanan rumah tangga miskin terhadap inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui RPJMD 2025–2029 menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui perluasan perlindungan sosial adaptif, penyediaan akses permodalan, peningkatan kesempatan pendidikan dan beasiswa, serta penyediaan hunian layak. Program-program prioritas juga diarahkan untuk memperluas lapangan kerja produktif, memperkuat perlindungan kelompok rentan, dan mengurangi kawasan kumuh. Dengan strategi ini, Kota Kediri menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 5,40 persen pada tahun 2029, sejalan dengan agenda SDGs nasional.
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan	Ketahanan pangan menjadi isu penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Pada tahun 2024, capaian ketersediaan pangan pokok tercatat sebesar 118 persen, yang menunjukkan kondisi surplus. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti potensi kerentanan pangan di beberapa kelompok masyarakat, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, serta keberlanjutan pasokan pangan sehat. Melalui RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kota Kediri mengarahkan kebijakan pada peningkatan diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan masyarakat, serta pengawasan terhadap keamanan pangan segar. Program prioritas juga meliputi penanganan kerawanan pangan, pengembangan infrastruktur kemandirian pangan, dan peningkatan edukasi gizi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan pangan yang cukup sekaligus pemenuhan gizi yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita,remaja putri, ibu hamil, dan lansia.
Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Pembangunan kesehatan di Kota Kediri menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2024, capaian kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah mencapai 97,40 persen, serta rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan mencapai 7,8 per 1.000 penduduk, angka yang mendekati standar ideal. Capaian ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti tingginya prevalensi penyakit menular dan penyakits tidak menular, permasalahan gizi ganda (stunting dan obesitas), serta ancaman kesehatan lingkungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, RPJMD 2025–2029 menetapkan strategi peningkatan layanan kesehatan dasar, perluasan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Kediri
	medis, promosi kesehatan dan perlindungan jaminan Kesehatan masyarakat Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian SDGs Tujuan 3.
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas	Pendidikan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri. Kondisi pendidikan menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana pada tahun 2024 pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sudah mencapai 99,77 persen, dan 90,52 persen guru telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan dasar sudah relatif baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan mutu antar sekolah, keterbatasan sarana pembelajaran, dan perlunya peningkatan kompetensi guru agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum serta teknologi. Akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan juga menjadi perhatian. Melalui RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kota Kediri menekankan penguatan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pendidikan informal serta peningkatan profesionalisme guru. Beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu terus diperluas, seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan adil bagi semua.
Tujuan 5: Kesetaraan Gender	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan. Di Kota Kediri, capaian anggaran responsif gender pada tahun 2024 tercatat 45,88 persen, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga masih mencapai 7,9 per 100.000 keluarga, dan tercatat 35 kasus perkawinan anak dari total 89.494 keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan keadilan gender, perlindungan perempuan, serta pencegahan perkawinan anak. Melalui RPJMD 2025–2029, pemerintah menetapkan arah kebijakan penguatan komitmen pengarusutamaan gender di setiap sektor, memperkuat perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, meningkatkan kualitas keluarga, serta memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan strategi ini, Kota Kediri berkomitmen mewujudkan pembangunan yang lebih setara dan inklusif.
Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan mendasar bagi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, akses air minum perpipaan di Kota Kediri baru mencapai 22,34 persen, sementara sarana sanitasi telah menjangkau

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Kediri
	seluruh rumah tangga (100 persen), meskipun sebagian masih menghadapi permasalahan kualitas. Tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur air minum, rendahnya jangkauan layanan perpipaan, dan kerentanan sanitasi di wilayah padat penduduk. Pemerintah Kota Kediri melalui RPJMD 2025–2029 menetapkan kebijakan pembangunan sistem penyediaan air minum, peningkatan pengelolaan air limbah domestik, serta penguatan sanitasi lingkungan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati akses air bersih yang lebih luas dan sanitasi yang lebih aman.
Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau	Sebagian besar rumah tangga di Kota Kediri telah menikmati akses listrik, namun pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas. Konsumsi energi masih didominasi oleh sumber berbasis fosil, sehingga efisiensi dan keberlanjutan energi menjadi isu penting. Untuk menjawab tantangan tersebut, RPJMD 2025–2029 mengarahkan strategi pada pemanfaatan energi ramah lingkungan, efisiensi penggunaan energi di fasilitas umum, serta pengembangan energi alternatif terbarukan skala kecil dan menengah. Dengan kebijakan ini, Kota Kediri berupaya memastikan akses energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Di Kota Kediri, pada tahun 2024 tercatat 40 persen pencari kerja telah mengikuti pelatihan, sementara perusahaan dengan tata kelola kerja layak baru mencapai 25,16 persen. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan, namun kesempatan kerja yang layak masih perlu diperluas. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya keterampilan tenaga kerja, belum terbangunnya link & match dengan dunia industri serta perlunya penguatan produktivitas UMKM. Melalui RPJMD 2025–2029, kebijakan diarahkan pada penguatan pelatihan bagi pencari kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja formal, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dari sektor non-industri pengolahan. Dengan strategi ini, Kota Kediri menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Kota Kediri memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan, industri kreatif, dan UMKM. Namun, tantangan masih muncul dari keterbatasan riset, rendahnya adopsi teknologi, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur perkotaan. Untuk menjawab tantangan ini, RPJMD 2025–2029 mengarahkan strategi pada penguatan riset dan inovasi, pengembangan kawasan industri kecil dan menengah, digitalisasi UMKM, serta peningkatan infrastruktur

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Kediri
	dasar dan konektivitas perkotaan. Dengan langkah tersebut, Kota Kediri diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi serta memperkuat fondasi pembangunan industri berbasis inovasi.
Tujuan 10: Berkurangnya Ketimpangan	Meski angka kemiskinan menurun, ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah masih menjadi tantangan pembangunan di Kota Kediri. Kelompok rentan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. RPJMD 2025–2029 menekankan kebijakan pemerataan pembangunan antar wilayah, peningkatan inklusi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Melalui strategi ini, diharapkan kesenjangan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata.
Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Permukiman perkotaan menjadi salah satu tantangan utama Kota Kediri. Pada tahun 2024, pengurangan kawasan kumuh baru mencapai 58,20 persen, dengan target meningkat hingga 80,61 persen pada tahun 2029. Akses PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) perumahan layak juga telah mencapai 88,79 persen. Tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan hunian layak yang terus meningkat, pengelolaan persampahan, serta infrastruktur drainase perkotaan. Melalui RPJMD 2025–2029, strategi diarahkan pada pengembangan perumahan layak huni, penataan kawasan kumuh, penguatan sistem pengelolaan sampah, serta perbaikan infrastruktur drainase. Dengan langkah ini, Kota Kediri diharapkan menjadi kota yang lebih layak huni, nyaman, dan berkelanjutan.
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Kota Kediri telah mencatat capaian pengelolaan persampahan hingga 99,05 persen pada 2024. Namun, pengurangan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan limbah B3 masih menjadi tantangan serius. RPJMD 2025–2029 mengarahkan kebijakan pada penguatan sistem daur ulang, penerapan prinsip ekonomi sirkular, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam konsumsi berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan pola konsumsi dan produksi yang lebih ramah lingkungan dapat terwujud.
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	Perubahan iklim membawa risiko banjir dan cuaca ekstrem yang berdampak pada masyarakat Kota Kediri. Tahun 2024, sebanyak 72,60 persen warga telah mengakses informasi rawan bencana, namun kesiapsiagaan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Melalui RPJMD 2025–2029, strategi diarahkan pada mitigasi risiko bencana, penguatan kapasitas adaptasi melalui pengembangan ruang terbuka hijau, serta edukasi publik mengenai perubahan iklim. Dengan upaya ini, Kota Kediri berkomitmen meningkatkan ketahanan iklim untuk melindungi kehidupan masyarakat.
Tujuan 14: Ekosistem Lautan	Sebagai kota non-pesisir, kontribusi Kota Kediri dalam tujuan ini dilakukan melalui pengelolaan sungai dan

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Kediri
	limbah agar tidak mencemari laut. Sungai Brantas sebagai aliran utama menjadi fokus pengendalian pencemaran plastik dan limbah domestik. RPJMD 2025–2029 menekankan strategi pengelolaan limbah cair, pengurangan plastik sekali pakai, serta kerja sama lintas daerah dalam menjaga kualitas air sungai. Dengan demikian, Kota Kediri turut berkontribusi dalam menjaga ekosistem laut secara regional.
Tujuan 15: Ekosistem Daratan	Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Kediri masih terbatas, yaitu 9,77 persen dari luas wilayah pada 2024, dengan target meningkat menjadi 9,83 persen pada 2029. Keterbatasan ruang konservasi serta pencemaran udara dan air menjadi tantangan pembangunan lingkungan. RPJMD 2025–2029 mengarahkan kebijakan pada penambahan RTH, rehabilitasi lahan kritis, penghijauan kota, serta pengendalian pencemaran. Upaya ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem daratan di Kota Kediri.
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Kediri tergolong baik, dengan capaian 100 persen pada 2024. Namun, tantangan baru seperti kejahatan siber dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan perlu mendapat perhatian. RPJMD 2025–2029 menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas aparatur, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta penegakan hukum yang adil. Dengan strategi ini, Kota Kediri berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang tangguh dan terpercaya.
Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Kemitraan menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Kediri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun masyarakat sipil. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan pendanaan pembangunan dan perlunya sinergi program. Melalui RPJMD 2025–2029, strategi diarahkan pada penguatan mekanisme kemitraan, peningkatan kerja sama dengan swasta, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik. Dengan langkah ini, Kota Kediri berupaya memastikan seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.2.5 Program Prioritas

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Nomenklatur program prioritas setiap urusan pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.

PROGRAM UNGGULAN KOTA KEDIRI

Dalam upaya membangun kota yang maju dan sejahtera membutuhkan langkah strategis yang memastikan seluruh aspek kehidupan masyarakat mendapat perhatian yang seimbang. Setiap sektor harus berkembang secara beriringan, mulai dari pemerataan pembangunan di tingkat komunitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, hingga penataan kota yang berkelanjutan. Dalam lima tahun ke depan, tujuh Program Unggulan (Sapta Cita) akan menjadi fondasi dalam mengarahkan pembangunan kota. Sapta Cita tidak hanya bertujuan menciptakan perubahan dan layanan publik yang lebih baik, tetapi juga memperkuat identitas, kemandirian, dan daya saing kota agar siap melesat dalam transformasi Indonesia Emas.

Adapun penjelasan untuk setiap Program Unggulan Kota Kediri adalah sebagai berikut:

CITA 1. Program Merata

Kualitas kehidupan masyarakat ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap kelurahan, hingga lingkup terkecil masyarakat yaitu RT dan RW memiliki peran krusial dalam membangun ketahanan sosial, menjaga kerukunan warga, serta memastikan kebutuhan dasar terpenuhi secara merata. Untuk mendukung optimalisasi peran tersebut, alokasi anggaran akan difokuskan pada penguatan pembangunan dan perlindungan sosial di tingkat kelurahan dengan mengarahkan pada kegiatan bina sosial, bina lingkungan dan padat karya. Bina sosial melingkupi Ketua RT, RW, serta kader posyandu balita dan lansia akan mendapatkan insentif yang lebih layak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Penguatan integrasi layanan primer posyandu juga didorong sebagai upaya mendekatkan layanan primer kepada masyarakat. *Universal Health Coverage* (UHC) tetap menjadi prioritas untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional.

Peran guru mengaji dan madrasah diniyah dalam membentuk karakter generasi muda juga mendapat perhatian khusus. Dengan langkah ini, terbentuk sosial masyarakat yang lebih kuat dan rukun mendorong terciptanya kota yang inklusif dan berdaya. Bina lingkungan mencakup pemeliharaan infrastruktur lingkungan. Bina lingkungan juga bermakna meningkatkan kewaspadaan dan empati terhadap lingkungan sekitar. Upaya perlindungan masyarakat miskin dan kelompok rentan (lanjut usia, disabilitas, perempuan dan anak, dsb) dilaksanakan dengan kolaborasi berbagai pihak. Kegiatan padat karya meliputi kegiatan yang melibatkan komunitas misalnya urban farming, bank sampah, dan sektor lingkungan lainnya. Program merata juga didukung dengan pembinaan ekonomi kerakyatan yaitu koperasi dan usaha mikro yang akan berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 1 Program Merata antara lain:

1) Pembangunan kelurahan
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2) Penguatan RT/ RW

Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3) Penguatan Posyandu
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perangkat Daerah yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal yang terkait dengan Posyandu.
4) Penguatan Guru Ngaji/ Madrasah Diniyah/ Sekolah Keagamaan Non Formal lainnya
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah.
5) Bantuan Sosial
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah; Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan verifikasi maupun rekomendasi terhadap pemberian Bantuan Sosial.
6) Asistensi Lanjut Usia
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan.
7) Optimalisasi Perlindungan Perempuan dan Anak
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
8) Pembinaan Koperasi
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
9) Jaminan Kesehatan Nasional
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial.

CITA 2. Produktif, Kreatif, Inovatif

Kapasitas sumber daya manusia merupakan subyek, aktor penting dalam kemajuan sebuah kota. Maka pengembangan potensi dan penguatan karakter diperlukan untuk mempersiapkan fondasi Indonesia Emas. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor penopang dan berjalan beriringan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpendidikan, memiliki kesehatan fisik maupun mental yang baik dan memiliki ciri yang dinamis dan kreatif. Dukungan terhadap pendidikan akan diwujudkan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi pelajar, memastikan setiap anak mendapatkan fasilitas belajar yang memadai tanpa hambatan ekonomi. Selain itu, kesempatan bagi masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi semakin terbuka lebar dengan penyediaan beasiswa untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta bagi atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Di sektor ekonomi, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan diperkuat melalui pendampingan, bantuan modal serta perluasan pasar. Upaya ini juga

didukung melalui penataan akses Reforma Agraria, penyuluhan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, peningkatan jejaring kemitraan, penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mendorong peningkatan daya saing produk lokal dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Budaya inovasi juga akan terus dikembangkan melalui kampanye dan program yang mendorong kreativitas serta produktivitas dalam berbagai bidang.

Penguatan peran pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui pembinaan kepemudaan, prestasi olah raga, pelatihan keterampilan kerja, dan pendampingan kewirausahaan, kesempatan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi permasalahan pembangunan. Perluasan kesempatan kerja ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui *link and match* dan peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 2 Produktif, Kreatif dan Inovatif antara lain:

1) BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan.
2) Beasiswa S1-S2-S3
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Keuangan.
3) Beasiswa Atlet Berprestasi
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemuda dan Olah Raga.
4) Bantuan Modal dan Peluasan Pasar UMKM
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian.
5) Pembinaan Pemuda
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemuda dan Olah Raga.
6) Pelatihan Ketrampilan Kerja/ Ketrampilan Wirausaha
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja.
7) Produktivitas Pertanian/ Perkebunan/Peternakan/ Perikanan
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian.
8) Peluasan Kesempatan Kerja
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal.

CITA 3. D'Cito (*Kediri City Tourism*)

Kota harus memiliki identitas yang kuat, baik dalam aspek sejarah, budaya, maupun tata ruang. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan daya tarik kota,

meningkatkan perekonomian, dan memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. Pembangunan kawasan wisata kota akan menjadi titik awal dalam menciptakan destinasi unggulan yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengelolaan benda-benda cagar budaya termasuk optimalisasi museum untuk menjadi daya tarik budaya. *Landmark* kota yang ikonik akan dibangun untuk memperkuat identitas daerah dan meningkatkan daya tarik visual kota. Pelestarian budaya akan diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi kreatif, memberikan ruang bagi para seniman, budayawan, dan pelaku industri kreatif untuk berkembang. Selain itu, penguatan karakter masyarakat, salah satunya melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis), memiliki sifat yang cekatan, ramah dan terbuka akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mendukung sektor pariwisata dan menciptakan lingkungan kota yang tertata rapi, nyaman, dan berdaya saing tinggi. Penguatan infrastruktur *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) dilaksanakan sebagai upaya menarik kunjungan melalui penyelenggaraan event budaya, ekonomi kreatif maupun kompetisi olah raga level nasional.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 3. D'Cito antara lain:

1) *Icon* Kota
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perencanaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup.
2) Kawasan Wisata Kota
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup.
3) Pelestarian Budaya/ Pengelolaan Benda Cagar Budaya
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan.
4) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata; Kecamatan
5) Penyelenggaraan Event Seni Budaya/ Olah Raga/ Ekonomi Kreatif
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemuda dan Olah Raga; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah.
6) Pengembangan Ekonomi Kreatif
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perencanaan; Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah.

CITA 4. Lingkungan Indah dan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan. Kota yang bersih, hijau, dan sehat tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi modal utama dalam menciptakan daya tarik investasi dan pariwisata. Komitmen untuk mewujudkan Kediri bebas sampah akan diperkuat melalui sistem pengelolaan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis partisipasi masyarakat. Ruang terbuka hijau akan diperluas untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri dan sejuk. Optimalisasi, pengembangan dan pemeliharaan taman-taman kota maupun taman kelurahan ditingkatkan untuk peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan ruang publik.

Penanaman pohon di lokasi yang rawan bencana, sumber mata air, maupun di lokasi-lokasi lainnya ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas air dan udara. Optimalisasi penurunan emisi karbon dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor dan berbagai pihak, agar Kota Kediri meningkatkan perannya dalam penurunan emisi nasional. Revitalisasi sumber mata air secara sistematis untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan. Selain itu, pengendalian limbah industri akan diperketat guna menjaga kualitas lingkungan. Operasionalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) juga dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan sanitasi aman dan menjaga kualitas tanah dan kualitas air untuk kesehatan masyarakat dan generasi berikutnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 4 Lingkungan Indah dan Berkelanjutan antara lain:

1) Penanaman Pohon
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup.
2) Kediri Bebas Sampah (KEBAS)
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Kecamatan.
3) Sanitasi Aman
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4) Ruang Terbuka Hijau
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Kecamatan.
5) Pengawasan Limbah Industri
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian.
6) Kebersihan Kota
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup.
7) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan.

8) Pelestarian Sumber Mata Air
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

CITA 5. *Smart Living*

Upaya untuk mewujudkan layanan publik yang Inklusif, dan Berbasis Teknologi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas layanan publik serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan terpadu berbasis digital akan diwujudkan melalui Lapor Mbak Wali 112, yang berfungsi sebagai saluran pengaduan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan baik terkait dengan pemerintahan, penanganan bencana dan kebakaran, pelayanan pendidikan, kesehatan dan lainnya secara cepat dan transparan. Program dokter keluarga akan memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan kesehatan primer yang berkualitas. Kualitas keluarga ditingkatkan melalui pembinaan keluarga dan kolaborasi lintas sektor hingga ke organisasi perempuan. Pembangunan kota yang inklusif juga akan diperkuat dengan menghadirkan berbagai fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, menciptakan ruang-ruang publik yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali untuk memastikan kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI). Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, berkualitas dan integratif antar moda (bus, kereta, pesawat) akan dilaksanakan terutama untuk mendukung kualitas pergerakan masyarakat, pergerakan ekonomi, pelayanan publik dan pelayanan wisatawan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 5 *Smart Living* antara lain:

1) Lapor Mbak Wali 112
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika; Perangkat Daerah yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal; Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Publik
2) Dokter Keluarga Layanan Kesehatan Keluarga
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan.
3) Kota Ramah Disabilitas
   Perangkat Daerah pelaksana: seluruh Perangkat Daerah
4) Literasi Digital
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perpustakaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika; Kecamatan.
5) Pelayanan Tanggap Bencana
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6) Pembangunan Kualitas Keluarga
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan.

7) Transportasi Publik
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan.
8) Penguatan Posyandu
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perangkat Daerah yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal yang terkait dengan Posyandu.

CITA 6. Pemerintahan Cepat Tepat

Menguatkan efektivitas Tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif. Pemerintahan yang profesional harus didukung oleh sistem pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Administrasi publik akan dipermudah dengan penyediaan layanan *all-in* di tingkat kelurahan dan optimalisasi Mall Pelayanan Publik memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen dalam satu lokasi dengan lebih efisien. Mobil layanan masyarakat akan dikerahkan di setiap kelurahan untuk menjangkau masyarakat maupun wilayah yang membutuhkan akses lebih cepat terhadap berbagai pelayanan dasar. Pelaksanaan pemerintahan yang responsif, bersih, dan berkinerja tinggi akan terus diperkuat melalui sistem pengawasan internal dan evaluasi yang ketat, memastikan setiap kebijakan berjalan dengan akuntabilitas tinggi.

Pelayanan pemerintahan yang profesional diupayakan melalui manajemen kepegawaian, peningkatan akuntabilitas pemerintahan, digitalisasi dan integrasi layanan pemerintahan. Peningkatan kemandirian fiskal daerah diupayakan melalui optimalisasi PAD serta penggunaan teknologi yang efektif dan efisien. Upaya memastikan kondisi yang kondusif melalui penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dengan ketegasan penegakan peraturan daerah, peningkatan kerukunan beragama, peningkatan wawasan kebangsaan dan penanganan maupun deteksi dini konflik di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 6 Pemerintahan Cepat Tepat antara lain:

1) Pelayanan Administrasi Warga *All In* Kelurahan
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Publik.
2) Mobil Pelayanan Masyarakat (MOPMAS)
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan.
3) Mall Pelayanan Publik
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal.
4) Peningkatan Trantibumlinmas
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5) Pengawasan Internal
   Perangkat Daerah pelaksana: Inspektorat
6) Manajemen Kepegawaian

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepegawaian; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan dan Pelatihan

7) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
   Perangkat Daerah pelaksana: seluruh Perangkat Daerah
8) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
   Perangkat Daerah pelaksana: seluruh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); .
9) Digitalisasi Pemerintahan
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika.
10) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Sekretariat DPRD.
11) Deteksi Dini Konflik Suku, Agama, dan Ras Antar Golongan (SAR)
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12) Penguatan Posyandu
   Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perangkat Daerah yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal yang terkait dengan Posyandu.

CITA 7. Infrastruktur Berkualitas

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk perekonomian maupun pelayanan publik, infrastruktur yang memadai menjadi faktor pendukung utama dalam menciptakan kota yang berdaya saing dan nyaman untuk dihuni. Pembangunan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas akan diprioritaskan untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Rencana pembangunan Kawasan Islamic Center selain menjadi sebuah *landmark* juga akan menjadi pusat pengembangan spiritual dan edukasi yang representatif mendukung identitas kota. Selain itu, penguatan infrastruktur ekonomi akan dilakukan melalui pembangunan sarana *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)* sebagai upaya menjadikan Kediri sebagai pusat kegiatan bisnis dan konferensi regional maupun nasional. Revitalisasi jalan dan sistem drainase kota juga akan dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan konektivitas serta mengurangi risiko banjir. Akses hunian layak, aman dan berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan luasan kawasan kumuh. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni dioptimalkan untuk mendukung penurunan kesenjangan dan kemiskinan. Untuk memastikan konektivitas masyarakat, selain kualitas jalan juga dilaksanakan peningkatan layanan perhubungan yang berkualitas dan mampu melayani tidak hanya masyarakat Kota Kediri namun juga wilayah regional yang terhubung dengan kabupaten sekitar. Pada sektor pertanian, peningkatan kualitas jalan usaha tani dan saluran irigasi dilaksanakan untuk mendukung distribusi dan produktivitas pertanian. Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Cita 7 antara lain:

1) Kawasan *Islamic Center*
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perencanaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2) Revitalisasi Jalan Kota/ Lingkungan
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3) Revitalisasi Saluran Drainase Kota/ Lingkungan
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan
5) Pengurangan Kawasan Kumuh
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6) Hunian Layak, Aman dan Berkelanjutan
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7) Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8) Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Layanan Perhubungan
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Perhubungan
9) Jalan Usaha Tani dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
   Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tujuh Program Unggulan Sapta Cita menjadi komitmen utama dalam menciptakan kota yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Program Unggulan Sapta Cita dilaksanakan secara kolaboratif dan lintas sektor serta mendukung tema/ prioritas nasional antara lain Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Program Sekolah Rakyat, Pengendalian Inflasi di Daerah, Dukungan Swasembada Pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, dan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Dukungan Sapta Cita Terhadap Tema/Prioritas Nasional

No.	Tema/ Prioritas Nasional	Sapta Cita	Keterangan
1.	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	• Cita 1 Program Merata • Cita 2 Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pelaksanaan kegiatan kolaboratif lintas

No.	Tema/ Prioritas Nasional	Sapta Cita	Keterangan
		• Cita 5 Smart Living • Cita 7 Infrastruktur Berkualitas	Perangkat Daerah melalui Program Prioritas terkait
2.	Program Sekolah Rakyat	• Cita 1 Program Merata • Cita 2 Produktif, Kreatif dan Inovatif • Cita 6 Pemerintahan Cepat Tepat	
3.	Pengendalian Inflasi di Daerah	• Cita 2 Produktif, Kreatif dan Inovatif • Cita 6 Pemerintahan Cepat Tepat	
4.	Dukungan Swasembada Pangan	• Cita 1 Program Merata • Cita 2 Produktif, Kreatif dan Inovatif • Cita 7 Infrastruktur Berkualitas	
5.	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	• Cita 1 Program Merata • Cita 2 Produktif, Kreatif dan Inovatif • Cita 6 Pemerintahan Cepat Tepat	
6.	Program 3 Juta Rumah	• Cita 1 Program Merata • Cita 6 Pemerintahan Cepat Tepat • Cita 7 Infrastruktur Berkualitas	
7.	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	• Cita 1 Program Merata • Cita 2 Produktif, Kreatif dan Inovatif	

Selanjutnya, penyelarasan Visi/ Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Program Unggulan Sapta Cita sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 Program Prioritas Pembangunan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan	Tujuan 1: 1. Terwujudnya Ekonomi yang Merata dan Infrastruktur Berkelanjutan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal	Meningkatnya Volume Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Milyar)	Program Pengembangan Ekspor	Produktif Kreatif-Inovatif
			Meningkatnya Penetrasi dan Permintaan Produk Lokal di Pasar Domestik	Persentase UMKM Produk Lokal Yang Dipasarkan Melalui Fasilitasi Kemitraan, Pameran dan Promosi Lainnya	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Produktif Kreatif-Inovatif
			Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktif Kreatif-Inovatif
			Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibina	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Produktif Kreatif-Inovatif
			Meningkatnya kapasitas tata kelola koperasi	% koperasi mengalami peningkatan dalam tatakelola	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata
			Meningkatnya kapasitas pengurus koperasi	%koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata
			Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata
			Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan tanaman perkebunan	produktivitas tanaman pangan (padi) (ton/ha)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktif Kreatif-Inovatif Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
				produktivitas tanaman pangan (jagung) (ton/ha)		
				produktivitas tanaman perkebunan (tebu) (ton/ha)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah peningkatan produksi komoditas peternakan (ton)		
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana pertanian	Persentase ketersediaan dan ketermanfaatan prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktif Kreatif-Inovatif Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya kapasitas SDM pertanian (penyuluh pertanian dan petani)	% SDM pertanian (penyuluh pertanian dan petani) yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Produktif Kreatif-Inovatif Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktif Kreatif-Inovatif Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Produktif Kreatif-Inovatif Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya produksi perikanan	Produksi Perikanan (ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktif Kreatif-Inovatif Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
		2. Meningkatnya daya saing kota di level nasional	Meningkatnya promosi investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Produktif Kreatif-Inovatif DCito (Kediri City Tourism)
			Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Produktif Kreatif-Inovatif DCito (Kediri City Tourism)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya iklim investasi	Skor Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Produktif Kreatif-Inovatif DCito (Kediri City Tourism)
			Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Infrastruktur Berkualitas Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas air siap minum perpipaan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Infrastruktur Berkualitas
			Meningkatnya kuantitas sistem pengolahan persampahan	Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Infrastruktur Berkualitas Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Infrastruktur Berkualitas Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya kenyamanan lingkungan perkotaan	Persentase kawasan yang tertata	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Infrastruktur Berkualitas DCito (Kediri City Tourism)
			Meningkatnya ketaatan bangunan gedung terhadap aturan	Persentase pengelolaan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Infrastruktur Berkualitas DCito (Kediri City Tourism) *Smart Living*
			Meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Infrastruktur Berkualitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						DCito (Kediri City Tourism)
			Meningkatnya kualitas jalan perkotaan	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Infrastruktur Berkualitas DCito (Kediri City Tourism)
			Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Infrastruktur Berkualitas DCito (Kediri City Tourism) *Smart Living*
			Terwujudnya ketertiban perparkiran di Tepi Jalan Umum	Persentase Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemerintahan Cepat Tepat DCito (Kediri City Tourism)
			Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman	Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Infrastruktur Berkualitas DCito (Kediri City Tourism) *Smart Living*
			Meningkatnya Ketaatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Melaksanakan Uji KIR	Persentase Ketaatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Melaksanakan Uji KIR	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Infrastruktur Berkualitas DCito (Kediri City Tourism) *Smart Living* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Keselamatan LLAJ	Persentase sarana prasarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Infrastruktur Berkualitas DCito (Kediri City Tourism) *Smart Living*

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya perumahan yang tertata	Persentase perumahan yang tertata	Program Pengembangan Perumahan	Infrastruktur Berkualitas Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya PSU Perumahan yang terkelola dengan baik	Persentase PSU Perumahan yang terkelola	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Infrastruktur Berkualitas Program Merata *Smart Living*
		3. Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya luasan kumuh di kawasan perkotaan	% pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Program Kawasan Permukiman	Infrastruktur Berkualitas Program Merata
			Meningkatnya pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sosial bagi penduduk miskin	Persentase penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Merata *Smart Living*
			Meningkatnya rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Merata *Smart Living*
			Meningkatnya produktivitas PSKS	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	Program Merata *Smart Living*
		4. Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya penyebaran informasi lapangan pekerjaan	Persentase Angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Produktif, Kreatif-Inovatif *Smart Living*
			Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)	Program Hubungan Industrial	Produktif, Kreatif-Inovatif *Smart Living*

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata
			Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata
Misi 2 : Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan	2. Terwujudnya masyarakat yang agamis, rukun dan toleran	5. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Laporan Masyarakat Terkait Potensi Konflik Radikalisme	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pemerintahan Cepat Tepat Produktif, Kreatif-Inovatif
			Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pemerintahan Cepat Tepat DCito (Kediri City Tourism)
			Meningkatkan Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Wilayah	Persentase laporan tim kewaspadaan dini terkait potensi konflik di masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pemerintahan Cepat Tepat DCito (Kediri City Tourism)
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pemerintahan Cepat Tepat DCito (Kediri City Tourism)
Misi 3 : Mewujudkan Produktivitas	3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif	6. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase capaian kinerja pelayanan puskesmas dan RS Pemerintah Daerah	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata *Smart Living*

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber Daya Manusia			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan	Persentase UKBM yang di ukur dan dibina tingkat perkembanganya	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living* Program Merata
			Meningkatnya kuantitas SDM kesehatan	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Produktif Kreatif-Inovatif Smart Living
		7. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	Indeks SPM Rapor Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata *Smart Living*
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikasi pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Produktif Kreatif-Inovatif
				Indeks Distribusi Guru PAUD		
				Indeks Distribusi Guru SD		
				Indeks Distribusi Guru SMP		
			Meningkatnya layanan perpustakaan	Rasio kunjungan perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living*
				Persentase Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Gemar Membaca		
			Meningkatnya pelaksanaan kegiatan olahraga	Persentase Peningkatan Kegiatan Olah raga yang diselenggarakan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Produktif Kreatif-Inovatif

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kapasitas kepemudaan	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata
		8. Meningkatnya kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan	Meningkatnya komitmen terhadap pengarusutamaan gender	Persentase Anggaran Responsif Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat
			Menurunnya angka perkawinan anak	Prevalensi Perkawinan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya layanan perlindungan anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living*
			Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Rasio KDRT per 100,000 keluarga	Program Perlindungan Perempuan	Produktif Kreatif-Inovatif Program Merata *Smart Living*
			Meningkatnya kualitas keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living*
			Meningkatnya pemenuhan hak anak	Cakupan Kelurahan Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living*
			Meningkatnya kualitas data sektoral terpilah gender dan anak	Cakupan OPD yang menyajikan data sektoral terpilah gender	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living*

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terwujudnya pengendalian penduduk sesuai target	*Total Fertility Rate* (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Produktif Kreatif-Inovatif *Smart Living*
				Age Specific Fertiity Rate (ASFR)		
Misi 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas	4.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas	9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*
			Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*
			Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase layanan dokumen kependudukan yg berkualitas	Program Pendaftaran Penduduk	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	persentase kualitas data kependudukan yang valid	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*
			Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Program Pengelolaan Arsip	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*
			Meningkatnya Layanan Masyarakat di Kecamatan	Persentase layanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemerintahan Cepat Tepat Program Merata Produktif Kreatif Inovatif Lingkungan Indah dan Berkelanjutan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemerintahan Cepat Tepat Program Merata Produktif Kreatif Inovatif Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pemerintahan Cepat Tepat Program Merata DCito (*Kediri City Tourism*)
			Ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	% ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pemerintahan Cepat Tepat Program Merata Produktif, Kreatif, Inivatif
			Meningkatnya kualitas publikasi kebijakan daerah	% Kebijakan daerah yang dipublikasikan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*
			Meningkatnya pengelolaan aplikasi e-Gov yang Terintegrasi	% aplikasi e-Gov yang terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*
			Meningkatnya Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang Memenuhi Prinsip SDI	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Statistik Sektoral sesuai Prinsip SDI	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya keamanan informasi	%informasi yang disampaikanmelalui jaringan komunikasi yang aman	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pemerintahan Cepat Tepat

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Upaya Penanganan dan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan yang berlaku	Capaian Ruang Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang berkategori baik % penegakan perda	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemerintahan Cepat Tepat DCito (*Kediri City Tourism*)
			Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase JPTP, JA, JF dan pelaksana yang mengikuti pengembangan kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemerintahan Cepat Tepat
			Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Raperda	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Merata Produktif, Kreatif-Inovatif Dcito *(Kediri City Tourism)* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan *Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat Infrastruktur Berkualitas
			Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Merata Produktif, Kreatif-Inovatif DCito *(Kediri City Tourism)* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Smart Living Pemerintahan Cepat Tepat Infrastruktur Berkualitas
			Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan	Persentase kelurahan yang menerapkan administrasi terstandar	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Merata Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya kualitas layanan hukum	Persentase layanan Hukum yang terfasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Cepat Tepat Program Merata
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Cepat Tepat Program Merata
			Meningkatnya Rekomendasi Hasil PEKPPP Yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil PEKPPP Yang Ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah	IPP Bagian Prokompim	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan dan Kesekretariatan Daerah	IPP Bagian Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemerintahan Cepat Tepat
		10. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan	Persentase target kinerja RKPD dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan	Program Merata Produktif, Kreatif-Inovatif

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemerintahan Daerah			Evaluasi Pembangunan Daerah	Dcito *(Kediri City Tourism)* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan *Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat Infrastruktur Berkualitas
			Meningkatkan ketercapaian program pembangunan daerah	Persentase capaian target program	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Merata Produktif, Kreatif-Inovatif Dcito *(Kediri City Tourism)* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan *Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat Infrastruktur Berkualitas
			Meningkatkan kematangan inovasi daerah	Persentase inovasi yang ditetapkan sebagai inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Merata Produktif, Kreatif-Inovatif Dcito *(Kediri City Tourism)* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan *Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat Infrastruktur Berkualitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja PD	Rata-rata Nilai AKIP Komponen Pelaporan PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pemerintahan Cepat Tepat
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Merata Produktif, Kreatif-Inovatif Dcito *(Kediri City Tourism)* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan *Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat Infrastruktur Berkualitas
		11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas penganggaran. penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Merata Produktif, Kreatif-Inovatif DCito *(Kediri City Tourism)* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan *Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat Infrastruktur Berkualitas
				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)		
				Rasio penyerapan anggaran (%)		
				Rasio belanja langsung dalam APBD di luar *transfer expenditure* (%)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Objek/subjek pajak baru yang terdata menjadi OP/WP	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemerintahan Cepat Tepat
				Persentase validitas Objek/subjek pajak terupdate		
				Persentase jumlah pajak/retribusi tertagih		
				Persentase Kepatuhan WP		
		12. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	*Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	*Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	*Smart Living* Pemerintahan Cepat Tepat
			Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemerintahan Cepat Tepat *Smart Living*

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 5: Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih Bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Tujuan 5: Terwujudnya Kota Wisata yang Tertata, Nyaman dan Berkelanjutan	13. Meningkatnya daya tarik wisata kota	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Lingkungan Indah dan Berkelanjutan Infrastruktur Berkualitas DCito (Kediri City Tourism)
			Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang terpelihara dengan baik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DCito (*Kediri City Tourism*)
			Meningkatnya kunjungan dalam event pariwisata	Persentase peningkatan event pariwisata, budaya dan olahraga	Program Pemasaran Pariwisata	DCito (*Kediri City Tourism*)
			Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Produktif, Kreatif-Inovatif DCito (*Kediri City Tourism*)
			Meningkatnya cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Program Pengembangan Kebudayaan	DCito (*Kediri City Tourism*)
		14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Peningkatan Mutu Air dan Udara Ambien	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup berkelanjutan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Merata Produktif, Kreatif-Inovatif DCito *(Kediri City Tourism)* Lingkungan Indah dan Berkelanjutan *Smart Living*

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Unggulan Sapta Cita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pemerintahan Cepat Tepat Infrastruktur Berkualitas
			Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Indah dan Berkelanjutan Program Merata
			Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimonitoring	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
			Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan Indah dan Berkelanjutan DCito *(Kediri City Tourism)*
			Meningkatnya pelayanan persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Indah dan Berkelanjutan DCito *(Kediri City Tourism)*

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif Tahun 2026 – 2030

Program Perangkat Daerah merupakan seluruh program dari seluruh Perangkat Daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini menjadi pijakan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan pemerintahan yang diampu. Penyusunan Program beserta dengan *outcome,* indikator, target indikator dan pagu indikatifnya memperhatikan *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan serta kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.

Tabel program dicantumkan hingga tahun 2030 sebagai upaya menjaga kesinambungan Pembangunan yaitu sebagai pijakan dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode tahun 2030-2034. Uraian program yang direncanakan serta indikator kinerja dan pagu pendanaan indikatif tahun 2026-2030 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	197,913,288,987.00	100 %	236,990,305,101.15	100%	236,990,305,101.15	100%	236,990,305,101.15	100%	236,990,305,101.15	100%	236,990,305,101.15	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	78.50		80.00		80.10		80.20		80.30		80.40		
					Indeks Profesionalisme ASN	84.90		85.07		85.15		85.24		85.33		85.41		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	Indeks SPM Raport Pendidikan		113,794,434,280.00		127,443,800,560.85		125,264,420,560.85		125,764,420,560.85		125,764,420,560.85		125,264,420,560.85	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikasi pendidik	39.6	1,415,012,185.00	39.64	429,725,000.00	39,66	429,725,000.00	39,68	429,725,000.00	39.70	429,725,000.00	39.72	429,725,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan
					Indeks Distribusi Guru PAUD	0.28		0.30		0,31		0,32		0.33		0.34		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
					Indeks Distribusi Guru SD	0.38		0.42		0,43		0,44		0.45		0.46		
					Indeks Distribusi Guru SMP	0.28		0.79		0,80		0,81		0.82		0.83		
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	341,288,573,868.00	100 %	329,946,500,902.00	100%	329,946,500,902.00	100%	329,946,500,902.00	100%	329,946,500,902.00	100%	329,946,500,902.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	84,57%		86%		87%		88%		89%		90%		
					Indeks Profesionalisme ASN	87,37		87,54		87,63		87,72		87,81		87,90		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase capaian kinerja pelayanan puskesmas dan RS Pemerintah Daerah	97.40%	104,510,402,788.00	100%	78,972,696,027.00	100%	78,827,696,027.00	100%	78,827,696,027.00	100%	78,827,696,027.00	100%	78,527,696,027.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kuantitas SDM kesehatan	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	7.8:1000	5,936,587,777.00	7.82:1000	5,611,171,818.00	7.83:1000	5,611,171,818.00	7.84:1000	5,611,171,818.00	7.85:1000	5,611,171,818.00	7.86:1000	5,611,171,818.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat	Persentase pengusaha PIRT/UMOT/TPP/ DAM yang	100	736,923,480.00	100 %	686,038,050.00	100%	686,038,050.00	100%	686,038,050.00	100%	686,038,050.00	100%	686,038,050.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				kesehatan, dan makanan minuman	mendapat rekomendasi													Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan	Persentase UKBM yang di ukur dan dibina tingkat perkembanganya	100%	1,106,993,266.00	100%	10,283,190,995.00	100%	10,283,190,995.00	100%	10,283,190,995.00	100%	10,283,190,995.00	100%	10,283,190,995.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	17,019,037,276.00	100%	16,703,639,570.00	100%	16,703,639,570.00	100%	16,703,639,570.00	100%	16,703,639,570.00	100%	16,703,639,570.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	70.76%		71.24%		71.48%		71.72%		71.96%		72.20%		
					Indeks Profesionalisme ASN	84.9		85.07		85.15		85.24		85.33		85.41		
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	14,373,284,777.00	55,50%	5,581,608,000.00	56.00%	5,581,608,000.00	56.50%	5,581,608,000.00	57.00%	5,581,608,000.00	57.50%	5,581,608,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Meningkatnya kualitas air siap	Akses Rumah Tangga Perkotaan	22.34%	1,048,193,500.00	22.91%	300,623,000.00	23.29%	300,623,000.00	23.38%	300,623,000.00	23.46%	300,623,000.00	23.54%	300,623,000.00	Perangkat Daerah yang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	minum perpipaan	terhadap Air Siap Minum Perpipaan													menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya kuantitas sistem pengolahan persampahan	Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan	17.39%	149,983,000.00	28.95%	14,011,400,768.00	31.58%	23,541,400,768.00	34.21%	13,541,400,768.00	36.84%	13,541,400,768.00	39.47%	13,541,400,768.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12.33%	14,407,287,000.00	18.32%	2,267,280,000.00	23.11%	2,267,280,000.00	29.07%	2,267,280,000.00	41.02%	2,267,280,000.00	52.9%	2,267,280,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	90.83%	11,728,214,429.00	91.33%	16,083,450,000.00	91.53%	16,083,450,000.00	91.73%	16,083,450,000.00	91.93%	16,083,450,000.00	92.14%	16,083,450,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya ketaatan bangunan gedung terhadap aturan	Persentase pengelolaan bangunan gedung	1.41%	21,983,128,487.00	5.42%	42,915,374,625.00	7.43%	27,542,035,000.00	9.44%	20,542,035,000.00	11.44%	29,364,111,998.40	13.45%	21,406,048,705.62	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya kenyamanan lingkungan perkotaan	Persentase kawasan yang tertata	-	0.00	42.86%	20,360,000,000.00	50.00%	44,428,076,295.60	57.14%	15,000,000,000.00	64.29%	5,000,000,000.00	71.43%	5,000,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas jalan perkotaan	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	86.24%	14,134,693,727.00	87.58%	55,453,600,148.00	88.09%	57,418,600,148.00	88.60%	78,418,600,148.00	89.10%	55,918,600,148.00	89.61%	54,918,600,148.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kapasitas tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	148,203,800.00	49.13%	487,832,000.00	57.83%	487,832,000.00	66.52%	487,832,000.00	75.22%	487,832,000.00	83.91%	487,832,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	75.71%	616,405,160.00	78.57%	1,699,500,000.00	80.00%	1,699,500,000.00	81.43%	1,699,500,000.00	82.86%	1,699,500,000.00	84.29%	1,699,500,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	4	1	PROGRAM	Meningkatnya	Persentase	100 %	8,056,609,758.00	100 %	12,115,981,400.00	100%	12,115,981,400.00	100%	12,115,981,400.00	100%	12,115,981,400.00	100%	12,115,981,400.00	PerangDaerah

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	layanan penunjang Perangkat Daerah	Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas													yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95 %		95,02 %		95.10%		95.15%		95.17%		95.20%		
					Indeks Profesionalisme ASN	86,44		86,46		86,48		86,50		86,52		86,54		
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya perumahan yang tertata	Persentase perumahan yang tertata	86.7	338,392,725.00	88.7	301,019,500.00	89.70%	301,019,500.00	90.70%	301,019,500.00	91.70%	301,019,500.00	92.70%	301,019,500.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Menurunnya luasan kumuh di kawasan perkotaan	% pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	7.68%	3,948,261,554.00	20.76%	4,952,417,600.00	27.30%	4,952,417,600.00	33.84%	4,952,417,600.00	40.38%	4,952,417,600.00	46.92%	4,952,417,600.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya PSU Perumahan yang terkelola dengan baik	Presentase PSU Perumahan yang terkelola	62.93%	4,402,262,159.00	64.93%	866,387,900.00	65.93%	866,387,900.00	66.93%	866,387,900.00	67.93%	866,387,900.00	68.93%	866,387,900.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	9,416,183,345.00	100 %	10,804,848,158.00	100%	10,804,848,158.00	100%	10,804,848,158.00	100%	10,804,848,158.00	100%	10,804,848,158.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	85.53 %		87 %		88 %		89 %		90 %		91 %		
					Indeks Profesionalisme ASN	78.83		79		79.1		79.2		79.3		79.4		
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Upaya Penanganan dan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan yang berlaku	Capaian Ruang Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang berkategori baik	100 %	7,249,949,920.00	100 %	5,009,493,338.00	100 %	5,009,493,338.00	100%	5,009,493,338.00	100%	5,009,493,338.00	100%	5,009,493,338.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					% penegakan perda	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran dan non	Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan	74.03 %	3,024,970,000.00	75 %	474,004,290.00	75.5 %	474,004,290.00	76%	474,004,290.00	76.5 %	474,004,290.00	77 %	474,004,290.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	kebakaran	Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Wilayah Managemen Kebakaran													Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	1,834,054,609.00	100 %	2,614,520,170.00	100%	2,614,520,170.00	100%	2,614,520,170.00	100%	2,614,520,170.00	100%	2,614,520,170.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	78.75		79.25%		79.50%		79.75%		80.00%		80.25%		
					Indeks Profesionalisme ASN	86.17		87.00		87.50		88.00		88.50		89.00		
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	72.60 %	1,056,180,195.00	80.14%	50,000,000.00	80.63%	50,000,000.00	81.12%	50,000,000.00	81.61%	50,000,000.00	82.1%	50,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnyalayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	75.89%		88%	316,314,000.00	92.31%	316,314,000.00	92.86%	316,314,000.00	96.55 %	316,314,000.00	100 %	316,314,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		100%	344,947,500.00	100%	344,947,500.00	100%	344,947,500.00	100%	344,947,500.00	100%	344,947,500.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	6,705,405,733.00	100%	7,174,000,102.00	100%	7,174,000,102.00	100%	7,174,000,102.00	100%	7,174,000,102.00	100%	7,174,000,102.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	79.4%		81%		82%		83%		84%		85%		
					Indeks Profesionalisme ASN	88.94		89.2		89.3		89.4		89.5		89.6		
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya produktivitas PSKS	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	86.00%	611,986,627.00	86.50%	806,090,600.00	87%	806,090,600.00	87.25%	806,090,600.00	87.38%	806,090,600.00	87.50%	806,090,600.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	100%	1,396,547,118.00	100%	1,751,958,400.00	100%	1,751,958,400.00	100%	1,751,958,400.00	100%	1,751,958,400.00	100%	1,751,958,400.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya pelayanan pemenuhan	Persentase penduduk miskin yang memperoleh	83.00%	14,431,552,601.00	81%	18,482,020,000.00	82%	18,482,020,000.00	83%	18,482,020,000.00	84%	18,482,020,000.00	85.00%	18,482,020,000.00	Perangkat Daerah yang menangani

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				kebutuhan dasar sosial bagi penduduk miskin	bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar,													Bidang Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	100%	527,533,860.00	100%	541,588,400.00	100%	541,588,400.00	100%	541,588,400.00	100%	541,588,400.00	100%	541,588,400.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%TMP yang dikelola	100%	31,965,118.00	100%	94,673,000.00	100%	94,673,000.00	100%	94,673,000.00	100%	94,673,000.00	100%	94,673,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja	4%	23,707,718.00	5%	6,148,350.00	5.50%	6,148,350.00	6%	6,148,350.00	6.50%	6,148,350.00	7%	6,148,350.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan	40%	9,324,663,406.00	40%	5,779,217,640.00	40%	5,779,217,640.00	40%	5,779,217,640.00	40%	5,779,217,640.00	40%	5,779,217,640.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penyebaran informasi lapangan pekerjaan	Persentase Angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	90%	192,559,664.00	90%	331,120,015.00	90%	331,120,015.00	90%	331,120,015.00	90%	331,120,015.00	90%	331,120,015.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)	25,16%	1,525,227,246.00	26%	2,388,502,646.00	26%	2,388,502,646.00	26%	2,388,502,646.00	26%	2,388,502,646.00	26%	2,388,502,646.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	6,047,326,885.00	100 %	7,159,670,740.00	100%	7,159,670,740.00	100%	7,159,670,740.00	100%	7,159,670,740.00	100%	7,159,670,740.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	78,72		78,85%		78,90%		78,95%		79%		79,50%		
					Indeks Profesionalisme ASN	83.59*		83.99		84.4		84.9		85.4		85.9		
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Meningkatnya komitmen terhadap pengarusutamaan	Persentase Anggaran Responsif Gender	45.88	1,569,339,070.00	65	1,121,431,640.00	65.2	1,121,431,640.00	65.4	1,121,431,640.00	65.5	1,121,431,640.00	65.7	1,121,431,640.00	Perangkat Daerah yang menangani

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	gender														Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Rasio KDRT per 100,000 keluarga	7.90 (6/75,985 RT)	356,667,603.00	6.14	338,835,075.00	5.26	338,835,075.00	4.39	338,835,075.00	3.51	338,835,075.00	2,63	338,835,075.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Menurunnya angka perkawinan anak	Prevalensi Perkawinan Anak	0.0391 (35/89.494)	23,815,250.00	0.0358	253,547,781.00	0.0335	253,547,781.00	0.0312	253,547,781.00	0.0289	253,547,781.00	0.0265	253,547,781.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya kualitas data sektoral terpilah gender dan anak	Cakupan OPD yang menyajikan data sektoral terpilah gender	21.43% (6/28 OPD)	27,184,800.00	71.43% (20 OPD)	50,801,600.00	78.57% (22 OPD)	50,801,600.00	85.71% (24 OPD)	50,801,600.00	92.86% (26 OPD)	50,801,600.00	100% (28 OPD)	50,801,600.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Cakupan Kelurahan Layak Anak	10.86 (5/46 Kel)	83,833,000.00	15.22 (7/46 Kel)	253,946,175.00	21.74% (10/46 Kel)	253,946,175.00	28.26% (13/46 Kel)	253,946,175.00	34.78% (16/46 Kel)	253,946,175.00	41.30% (19/46 Kel)	253,946,175.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya layanan perlindungan anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif	100% (19/19 pengaduan)	628,278,500.00	100%	278,038,500.00	100%	278,038,500.00	100%	278,038,500.00	100%	278,038,500.00	100%	278,038,500.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	11,765,769,408.00	100 %	12,374,638,679.00	100%	12,374,638,679.00	100%	12,374,638,679.00	100%	12,374,638,679.00	100%	12,374,638,679.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pangan
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	83.38		85		86%		87.00%		88.00%		89.00%		
					Indeks Profesionalisme ASN	89.85		89.86		89.87		89.88		89.89		89.9		
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	% ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	33%	46,800,000.00	33%	50,000,000.00	33.00%	50,000,000.00	33%	50,000,000.00	33.00%	50,000,000.00	33%	50,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pangan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok	Persentase ketersediaan pangan pokok	118 %	102,321,652.00	120 %	520,000,000.00	121 %	520,000,000.00	122	520,000,000.00	123	520,000,000.00	124	520,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															Bidang Pangan
				Meningkatnya angka kecukupan energi konsumsi	Persentase konsumsi energi	93%		93.48%	57,824,090.00	93.71%	57,824,090.00	93.95%	57,824,090.00	94.19%	57,824,090.00	94.43%	57,824,090.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya kerawanan pangan	%Daerah rentan rawan pangan	21.7 %	25,893,610.00	19.5 %	39,621,500.00	18.50%	39,621,500.00	17.4 %	39,621,500.00	16.3 %	39,621,500.00	15.2 %	39,621,500.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pangan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terlaksananya pengawasan dan monitoring keamanan pangan	%Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	19%	30,279,325.00	20%	40,332,575.00	21%	40,332,575.00	21%	40,332,575.00	22%	40,332,575.00	22%	40,332,575.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya Pengelolaan Tanah kosong	Persentase peningkatan pengelolaan tanah kosong	0%	0.00	8.70%	42,803,800.00	13.04%	42,803,800.00	17.39%	42,803,800.00	21.74%	42,803,800.00	26.09%	42,803,800.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanahan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	20,529,211,591.00	100 %	34,132,978,348.00	100%	34,132,978,348.00	100%	34,132,978,348.00	100%	34,132,978,348.00	100%	34,132,978,348.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan	90 %		95 %		96%		96.50%		96.70%		96.80%		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
					Berkualitas													
					Indeks Profesionalisme ASN	80.26		80.76		90		90.3		90.6		90.9		
2	1 1	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup berkelanjutan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	72 %	309,036,754.00	90 %	440,106,100.00	92%	440,106,100.00	93%	440,106,100.00	94%	440,106,100.00	95%	440,106,100.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2	1 1	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas air dan udara	Peningkatan Mutu Air dan Udara Ambien	57%	968,838,836.00	57.20%	729,954,250.00	57.40%	729,954,250.00	57.60%	729,954,250.00	57.80%	729,954,250.00	60.00%	729,954,250.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2	1 1	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	9.77%	9,440,055,998.00	9.83%	2,949,636,532.00	9.86%	2,949,636,532.00	9.89%	2,949,636,532.00	9.91%	2,949,636,532.00	9.94%	2,949,636,532.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2	1 1	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Kegiatan/Usaha yang Memiliki rincian teknis (rintek) Limbah B3	Persentase sampah B3 yang ditangani	86%	71,864,918.00	90 %	67,230,515.00	91%	67,230,515.00	92%	67,230,515.00	93%	67,230,515.00	94%	67,230,515.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2	1 1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimonitoring	13.00%	150,733,704.00	16.00%	114,741,250.00	17.00%	114,741,250.00	18.00%	114,741,250.00	19.00%	114,741,250.00	20.00%	114,741,250.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			(PPLH)															
2	1 1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	13.31 %	138,054,540.00	21.37 %	86,930,000.00	22%	86,930,000.00	23%	86,930,000.00	24%	86,930,000.00	25%	86,930,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2	1 1	1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pelayanan persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	99.05%	18,012,601,932.00	99.06%	8,811,139,249.00	99.07%	8,811,139,249.00	99.08%	13,811,139,249.00	99.09%	8,811,139,249.00	99.10%	8,811,139,249.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2	1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	1 2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	7,844,216,492.00	100%	6,953,199,856.00	100%	6,953,199,856.00	100%	6,953,199,856.00	100%	6,953,199,856.00	100%	6,963,199,856.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	79.62%		80.12%		80.37%		80.62%		80.87%		81.12%		
					Indeks Profesionalisme ASN	88.16		88.66		88.91		89.16		89.41		89.66		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2	1 2	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase layanan dokumen kependudukan yg berkualitas	96%	763,753,614.00	96.8%	370,490,691.00	97%	370,490,691.00	97.5%	370,490,691.00	98%	370,490,691.00	99%	370,490,691.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	persentase layanan dokumen pencatatan sipil yg berkualitas	96%	163,510,962.00	96.5%	85,721,800.00	97%	85,721,800.00	97.5%	85,721,800.00	98%	85,721,800.00	99%	85,721,800.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase kualitas data kependudukan yang valid	95%	174,676,403.00	96.5%	82,236,800.00	96.70%	82,236,800.00	97%	82,236,800.00	97.20%	82,236,800.00	97.5%	82,236,800.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95%	40,838,018.00	95.5 %	10,000,000.00	95.60%	10,000,000.00	95.80%	10,000,000.00	96%	10,000,000.00	96.30%	10,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1		URUSAN															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	3		PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	1 3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan	Persentase kelurahan yang menerapkan administrasi terstandar	75%	60,235,886.00	79 %	206,579,200.00	81%	206,579,200.00	83%	206,579,200.00	85%	206,579,200.00	87%	206,579,200.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1 3	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	76%	6,506,000.00	81 %	154,259,900.00	84%	154,259,900.00	87%	154,259,900.00	90%	154,259,900.00	93%	154,259,900.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	1 4	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terwujudnya pengendalian penduduk sesuai target	Angka Kelahiran Total/Total Fertiflity Rate (TFR)	1.96	1,862,825,600.00	2	2,228,536,000.00	2	2,228,536,000.00	2	2,228,536,000.00	2	2,228,536,000.00	2	2,228,536,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					ASFR	9.2		8.97		8.85		8.72		8.60		8.50		
2	1 4	3	PROGRAM PEMBINAAN	Tersebarluasnya metode kontrasepsi	Angka Prevalensi Penggunaan	57.60	2,292,182,967.00	58.10	1,255,659,000.00	58.40	1,255,659,000.00	58.70	1,255,659,000.00	58.90	1,255,659,000.00	59.20	1,255,659,000.00	Perangkat Daerah yang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			KELUARGA BERENCANA (KB)	modern untuk program keluarga berencana	Metode Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)													menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	13%		12.26%		11.73%		11.24%		10.76%		10.30%		
2	1 4	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kualitas keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23.00	2,447,850,600.00	23.00	2,058,909,953.00	23.00	2,058,909,953.00	23.00	2,058,909,953.00	23.00	2,058,909,953.00	23.00	2,058,909,953.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Indeks Lansia Berdaya	57.00		59.47		61.83		64.29		66.84		69.5		
					Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	91.30		92.88		93.77		94.67		95.58		96.50		
2	1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	1 5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	17,714,754,621.00	100 %	12,425,321,500.00	100 %	12,425,321,500.00	100 %	12,425,321,500.00	100 %	12,425,321,500.00	100 %	12,425,321,500.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	79.94 %		85 %		86%		87%		88%		89%		
					Indeks Profesionalisme	81.13*		81.63		82.13		82.63		83.13		83.63		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
					ASN													
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	92.94%	18,173,529,844.00	93.85%	3,062,090,969.00	96.68%	3,062,090,969.00	97.18%	3,062,090,969.00	98.30%	3,062,090,969.00	99.00%	3,062,090,969.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan
				Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman	Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	88.16%		93.42%	1,932,445,798.00	94.74%	1,932,445,798.00	97.37%	1,932,445,798.00	98.68%	1,932,445,798.00	100.00 %	1,932,445,798.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan
				Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Keselamatan LLAJ	Persentase sarana prasarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	84.84%		87.88%	7,872,024,455.00	89.39%	7,872,024,455.00	93.94%	7,872,024,455.00	95.45%	7,872,024,455.00	97.27%	7,872,024,455.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan
				Meningkatnya Ketaatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Melaksanakan Uji KIR	Persentase Ketaatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Melaksanakan Uji KIR	85.29%		89.10%	621,183,608.00	90.66%	621,183,608.00	92.22%	621,183,608.00	93	621,183,608.00	93.77%	621,183,608.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan
				Terwujudnya ketertiban perparkiran di Tepi Jalan Umum	Persentase Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	75.00%		83.33%	4,574,402,000.00	87.50%	4,574,402,000.00	91.67%	4,574,402,000.00	95.83%	4,574,402,000.00	100.00 %	4,574,402,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan
2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	1 6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	6,682,346,419.00	100 %	7,888,839,794.00	100 %	7,888,839,794.00	100 %	7,888,839,794.00	100 %	7,888,839,794.00	100 %	7,888,839,794.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		dan Informatika
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	80.53%		85%		86%		87%		88%		89%		
					Indeks Profesionalisme ASN	85		87		89		91		92		93		
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya kualitas publikasi kebijakan daerah	% Kebijakan daerah yang dipublikasikan	100%	3,880,070,012.00	100%	3,057,265,998.00	100%	3,057,265,998.00	100%	3,057,265,998.00	100%	3,057,265,998.00	100%	3,057,265,998.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pengelolaan aplikasi e-Gov yang Terintegrasi	% aplikasi e-Gov yang terintegrasi	64 %	3,990,354,835.00	65 %	5,551,117,262.00	66%	5,551,117,262.00	67%	5,551,117,262.00	68%	5,551,117,262.00	69%	5,551,117,262.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	7,068,609,107.00	100%	6,799,327,224.00	100%	6,799,327,224.00	100%	6,799,327,224.00	100%	6,799,327,224.00	100%	6,799,327,224.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Persentase Pemenuhan Kriteria	81,03 %		81,06 %		81,07 %		81,08 %		81,09%		81,10 %		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
					Pengelolaan Keuangan Berkualitas													
					Indeks Profesionalisme ASN	84,9		87.8		88		88.2		88.5		88.7		
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang mematuhi aturan berlaku	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	62.70%	166,709,858.00	62.72%	90,898,265.00	62.75%	90,898,265.00	62.80%	90,898,265.00	62.82%	90,898,265.00	62.85%	90,898,265.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	41.17%	160,673,462.00	41.74%	53,457,665.00	41.93%	53,457,665.00	42.12%	53,457,665.00	42.31%	53,457,665.00	42.50%	53,457,665.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kapasitas pengurus koperasi	% Koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian	20%	273,594,437.00	20.00%	196,543,005.00	20.00%	196,543,005.00	20.00%	196,543,005.00	20.00%	196,543,005.00	20.00%	196,543,005.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya kapasitas tata kelola koperasi	% koperasi mengalami peningkatan dalam tatakelola	55%	1,210,291,313.00	55%	1,595,000,000.00	55.10%	1,595,000,000.00	55.10%	1,595,000,000.00	55.15%	1,595,000,000.00	55.15%	1,595,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan dan	53.60%	25,097,008,675.00	57.02%	24,016,112,900.00	58.73%	4,294,262,900.00	60.62%	5,294,262,900.00	62.29%	7,094,262,900.00	63.94%	4,294,262,900.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			USAHA MIKRO (UMKM)		pendampingan													Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	1 8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	7,106,885,836.00	100 %	7,143,806,860.00	100	7,143,806,860.00	100	7,143,806,860.00	100	7,143,806,860.00	100	7,143,806,860.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	85.52%		87%		88%		89%		90%		91%		
					Indeks Profesionalisme ASN	91		91		91		91		91		91		
2	1 8	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya iklim investasi	Skor Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB)	58.7	46,807,300.00	63	28,401,692.00	65	28,401,692.00	75	28,401,692.00	85	28,401,692.00	90	28,401,692.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal
2	1 8	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya promosi investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	3	171,021,970.00	1	175,748,038.00	2	175,748,038.00	2	175,748,038.00	3	175,748,038.00	3	175,748,038.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal
2	1 8	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	3.82	417,568,131.00	3.84	204,305,537.00	3.85	204,305,537.00	3.86	204,305,537.00	3.87	204,305,537.00	3.88	204,305,537.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		Penanaman Modal
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kepatuhan investor terhadap ketentuan penanaman modal	% perusahaan yang patuh	100%	667,248,881.00	100%	80,559,425.00	100%	80,559,425.00	100%	80,559,425.00	100%	80,559,425.00	100%	80,559,425.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	96.65%	216,868,858.00	100%	119,773,800.00	100%	119,773,800.00	100%	119,773,800.00	100%	119,773,800.00	100%	119,773,800.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kapasitas kepemudaan	Persentase Pembinaan Kepemudaan	8%	1,631,990,975.00	10%	1,602,482,700.00	11%	1,602,482,700.00	12%	1,602,482,700.00	13%	1,602,482,700.00	14%	1,602,482,700.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan olahraga	Persentase Peningkatan Kegiatan Olah raga yang diselenggarakan	33.33%	11,418,312,509.00	33.35%	15,001,915,000.00	33.36%	5,524,000,000.00	33.37%	7,424,000,000.00	33.38%	9,524,000,000.00	33.39%	5,524,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang Memenuhi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Statistik	70%	129,904,387.00	80%	184,414,285.00	85%	184,414,285.00	90%	184,414,285.00	95%	184,414,285.00	100%	184,414,285.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Prinsip SDI	Sektoral sesuai Prinsip SDI													Statistik
2	2 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	2 1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan informasi	%informasi yang disampaikan melalui jaringan komunikasi yang aman	80%	869,881,500.00	85%	1,954,729,330.00	87%	1,954,729,330.00	89%	1,954,729,330.00	91%	1,954,729,330.00	93%	1,954,729,330.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Persandian
2	2 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	2 2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	7,930,825,701.00	100 %	9,384,168,615.00	100 %	9,384,168,615.00	100 %	9,384,168,615.00	100 %	9,384,168,615.00	100 %	9,384,168,615.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	82,63%		82,93%		83,08%		83,23%		83,38%		83,53%		
					Indeks Profesionalisme ASN	85,05		85,2		85,35		85,5		85,65		85,8		
2	2 2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan	73%	4,930,525,204.00	75%	4,875,000,000.00	77%	4,875,000,000.00	78%	4,875,000,000.00	79%	4,875,000,000.00	81%	4,875,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan
2	2 2	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya kunjungan museum	Persentase Kenaikan Kunjungan Museum	-37%	713,786,743.00	37.01%	680,188,000.00	37.02%	680,188,000.00	37.03%	680,188,000.00	37.04%	680,188,000.00	37.05%	680,188,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		Kebudayaan
2	2 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya layanan perpustakaan	Rasio kunjungan perpustakaan	4.16%	363,770,391.00	4.24%	909,878,812.00	4.28%	909,878,812.00	4.32%	909,878,812.00	4.36%	909,878,812.00	4.40%	909,878,812.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perpustakaan
					Persentase Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Gemar Membaca	0		0.50%		1%		1.50%		2%		2.50%		
2	2 3	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Pelestarian Koleksi muatan lokal, koleksi langka dan/atau naskah kuno	Jumlah Koleksi Nasional, Khas Daerah dan Naskah Kuno yang Terdata	5	0.00	15	4,375,000.00	20	4,375,000.00	25	4,375,000.00	30	4,375,000.00	35	4,375,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perpustakaan
2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	2 4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	4,931,056,517.00	100 %	5,482,318,806.00	100 %	5,482,318,806.00	100 %	5,482,318,806.00	100 %	5,482,318,806.00	100 %	5,482,318,806.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kearsipan
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	80,06%		85%		86%		87%		88%		89%		
					Indeks Profesionalisme	81.52		83		84		85		86		87		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
					ASN													
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	73%	71,966,083.00	79%	83,186,880.00	82%	83,186,880.00	85%	83,186,880.00	88%	83,186,880.00	92%	83,186,880.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kearsipan
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya penyelamatan arsip	Persentase Unit Kearsipan yang arsipnya diselamatkan	20%	18,677,898.00	30%	20,398,830.00	35%	20,398,830.00	40%	20,398,830.00	45%	20,398,830.00	50%	20,398,830.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi Perikanan (ton)	187.8	367,510,150.00	193.49	270,438,179.00	195.42	270,438,179.00	197.38	270,438,179.00	199.35	270,438,179.00	201.34	270,438,179.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kapita)	34.8	372,029,535.00	38.45	145,332,500.00	39.22	145,332,500.00	39.61	145,332,500.00	40.01	145,332,500.00	40.41	145,332,500.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang terpelihara dengan baik	50%	310,096,052.00	54%	162,655,810.00	57%	162,655,810.00	60%	162,655,810.00	65%	162,655,810.00	70%	162,655,810.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan dalam event pariwisata	Persentase Peningkatan Event Pariwisata, Budaya dan Olahraga	2.70%	490,026,501.00	2.80%	734,000,000.00	3.00%	734,000,000.00	3.50%	734,000,000.00	4.50%	734,000,000.00	5.50%	734,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif dan Kelompok Budaya yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50%	0.00	60%	43,500,000.00	70%	43,500,000.00	75%	43,500,000.00	80%	43,500,000.00	90%	43,500,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan tanaman perkebunan	produktivitas tanaman pangan (padi) (ton/ha)	7.33	667,448,930.00	7.35	427,923,664.00	7.36	412,929,664.00	7.37	412,929,664.00	7.38	412,929,664.00	7.39	412,929,664.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian
					produktivitas tanaman pangan (jagung) (ton/ha)	8.75		8.77		8.78		8.79		8.8		8.81		
					produktivitas tanaman perkebunan (tebu) (ton/ha)	99.15		99.17		99.18		99.19		99.2		99.21		
				Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi komoditas peternakan (ton)	3751		3826	56,969,000.00	3865	41,975,000.00	3903	41,975,000.00	3942	41,975,000.00	3943	41,975,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana pertanian	Persentase ketersediaan dan ketermanfaatan prasarana pertanian	0%	487,555,181.00	81%	10,000,000.00	82%	10,000,000.00	83%	10,000,000.00	84%	10,000,000.00	85%	10,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN	Meningkatnya pengendalian	Persentase Pengendalian	50%	64,532,610.00	51%	323,713,975.00	52%	323,713,975.00	53%	323,713,975.00	54%	323,713,975.00	55%	323,713,975.00	Perangkat Daerah yang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner													menangani Bidang Pertanian
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%penanganan bencana pertanian	90%	26,399,900.00	92%	55,394,920.00	92%	55,394,920.00	94%	55,394,920.00	95%	55,394,920.00	96%	55,394,920.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian (penyuluh pertanian dan petani)	% SDM Pertanian (Penyuluh Pertanian dan petani) yang ditingkatkan	83%	106,585,000.00	83%	2,831,003,447.00	84%	2,831,003,447.00	84%	2,831,003,447.00	85%	2,831,003,447.00	85%	2,831,003,447.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	% Izin Usaha Pertanian yang difasilitasi	25%		27%	10,000,000.00	28%	10,000,000.00	29%	10,000,000.00	30%	10,000,000.00	31%	10,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	31	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	6,897,185,384.00	100 %	7,190,700,346.00	100	7,190,700,346.00	100	7,190,700,346.00	100	7,190,700,346.00	100	7,190,700,346.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	76,89%		82%		84%		86%		88%		90%		
					Indeks Profesionalisme ASN	88.44		89.5		90		90.5		91		91.5		
3	3	2	PROGRAM	Meningkatnya	Persentase Izin	74.42%	0.00	76.26%	15,000,000.00	77.08%	15,000,000.00	77.85%	15,000,000.00	78.57%	15,000,000.00	79.25%	15,000,000.00	Perangkat

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	0		PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Usaha Perdagangan yang Difasilitasi													Daerah yang menangani Bidang Perdagangan
3	3 0	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	13.24%	383,541,529.00	16.31%	200,000,000.00	17.77%	200,000,000.00	19.18%	200,000,000.00	20.54%	200,000,000.00	21.85%	200,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan
3	3 0	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	4.15	316,893,666.00	8.0	390,000,000.00	7.9	390,000,000.00	7.8	390,000,000.00	7.7	390,000,000.00	7.6	390,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan
3	3 0	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Volume Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Milyar)	105,578.76	633,067,249.00	110,923.68	315,000,000.00	113,696.78	315,000,000.00	116,539.20	315,000,000.00	119,452.68	315,000,000.00	122,438.99	315,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan
3	3 0	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks Tertib Ukur	79.43	370,149,824.00	81	249,000,000.00	82	249,000,000.00	83	249,000,000.00	84	249,000,000.00	85	249,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan
3	3 0	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penetrasi dan Permintaan Produk Lokal di Pasar Domestik	Persentase UMKM Produk Lokal Yang Dipasarkan Melalui Fasilitasi Kemitraan, Pameran dan Promosi Lainnya	2.42%	362,072,429.00	2.72%	275,000,000.00	2.83%	275,000,000.00	2.93%	275,000,000.00	3.02%	275,000,000.00	3.10%	275,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan
3	3 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	3 1	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Meningkatnya Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan	4.76%	16,037,258,496.00	4.25%	10,300,000,000.00	4.50%	10,300,000,000.00	4.75%	10,300,000,000.00	5.00%	10,300,000,000.00	5.25%	10,300,000,000.00	Perangkat Daerah yang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			PEMBANGUNAN INDUSTRI	Industri	Industri													menangani Bidang Perindustrian
3	3 1	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepatuhan dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Di Sektor Industri	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	91.40%	0.00	91.60%	10,000,000.00	91.70%	10,000,000.00	91.80%	10,000,000.00	91.90%	10,000,000.00	92.00%	10,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian
3	3 1	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatkan Akurasi dan Keterpaduan Data Industri	Persentase Data Industri Yang Masuk Dalam SIINas	1.31%	916,377,718.00	1.45%	95,000,000.00	1.49%	95,000,000.00	1.53%	95,000,000.00	1.56%	95,000,000.00	1.59%	95,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1		SEKRETARIAT DAERAH															
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	45,525,380,858.00	100 %	43,202,064,779.00	100 %	43,202,064,779.00	100 %	43,202,064,779.00	100 %	43,202,064,779.00	100 %	43,202,064,779.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	79,49%		80,50%		81%		81,5%		82%		82,50%		
					Indeks Profesionalisme ASN	87.03		87.07		87.09		87.11		87.13		87.15		
				Meningkatnya Rekomendasi Hasil PEKPPP Yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil PEKPPP Yang Ditindaklanjuti	22.72%		50.09%	593,921,800.00	79.54%	593,921,800.00	89.77%	593,921,800.00	94.31%	593,921,800.00	100%	593,921,800.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		Daerah
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah	IPP Bagian Prokompim	3.03		3.4	3,832,319,809.00	3.60	3,832,319,809.00	3.8	3,832,319,809.00	3.90	3,832,319,809.00	4	3,832,319,809.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan dan Kesekretariatan Daerah	IPP Bagian Umum	1.2		3.4	2,368,481,380.00	3.60	2,368,481,380.00	3.8	2,368,481,380.00	3.90	2,368,481,380.00	4	2,368,481,380.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja PD	Rata-rata Nilai AKIP Komponen Pelaporan PD	12.38		12.6	107,463,200.00	12.75	107,463,200.00	13.25	107,463,200.00	13.75	107,463,200.00	14.25	107,463,200.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Efektif	66.60%	20,988,405,508.00	70%	1,117,670,117.00	75%	1,117,670,117.00	80%	1,117,670,117.00	85%	1,117,670,117.00	90%	1,117,670,117.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	94%		96%	13,429,820,200.00	97%	7,649,577,168.26	98%	7,447,262,334.29	99%	8,380,310,200.00	100%	8,464,717,200.10	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya kualitas layanan hukum	Persentase layanan Hukum yang terfasilitasi	100%		100%	1,138,320,400.00	100%	1,138,320,400.00	100%	1,138,320,400.00	100%	1,138,320,400.00	100%	1,138,320,400.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang efektif	40%	2,057,205,520.00	70%	1,187,604,800.00	80 %	1,187,604,800.00	90%	1,187,604,800.00	95 %	1,187,604,800.00	100 %	1,187,604,800.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	74.8		76	745,748,050.00	77	745,748,050.00	78	745,748,050.00	79	745,748,050.00	80	745,748,050.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
				Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan regulasi penganggaran dan pelaksanaan APBD	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Pedoman Penganggaran dan Pelaksanaan APBD	84.30%		85%	601,222,050.00	85.50%	601,222,050.00	86%	601,222,050.00	86.50%	601,222,050.00	87%	601,222,050.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4	2		SEKRETARIAT DPRD															
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	30,018,833,867.00	100 %	35,917,197,960.00	100	35,917,197,960.00	100	35,917,197,960.00	100	35,917,197,960.00	100	35,917,197,960.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	90 %		93.50%		94%		94.5%		95%		95.5%		
					Indeks Profesionalisme ASN	84.9		85.07		85.15		85.24		85.33		85.41		
					Persentase cakupan pelayanan Keuangan dan	93%		93.50%		94%		94.50%		95%		95.50%		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
					Kesejahteraan DPRD													
					Persentase cakupan pelayanan Administrasi DPRD	90 %		93.50%		94%		94.50%		95%		95.50%		
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Raperda	86%	40,897,088,585.00	87%	46,457,000,000.00	87.50%	46,457,000,000.00	88%	46,457,000,000.00	88.50%	46,457,000,000.00	89 %	46,457,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	1		PERENCANAAN															
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	8,463,414,619.00	100 %	8,645,069,500.00	100%	8,645,069,500.00	100%	8,645,069,500.00	100%	8,645,069,500.00	100%	8,645,069,500.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perencanaan
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	77,86%		82%		84%		86%		88%		90.00%		
					Indeks Profesionalisme ASN	94.55		95.5		96		96.5		97		97.5		
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan	Persentase target kinerja RKPD dengan RPJMD	-	2,291,122,620.00	95%	2,716,621,010.00	96%	2,716,621,010.00	97%	2,716,621,010.00	98%	2,716,621,010.00	98%	2,716,621,010.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perencanaan
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN	Meningkatkan ketercapaian	Persentase capaian target program	-	2,170,308,315.00	91%	2,007,270,400.00	92%	2,007,270,400.00	93%	2,007,270,400.00	94%	2,007,270,400.00	95%	2,007,270,400.00	Perangkat Daerah yang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	program pembangunan daerah														menangani Bidang Perencanaan
5	2		KEUANGAN															
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	23,590,067,851.00	100%	27,151,926,940.00	100%	27,151,926,940.00	100%	27,151,926,940.00	100%	27,151,926,940.00	100%	27,151,926,940.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Keuangan
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	78,65 %		91%		92%		93%		94%		95%		
					Indeks Profesionalisme ASN	89,45		89,60		89.7		89.8		89.9		90,00		
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	13.16 %	7,620,843,628.00	12.50 %	13,660,619,640.00	12 %	13,660,619,640.00	11.5 %	13,660,619,640.00	11 %	13,660,619,640.00	10 %	13,660,619,640.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Keuangan
					Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	21.58 %		18.60 %		18.49 %		18.38 %		18.28 %		18.17 %		
					Rasio penyerapan anggaran (%)	82.42 %		84.50 %		86 %		87.5 %		89 %		90 %		
					Rasio belanja langsung dalam APBD di luar transfer expenditure (%)	81.39 %		83.66 %		82.82 %		82.03 %		81.46 %		80.83 %		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN	Meningkatnya Kualitas	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2.36	1,030,177,869.00	2.60	951,779,600.00	2.73	951,779,600.00	2.87	951,779,600.00	3.01	951,779,600.00	3.16	951,779,600.00	Perangkat Daerah yang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah														menangani Bidang Keuangan
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Objek/subjek pajak baru yang terdata menjadi OP/WP	47 %	5,051,584,906.00	53 %	5,090,203,004.00	56 %	5,090,203,004.00	59 %	5,090,203,004.00	62 %	5,090,203,004.00	65 %	5,090,203,004.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Keuangan
					Persentase validitas Objek/subjek pajak terup-date	62 %		72 %		77 %		82 %		87 %		92%		
					Persentase jumlah pajak/retribusi tertagih	10.68 %		12 %		13 %		14 %		15 %		16%		
					Persentase Kepatuhan WP	62 %		68 %		71 %		74 %		77 %		80 %		
5	3		KEPEGAWAIAN															
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	7,697,276,159.00	100 %	8,866,112,609.00	100 %	8,866,112,609.00	100 %	8,866,112,609.00	100 %	8,866,112,609.00	100 %	8,866,112,609.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepegawaian
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	90 %		95%		96%		97%		98%		99%		
					Indeks Profesionalitas ASN	95.1		95.29		95.39		95.48		95.58		95.67		
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terpenuhinya Formasi ASN sesuai ABK	Persentase formasi ASN yang terisi sesuai ABK	44.68%	3,459,437,237.00	64.13%	970,058,870.00	64.19%	970,058,870.00	64.26%	970,058,870.00	64.32%	970,058,870.00	64.38%	970,058,870.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepegawaian
				Meningkatnya kinerja ASN	Persentase ASN dengan predikat kinerja minimal "Baik"	95.00%		95.95%	400,000,000.00	96.43%	400,000,000.00	96.91%	400,000,000.00	97.40%	400,000,000.00	97.89%	400,000,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
																		Kepegawaian
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase JPTP, JA, JF dan pelaksana yang mengikuti pengembangan kompetensi	89.70%	89,938,431.00	91.50%	909,374,144.00	92.42%	909,374,144.00	93.34%	909,374,144.00	94.28%	909,374,144.00	95.22%	909,374,144.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan dan Pelatihan
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatkan kematangan inovasi daerah	Persentase inovasi yang ditetapkan sebagai inovasi daerah	65.25%	2,192,457,066.00	75%	621,873,890.00	80%	621,873,890.00	85%	621,873,890.00	90%	621,873,890.00	91%	621,873,890.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penelitian dan Pengembangan
				Meningkatkan jumlah penelitian selaras dengan kebutuhan strategis dan prioritas pembangunan daerah	Persentase penelitian yang sesuai dengan prioritas daerah	-		91%	1,510,454,120.00	92%	1,510,454,120.00	93%	1,510,454,120.00	94%	1,510,454,120.00	95%	1,510,454,120.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penelitian dan Pengembangan
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	1		INSPEKTORAT DAERAH															
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Meningkatnya layanan penunjang	Persentase Pemenuhan Kriteria	100 %	9,757,268,712.00	100 %	14,611,363,710.00	100 %	14,611,363,710.00	100 %	14,611,363,710.00	100 %	14,611,363,710.00	100 %	14,611,363,710.00	Perangkat Daerah yang

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah	Renja Berkualitas													menangani Bidang Inspektorat Daerah
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	78.86 %		95%		96%		97%		98%		99%		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
					Indeks Profesionalisme ASN	85.05		85.85		86.25		86.65		87.05		87.45		Perangkat Daerah yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100%	1,164,523,013.00	100%	1,276,412,670.00	100%	1,276,412,670.00	100%	1,276,412,670.00	100%	1,276,412,670.00	100%	1,276,412,670.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas SPIP	3.207	1,157,554,327.00	3.25	1,352,053,920.00	3.27	1,352,053,920.00	3.29	1,352,053,920.00	3.3	1,352,053,920.00	3.40	1,352,053,920.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
					Nilai Kapabilitas APIP	3.29		3.35		3.37		3.39		3.40		3.45		
					Indeks SPI KPK	72.42		72.5		72.60		72.65		72.70		73		
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1		KECAMATAN															
7	1	3	PROGRAM	Meningkatnya	Persentase	71.96	1,172,370,305.00	77 %	1,264,118,943.00	80%	1,264,118,943.00	83%	1,264,118,943.00	86%	1,264,118,943.00	89%	1,264,118,943.00	Perangkat

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%												Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	26,262,362,019.00	100 %	28,123,435,261.60	100%	28,123,435,261.60	100%	28,123,435,261.60	100%	28,123,435,261.60	100%	28,123,435,261.60	Kecamatan Mojoroto
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	79,53 %		80 %		80,25 %		80,5 %		80,75 %		81%		
					Indeks Profesionalisme ASN	86.58		88.25		88.5		88.75		89		89.25		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya layanan masyarakat di Kecamatan	Persentase layanan publik yang berkualitas	100 %	236,732,600.00	100 %	139,707,600.00	100%	139,707,600.00	100%	139,707,600.00	100%	139,707,600.00	100%	139,707,600.00	Kecamatan Mojoroto
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	96 %	5,837,325,952.00	96,5%	15,048,302,140.00	96,75%	15,048,302,140.00	97%	15,048,302,140.00	97,25%	15,048,302,140.00	97,5%	15,048,302,140.00	Kecamatan Mojoroto
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	100 %	181,337,300.00	100 %	55,772,445.00	100%	55,772,445.00	100%	55,772,445.00	100%	55,772,445.00	100%	55,772,445.00	Kecamatan Mojoroto
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya sinergitas stakeholder penyelenggara	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan	100 %	490,499,647.00	100 %	351,346,800.00	100%	351,346,800.00	100%	351,346,800.00	100%	351,346,800.00	100%	351,346,800.00	Kecamatan Mojoroto

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			UMUM	pemerintahan Kecamatan	umum													
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	100 %	7,139,875,750.00	100 %	5,448,666,200.00	100%	5,448,666,200.00	100%	5,448,666,200.00	100%	5,448,666,200.00	100%	5,448,666,200.00	Kecamatan Mojoroto
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	28,569,132,401.00	100%	30,801,107,441.60	100%	30,801,107,441.60	100%	30,801,107,441.60	100%	30,801,107,441.60	100%	30,801,107,441.60	Kecamatan Kota
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	80%		81%		81.4%		81.45%		81.6%		81.65%		
					Indeks Profesionalisme ASN	86.58		88,25		88,5		88,75		89		89.25		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya layanan masyarakat di Kecamatan	Persentase layanan publik yang berkualitas	91 %	134,214,612.00	93 %	102,000,000.00	94%	102,000,000.00	95%	102,000,000.00	96%	102,000,000.00	97%	102,000,000.00	Kecamatan Kota
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	99.00%	8,891,389,777.00	99.20%	14,277,209,750.00	99.30%	14,277,209,750.00	99.40%	14,277,209,750.00	99.50%	14,277,209,750.00	99.60%	14,277,209,750.00	Kecamatan Kota
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	95%	163,333,106.00	96.5 %	70,000,000.00	97.00%	70,000,000.00	97.50%	70,000,000.00	98%	70,000,000.00	98.50%	70,000,000.00	Kecamatan Kota
7	1	5	PROGRAM	Meningkatnya	Persentase	100%	681,436,870.00	100 %	738,200,000.00	100%	738,200,000.00	100%	738,200,000.00	100%	738,200,000.00	100%	738,200,000.00	Kecamatan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan Kecamatan	terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum													Kota
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	90%	7,222,607,145.00	92%	6,303,803,920.00	93%	6,303,803,920.00	94%	6,303,803,920.00	95%	6,303,803,920.00	96%	6,303,803,920.00	Kecamatan Kota
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	26,639,723,461.00	100%	28,577,000,151.80	100%	28,577,000,151.80	100%	28,577,000,151.80	100%	28,577,000,151.80	100%	28,577,000,151.80	Kecamatan Pesantren
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	81,16%		81%		82.0%		82%		82.0%		82%		
					Indeks Profesionalisme ASN	83.73		83.75		83.76		83.77		83.78		83.79		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya layanan masyarakat di Kecamatan	Persentase layanan publik yang berkualitas	87%	204,035,550.00	89%	94,490,800.00	90%	94,490,800.00	91%	94,490,800.00	92%	94,490,800.00	93%	94,490,800.00	Kecamatan Pesantren
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	99%	7,849,017,054.00	99.2%	14,518,339,125.00	99.3%	14,518,339,125.00	99.4%	14,518,339,125.00	99.5%	14,518,339,125.00	99.6%	14,518,339,125.00	Kecamatan Pesantren
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan	91 %	149,610,800.00	92 %	74,546,100.00	92.5%	74,546,100.00	93%	74,546,100.00	93.5%	74,546,100.00	94%	74,546,100.00	Kecamatan Pesantren

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
					ketertiban lingkup kecamatan													
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya sinergitas stakeholder penyelenggara pemerintahan Kecamatan	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	94 %	703,724,013.00	95 %	617,279,100.00	95.50%	617,279,100.00	96%	617,279,100.00	96.5%	617,279,100.00	97%	617,279,100.00	Kecamatan Pesantren
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	90%	7,194,899,630.00	92 %	5,640,280,350.00	93%	5,640,280,350.00	94%	5,640,280,350.00	95%	5,640,280,350.00	96%	5,640,280,350.00	Kecamatan Pesantren
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	2,878,200,954.00	100 %	4,201,262,890.00	100 %	4,201,262,890.00	100 %	4,201,262,890.00	100 %	4,201,262,890.00	100%	4,201,262,890.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95%		95%		95%		96 %		96 %		97%		
					Indeks Profesionalisme ASN	80.59		80.59		85.60		85.65		85.68		85.70		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Laporan Masyarakat Terkait Potensi Konflik Radikalisme	90 %	688,958,594.00	91%	666,925,770.00	92%	666,925,770.00	93%	666,925,770.00	93%	666,925,770.00	94%	666,925,770.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pencegahan konflik politik di wilayah Kota Kediri	90 %	31,278,500,947.00	91 %	7,457,746,230.00	92%	3,788,612,230.00	93%	8,288,612,230.00	93%	8,288,612,230.00	94%	4,288,612,230.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase capaian Ormas melaporkan keberadaannya disertai dengan dokumen lengkap	90 %	912,593,600.00	91 %	1,155,267,000.00	92%	1,755,267,000.00	93%	1,755,267,000.00	93%	3,249,674,000.00	94%	1,755,267,000.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA	85%	0.00	86 %	201,997,770.00	87%	201,997,770.00	88%	201,997,770.00	89%	201,997,770.00	90%	201,997,770.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Meningkatkan Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Wilayah	Persentase laporan tim kewaspadaan dini terkait potensi konflik di masyarakat	95 %	603,254,624.00	96 %	1,326,770,400.00	96%	1,326,770,400.00	97%	1,326,770,400.00	97%	1,326,770,400.00	98%	1,326,770,400.00	Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	OUTCOME	INDIKATOR	Baseline 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															Politik
Total							**1,558,564,962,484.00**		**1,685,230,709,827.00**		**1,665,016,936,465.86**		**1,652,286,545,336.29**		**1,629,936,077,200.40**		**1,607,978,013,907.72**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian dari indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Indikator Kinerja utama terdiri atas indikator tujuan dan indikator sasaran pembangunan daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan kewenangan daerah.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Kediri yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3.43	3.5–4.5	3.5–4.5	3.7–4.7	3.9–4.9	4.0–5.0	4.5–5.5	-
2.	Indeks Gini	Indeks	0.337	0.327-0.364	0.327-0.364	0.325-0.362	0.323-0.363	0.321-0.358	0.319-0.356	-
3.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.65	3.75	3.84	3.93	4.02	4.11	4.2	-
4.	Tingkat Kemiskinan	%	6.51	6.45-6.32	6.35–6.15	6.22-5.73	6.19-5.61	5.95-5.54	5.72-5.40	-
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.91	3.87–3.54	3.84–3.51	3.80–3.47	3.75–3.43	3.71–3.39	3.66–3.35	-
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81.88	82.77	83.00	84.24	84.76	85.15	85.42	-
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85.42	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	-
8.	Nilai SAKIP	Nilai	72.49	72.99	73.19	74.55	78.45	79.72	80.21	-
9.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	59.75	62.00	65.00	68.00	72.00	76.00	80.00	-
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67.09	69.79	69.88	69.97	70.07	70.16	70.25	-
11.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	78.20	73-70	70-67	67-64	64-62	62-61	61-60	-

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam bab IV disusun dengan mempertimbangkan:

a. Indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tidak terseleksi menjadi Indikator Kinerja Utama
b. Indikator tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
c. Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045 yang belum menjadi indikator tujuan dan sasaran RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah
d. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, IKD dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu:

1. Aspek geografi dan demografi
   Aspek ini berfokus pada kondisi fisik dan dinamika penduduk di suatu wilayah, yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pembangunan wilayah. Indikator dalam aspek ini menggambarkan ketahanan lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, serta dinamika kependudukan.
2. Aspek kesejahteraan masyarakat
   Aspek ini mencerminkan pencapaian pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Indikatornya mencakup dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan kesetaraan gender.
3. Aspek daya saing daerah
   Aspek ini menekankan pada kapasitas dan potensi ekonomi serta kelembagaan daerah untuk bersaing dan berkembang dalam jangka panjang.
4. Aspek pelayanan umum
   Aspek ini mencakup seluruh bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Kediri secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76.67	76.68	76.77	76.88	76.99	77	77.01
2	Skor Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/ PoU)	Skor	5.31	5.71	5.48	5.25	5.03	4.8	4.57
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	16.74	22.56	22.91	23.29	23.38	23.46	23.54
4	Indeks Kualitas Air	%	68	68.01	68.02	68.03	68.04	68.05	68.06
5	Indeks Kualitas Udara	%	94.31	84.75	84.93	85.10	85.31	85.51	85.70
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	45.99	45.20	45.25	45.30	45.35	45.40	45.45
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12.33	14.72	18.32	23.11	29.07	41.02	52.9
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16.99	17.67	18.30	18.95	19.67	20.40	21.20
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	89.98	90.28	90.48	90.68	90.88	91.08	91.38
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	ton CO2 eq	1,247,635.36	1,257,635.36	1,267,635.36	1,277,635.36	1,287,635.36	1,297,635.36	1,307,635.36
11	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.72	0.74
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.02	1.00	0.97	0.95	0.93	0.91	0.88
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (juta)	565.84	586.49	614.40	643.65	674.30	706.40	740.02
2	Indeks Kesejahteraan Sosal (Ikessos)	Indeks	57.72	60.00	60.50	61.00	61.50	62.00	62.50
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99
4	Umur Harapan Hidup	Tahun	75.94	76.07	76.33	76.59	76.86	77.12	77.38

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Prevalensi Stunting (berdasarkan SKI)	%	18.6	18.3	17.5	16.3	15.2	14.2	13
6	Indeks Kesehatan	Indeks	0.8606	0.8607	0.8627	0.8647	0.8667	0.8687	0.8707
7	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	55.4	44.31-54.71	42.31-53.71	40.31-52.71	38.31-51.71	36.31-50.71	34.31-49.71
8	*Treatment Success Rate* (TSR) TBC	%	86.13	90	90	90	90	90	90
9	*Treatment Coverage TBC*	%	120	90	90	90	90	90	90
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100.41	100	100	100	100	100	100
11	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10.92	10.95	11.03	11.12	11.27	11.34	11.37
12	Harapan lama Sekolah	Tahun	15.71	15.72	15.74	15.81	15.9	15.96	16
13	% Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:								
	a. Literasi Membaca SD	%	70.83	73.33	75.83	78.33	80.83	83.33	85.83
	b. Numerasi SD	%	58.23	61.13	64.03	66.93	69.83	72.73	75.63
	c. Literasi Membaca SMP	%	82.28	83.38	84.48	85.58	86.68	87.78	88.88
	d. Numerasi SMP	%	70.21	71.71	73.21	74.71	76.21	77.71	79.21
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	51.21	70	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00 (Tinggi)
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	43.23	59.27	62.12	66.80	69.66	74.34	77.70
16	Indeks Kota Toleran	Indeks	6.073	6.215	6.283	6.384	6.412	6.452	6.511
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	4.56	4.58	4.6	4.63	4.66	4.69	4.72
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58.15	59.4	60.7	62	63.35	64.7	66.1
19	Indeks Pembangunan Kualitas	Indeks	65.91	66.76	67.61	68.46	69.30	70.15	71

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Keluarga (iBangga)		(Berkembang)	(Berkembang)					(Tangguh)
20	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	71.04*	71.88	72.72	73.56	74.4	75.24	76.08
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.99	96.22	96.56	96.94	97.35	97.76	98.17
22	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.12	0.094	0.084	0.079	0.073	0.069	0.064
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60.55	61.05	61.55	62.05	62.55	63.05	63.54
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio Ketergantungan	Rasio	43.33	43.70	44.08	44.49	44.94	45.46	46.06
2	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	20.57	22.5	22.8	23.1	23.4	23.7	24.1
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	79.64	79.5	79	78.5	78	77.5	77
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.87	2	2.09	2.19	2.29	2.4	2.51
5	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	1.758.997	1,800,000	2,155,000	2,371,000	2,608,000	2,869,000	3,156,000
6	Nilai ICOR	Nilai	5.56 *	5.25	5.00	4.75	4.5	4.25	4.00
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70.74	70.94	71.23	71.52	71.70	71.94	72.17
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	51.52	53.05	55	57	59	61	63
9	ROA BUMD	%	2.6	2.8	2.85	2.9	2.95	3	3.05
10	Indeks Masyarakat Digital	%	50.65	52.15	53.65	55.15	56.65	58.15	59.65
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	18.44	18.50	18.60	18.70	18.80	18.90	19.00
12	Net Ekspor Barang dan Jasa	Rp Milyar	105,578.76	108,218.23	110,923.68	113,696.78	116,539.20	119,452.68	122,438.99
13	% Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	10.55	10.97	11.27	11.53	11.78	12.00	12.21
14	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	%	4.15	8.5	8	7.9	7.8	7.7	7.6

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	5.326	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
16	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	81.02	81.42	81.82	82.22	82.62	83.02	83.42
17	Indeks Infrastruktur	Indeks	87.41	87.51	87.61	87.71	87.81	87.91	88.01
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	83.94	84.78	85.62	86.46	87.3	88.14	88.98
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.16	0.170	0.173	0.176	0.179	0.180	0.183
20	Tingkat Inflasi	%	1.19	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1
21	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	N.A	7.52	7.58	7.63	7.68	7.73	7.78
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.2	4.25	4.3	4.35	4.4	4.45	4.51
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.54	3.55	3.55	3.57	3.58	3.59	3.60
3	Indeks SPBE[(a)]	Indeks	3.8	3.8	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1
4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	86.04	86.5	87	87.5	88	88.5	89
5	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
V	**Indikator Kinerja Kunci**								
A	**Pendidikan**								
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0.8	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86
2	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	97.43	100	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	%	106.95	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	%	128.09	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Guru Bersertifikasi	%	39.6	39.62	39.64	39.66	39.68	39.69	39.72
6	Indeks Rapor Pendidikan	Indeks	82.23	82.24	82.25	82.26	82.27	82.28	82.29

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B	**Kesehatan**								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	78.37	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	77.66	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	82	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	91.9	100	100	100	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	%	100	100	100	100	100	100	100
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1	Persentase Infrastruktur SDA yang Memadai	%	65.31	67.11	68.91	69.72	70.54	71.35	72.17
2	Persentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang Memadai	%	47.25	48.53	49.81	51.06	52.11	53.36	54.31
3	Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Memadai	%	88.08	88.7	89.08	89.47	89.85	90.24	90.62

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang yang Berkualitas	%	85.46	85.66	85.86	86.06	86.26	86.46	86.66
D	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
1	Rasio Permukiman Layak Huni	%	93.49	93.95	94.41	94.87	95.33	95.79	96.26
2	Persentase Rusunawa dalam Kondisi Baik yang Dikelola Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	7.68	14.22	20.76	27.30	33.84	40.38	46.92
4	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0	18.12	27.18	36.24	45.30	54.36	63.42
5	Presentase PSU Perumahan yang Terkelola	%	62.93	63.93	64.93	65.93	66.93	67.93	68.93
6	Persentase Perumahan yang Tertata	%	68	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00
E	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	%	96	96	96.25	96.5	96.75	97	97.25
2	Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Pemadam Kebakaran	%	96.84	97	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Managemen	%	93.33	93.5	94	94.5	95	95.5	96

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kebakaran (WMK)								
5	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana	%	72.6	78.93	80.14	80.63	81.12	81.61	82.1
6	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	75.89	86.98	88	92.31	92.86	96.55	100
7	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
F	**Sosial**								
1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Fungsi Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Menangani PPKS	%	86	86.00	86.50	87.00	87.25	87.38	87.50
3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase TMP yang Direvitalisasi	%	100	100	100	100	100	100	100
G	**Ketenagakerjaan**								
1	% Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	58	60	60	60	60	60	60
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	45.88	60	65	65.2	65.4	65.5	65.7
2	Cakupan Kelurahan Layak Anak	%	10.86	13.04	15.22	21.74	28.26	34.78	41.3
I	**Pangan**								
1	Persentase Angka Kecukupan Energi (Ketersediaan)	%	122.83	122.7	122.6	122.5	122.4	122.3	122
J	**Pertanahan**								
1	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	%	0	4.35	8.70	13.04	17.39	21.74	26.09
K	**Lingkungan Hidup**								
1	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani	%	89.84	89.85	89.86	89.87	89.88	89.89	89.90
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	17.04	9.82	9.83	9.86	9.89	9.91	9.94
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	86.11 (B)	86.88	87.25	87.75	88.4	88.8	89
2	Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik	%	99.82	99.85	99.9	99.93	99.95	99.97	100
3	Persentase Kepemilikan KK	%	99.57	99.6	99.75	99.8	99.85	99.9	99.95
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18	%	99.94	99.97	99.98	99.99	100	100	100
5	Persentase Kepemilikan KIA	%	98.15	98.25	98.5	98.75	98.85	98.95	99
6	Jumlah OPD/Lembaga yang Melakukan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD/ Lembaga	19 OPD	20	21	22	23	23	23
7	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	93.49	93.75	93.85	93.9	94	94.25	94.75
8	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	93.5	93.75	93.85	93.9	93.95	94	94.05
9	Penerapan IKD (Identitas	%	13.82	18.5	20.25	22.75	25	27.75	30

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kependudukan Digital)								
M	**Pengendalian Penduduk dan KB**								
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	71.1 (Tinggi)	72.61	73.25	73.84	74.4	74.92	75.4
2	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	88	88.5	89.12	89.74	90.37	91	91.64
3	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dan Berkelanjutan	%	80.43 (37 dari 46 Kelurahan)	82.61 (38 dari 46 Kel)	86.96 (40 dari 46 kel)	93.48 (43 dari 46 Kel)	95.65 (44 dari 46 Kel)	97.83 (45 dari 46 Kel)	100
N	**Perhubungan**								
1	Tingkat Layanan Jalan	Nilai	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan	Indeks	3.7	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76
O	**Komunikasi dan Informatika**								
1	% Aplikasi e-Gov yang Terintegrasi	%	64	64	65	66	67	68	69
P	**Koperasi, Usaha kecil dan Menengah**								
1	% Usaha Mikro yang Meningkat Omzetnya	%	7.91	7.95	8.00	8.05	8.10	8.15	8.20
2	% Koperasi Sehat	%	72.09	72.10	72.20	72.30	72.40	72.50	72.60
Q	**Penanaman Modal**								
1	Realisasi Investasi	Rp Milyar	1.546	1.414	1.484,70	1.558,94	1.668,06	1.801,50	1.945,62
2	Skor PTSP	Skor	94.45	94.5	94.75	95	95.25	95.5	95.75
3	Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Skor	95.92	95.95	95.97	95.99	96.05	96.1	96.15
R	**Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Persentase kenaikan atlet dan pemuda berprestasi	%	3.39	4.00	4.5	4.75	5.50	6.0	6.25

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S	**Statistik**								
1	Indeks Pembangunan Statistik	%	2.54	2.55	2.75	2.95	3.15	3.35	3.55
T	**Persandian**								
1	Indeks Keamanan Informasi	%	62.94	63	64	65	66	67	68
U	**Kebudayaan**								
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100
V	**Perpustakaan**								
1	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	%	27.45	28	29	30	31	32	33
2	Tingkat Kegemaran Membaca	%	99.34	99.4	99.46	99.52	99.58	99.64	99.7
W	**Kearsipan**								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	60.41	68	69	70	71	72	73
2	Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang Bernilai Baik	%	60	63	66	69	72	75	78
X	**Kelautan dan Perikanan**								
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1	1	1	1	1	1	1
Y	**Pariwisata**								
1	Persentase kenaikan kunjungan wisata	%	5.06	6.25	7.5	8.75	10	11.25	12.50
2	Persentase pertumbuhan tamu hotel	%	-4.57	5.00	5.25	5.50	5.75	6.0	6.25
Z	**Pertanian**								
1	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Rp Milyar	24.04	24.52	25.00	25.48	25.96	26.44	26.92
2	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	2	2	2	2	2	2	2
3	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	2	2	2	2	2	2	2

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AA	**Perdagangan**								
1	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Rp Milyar	1,129.57	1,131.34	1,204.88	1,283.20	1,366.60	1,455.43	1,550.04
BB	**Perindustrian**								
1	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp Milyar	6,608.87	4,031.74	4,152.69	4,277.27	4,405.59	4,537.76	4,673.89
CC	**Sekretariat Daerah**								
2	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai	11.37	11.75	12.25	12.75	13.25	13.75	14.25
3	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	51.62	65	66	67	68	69	70
4	Persentase UPP dengan IPP Minimal "Baik"	%	22.72	40	60	80	90	95	100
DD	**Sekretariat DPRD**								
1	Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD	%	93	93.5	94	94.5	95	95.5	96
2	Persentase Kegiatan dan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terfasilitasi	%	93	93.5	94	94.5	95	95.5	96
EE	**Perencanaan**								
1	Nilai Sakip Komponen Perencanaan	Nilai	23.25	23.30	23.35	23.40	23.50	23.80	24
2	Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD berkategori berhasil	%	83.87	90	91	92	93	94	95
FF	**Keuangan**								
1	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Persentase Peningkatan PAD (Target Dihitung Berdasarkan Peningkatan dari Tahun 2024)	%	0	6.41	7.10	8.76	10.63	12.59	14.65
GG	**Kepegawaian**								
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	306	314	315	316	318	322	325
2	Persentase Pejabat ASN yang	%	61.69	62.92	64.18	65.46	66.77	68.11	69.47

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ditempatkan Sesuai Potensi dan Kinerja								
3	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	89.39	89.84	90.29	90.74	91.19	91.65	92.11
HH	**Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase pertumbuhan inovasi daerah	%	16,13	16,5	16,75	17,25	17,5	17,75	18
II	**Inspektorat Daerah**								
1	Maturitas SPIP	Nilai	3.207	3.22	3.25	3.27	3.29	3.3	3.4
2	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3.29	3.3	3.35	3.37	3.39	3.4	3.45
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	100	100	100	100	100	100	100
JJ	**Kecamatan**								
1	IKM Kecamatan Mojoroto	Indeks	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	3.77	3.78
2	IKM Kecamatan Kota	Indeks	3.89	3.90	3.91	3.92	3.93	3.94	3.95
3	IKM Kecamatan Pesantren	Indeks	3.45	3.47	3.50	3.53	3.55	3.58	3.60
KK	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kota Kediri	%	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan:

(a) : Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan, sedangkan untuk tahun 2024-2025 target menggunakan Indeks SPBE

BAB V

PENUTUP

RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi pondasi utama dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri. Dokumen ini menjadi kompas strategis yang mengarahkan jalannya pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan besar dalam RPJPD Kota Kediri 2025-2045. RPJMD 2025-2029 adalah cetak biru perubahan, yang akan menjadi landasan fondasi kuat dalam percepatan transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Kediri serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan sampai dengan tahun 2030. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab diperlukan guna pencapaian target yang telah ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Dokumen RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri mulai tahun 2026 hingga tahun 2030;
b. Pemerintah Kota Kediri berkewajiban menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
c. RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Penyusunan Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2025;
d. Seluruh Perangkat Daerah Kota Kediri, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Kediri tahun 2025-2029;
e. Seluruh Perangkat Daerah Kota Kediri, dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
f. Seluruh Perangkat Daerah Kota Kediri agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri 2025-2029;
g. Setelah berakhirnya RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kota Kediri Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan berikutnya.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan salah satunya untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a. Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD.
b. Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

Keberhasilan mewujudkan Visi "Membangun Kota Kediri Yang Mapan: Kota Yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, *Ngangeni*" membutuhkan dedikasi penuh dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap langkah menuju visi besar ini harus diiringi dengan sinergi, kerja sama, dan tekad yang kuat. Dengan semangat kebersamaan, setiap tujuan, misi, dan sasaran pembangunan akan dapat diwujudkan secara nyata.

WALIKOTA KEDIRI

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

KOTA KEDIRI Mapan

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

kedirikota.go.id
Jalan Basuki Rahmad No.15, Kota Kediri